

PERDA RPJMD 2025-2029



PERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029



**BAPPEDA
REJANG LEBONG**



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)

- tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 11. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
 12. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan.
 13. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
 14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RPJMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan RKPD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Bupati.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 26 Agustus 2025



BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 26 Agustus 2025



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 184

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU: (1/18/2025).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1. LATAR BELAKANG	1-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	1-4
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA.....	1-7
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029	1-9
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Nasional	1-14
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.....	1-15
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032.....	1-16
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.....	1-17
1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045.....	1-19
1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032.....	1-20
1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2025-2029.....	1-21
1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	1-22
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	1-23
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	1-24

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	2-1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS.....	2-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	2-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	2-10
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	2-14
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian	2-19
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	2-22
2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	2-24
2.1.1.7 Demografi	2-25
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	2-30
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	2-30
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua.....	2-41
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	2-45
2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif.....	2-51
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	2-54
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	2-56
2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	2-59
2.1.3.1 Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	2-59
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Daerah.....	2-60
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau	2-65
2.1.3.4 Transformasi Digital.....	2-65
2.1.3.5 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	2-66
2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro.....	2-75
2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	2-77
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	2-77
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, Demokrasi Substansial.....	2-83
2.1.5 KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.....	2-85
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	2-86
2.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2024	2-87
2.2.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah	2-87
2.2.1.2 Realisasi Belanja Daerah.....	2-99
2.2.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah.....	2-112
2.2.2 Neraca Daerah	2-115

2.2.3 Pertumbuhan PDRB Pengeluaran	2-126
2.2.4 Analisis Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	2-129
2.2.4.1 Analisis Proyeksi Pendapatan	2-130
2.2.4.2 Analisis Proyeksi Belanja	2-133
2.2.4.3 Analisis Proyeksi SILPA	2-135
2.2.4.4 Analisis Pengeluaran Pembiayaan.....	2-137
2.2.5 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 – 2030	2-138
 2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	 2-146
2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	2-146
2.3.2 ISU STRATEGIS	2-162
2.3.2.1 Isu Strategis Global	2-162
2.3.2.2 Isu Strategis Nasional	2-166
2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Bengkulu.....	2-169
2.3.2.4 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045	2-180
2.3.2.5 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong	2-188
2.3.2.6 Isu Strategis Kabupaten Rejang Lebong.....	2-201
 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 3-1
3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	3-1
3.1.1 VISI DAN MISI.....	3-1
3.1.2 TUJUAN DAN SASARAN	3-4
3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	3-15
3.2.1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029.....	3-15
3.2.2. STRATEGI PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG.....	3-19
3.2.2.1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	3-19
3.2.2.2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.....	3-20
3.2.2.3 Pengarusutamaan Gender.....	3-21
3.2.2.4 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	3-22
3.2.2.5 Pengarusutamaan Hak Anak.....	3-23
3.2.2.6 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.....	3-23
3.2.2.7 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	3-23
3.2.3. ARAH KEBIJAKAN.....	3-24
3.2.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 : Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis.....	3-26

3.2.3.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 : Penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, pengembangan agrowisata dan budaya lokal	3-27
3.2.3.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027 : Integrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Keamanan Terpadu.....	3-28
3.2.3.4	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2028 : Akselerasi Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif.....	3-29
3.2.3.5	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2029 : Integrasi Ekonomi Hijau Dalam Pembangunan Daerah dan Pemerataan IPM Antar Wilayah.....	3-29
3.2.3.6	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Tata Ruang dan Wilayah	3-30
3.2.3.7	Arah Kebijakan 2025-2029 – Menuju pertumbuhan daerah yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.....	3-45
3.2.4.	PRIORITAS PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN	
	JANJI KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI.....	3-47
3.2.4.1	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	3-47
3.2.4.2	Program Prioritas Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	3-58
3.2.4.3	Program Unggulan Janji Kampanye	3-81
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAH DAERAH.....	4-1
4.1	PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	4-1
4.2	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	4-81
4.2.1	Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui IKU.....	4-81
4.2.2	Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui IKD.....	4-81
4.2.3	Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui IKK.....	4-84
BAB V	PENUTUP	5-1
5.1	KAIDAH PELAKSANAAN.....	5-2
5.1.1	Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan.....	5-2
5.1.2	Kepemimpinan dan Pengarahan Bupati	5-3
5.1.3	Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	5-3
5.1.4	Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Publik.....	5-3
5.2	PENGENDALIAN DAN EVALUASI	5-3

5.3	PEDOMAN TRANSISI.....	5-5
5.3.1	Mekanisme Transisi Kepemimpinan.....	5-6
5.3.2	Evaluasi dan Pelaporan Berkala.....	5-6
5.3.3	Penyiapan RKPD Tahun Anggaran 2030	5-6
5.4	KATA AKHIR	5-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	1-9
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Rejang Lebong	2-2
Gambar 2. 2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-10
Gambar 2.3	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 (Kuintal)	2-11
Gambar 2.4	Produksi Tanaman Biofarma Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 (kg)	2-11
Gambar 2.5	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 (Kuintal)	2-12
Gambar 2. 6	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Rejang Lebong	2-15
Gambar 2. 7	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Rejang Lebong	2-16
Gambar 2. 8	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong.....	2-20
Gambar 2. 9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Rejang Lebong.....	2-20
Gambar 2. 10	Piramida Penduduk Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	2-28
Gambar 2. 11	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-29
Gambar 2. 12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2-31
Gambar 2. 13	Rasio gini Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2-36
Gambar 2. 14	Grafik Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2-38
Gambar 2. 15	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	2-40
Gambar 2. 16	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2020-2024.....	2-63
Gambar 2. 17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-64
Gambar 2. 18	Jumlah Pengunjung Wisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-69
Gambar 2.19	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-71
Gambar 2. 20	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2020-2024	2-74
Gambar 2. 21	Laju Inflasi Kota Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024.....	2-76
Gambar 2. 22	Nilai Investasi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-77
Gambar 2. 23	Progress Nilai SAKIP Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020-2024	2-79

Gambar 2. 24	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-80
Gambar 2. 25	Angka Kriminalitas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-84
Gambar 2. 26	Tren Total Pendapatan APBD Rejang Lebong 2020-2024	2-96
Gambar 2. 27	PAD dan Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan.....	2-98
Gambar 2. 28	Proyeksi Pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.....	2-131
Gambar 2. 29	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	2-133
Gambar 2. 30	Proyeksi SILPA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	2-135
Gambar 2. 31	Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	2-137
Gambar 2. 32	Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).....	2-151
Gambar 2. 33	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Rejang Lebong (Ribu Rupiah) Dan Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu.....	2-154
Gambar 2. 34	Pohon Masalah Belum Optimalnya Aktivitas Ekonomi untuk Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan	2-154
Gambar 2. 35	Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu Berdasarkan Subsektor Tahun 2024.....	2-155
Gambar 2. 36	Nilai PMDN (Juta Rupiah) dan PMA (Ribu USD) Kabupaten Rejang Lebong.....	2-157
Gambar 2. 37	Pohon Masalah Transformasi Tata Kelola Belum Terlaksana dengan Baik.....	2-158
Gambar 2. 38	Pohon Masalah Belum Optimalnya Pariwisata dan Pelestarian Lingkungan.....	2-160
Gambar 2. 39	Pohon Masalah Infrastruktur Konektivitas yang Kurang Memadai	2-161
Gambar 3. 1	Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Rejang Lebong	3-25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029	1-13
Tabel 1. 2	Keselarasan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045.....	1-15
Tabel 1. 3	Keselarasan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.....	1-18
Tabel 1. 4	Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045	1-19
Tabel 1. 5	Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	1-21
Tabel 2. 1	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong.	2-1
Tabel 2. 2	Luas Wilayah Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten Rejang Lebong	2-3
Tabel 2. 3	Luas Wilayah Menurut Ketinggian Lahan di Kabupaten Rejang Lebong	2-3
Tabel 2.4	Luas Wilayah Menurut Ketinggian Lahan per Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.....	2-4
Tabel 2.5	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	2-8
Tabel 2.6	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Rejang Lebong (Ton).....	2-13
Tabel 2.7	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha (ton) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	2-13
Tabel 2. 8	Status Daya Dukung Air di Kabupaten Rejang Lebong	2-14
Tabel 2. 9	Daya Dukung Pangan Kabupaten Rejang Lebong	2-16
Tabel 2. 10	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Berdasarkan Jasa Penyediaan di Kabupaten Rejang Lebong (%).....	2-18
Tabel 2.11	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah).....	2-21
Tabel 2. 12	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024	2-22
Tabel 2. 13	Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-23
Tabel 2. 14	Persentase Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024.....	2-24
Tabel 2.15	Perkembangan Indeks Resiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-25

Tabel 2. 16	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-26
Tabel 2. 17	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-27
Tabel 2. 18	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-29
Tabel 2. 19	Distribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	2-33
Tabel 2. 20	Profil Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-36
Tabel 2. 21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	2-38
Tabel 2. 22	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	2-39
Tabel 2. 23	Pendapatan Perkapita Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-39
Tabel 2. 24	Angka Harapan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-41
Tabel 2. 25	Realisasi AKI dan AKB Kabupaten Rejang Lebong	2-42
Tabel 2. 26	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-43
Tabel 2. 27	Nilai Komponen Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024	2-43
Tabel 2. 28	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-44
Tabel 2. 29	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-45
Tabel 2. 30	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-45
Tabel 2. 31	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024	2-46
Tabel 2. 32	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024	2-46
Tabel 2. 33	Jumlah Sekolah Setiap Jenjang Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-47
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-48
Tabel 2. 35	Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-48
Tabel 2. 36	Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-49
Tabel 2. 37	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-50

Tabel 2. 38	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-51
Tabel 2. 39	Status keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Rejang Lebong.....	2-52
Tabel 2. 40	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-53
Tabel 2. 41	Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 .	2-54
Tabel 2. 42	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-56
Tabel 2. 43	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-57
Tabel 2. 44	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024..	2-58
Tabel 2. 45	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-60
Tabel 2.46	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-61
Tabel 2.47	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024.....	2-62
Tabel 2.48	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-64
Tabel 2. 49	Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2020-2024.....	2-67
Tabel 2. 50	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-67
Tabel 2. 51	Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-68
Tabel 2. 52	Jumlah Pengunjung Tempat Wisata Tahun 2020-2024	2-70
Tabel 2. 53	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020- 2024	2-72
Tabel 2. 54	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-73
Tabel 2. 55	Nilai Perencanaan Pembangunan dan Pengukuran Kinerja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-77
Tabel 2. 56	Opini BPK Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-78
Tabel 2. 57	Perkembangan Kepegawaian di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.	2-78
Tabel 2. 58	Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-81
Tabel 2. 59	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.	2-82
Tabel 2. 60	Indeks Sistem Pemertintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-82
Tabel 2. 61	Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-83
Tabel 2. 62	Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (Rupiah).....	2-88

Tabel 2. 63	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-90
Tabel 2. 64	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-100
Tabel 2. 65	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.....	2-103
Tabel 2. 66	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024	2-113
Tabel 2. 67	Neraca Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 (Nilai dalam Rupiah)	2-117
Tabel 2. 68	Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2024 (Dalam Persentase, %)	2-127
Tabel 2. 69	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Rejang Lebong.....	2-142
Tabel 2. 70	Analisis Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.....	2-146
Tabel 2. 71	Proyeksi Penduduk Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2035.....	2-186
Tabel 2. 72	Proyeksi Penduduk Rejang Lebong Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2035	2-187
Tabel 2. 73	Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2042.....	2-189
Tabel 2. 74	Isu Strategis Daerah Kabupaten Rejang Lebong.....	2-210
Tabel 3. 1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.....	3-5
Tabel 3. 2	Keselarasan Visi RPJMN 2025-2029, Visi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029	3-12
Tabel 3. 3	Keselarasan Misi RPJMN 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029	3-13
Tabel 3. 4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	3-15
Tabel 3. 5	Strategi Pencapaian SDG's dalam RPJMD 2025-2029	3-20
Tabel 3. 6	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	3-25
Tabel 3. 7	Arah Kebijakan setiap Misi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	3-46
Tabel 3. 8	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas	3-53
Tabel 3. 9	Sinergitas Prioritas Nasional , Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	3-55

Tabel 3. 10	Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	3-60
Tabel 3. 11	Rumusan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	3-82
Tabel 4. 1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.....	4-2
Tabel 4. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2030 ...	4-80
Tabel 4. 3	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2030	4-82
Tabel 4. 4	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	4-84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan setiap daerah, namun tetap sejalan dengan kebijakan nasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Instrumen utama dalam perencanaan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku lima tahun. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menjadi pedoman teknis sehingga dapat menjamin keselarasan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, memastikan keterpaduan antar-perangkat daerah, serta memenuhi ketentuan waktu, prosedur, dan substansi yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 yang merupakan respon terhadap dinamika pembangunan nasional dan daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun ke depan, disusun dengan juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, dengan mempertimbangkan potensi lokal, tantangan, dan isu-isu strategis yang berkembang. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang holistik, integratif, dan spasial, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mencakup empat aspek utama: teknokratis, partisipatif, politis, serta kombinasi *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis menekankan penggunaan data dan analisis ilmiah untuk memastikan keputusan yang akurat dan berbasis bukti. Sementara itu, pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil. Pendekatan politik mempertimbangkan dinamika politik lokal dan

nasional, sedangkan kombinasi *top-down* dan *bottom-up* memastikan bahwa arahan dari pemerintah pusat dapat diselaraskan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Prinsip-prinsip perencanaan yang diusung dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 meliputi tematik, holistik, integratif dan spasial. Prinsip tematik menetapkan tema prioritas yang menjadi fokus pembangunan dalam periode tertentu. Prinsip holistik menjamin bahwa program pembangunan dirancang secara komprehensif, mencakup seluruh aspek dari hulu hingga hilir. Prinsip integratif menciptakan sinergi antar-pemangku kepentingan dan sumber pendanaan, sementara prinsip spasial memastikan bahwa perencanaan memperhatikan keterkaitan antar-wilayah dan kesatuan geografis. Dengan pendekatan dan prinsip tersebut, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui perencanaan yang matang dan partisipatif, Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah yang berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 juga selaras dengan Asta Cita yang merupakan Prioritas Pembangunan Nasional. Asta Cita, yang terdiri dari delapan agenda prioritas pembangunan nasional, mencakup pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, RPJMD Rejang Lebong mengintegrasikan agenda-agenda tersebut ke dalam rencana pembangunan daerah. Misalnya, dalam hal pembangunan manusia, RPJMD Rejang Lebong menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang sejalan dengan prioritas nasional untuk mengurangi kesenjangan akses dan kualitas layanan dasar. Program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat, menjadi fokus utama.

Selain itu, RPJMD Rejang Lebong juga mengakomodasi prioritas pembangunan nasional dalam bidang infrastruktur. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih, yang sejalan dengan program nasional untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat integrasi dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Dalam bidang ekonomi, RPJMD Rejang Lebong mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata, yang sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Di samping memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, Kabupaten Rejang Lebong juga menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Selain itu, infrastruktur transportasi dan logistik masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan nasional yang menghubungkan dengan provinsi lain, masih memerlukan perbaikan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Selain itu juga isu lingkungan juga menjadi tantangan serius. Deforestasi dan alih fungsi lahan, penurunan daya dan kapasitas lingkungan, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Oleh karena itu, pembangunan di Rejang Lebong perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, termasuk melalui penerapan praktik pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan. RPJMD Rejang Lebong 2025-2029 mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ini, sejalan dengan prioritas nasional untuk mencapai target pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Di sisi lain, Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama wisata alam dan budaya yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, pengembangan pariwisata masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur pendukung, seperti akses transportasi yang memadai dan fasilitas akomodasi yang berkualitas. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 juga mengakomodasi pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Selain itu juga mengintegrasikan program-program peningkatan kapasitas teknologi dan inovasi untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor Pembangunan dan layanan masyarakat, dalam hal ini termasuk implementasi *e-government*, pengembangan kepariwisataan dan revitalisasi UMKM dan BUMD dengan memanfaatkan teknologi informasi dan manajemen modern.

Sebagai pengantar menuju isi dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029, bab ini memberikan gambaran umum tentang konteks pembangunan daerah, pendekatan dan prinsip-prinsip perencanaan dalam penyusunan RPJMD. Di samping itu disajikan peraturan perundangan yang melandasinya serta kaitan antar dokumen perencanaan dan keselarasannya dengan substansi RPJMD Rejang Lebong. Bab-bab selanjutnya akan menguraikan secara lebih rinci tentang kondisi sosial-ekonomi-budaya dan keuangan daerah, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan; visi, misi, tujuan, strategi, dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan keselarasan dengan kebijakan nasional.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80 Tahun 2012);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan mengacu dan mempertimbangkan dokumen perencanaan nasional, provinsi, serta daerah sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat dan

saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah (PD), program lintas PD, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dapat dilihat pada Gambar 1.1. Keterkaitan ini diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, sehingga terwujud harmonisasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rejang Lebong dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan. Renstra ini dilengkapi dengan indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun.

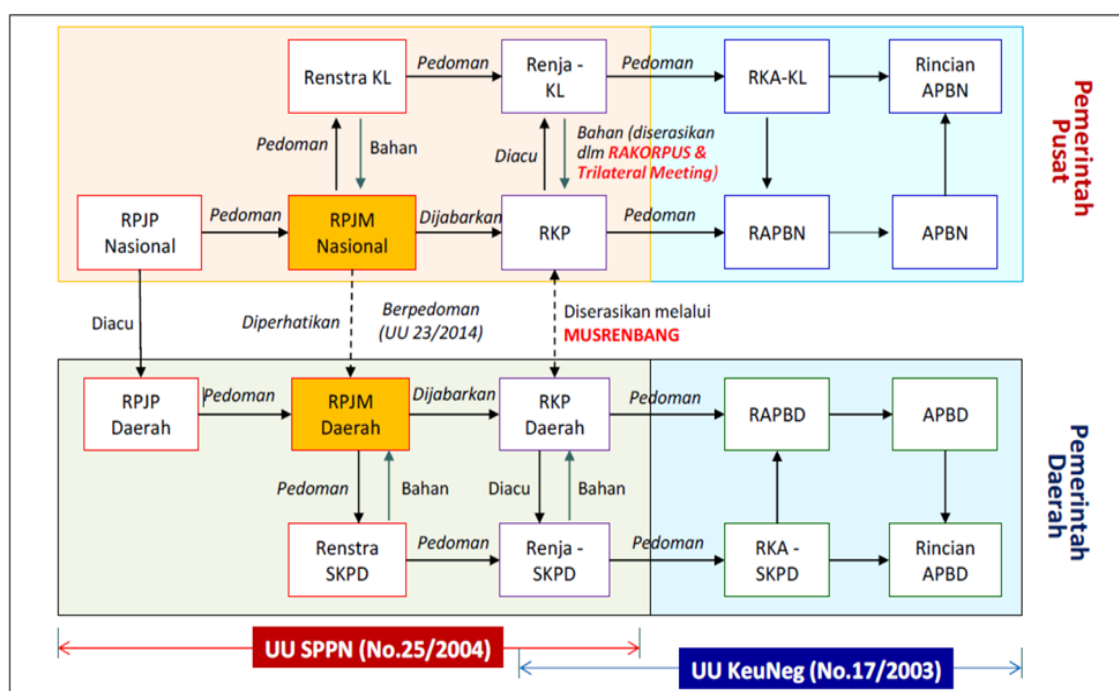
Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu rencana tahunan daerah yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dokumen Renja ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang kemudian dirangkum menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD selanjutnya ditindaklanjuti menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Dengan demikian, RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar bagi rencana jangka pendek hingga penganggaran.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW memberikan acuan mengenai struktur dan pola ruang yang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini bertujuan agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Bengkulu dan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong juga harus mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong secara efektif. KLHS juga memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Dengan memperhatikan keterkaitan antara RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJM Provinsi, RTRW, dan KLHS, penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Analisa terhadap Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan perundang-undangan lainnya

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 adalah “Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan”. Visi ini mencerminkan komitmen Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan pembangunan yang maju, mandiri, berbasis nilai-nilai religius, dan berkelanjutan. Visi ini mendukung visi presiden tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini selaras

dengan delapan misi presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita pembangunan nasional, khususnya dalam:

- 1) Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, dengan mengedepankan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan.
- 2) Mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan meneguhkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan.
- 3) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 dan hubungannya dengan Delapan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 adalah:

1. Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan Efektif didukung Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Profesional

- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-1 RPJMN 2025-2029, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” dan Agenda Ke-7 yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program-program seperti peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), penerapan sistem elektronik dalam pelayanan publik dan penguatan pengawasan internal untuk mencegah korupsi.

2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah

- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti agrowisata dan sektor unggulan lainnya.
- 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-3 RPJMN 2025-2029, yaitu “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi”, yang fokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan nilai tambah produk daerah.

- 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program pengembangan agrowisata dan peningkatan potensi sektor unggulan daerah yaitu pertanian dan pariwisata.
- 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.**
- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan memastikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.
 - 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-4 RPJMN 2025-2029, yaitu "Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas" dan Agenda Ke-6 yaitu "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi", yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi, pendidikan berkualitas yang merata dan kesehatan untuk semua.
 - 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program Pembangunan sarana prasarana dan kualitas pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan listrik di daerah terpencil.
- 4. Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah**
- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan serta berdaya saing, dengan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan transformasi digital dan inovasi daerah.
 - 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-2 RPJMN 2025-2029, yaitu "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru" dan Agenda Ke-5 yaitu "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri", yang bertujuan untuk membangun sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, terwujudnya pengembangan ekonomi digital dan meningkatkan inovasi dan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi digital serta daya saing industri.

- 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program pelestarian budaya lokal, pemanfaatan teknologi dalam sistem perkonomian dan meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengembangkan potensi lokal Berbasis Sumber Daya dengan mengedepankan transformasi digital untuk peningkatan daya saing daerah.

5. Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.

- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sebagai bagian dari komitmen global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-2 RPJMN 2025-2029, yaitu "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru " dan Agenda Ke-8 yaitu "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur", yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta ekonomi hijau.
- 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian visi dan misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dan substantif dengan Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya bertujuan untuk memajukan daerah secara internal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan sinergi antara pembangunan daerah dan nasional, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 1. 1
Keselarasn Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029
dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029

No.	Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	Asta Cita (Misi Pembangunan) RPJMN Tahun 2025-2029
1.	MISI1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah.	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Nasional

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang, pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang RTRW Nasional. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pada strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdapat strategi mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40 persen dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional.

b. Rencana Struktur Ruang

Rencana sistem jaringan sumber daya air berupa wilayah sungai yang terkait dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah Rencana Tahapan Pengembangan II – IV/A. Rencana tersebut berupa Perwujudan Sistem Jaringan SDA pada Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau yang mana Wilayah Sungai yang masuk ke dalam Wilayah Sungai Kabupaten Rejang Lebong adalah Wilayah Sungai Musi dan Lemau.

c. Rencana Pola Ruang

Rencana Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah:

1. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/3 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Cagar Alam pada Cagar Alam Talang Ulu I
2. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/3 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Cagar Alam pada Cagar Alam Talang Ulu II
3. Rencana Tahapan Pengembangan II/A/4 berupa Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional Taman Nasional pada Taman Nasional Kerinci Seblat
4. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/6 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam pada Taman Wisata Alam Bukit Kaba.

d. Penetapan Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan Rencana Tahapan Pengembangan II/B/I berupa Rehabilitasi/revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 juga memperhatikan RPJPD Provinsi Bengkulu. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu adalah “Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Terdapat keselarasan antara visi pembangunan Provinsi Bengkulu dengan visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong. Makna kata sejahtera RPJPD Provinsi Bengkulu sudah tersirat dalam makna maju dan sejahtera dalam visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, yaitu masyarakat yang aman sentosa dan makmur serta terlepas dari segala macam kesukaran. Sementara itu berkelanjutan memiliki makna menjaga dan melestarikan lingkungan serta mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.

Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, perlindungan dan kesamaan di depan hukum, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender dan daerah.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045. Konsistensi ini dapat dilihat dari keselarasan antara visi dalam RPJPD Provinsi Bengkulu dengan visi dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2
Keselarasan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029
dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045
	VISI Mewujudkan Rejang Lebong Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan	VISI Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan
1.	MISI1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	MISI 1: Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing Misi 3: Menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	MISI 2: Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumberdaya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	MISI 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah	MISI 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Misi 4: Menciptakan atmosfir pembangunan yang kondusif melalui perwujudan keamanan daerah tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	MISI 5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi MISI 7: Mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 memperhatikan RTRW Provinsi Bengkulu. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang dan pola ruang RTRW Provinsi Bengkulu. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan terkait langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rencana struktur ruang

Arahan rencana struktur ruang khususnya rencana sistem perkotaan menetapkan Kota Curup sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi pemantapan jaringan jalan arteri primer yang melewati Batas Kota Curup – Jalan Thamrin – Jalan Merdeka – Jalan A. Yani - Curup, pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yang melewati Curup,

optimalisasi dan pengembangan Terminal Simpang Nangka, serta pengembangan jalur jaringan kereta api yang melewati Kota Padang. Rencana sistem jaringan energi meliputi peningkatan kapasitas PLTA Tes dan PLTA Musi. Pengembangan jaringan sumber daya air meliputi pengembangan jaringan irigasi yang diutamakan untuk mengaliri area pertanian potensial, pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi termasuk DAS Musi.

b. Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas kurang lebih 90.800 hektar, Cagar Alam Danau Menghijau dengan luas kurang lebih 2.882 hektar, Cagar Alam Talang Ulu 1 dengan luas kurang lebih 1 hektar, Cagar Alam Talang Ulu 2 dengan luas kurang lebih 1 hektar, Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan luas kurang lebih 340.575 hektar, Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih 13.490 hektar, serta kawasan lindung geologi tanah longsor dan gunung berapi.

Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi (Kota Curup), kawasan peruntukan industri, serta kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri dari wisata alam dan wisata buatan yaitu Danau Mas Harun Bastari dan Suban Air Panas di Curup.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

Pembangunan Provinsi Bengkulu memiliki visi “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan” sesuai yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Provinsi Bengkulu ini diturunkan ke dalam empat misi pembangunan, yaitu 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius, 2) Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah, 3) Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan rasa aman, dan 4) Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

Provinsi Bengkulu memiliki tujuh prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan program-program prioritas. Prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu terdiri dari 1) Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah

yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius; 2) Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan Makmur; 3) Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah; 4) Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas; 5) Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal; 6) Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan; 7) Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta berketahanan iklim.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. Konsistensi ini dapat dilihat dari keselarasan antara visi dalam RPJMD Provinsi Bengkulu dengan visi dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3
Keselarasan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029
dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029
	VISI : Mewujudkan Rejang Lebong Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan	VISI: Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan
1.	MISI1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	MISI 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, autable dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, professional serta religius
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	MISI 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	MISI 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat MISI 3 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029
		terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah.	MISI 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	MISI 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045

RPJMD 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan keempat pelaksanaan RPJPD Rejang Lebong 2025-2045. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045 sudah dirumuskan visi Rejang Lebong sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Rejang Lebong adalah “Rejang Lebong Unggul, Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Berkelanjutan”. Sementara itu, visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan”.

Untuk menjabarkan visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045 terdapat 8 misi utama. Dari kedelapan misi utama dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong terdapat kaitan yang erat dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan secara eksplisit misi pada RPJMD merupakan turunan dari misi yang ada pada RPJPD seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4
Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045
	VISI Mewujudkan Rejang Lebong Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan	VISI Rejang Lebong Unggul, Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Berkelanjutan
1.	MISI 1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	MISI 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045
		Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang baik (<i>good governance</i>) melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis agrobisnis dan agrowisata
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	Misi 7: Mewujudkan konektivitas wilayah yang baik melalui penyediaan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya serta ketahanan ekologi
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	Misi 8: Menerapkan kesinambungan Pembangunan Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 memperhatikan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang, pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Rejang Lebong. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan arahan dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 2012-2032, yang berusaha dicapai adalah pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pembangunan berusaha dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan atau dengan kata lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Rejang Lebong mengatur tentang pusat-pusat kegiatan yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah. Pusat kegiatan

terwujud sebagai sistem perkotaan yang terdiri dari PKW, PKL, PPK dan PPL. PWK telah ditetapkan dalam RTRW yaitu Kota Curup, sedangkan PKL pada Kabupaten Rejang Lebong adalah Kota Padang.

b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong mengatur tentang pola ruang kawasan lindung dan budidaya dengan memperhatikan kawasan yang telah ditetapkan oleh nasional dan provinsi.

1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029 juga mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Keterkaitan RPJMD dengan KLHS ini dimaksudkan agar pembangunan dapat memperhatikan dampak sesuai dengan isu prioritas pada KLHS.

Tabel 1. 5
Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029
dengan KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029
1.	MISI1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	ISU PRIORITAS : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	ISU PRIORITAS : Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan ekowisata, serta peningkatan daya dukung lingkungan terhadap sektor pertanian dan perkebunan.
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	ISU PRIORITAS : Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdayasaing dengan mengutamakan Transformasi Digital yang didukung generasi muda	ISU PRIORITAS : Peningkatan stabilitas sosial melalui pemberdayaan UMKM berbasis teknologi dan pelestarian budaya lokal dalam pembangunan berkelanjutan
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	ISU PRIORITAS : Meningkatkan pembangunan ekonomi hijau dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam

Sumber: KLHS Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029, diolah

1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis pembangunan daerah selama lima tahun yang berperan sebagai rujukan utama dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan berbagai rencana di tingkat nasional, provinsi, maupun sektoral, sehingga tercipta sinergi dan kesinambungan pembangunan. Integrasi ini juga menjadi langkah penting untuk mencegah duplikasi program, memaksimalkan sumber daya, dan memastikan tujuan pembangunan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional.

Keterpaduan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi RPJMD dengan beberapa dokumen kunci, antara lain:

1. Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

RPJMD memastikan bahwa kebijakan daerah mendukung pencapaian 17 tujuan/*goals Sustainable Development Goals* (SDG's) melalui pengintegrasian indikator dan target pembangunan berkelanjutan dalam seluruh program strategis daerah, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola pemerintahan.

2. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

RPJMD menjadi dokumen dalam keterpaduan kebijakan antara rencana strategis daerah dengan program teknis di bidang pangan dan gizi. Juga menjadi instrumen untuk menjamin ketersediaan pangan, pemerataan distribusi, dan perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan, selaras dengan tujuan nasional di bidang pangan dan gizi.

3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

RPJMD mengarusutamakan target dan strategi RPKD dalam kebijakan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan secara terukur melalui program lintas sektor yang berkelanjutan. Selain itu dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai fokus utama dalam setiap tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

4. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

RPJMD mensinergikan arah kebijakan dan target GDPK yang termuat pada peta jalan GDPK dan rencana aksi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pemanfaatan bonus demografi untuk pembangunan berkelanjutan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan instrumen perencanaan strategis yang dirancang dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kerangka tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan yang terukur. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap isu-isu strategis daerah, serta memuat langkah-langkah sistematis dan terstruktur untuk mencapai target pembangunan melalui program-program prioritas yang dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun.

Secara spesifik, tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah:

RPJMD berfungsi sebagai dokumen operasional yang mentransformasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan selaras dengan prioritas kepemimpinan daerah.

2. Pedoman Perencanaan Strategis bagi Perangkat Daerah :

RPJMD menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini memandu perumusan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas RPJMD, sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

3. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Pembangunan :

RPJMD dirancang untuk memperkuat keterkaitan, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan antara perangkat daerah, serta antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

4. Acuan bagi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*):

RPJMD berperan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, dalam mendukung pencapaian target kinerja program prioritas. Dokumen ini juga menjadi dasar untuk mengalokasikan sumber pendanaan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

5. Indikator Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan:

RPJMD berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Melalui dokumen ini, pencapaian kinerja pembangunan dapat dievaluasi secara objektif, transparan, dan akuntabel.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berisi:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

1.2. DASAR HUKUM

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Menjelaskan hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong bagi daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Memuat sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan analisis mendalam dan sistematis mengenai kondisi umum daerah, yang mencakup aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Analisis ini menjadi landasan fundamental untuk memahami konteks pembangunan daerah serta merumuskan kebijakan dan program yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Bagian ini menguraikan secara rinci kondisi geografis Kabupaten Rejang Lebong, meliputi topografi, iklim, potensi pengembangan wilayah, serta identifikasi area rawan bencana. Selain itu, dipaparkan pula analisis demografis yang mencakup struktur, distribusi, dan dinamika kependudukan. Data seperti kepadatan penduduk, komposisi usia, dan tren migrasi menjadi dasar untuk merancang kebijakan pembangunan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Bagian ini membahas kondisi kesejahteraan melalui tiga dimensi utama:

1. **Pemerataan Ekonomi:** Analisis mendalam mengenai tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang adil.
2. **Kesejahteraan Sosial:** Evaluasi aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang berkualitas.
3. **Seni, Budaya, dan Olahraga:** Peran sektor budaya dan olahraga dalam meningkatkan kualitas hidup dan identitas masyarakat.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan faktor krusial dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagian ini menganalisis empat pilar utama daya saing:

1. **Kemampuan Ekonomi Daerah:** Potensi sektor unggulan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. **Fasilitas Wilayah/Infrastruktur:** Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi, seperti transportasi, energi, dan komunikasi.
3. **Iklim Berinvestasi:** Kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif.
4. **Sumber Daya Manusia:** Kualitas tenaga kerja, tingkat produktivitas, dan upaya pengembangan kapasitas manusia.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bagian ini mengkaji dua jenis layanan:

1. **Layanan Wajib:** Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah.
2. **Layanan Pilihan:** Pelayanan tambahan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan spesifik daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.5. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

Di sini disajikan permasalahan yang melingkupi BUMD, langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan berbagai problematika yang melingkupinya, serta rencana tindak revitalisasi BUMD.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sub bagian ini menguraikan kondisi keuangan daerah, asumsi perencanaan pembangunan, dan kebijakan pengelolaan keuangan untuk lima tahun mendatang. Struktur keuangan daerah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.1. Realisasi Keuangan Daerah 2020-2024

Di sini menyajikan evaluasi komprehensif kinerja keuangan daerah selama lima tahun terakhir, mencakup pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta analisis Neraca Daerah. Tren pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah menjadi dasar untuk proyeksi keuangan yang realistis dan berkelanjutan.

2.2.2. Implikasi Kebijakan

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi penggunaan anggaran dan hasil pembiayaan. Bagian ini juga mengidentifikasi tantangan dan pelajaran yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kebijakan keuangan di masa mendatang.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Analisis ini mencakup sumber pendapatan, alokasi belanja, dan strategi pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan mendukung prioritas pembangunan.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Sub bagian ini mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi dasar perumusan visi, misi, dan kebijakan pembangunan. Isu-isu strategis disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan laporan KLHS RPJMD ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2025–2029.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur.

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Bagian ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.

3.2.2. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam bab ini termuat program prioritas pembangunan yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Program pembangunan daerah dilengkapi beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif anggaran. Program-program tersebut disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, dengan penjelasan peran masing-masing perangkat daerah sebagai penanggung jawab.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan Program Perangkat Daerah dan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sub bab ini berisi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), Indikator ini menjadi alat evaluasi pencapaian visi, misi, Tujuan dan sasaran serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam periode RPJMD 2025-2029.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya periode RPJMD 2025–2029. Hal ini mencakup mekanisme evaluasi, pelaporan, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang (RPJPD 2025–2045) yang berorientasi pada kemajuan, kemandirian, keberagamaan, dan keberlanjutan. Fokus utama periode ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekaligus memperkuat hilirisasi produk unggulan daerah, termasuk kopi, agrowisata, dan ekonomi kreatif. Pendekatan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap potensi demografis, geografis, dan ekonomi lokal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong efisiensi dan inklusivitas. Selain itu, RPJMD ini mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan global *Sustainable Development Goals* (SDGs), memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu dengan ibukota kabupaten di Kota Curup. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sebesar 155.026 hektare yang tersebar ke dalam 15 kecamatan, 34 kelurahan dan 122 desa. Wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 24.460 hektare, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup dengan luas wilayah sebesar 621 hektare. Secara rinci data kecamatan dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

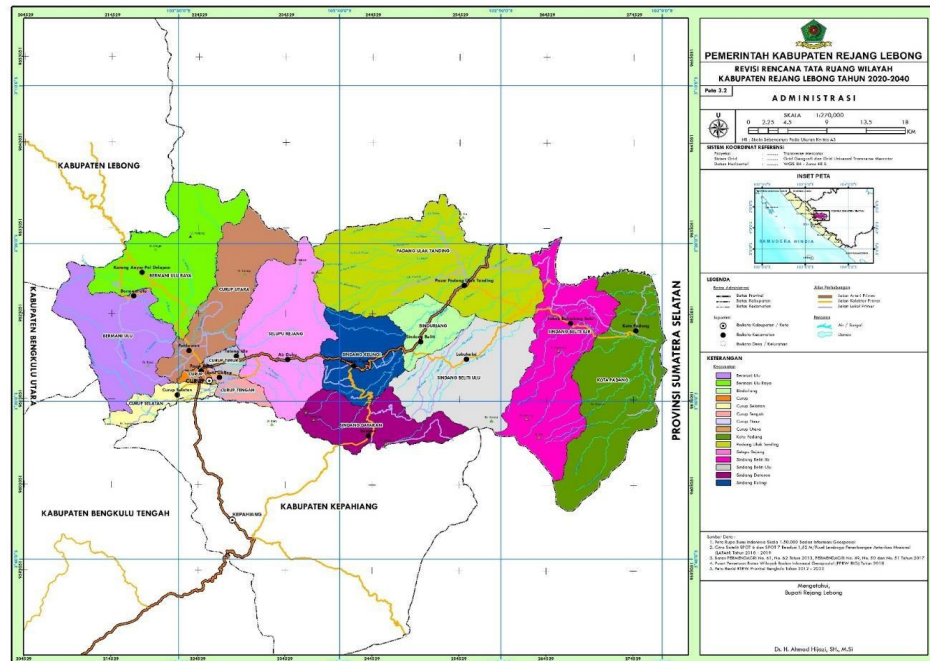
Tabel 2. 1
Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Hektare)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Ibukota
1	Curup	621	9	-	Kelurahan Pasar Baru
2	Curup Utara	11.041	2	12	Kelurahan Tunas Harapan
3	Curup Timur	1.077	4	5	Kelurahan Talang Ulu
4	Curup Selatan	2.918	2	9	Desa Lubuk Ubar
5	Curup Tengah	1.748	9	1	Kelurahan Air Bang
6	Sindang Kelingi	8.187	1	9	Kelurahan Beringin Tiga
7	Sindang Daratan	8.389	-	6	Desa Bengko
8	Kota Padang	19.039	3	7	Kelurahan Kota Padang
9	Sindang Beliti Ilir	16.597	-	10	Desa Lubuk Belimbing I
10	Bermani Ulu	12.788	-	12	Desa Kampung Melayu
11	Bermani Ulu Raya	14.727	-	10	Desa Tebat Tenong Luar
12	Pandang Ulak Tanding	24.460	1	14	Kelurahan Padang Ulak Tanding
13	Binduriang	4.447	-	5	Desa Kepala Curup
14	Sindang Beliti Ulu	14.045	-	9	Desa Lubuk Alai
15	Selupu Rejang	14.944	3	13	Kelurahan Air Duku
Kabupaten Rejang Lebong		155.026	34	122	Kecamatan Curup

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.



Sumber : Rancangan Perda RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2044

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Rejang Lebong

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara $2^{\circ} 22' 07''$ - $3^{\circ} 31'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} 19'$ - $102^{\circ} 57'$ Bujur Timur. Sementara itu, secara geografis terletak diantara dua buah bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba. Kabupaten Rejang Lebong memiliki letak yang strategis karena memiliki akses yang cepat menuju Jalan Lintas Sumatra. Jarak ibukota Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Kota Curup dengan Kota Bengkulu sekitar 85 Km. Sementara itu, jarak Kota Curup dengan Kota Lubuk Linggau di Provinsi Sumatra Selatan sekitar 55 Km, dan jarak dengan Kota Palembang di Provinsi Sumatra Selatan sekitar 484 Km.

c. Kondisi Topografi

1. Kemiringan Lahan

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong memiliki kelerengan datar sampai bergelombang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak pada kemiringan lahan lebih dari 8% dimana seluas 106.371 Hektare atau sekitar 68.58% dari seluruh lahan yang ada diwilayah Kabupaten dengan lokasi tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten Rejang Lebong

No	Kemiringan Lahan (derajat)	Luas	
		Hektare	Persentase
1	0-3% (Datar)	21.475	13,85
2	3-8 % (Landai)	27.235	17,57
3	8-15 % (Berombak)	42.768	27,59
4	15-25 % (Agak Curam)	30.351	19,58
5	25-45 % (Curam)	25.238	16,28
6	> 45 % (Sangat Curam)	7.960	5,13
Kabupaten Rejang Lebong		155.027	100,00

Sumber: Laporan Draft Akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2044; DPUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong, 2021

2. Ketinggian Lahan

Kabupaten Rejang Lebong terletak di kawasan perbukitan yaitu Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat dan Bukit Kaba di bagian timur. Oleh karena itu, sebagian besar Kabupaten Rejang Lebong atau sebesar 25,10 persen dari seluruh luas wilayahnya berada di ketinggian di atas 1.000-1500 meter dari permukaan laut (mdpl) dan 23,12 persen atau 35.841 hektare wilayah kabupaten ini berada di ketinggian 750-1000 mdpl. Selanjutnya 17.79 persen atau 24.477 hektare berada di ketinggian 0-250, 15,27 persen atau 23.672 hektare berada di ketinggian 250-500 mdpl, 16,64 persen atau 25.798 hektare berada di ketinggian 500-750 mdpl, 3,92 persen atau 6.077 hektare berada di ketinggian 500-1.000 mdpl, dan 0.16 persen lainnya atau seluas 255 hektare berada di ketinggian lebih dari 2000 mdpl. Dilihat dari ketinggiannya, Kabupaten Rejang Lebong sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Lebih lanjut luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong menurut ketinggian lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Lahan di Kabupaten Rejang Lebong

No	Ketinggian (mdpl)	Luas	
		Hektare	Persentase
1	0- 250	24.477	17,79
2	250-500	23.672	15,27
3	500-750	25.798	16,64
4	750-1000	35.841	23,12
5	1000-1500	38.907	25,10
6	1500-200	6.077	3,92
7	> 2000	255	0,16
Kabupaten Rejang Lebong		155.027	100,00

Sumber: Laporan Draft Akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2044; DPUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Secara umum, rata-rata kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong terletak pada ketinggian 750 hingga 1500 meter diatas permukaan laut, sementara itu terdapat lima kecamatan yang terletak pada ketinggian dibawah 250 meter diatas permukaan laut yaitu Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

Tabel 2. 4
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Lahan per Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong

NO	Kecamatan	Ketinggian Lahan (mdpl)						
		0 - 250	250 -500	500 -750	750 - 1000	1000 - 1500	1500 - 2000	> 2000
1	Curup	-	-	620,8	-	-	-	-
2	Curup Utara	-	-	3405,8	2912,3	4139,1	577,1	6,5
3	Curup Timur	-	-	917,3	159,4	-	-	-
4	Curup Selatan	-	-	2350,7	567,0	-	-	-
5	Curup Tengah	-	-	662,2	783,5	302,6	-	-
6	Sindang Kelingi	-	73,4	2162,8	2597,2	3353,5	-	-
7	Sindang Daratan	-	-	220,9	3253,9	4081,5	832,2	-
8	Kota Padang	9979,0	4333,4	1823,8	1050,4	1716,4	135,5	-
9	Sindang Beliti Ilir	7092,9	2432,2	2225,3	2090,0	2560,0	196,6	-
10	Bermani Ulu	-	-	783,9	7130,0	3612,5	1067,0	195,0
11	Bermani Ulu Raya	-	-	238,6	7000,6	7188,0	299,6	-
12	Padang Ulak Tanding	6890,6	8588,2	3846,7	2294,0	2447,4	393,0	-
13	Binduriang	1,3	3466,1	972,7	6,6	-	-	-
14	Sindang Beliti Ulu	513,2	4778,5	5447,5	1753,2	1371,0	182,0	-
15	Selupu Rejang	-	-	118,9	4243,2	8134,8	2393,7	53,3
Kabupaten Rejang Lebong		24.477	23.672	25.798	35.841	38.907	6.077	255

Sumber: Laporan Draft Akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2044; DPUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong, 2025

d. Kondisi Geologi

Secara geomorfik yang mendasarkan pada peta rupa bumi, Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar berupa bentang alam vulkanik Kwartir yang terdiri dari beberapa kerucut vulkanik dan sebagian kecil berupa bentang alam perbukitan Tersier dan bentang alam dataran. Secara litostratigrafi yang mendasarkan pada peta geologi lembar Bengkulu dengan skala 1: 250.000 (Gafoer, Amin dan Pardede,1992), maka wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar didominasi oleh produk kegiatan gunung api baik yang berlangsung saat Kwartir – Plistosen (Formasi Kasai/QTk) dan Satuan Batuan Gunungapi Riolit-Andesit (QTv), sedangkan produk Vulkanik Kwartir Holosen yang berupa Satuan Batuan Gunungapi Andesit – Basalt (Qv) yang terdiri dari empat tipe (berdasarkan tipe erupsinya) yaitu *l* : *Bukit Lumut (Qvl)*, *h* : *Bukit Hulusulup (Qvh)*, *dn* : *Bukit Daun (Qvdn)*, dan *d* : *Bukit Dingin (Qvd)*). Selanjutnya pada kurun waktu geologi yang sama juga dihasilkan Satuan Breksi Gunungapi (Qhv) yang terdiri dari empat tipe (berdasarkan tipe erupsinya) yaitu *c* : *Bukit Condong (Qhvc)*, *k* : *Bukit Kaba (Qhvk)*, *b* : *Bukit*

Balai (Qhvb), be : Bukit Besar (Qhvbe) dan d : Bukit Dempo (Qhvd).

Urutan litostratigrafi dari yang tertua hingga termuda antara lain Formasi Seblat (Toms), Formasi Hulusimpang (Tomh), dan Formasi Bal (Tmb) yang berumur Tersier dan Endapan Vulkanik Kwartir Plio – Plistosen (Formasi Kasai/QTk) dan Satuan Batuan Gunungapi Rhyolit – Andesit (QTV). Selanjutnya diikuti Satuan Gunungapi Andesit Basalt (Qv) dan Satuan Breksi Gunungapi (Qhv) dan akhirnya Endapan Aluvial (Qa). Sejarah pembentukan stratigrafi di Kabupaten Rejang Lebong diawali dengan pembentukan Formasi Seblat (Toms) dan Formasi Hulusimpang (Tomh) yang berlangsung selama Miosen Awal. Formasi Seblat (Toms) terdiri dari batupasir terkersikkan, batulempung, batupasir konglomeratan, batugamping, serpih, napal, batulempung tufan dengan sisipan batupasir, yang diendapkan pada lingkungan laut. Bersamaan waktu geologinya, terbentuk juga di daerah Kabupaten Rejang Lebong Formasi Hulusimpang (Tomh) yang merupakan produk vulkanik pada Miosen Awal yang terdiri dari lava, breksi gunung api dan tuf, bersifat andesitik hingga basaltik, sebagian sudah mengalami metamorfosa, setebal 700 meter yang terbentuk di darat.

Selanjutnya, secara tidak selaras di atasnya diendapkan Formasi Bal (Tmb) pada waktu Miosen Tengah – Miosen Akhir yang terdiri dari breksi gunungapi epiklastik, dengan sisipan batupasir yang bersifat dasitan, tebalnya sekitar 300 meter. Kemudian pada periode antara Pliosen – Plestosen dan secara tidak selaras diendapkan Satuan Batuan Gunungapi Rhyolit Andesit (QTV) dan Formasi Kasai (QTk). Satuan Batuan Gunungapi Rhyolit Andesit tersusun atas lava rhyolite, dasit, andesit, tuf, breksi batu apung dengan ketebalan sekitar 350 meter, sedangkan Formasi Kasai (QTk) terdiri dari batu pasir konglomeratan, batu lempung tufan mengandung kayu terkersikkan, batu apung dan sisipan lignit. Kemudian di atas satuan satuan tersebut diendapkan secara tidak selaras Satuan Batuan Gunungapi Andesit Basalt (Qv) dan Satuan Breksi Gunungapi (Qhv) yang berumur Holosen, dan diakhiri dengan Endapan Aluvial (Qa). Satuan Batuan Gunungapi Andesit Basalt (Qv) terdiri dari lava berupa andesit hingga basalt, tuf dan breksi lahar, sedangkan Satuan Breksi Gunungapi (Qhv) tersusun atas breksi gunungapi, lava andesit basalt. Endapan Aluvial (Qa) berupa pasir, lanau, lempung, dan kerikil yang hingga saat ini masih terbentuk.

Formasi formasi yang berumur lebih tua dari Miosen Awal tidak tersingkap di daerah Kabupaten Rejang Lebong, tetapi tersingkap di daerah lain yang berumur Paleosen dan Eosen dan bahkan batuan yang berumur Jura hingga Kapur. Hubungan stratigrafi ketidakselarasan terdapat antara batuan Mesozoikum dengan batuan Tersier (Kenozoikum) dan antara batuan Eosen dengan batuan Oligosen (Gafoer, Amin dan Pardede,1992). Tektonik Regional Sumatra jika dilihat dari hubungan stratigrafi antar formasi atau satuan batuan (Gafoer, Amin dan Pardede,1992) diperkirakan terjadi beberapa kali diantaranya ditandai adanya ketidakselarasan 1) Ketidakselarasan antara batuan Mesozoikum dengan batuan Kenozoikum

(Tersier), 2) Ketidakselarasan antara batuan Eosen dan Oligosen, 3) Ketidakselarasan saat Miosen Tengah antara batuan Miosen Awal dengan batuan Miosen Akhir, 4) Ketidakselarasan antara batuan Miosen dengan batuan Pliosen, 5) Ketidakselarasan saat Plistosen antara batuan Plistosen dan batuan Holosen. Dampak adanya beberapa ketidakselarasan ini membuktikan bahwa telah terjadi tektonik yang menyebabkan terbentuknya beberapa struktur geologi seperti lipatan (antiklin, sinklin), sesar geser, sesar naik, sesar turun dan beberapa kelurusan struktur geologi di wilayah lembar Bengkulu hingga saat ini.

1. Struktur dan Karakteristik Geologi

Dampak dari adanya tektonik yang ditandai dengan ketidakselarasan antara formasi atau satuan batuan yang telah diutarakan di atas, maka terbentuklah lipatan (antiklin dan sinklin) yang arahnya barat laut-tenggara akibat pergerakan lempeng Hindia Australia ke arah utara/timur laut dan lempeng Pasifik ke arah barat terhadap lempeng Asia. Di Sumatra pergerakan tersebut berdampak sebagai gaya kompresi dengan arah barat daya – timur laut, sehingga menghasilkan beberapa lipatan (antiklin dan sinklin) yang arah sumbu lipatannya barat laut-tenggara, selain itu juga menghasilkan sesar naik yang arahnya barat laut-tenggara hingga utara-selatan. Dinamika pergerakan ketiga lempeng tersebut menghasilkan sesar geser Sumatra yang arahnya dekstral (searah jarum jam) dan diduga terjadi sejak Oligosen (Daily, et.al, 1997, Simanjuntak dan Barbier, 1996).

Sesar Sumatra terbagi menjadi beberapa segmen atau zona yang tidak berupa garis lurus tetapi merupakan zona dengan lebar yang bervariasi. Zona sesar Sumatra di daerah Rejang Lebong dan sekitarnya terdapat segmen sesar Musi Keruh di bagian tenggara dan sesar Ketaun di bagian barat laut dari lembar peta geologi Bengkulu (Gafoer, Amin dan Pardede, 1992). Dampak dari adanya zona sesar Sumatra yang bergerak secara dextral, maka pada zona tersebut akan bekerja gaya ekstension yang mengakibatkan banyak terjadi sesar turun (*pull a part basin*) yang berupa graben yang berarah barat daya-timur laut atau barat laut-tenggara. Selain itu juga terjadi kelurusan struktur geologi yang diduga berupa sesar geser yang berarah barat laut-tenggara. Pola sesar Sumatra yang terjadi pada saat Oligosen ini akan mengalami reaktivasi kembali saat terjadi tektonik pada periode berikutnya sehingga nampak gambaran struktur geologi saat ini.

2. Potensi dan Kandungan

Berdasarkan kondisi geologi yang telah diuraikan di atas, maka potensi kandungan mineral dan batuan di Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar berasal dari material vulkanik/gunungapi yang antara lain berupa lava atau berupa batuan beku andesitik-basaltik, batuan piroklastik yang berupa breksi gunungapi (breksi piroklastik), tuf lapilli, tuf kasar dan tuf halus, batuan epiklastik yang berupa konglomerat, breksi epiklastik/breksi lahar, pasir kasar dan pasir halus. Material vulkanik tersebut sangat bermanfaat sebagai material yang digunakan

untuk pembangunan infrastruktur. Potensi lainnya adalah energi panas bumi yang dicerminkan oleh kemunculan mata air panas yang terkait dengan keberadaan gunungapi yang ada di daerah Kabupaten Rejang Lebong, namun masih perlu penelitian eksplorasi lebih lanjut mengenai potensi panas buminya. Selain itu karena material tanah berasal dari bahan vulkanik, maka mempunyai potensi kesuburan tanah yang tinggi yang dicirikan oleh keberadaan unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman.

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang sebagian besar tersusun oleh batuan vulkanik Kwartir umumnya mempunyai banyak sumber air baik berupa danau atau air terjun (18 lokasi) yang sangat bermanfaat untuk irigasi pertanian, sumber air baku, dan pembangkit listrik mikrohidro. Disamping itu, terdapat potensi negatif yang berupa ancaman/rawan kegiatan gunungapi, tanah longsor karena tanahnya cukup tebal akibat pelapukan hidrotermal, dan kegempaan yang perlu diwaspadai karena dekat dengan zona sesar Sumatra, khususnya sesar Musi Keruh dan sesar Ketaun. Perlu dipetakan dan diwaspadai kemungkinan adanya sesar-sesar aktif di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, khususnya disebelah barat laut Kota Curup, sebagai usaha mitigasi bencana gempabumi tektonik sebelum bencana terjadi sehingga dapat dipersiapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasinya.

e. Hidrologi

Berdasarkan data yang diperoleh BPS Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa kondisi hidrologi di Kabupaten Rejang Lebong dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tipe iklim dan curah hujan. Dalam hal ini, kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap keadaan aliran, debit sungai/mata air dan air tanah.

1. Daerah Aliran Sungai

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dilalui oleh beberapa hulu sungai besar, yaitu Hulu Sungai Musi yang berada di Kecamatan Selupu Rejang mengalir dari Timur menuju ke Laut Cina Selatan, Hulu Sungai Kelingi yang berada di Kecamatan Binduriang mengalir dari utara menuju Sungai Musi, Anak Sungai Kelingi yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding yang mengalir dari utara menuju Sungai Kelingi, Anak Sungai Beliti yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding yang mengalir dari utara menuju Sungai Musi dan Anak Sungai Kesiho di Kecamatan Sindang Beliti Ulu mengalir dari utara menuju Sungai Musi. Sebagian besar sungai tersebut banyak dipergunakan untuk kepentingan penduduk sebagai tempat kegiatan mandi, cuci, dan irigasi.

2. Air Tanah

Kabupaten Rejang Lebong berada di kawasan pegunungan sehingga terdapat banyak mata air. Selain itu, Kabupaten Rejang Lebong mayoritas berada pada daerah yang mempunyai akuifer air tanah dengan produktifitas sedang sampai tinggi (tipe B2 dan B3), daerah ini umumnya

berada pada daerah-daerah dataran atau bergelombang, sedangkan wilayah yang berada pada akuifer dengan produktifitas rendah/air tanah langka (tipe C4) umumnya berada pada daerah-daerah perbukitan.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumberdaya air yaitu dengan memperhatikan sifat fisik dan batuan yang merupakan faktor yang mempengaruhi air bisa meresap kedalam tanah, luas daerah resapan dan lama waktu peresapan serta curah hujan. Kemudian, untuk menambah waktu peresapan air, dibutuhkan adanya tumbuh-tumbuhan.

f. Klimatologi

Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di wilayah Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi di bulan Desember-Maret dan musim kemarau yang terjadi di bulan Juni-September. Sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan atau pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Secara umum, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah beriklim tropis basah dengan suhu udara rata-rata 23,9°C. Kabupaten Rejang Lebong memiliki suhu udara minimum 22,9°C dan suhu udara maksimum 24,8°C dengan kelembaban udara berkisar antara 80 persen sampai 92 persen.

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data citra Tahun 2019, yang tercantum dalam draft laporan akhir revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2044, penggunaan lahan di Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar untuk lahan perkebunan dengan luas 101.979,65 Ha (65,78%). Untuk lebih jelasnya pola penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Jenis Peruntukan	Peruntukan Eksisting (Ha)	Persentase (%)
1	Badan Air	335,81	0,22
2	Belukar	83,53	0,05
3	Belukar Rawa	5,38	0,003
4	Hutan Alam	38.464,63	24,81
5	Kawah	196,94	0,13
6	Perkebunan	101.979,65	68,78
7	Permukiman	3.004,95	1,94
8	Pertanian Lahan Kering	7.214,19	4,65
9	Sawah	3.238,76	2,09
10	Tanah Terbuka	502,69	0,32
Total Luas		155.026,53	100,00

Sumber: Laporan Draft Akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024-2044; DPUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Kawasan perkebunan banyak ditemui di bagian timur dan barat Kabupaten Rejang Lebong. Adapun beberapa Kecamatan dengan kawasan perkebunan terluas yakni Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Sindang Beliti Ulu dan Kecamatan Bermani Ulu. Selanjutnya, terdapat beberapa kecamatan yang didominasi oleh hutan alam diantaranya Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

Pada bagian tengah memanjang ke selatan wilayah Kabupaten Rejang Lebong, peruntukan berupa pertanian lahan kering terlihat cukup mendominasi, terutama di Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Dataran, Sindang Kelingi, Bermani Ulu Raya dan sebagian Kecamatan Bermani Ulu. Sementara itu, peruntukan pertanian lahan basah seperti sawah sebagian besar berada di daerah dataran seperti Kecamatan Curup Utara, Curup Selatan, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya dan sebagian kecil berada di Kecamatan Curup, Curup Timur, Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Selupu Rejang dan Sindang Beliti Ilir. Selanjutnya, persebaran permukiman dapat dikatakan hampir tersebar diseluruh wilayah terutama pada wilayah dengan topografi datar atau tersebar memanjang mengikuti jalan.

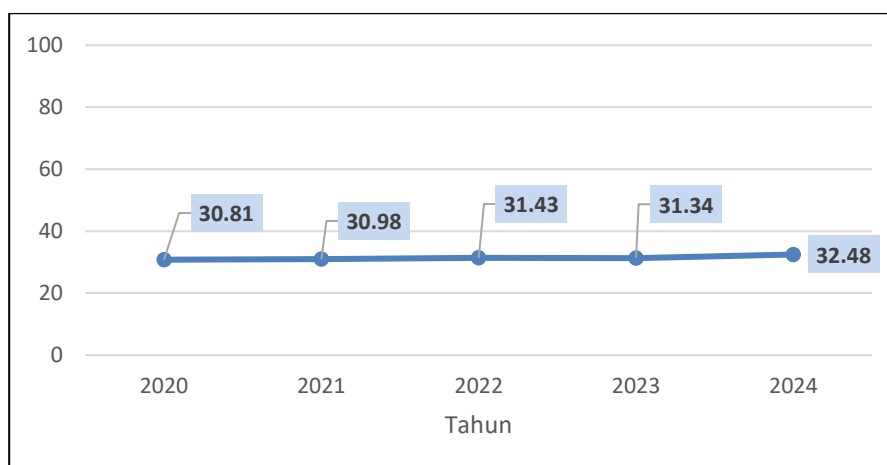
h. Sumber Daya Hutan

Sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh kawasan hutan, baik hutan dengan fungsi lindung maupun hutan dalam fungsi budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, kawasan hutan lindung di Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas kurang lebih 25.248 hektare yang meliputi hutan lindung Bukit Daun seluas 1.973 hektare, Hutan Lindung Rimbo Pengadang berada di sekitar Bermani Ulu seluas 3.158 hektare, Hutan Lindung Bukit Balai Rejang yang berada di sekitar Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang seluas 16.754 hektare, serta kawasan dengan kemiringan lereng > 40 persen seluas 3.363 hektare dimana sebarannya terdapat di Kecamatan Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding dan Sindang Beliti Ulu. Sementara itu, kawasan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong adalah kawasan hutan produksi terbatas Bukit Basa seluas 125 hektare dengan sebarannya berada di Kecamatan Curup Utara.

Sumber daya hutan yang melimpah di Kabupaten Rejang Lebong ini dapat mendorong perekonomian masyarakat mulai dari hasil hutan seperti kayu, hasil hutan non kayu, dan juga pemanfaatan sektor wisata alam dan penelitian. Hal ini dapat terjadi dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan daerah berbasis hutan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020, sektor ini mencatat kontribusi sebesar 30,81 persen, dan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 32,48 persen pada tahun 2024. Capaian ini menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang terbesar terhadap struktur PDRB Kabupaten Rejang Lebong, melampaui sektor-sektor lainnya. Dominasi sektor ini mencerminkan karakteristik dan potensi wilayah Rejang Lebong yang secara geografis terletak di dataran tinggi, dengan kondisi agroklimat yang sangat mendukung aktivitas pertanian, khususnya tanaman hortikultura.



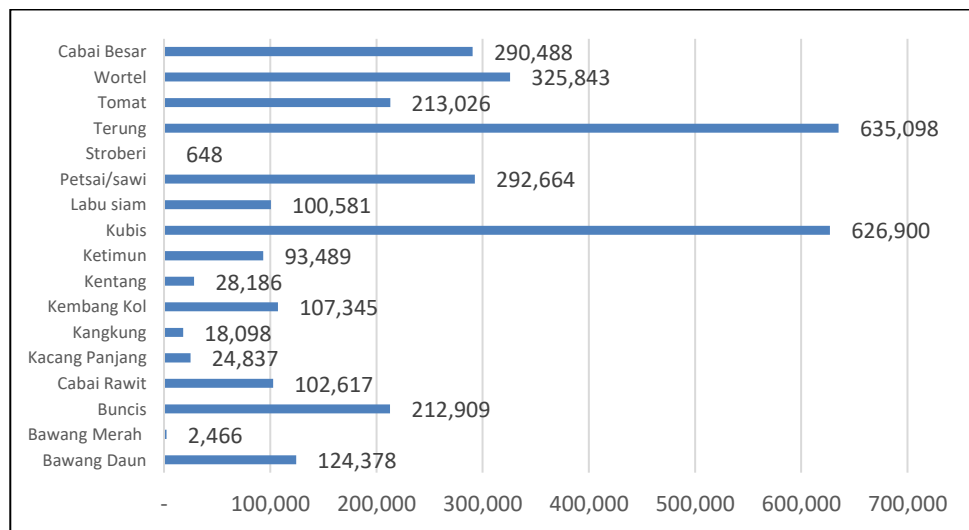
Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2. 2
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Potensi pertanian yang besar di Kabupaten Rejang Lebong yaitu produksi sayuran dan buah-buahan. Komoditas unggulan seperti kubis dan terong menjadi tulang punggung produksi pertanian, meskipun produksi kubis mengalami penurunan sebesar 9% selama enam tahun terakhir. Di sisi lain, produksi bawang merah meningkat signifikan hingga 1.357%, menunjukkan adanya diversifikasi komoditas yang berhasil. Selain itu, pertumbuhan ini juga mengindikasikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sektor yang relatif tangguh dan resilien terhadap tekanan ekonomi, termasuk selama masa pandemi COVID-19. Keberlanjutan kontribusi tinggi dari sektor ini tidak hanya penting bagi ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui modernisasi pertanian, peningkatan infrastruktur irigasi, akses pasar, serta inovasi teknologi pertanian. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian sebagai sektor unggulan perlu terus didorong secara strategis agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Rejang Lebong secara berkelanjutan.

a. Pertanian dan Perkebunan

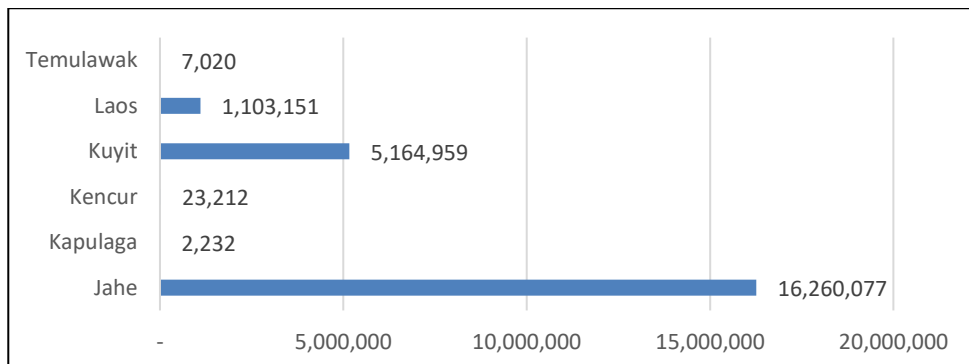
Sektor pertanian adalah bagian penting dari ekonomi Kabupaten Rejang Lebong karena merupakan sektor utama yang berkontribusi terbesar pada pembentukan PDRB. Produksi hortikultura, seperti sayuran dan buah-buahan, sangat beragam di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Rejang Lebong dalam Angka Tahun 2025 Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah penghasil sayuran. Pada tahun 2024 tercatat untuk hortikultura bawang merah sebanyak 2.466 kuintal, cabai merah 290.488 kuintal, kentang 28.186 kuintal, kubis mencapai 626.900 kuintal, petsai 292.664 kuintal, tomat 213.026 kuintal, bawang daun 124.378 kuintal, terong 635.098 kuintal, buncis 212.909 kuintal, cabe rawit 102.617 kuintal dan kacang panjang, 24.837 kuintal.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2.3
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 (Kuintal)

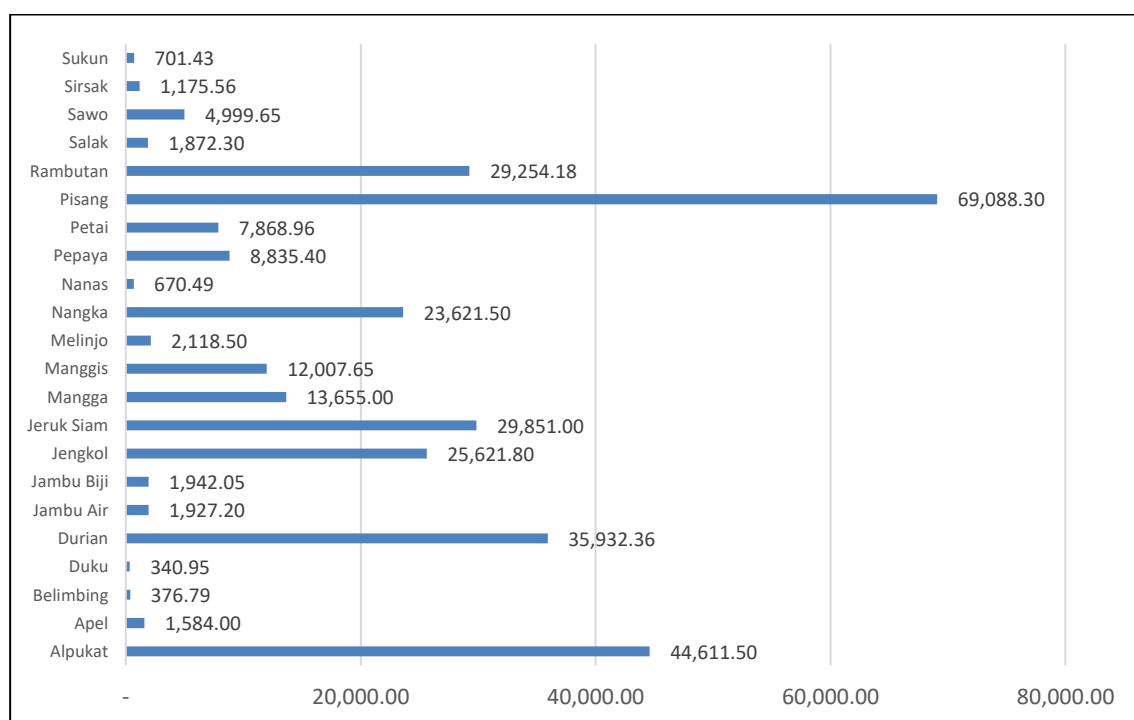
Untuk tanaman biofarmaka, produksi terbanyak ada pada komoditas jahe yaitu mencapai 16.260.077 Kg. Produksi terkecil adalah komoditas kapulaga dengan produksi sebesar 2.232 Kg pada tahun 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2.4
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 (kg)

Sedangkan untuk tanaman buah-buahan, produksi terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong adalah buah pisang 69.088,30 kuintal di Kecamatan Padang Ulak Tanding, alpukat 44.611,50 kuintal di Kecamatan Sindang Dataran, durian mencapai 35.932,36 kuintal di Kecamatan Padang Ulak Tanding, dan Jeruk siam 29.851 kuintal di Kecamatan Bermani Ulu Raya. Selama bertahun-tahun, Kabupaten Rejang Lebong telah berfungsi sebagai penyuplai utama kebutuhan sayur-sayuran dan buah-buahan Provinsi Bengkulu, bahkan hingga keluar provinsi.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2. 5
Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 (Kuintal)

Luasan perkebunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 yaitu sebesar 41.096,77 Ha atau sekitar 26,51% dari luasan Kabupaten Rejang Lebong. Luasan Perkebunan ini didominasi oleh jenis tanaman kopi yaitu sebesar 29.854,5 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Rejang Lebong. Produksi Perkebunan tahun 2024 tertinggi juga pada jenis tanaman kopi yaitu sebesar 14.826,89 ton. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kopi masih menjadi tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Rejang Lebong. Tanaman Perkebunan unggulan lainnya yaitu karet dan aren dengan total luas areal tanaman sebesar 9.510 hektare dan 2.301,95 hektare dengan total produksi 4.429 ton dan 5.861,57 ton.

Tabel 2. 6
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Rejang Lebong (Ton)

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Tahunan					
Karet	4463,74	4447,49	4358,63	4347,11	4429
Kelapa	188,426	190,251	186,427	189,42	194,79
Kelapa Sawit	1092,55	1156,1	1445,1	6515,8	6617,45
Kopi	18604,705	18797,351	16561,834	13721,081	14826,89
Kakao	205,385	203,835	36,81	35,2	36,39
Teh	0	0	0	0	0
Jambu Mete	0	0	0	0	0
Pala	5,295	5,315	5,315	0,301	n/a
Lada	95,288	95,838	88,175	54,638	81,945
Karet	4463,74	4447,49	4358,63	4347,11	4429
Kelapa	188,426	190,251	186,427	189,42	194,79
Aren	n/a	n/a	n/a	n/a	5861,57
Tanaman Semusim					
Tebu	0	0	0	0	0
Tembakau	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

b. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Rejang Lebong, meskipun lebih dikenal dengan kondisi geografis pegunungan, memiliki potensi perikanan skala kecil yang dapat dikembangkan, terutama di sungai dan danau. Produksi perikanan pada sektor perikanan tangkap dengan sebesar 5.888,19 ton pada tahun 2024, terlihat pada Tabel 2.6 bahwa produksi kolam air deras paling banyak dibandingkan dengan jenis usaha kolam lainnya dengan produksi sebesar 4.547,13 ton pada tahun 2024.

Tabel 2. 7
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha (ton)
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)				
		Kolam Air Deras	Kolam Air Tenang	Kolam Terpal/ Fiber	Jaring Apung	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Curup Kota	42	33,5	20.10	-	95,60
2	Curup Utara	139,2	38,3	23.40	42	242,90
3	Curup Timur	-	35,1	27.72	-	62,82
4	Curup Selatan	122,67	127,35	40.95	-	290,97
5	Curup Tengah	-	55,23	17.11	-	72,34
6	Sindang Kelingi	-	5,04	1.79	-	6,83
7	Sindang Dataran	-	-	-	-	-
8	Kota Padang	119,9	59,06	-	-	178,96
9	Sindang Beliti Ilir	-	3,7	-	-	3,70

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)				
		Kolam Air Deras	Kolam Air Tenang	Kolam Terpal/Fiber	Jaring Apung	Jumlah
10	Sindang Beliti Ulu	-	-	-	-	-
11	Bermani Ulu	-	68,42	25.50	-	93,92
12	Bermani Ulu Raya	9,46	104,19	24.15	-	137,80
13	Padang Ulak Tanding	4113,9	443,3	130.93	-	4.688,13
14	Binduriang	-	-	-	-	-
15	Selupu Rejang	-	-	14.23	-	14,23
Jumlah		4.547,13	973,19	325,87	42	5.888.19

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, 2025

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Air

Hasil analisis yang dilakukan status daya dukung air di Kabupaten Rejang Lebong hanya 1% yang sudah terlampaui, 99% lainnya belum terlampaui.

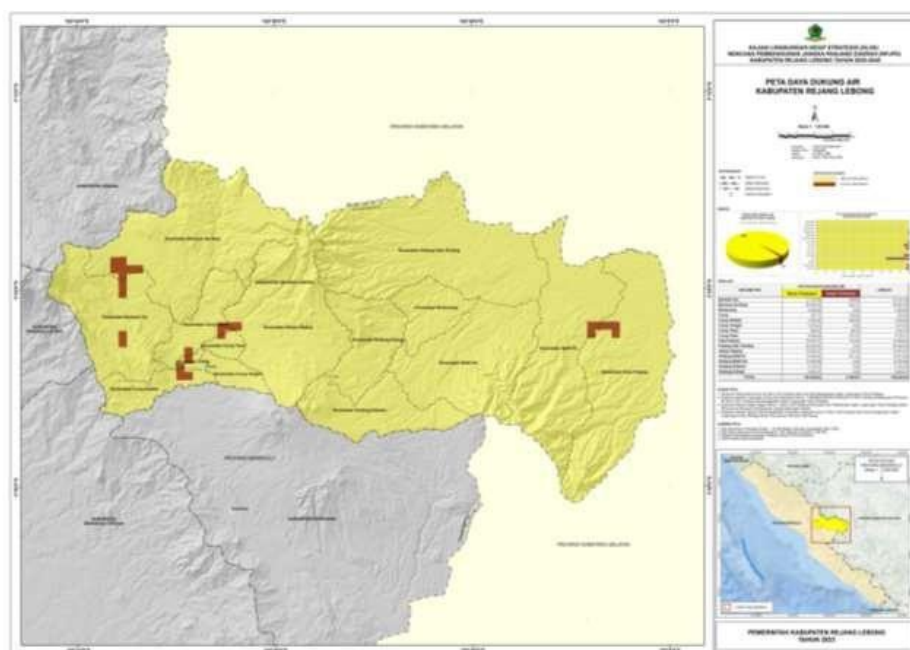
Tabel 2. 8
Status Daya Dukung Air di Kabupaten Rejang Lebong

KECAMATAN	STATUS DAYA DUKUNG AIR		JUMLAH
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bermani Ulu	11.741,66	399,68	12.141,34
Bermani Ulu Raya	20.305,00	542,27	20.847,28
Binduriang	4.459,20	0,00	4.459,20
Curup	391,71	130,92	522,63
Curup Selatan	3.392,46	206,96	3.599,42
Curup Tengah	1.910,23	0,00	1.910,23
Curup Timur	994,57	40,79	1.035,35
Curup Utara	4.444,64	275,57	4.720,21
Kota Padang	18.787,37	312,46	19.099,83
Padang Ulak Tanding	24.362,45	0,00	24.362,45
Selupu Rejang	16.456,37	116,50	16.572,87
Sindang Beliti Ilir	16.609,60	201,36	16.810,96
Sindang Beliti Ulu	14.364,98	0,00	14.364,98
Sindang Dataran	8.102,23	0,00	8.102,23
Sindang Kelingi	6.903,07	0,00	6.903,07
TOTAL	153.225,53	2.226,51	155.452,04

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029, DLH 2025

Air permukaan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong adalah air yang terdapat di sungai, rawa, cekungan, danau/situ, serta sungai-sungai seperti Aek Kelingi, Aek Kati, Aek Semumai, Aek Musi, Aek Meles, Aek Bliti, Aek Dondan dan Aek Kati. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dan bermuara di Sungai Musi, Sungai Kati dan Sungai Semumai yang merupakan tiga sungai besar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Secara makro sungai/anak sungai tersebut merupakan Wilayah Aliran Sungai (WAS) Musi dan Sub-WAS Semumai dan Kati. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber utama air untuk kepentingan irigasi pada lahan-lahan pertanian.

Sumber air baku air permukaan yang saat ini dimanfaatkan sebagai sumber air bersih adalah dari Sungai Air Musi Kejalo terdapat di kecamatan Selupu Rejang, mempunyai debit 13.356 lt/det dengan elevasi 779 mdpl. Secara umum, dilihat dari ketersediaan dan penggunaan air di Kabupaten Rejang Lebong, daya dukung air belum terlampaui. Mata air (eksisting) saat ini yang masih dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Dharma sebagai sumber air minum di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Mata Air Bulak, Mata Air Suban Ayam, Mata Air Meles Atas, Mata Air Meles Bawah dan Mata Air Suban Air Panas. Kondisi tersebut dapat dilihat pada peta berikut.



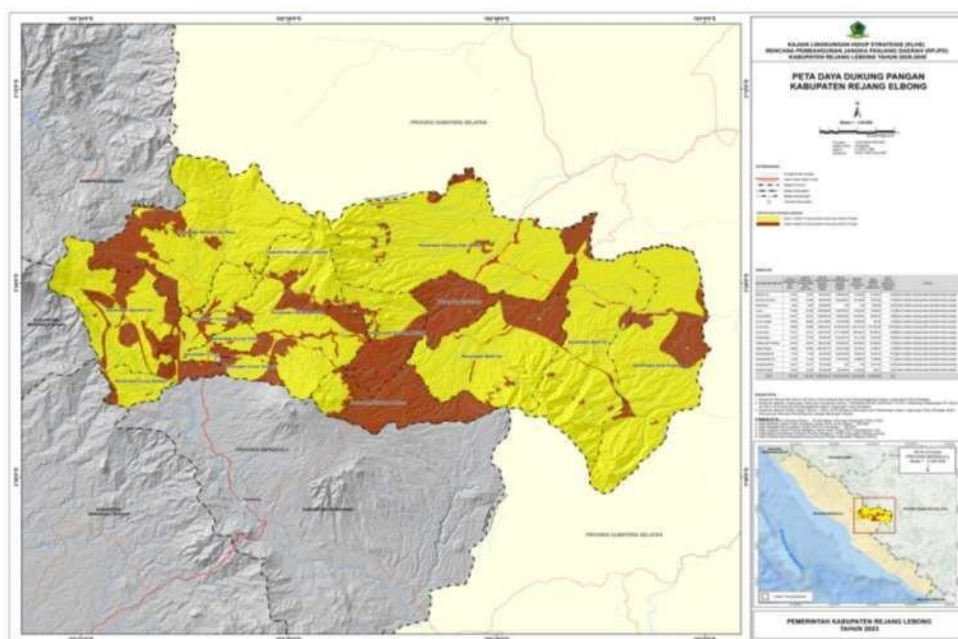
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029

Gambar 2. 6
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Rejang Lebong

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia bahan pangan (P1) berkaitan dengan kemampuan ekosistem secara alamiah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan ekosistem untuk manusia meliputi segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati, seperti tanaman dan hewan, maupun berasal dari air, yaitu berupa ikan, Faktor utama yang mempengaruhi

kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah ekoregion bentang lahan dan tutupan lahan. Ekoregion bentang lahan yang memiliki karakteristik kesuburan tanah yang tinggi, seperti dataran aluvial, cenderung akan memiliki potensi terhadap penyediaan pangan yang tinggi karena menjadi tempat yang sesuai untuk tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Selain ekoregion bentang lahan, tutupan vegetasi juga menentukan tingkat kemampuan ekosistem dalam menyediakan bahan pangan bagi manusia. Semakin rapat tutupan lahan, maka semakin besar pula potensi penyediaan bahan pangan yang dapat dihasilkan oleh ekosistem karena keberadaan berbagai macam jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan. Kondisi tersebut dapat kita lihat sebagaimana peta dan tabel berikut ini.



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029

Gambar 2. 7
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Rejang Lebong

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong belum melampaui ambang batas kebutuhan bahan pangan.

Tabel 2. 9
Daya Dukung Pangan Kabupaten Rejang Lebong

WILAYAH KECAMATAN	JP BPS (Jiwa)	JP SISTEM GRID (Jiwa) (150 X 150)	JUMLAH KEBUTUHAN BAHAN PANGAN (Kg/Th)	JUMLAH KETRSEDIAAN BAHAN PANGAN (Kg/Th)	AMBANG BATAS PENDUDUK (Jiwa)	NILAI AMBANG BATAS PENDUDUK	NILAI STATUS KEBUTUHAN BAHAN PANGAN	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bermani Ulu	13.907	13.907	964.450,45	4.288.982,29	61.845,45	47.938,45	4,45	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Bermani Ulu Raya	12.054	12.054	835.944,90	6.042.224,37	87.126,52	75.072,52	7,23	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan

WILAYAH KECAMATAN	JP BPS (Jiwa)	JP SISTEM GRID (Jiwa) (150 X 150)	JUMLAH KEBUTUHAN BAHAN PANGAN (Kg/Th)	JUMLAH KETRSEDIAAN BAHAN PANGAN (Kg/Th)	AMBANG BATAS PENDUDUK (Jiwa)	NILAI AMBANG BATAS PENDUDUK	NILAI STATUS KEBUTUHAN BAHAN PANGAN	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Binduriang	9.032	9.032	626.369,20	0,00	0,00	-9.032,00	0,00	Sudah melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Curup	27.093	27.093	1.878.899,55	3.020.275,51	43.551,20	16.458,20	1,61	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Curup Selatan	24.037	24.037	1.666.965,95	7.628.556,04	110.000,81	85.963,81	4,58	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Curup Tengah	35.094	35.094	2.433.768,90	2.470.818,89	35.628,25	534,25	1,02	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Curup Timur	26.690	26.690	1.850.951,50	94.159.342,38	1.357.741,06	1.331.051,06	50,87	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Curup Utara	19.311	19.311	1.339.217,85	12.715.289,05	183.349,51	164.038,51	9,49	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Kota Padang	12.473	12.473	865.002,55	2.504.497,92	36.113,89	23.640,89	2,90	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Padang Ulak Tanding	20.076	20.076	1.392.270,60	9.404.250,47	135.605,63	115.529,63	6,75	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Selupu Rejang	36.942	36.942	2.561.927,70	5.494.778,69	79.232,57	42.290,57	2,14	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Sindang Beliti Ilir	9.164	9.164	635.523,40	2.294.109,39	33.080,16	23.916,16	3,61	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Sindang Beliti Ulu	11.440	11.440	793.364,00	1.720.479,64	24.808,65	13.368,65	2,17	Belum melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Sindang Dataran	10.417	10.417	722.418,95	0,00	0,00	-10.417,00	0,00	Sudah melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
Sindang Kelingi	13.515	13.515	937.265,25	902.400,30	13.012,26	-502,74	0,96	Sudah melebihi ambang batas kebutuhan bahan pangan
TOTAL	281.245	281.245	19.504.340,75	152.646.004,92	2.201.095,96	1.919.850,96	97,78	

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029

Tabel dibawah menyajikan klasifikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berdasarkan berbagai jasa penyediaan lingkungan di wilayah tersebut. Data ini memberikan dasar evaluasi terhadap ketersediaan layanan lingkungan sekaligus mengidentifikasi tantangan yang harus dihadapi agar seluruh sektor dapat berfungsi optimal tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

Tabel 2. 10
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Berdasarkan Jasa
Penyediaan di Kabupaten Rejang Lebong (%)

Jasa Penyediaan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemurnian Air	19,9	4,2	33,5	28,2	22,3
Air Bersih	30,1	26,6	22,0	20,4	0,9
Iklim	22,2	20,7	22,0	23,7	6,4
Tata Aliran dan Banjir	19,9	4,2	33,5	28,2	14,1
Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	21,0	3,0	3,2	43,2	29,6
Biodiversitas	16,8	28,0	21,3	7,7	27,2
Pengelolaan dan Penguraian Limbah	27,2	7,7	21,3	28,0	16,8

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, DLH 2025

Berdasarkan Tabel di atas, klasifikasi DDDTLH untuk jasa penyediaan lingkungan menunjukkan distribusi ketersediaan layanan di berbagai sektor yang esensial untuk pembangunan berkelanjutan. Misalnya, jasa biodiversitas menunjukkan proporsi signifikan pada kategori tinggi sebesar 28%, yang mengindikasikan perhatian serius terhadap pelestarian lingkungan dan pentingnya menjaga daya dukung kawasan. Jasa air bersih memiliki persentase tertinggi pada kategori sangat tinggi (30,1%), menggambarkan pemenuhan kebutuhan air bersih yang krusial bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, pengelolaan iklim yang menunjukkan nilai tinggi sebesar 22,2% menandakan komitmen terhadap isu perubahan iklim, sebuah tantangan global yang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, sektor pencegahan dan perlindungan bencana alam masih menghadapi tantangan serius, dengan 43,2% diklasifikasikan pada kategori rendah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kewaspadaan, upaya pencegahan, serta penanggulangan bencana yang lebih efektif. Sektor tata aliran dan banjir dengan 14,1% pada kategori sangat rendah juga menuntut pengelolaan yang lebih optimal untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan risiko kerusakan akibat bencana.

Secara keseluruhan, Tabel di atas menunjukkan kemajuan dalam penyediaan jasa lingkungan, tetapi beberapa sektor masih membutuhkan perhatian intensif agar pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan secara menyeluruh. Salah satu fokus utama dalam pengelolaan lingkungan adalah konservasi hutan dan lahan secara berkelanjutan. Upaya preventif untuk mencegah degradasi lahan dan deforestasi melalui praktik reboisasi serta rehabilitasi lahan kritis sangat krusial. Keberlanjutan hutan dan lahan tidak hanya berdampak positif pada kualitas lingkungan, tetapi juga menjaga ekosistem pendukung kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Konservasi Daerah

Aliran Sungai (DAS) menjadi upaya strategis untuk melestarikan sumber daya air tersebut.

Di sisi lain, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan harus menjadi prioritas utama guna mempertahankan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan pengelolaan limbah domestik, industri, dan pertanian dapat mengurangi dampak pencemaran terhadap air, tanah, dan udara. Fokus utama perlu diberikan pada pengolahan limbah cair dan padat serta pengembangan praktik daur ulang yang efektif. Implementasi kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya juga sangat penting untuk menjaga kualitas udara di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan pengawasan dan monitoring kualitas lingkungan yang ketat, pemerintah daerah dapat dengan cepat mendeteksi dan menanggulangi pencemaran, yang sekaligus akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat.

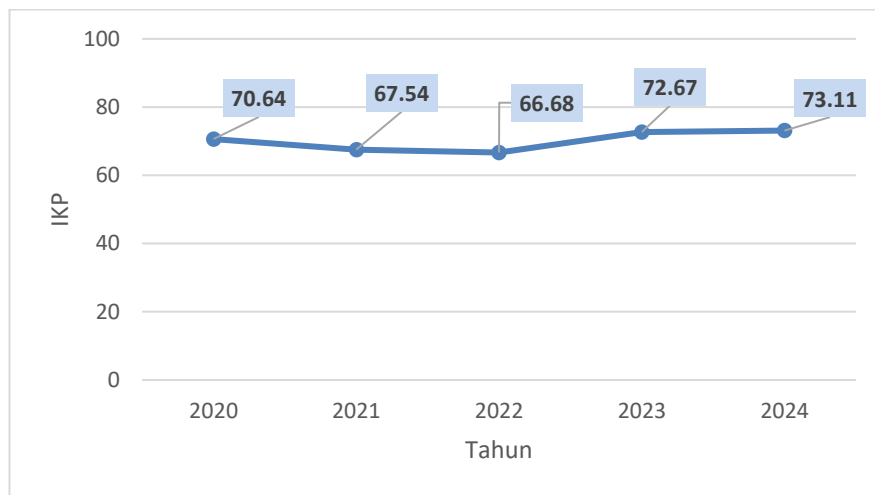
Lebih lanjut, pengembangan energi terbarukan merupakan isu strategis nasional yang harus diimplementasikan di tingkat daerah, khususnya dalam rangka mendukung konservasi sumber daya alam. Promosi penggunaan energi surya dan angin berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang menjadi penyumbang utama pencemaran dan perubahan iklim. Selain itu, pemanfaatan biomassa dan biogas dari limbah pertanian serta peternakan dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Implementasi pengembangan energi terbarukan perlu diiringi dengan penataan ruang yang berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Penetapan zonasi yang jelas bagi berbagai fungsi penggunaan lahan dapat mencegah konflik pemanfaatan lahan yang selama ini kerap terjadi. Kawasan lindung dan konservasi harus diperkuat untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem penting di Kabupaten Rejang Lebong. Di sisi lain, pengembangan infrastruktur hijau, seperti taman kota dan ruang terbuka hijau, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian

a. Ketahanan Pangan

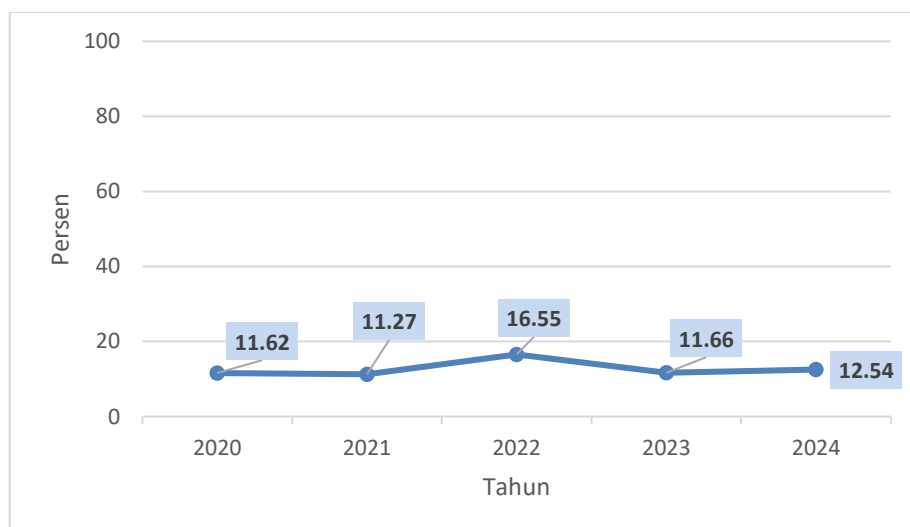
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah salah satu indikator penting yang menggambarkan stabilitas pasokan dan aksesibilitas pangan di suatu wilayah. Dari 2020 hingga 2022, Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan IKP, dari 70,64 menjadi 66,68. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan signifikan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan, seperti perubahan iklim, gangguan distribusi, dan harga pangan yang tidak stabil. Namun, pada 2023, IKP kembali meningkat menjadi 72,67 dan meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 73,11, hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam sistem produksi dan distribusi pangan lokal. Ketahanan pangan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada aksesibilitas dan keterjangkauan pangan bagi semua lapisan masyarakat.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2. 8
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong

Untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, pemerintah perlu bekerja sama dengan petani, pemangku kepentingan, dan industri terkait dalam mengembangkan teknologi pertanian yang inovatif, memperluas akses pasar, serta menjaga harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi yang lebih luas.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2. 9
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan data prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi konsumsi pangan masyarakat menunjukkan tren yang tidak stabil. Meskipun terjadi perbaikan pada beberapa tahun, lonjakan signifikan di tahun 2022 dan kenaikan kembali pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masalah ketidacukupan konsumsi pangan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara serius. Ketidakstabilan ini mencerminkan adanya kerentanan dalam sistem ketahanan

pangan daerah, baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan, maupun keterjangkauan pangan bergizi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terpadu dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kecukupan konsumsi pangan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, agar kualitas gizi dan kesejahteraan penduduk dapat terjamin secara merata dan berkelanjutan.

b. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur jumlah rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu di suatu wilayah dalam satu tahun. Pengeluaran ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Pengeluaran perkapita penting untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, dan perubahannya dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah serta daya beli penduduknya. Meningkatnya pengeluaran perkapita umumnya dianggap sebagai tanda positif dari peningkatan kesejahteraan, namun perlu juga memperhatikan faktor inflasi yang dapat memengaruhi nilai pengeluaran tersebut.

Tabel 2. 11
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional
Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rejang Lebong	10.234	10.323	10.547	10.848	11.385
2	Pengeluaran Perkapita Provinsi Bengkulu	10.380	10.487	10.840	11.172	11.733
3	Pengeluaran Perkapita Indonesia	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong; BPS Provinsi Bengkulu; BPS Indonesia, 2025.

Tingkat pengeluaran per kapita di Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari Rp. 10.234 pada tahun 2020 menjadi Rp. 11.385 pada tahun 2024. Meskipun demikian, nilai ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu dan nasional, yang masing-masing mencapai Rp. 11.733 dan Rp. 12.341 pada tahun 2024. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan daya beli masyarakat Rejang Lebong dibandingkan dengan rata-rata regional dan nasional. Namun, peningkatan pengeluaran per kapita yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan adanya perbaikan ekonomi rumah tangga yang dapat dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber penghasilan, program pemberdayaan masyarakat, serta stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok. Kenaikan ini juga mencerminkan perbaikan pada aspek konsumsi dan kesejahteraan masyarakat secara umum, meskipun perlu perhatian khusus dalam memperkuat struktur ekonomi lokal agar daya beli masyarakat semakin mendekati atau melampaui rata-rata provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas

masyarakat, penguatan sektor-sektor unggulan daerah, dan pemerataan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata dan inklusif.

Peningkatan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 4% sebagai indikator aktivitas ekonomi yang sehat. Di sisi lain, stabilnya Rasio gini di kisaran 0,3 pada tahun 2022–2023, yang kemudian menunjukkan tren penurunan pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran per kapita tidak hanya menggambarkan pertumbuhan konsumsi, tetapi juga mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata, yang pada akhirnya mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong.

c. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Dalam hal pelayanan dasar, Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum (SPAM). Pada tahun 2024, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap SPAM baru mencapai 45,46%. Artinya, lebih dari separuh penduduk masih bergantung pada sumber air alternatif seperti sumur gali, mata air, atau air hujan yang belum tentu memenuhi standar kualitas air minum. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya cakupan jaringan air minum yang dikelola secara sistematis. Sementara itu, tabel dibawah menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 56,37% rumah tangga telah memiliki akses terhadap air minum layak, meskipun angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 57,25%. Penurunan ini mengindikasikan belum konsistennya pemenuhan standar layanan air minum yang layak, baik dari sisi kualitas maupun keberlanjutan layanan. Dengan demikian, rendahnya akses terhadap SPAM dan fluktuasi akses air minum layak mencerminkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur air bersih, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Upaya ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang air bersih dan sanitasi.

Tabel 2. 12
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Persen	45,24	65,07	57,25	56,37	45,46

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu pondasi penting bagi keberlanjutan Pembangunan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi

awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Selama lima tahun terakhir, IKLH di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren yang membaik, mencerminkan keberhasilan sejumlah intervensi pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan air bersih dan perlindungan sumber daya air. Indeks Kualitas Udara juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dari 86,12 hingga 92,76.

Selain itu, seluruh pelaku usaha di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan prosedur pengelolaan limbah industri dan domestik pada 2022 hingga 2023, mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang lebih baik, namun kembali menurun di tahun 2024 menjadi 70%. Persentase pengolahan sampah juga meningkat hingga 72,66% pada 2023 namun kembali menurun di tahun 2024 menjadi 42,87%. Upaya peningkatan kesadaran lingkungan perlu terus didorong untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang pada akhirnya akan mendukung kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Tabel 2. 13
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	65,61	66,50	69,12	69,53	71,09
2	Indeks Kualitas air	Indeks	56,1	58,33	63,33	61,67	56,2
3	Indeks Kualitas udara	Indeks	86,12	86,56	88,41	89,58	92,76
4	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan prosedur pengolahan limbah industri dan domestik	Persen	80	72,20	100	100	70
5	Persentase pengelolaan persampahan	Persen	43,80	42,53	47,88	72,66	42,87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong penting menyusun strategi untuk meningkatkan persentase pengelolaan persampahan seperti penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan infrastruktur dan sarana persampahan, penguatan edukasi, sosialisasi dan perubahan perilaku, pemanfaatan teknologi dan inovasi, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Berdasarkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tercatat sebesar 64,41%. Sementara itu, tingkat akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah pada tahun 2024 mencapai 76,61%.

Tabel 2. 14
Persentase Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	Persen	70,02	71,50	70,20	64,41	76,61

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, baik melalui sistem individual seperti tangki septik yang memenuhi syarat teknis, maupun melalui sistem terpusat. Persentase tersebut mencerminkan kemajuan yang cukup signifikan dalam penyediaan infrastruktur sanitasi, meskipun masih terdapat sekitar 23,39% penduduk yang belum terlayani secara optimal. Ketimpangan ini, ditambah dengan masih rendahnya akses terhadap sanitasi layak, dapat menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu untuk memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi yang ada, serta mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan pengelolaan air limbah menjadi elemen krusial dalam strategi pembangunan daerah, guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan dinamika penurunan dan fluktuasi ringan. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 100,71, kemudian mengalami penurunan berturut-turut hingga mencapai 92,58 pada 2021. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana, seperti peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan penanganan risiko berbasis masyarakat. Namun, pada tahun 2022 terlihat sedikit peningkatan indeks dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 108,60. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum tren menurun, terdapat potensi risiko atau kerentanan yang muncul kembali dan perlu diwaspadai. Selanjutnya, pada tahun 2023 indeks kembali menurun menjadi 97,92, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir, sebelum naik lagi ke angka 112,35 pada tahun 2024. Hal ini diikuti dengan angka Indeks Ketahanan Daerah yang juga semakin membaik dari tahun ke tahun. Indeks ketahanan pada tahun 2024 menjadi 0.32 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,24 yang menunjukkan ketahanan yang lebih baik, dengan kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana yang lebih kuat.

Tabel 2. 15
Perkembangan Indeks Resiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	100,71	92,58	108,60	97,92	112,35
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	-	0,64	0,24	0,33	0,32

Sumber : Inarisk BNPB Indonesia, 2025

Dari tren ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun indeks risiko bencana cenderung menurun dalam jangka panjang, masih terdapat fluktuasi kecil yang menunjukkan bahwa risiko belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam strategi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat agar capaian yang telah diraih tidak mengalami kemunduran di masa mendatang.

2.1.1.7 Demografi

Analisis demografi merupakan pondasi penting dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Dengan memahami ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, perencanaan pembangunan dapat merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan. Faktor-faktor demografis seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan populasi memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah, serta membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebagai contoh, di wilayah dengan tingkat kelahiran yang tinggi, kebutuhan akan fasilitas kesehatan ibu dan anak serta layanan pendidikan sangat krusial. Di sisi lain, di wilayah dengan populasi lanjut usia yang meningkat, perencanaan perlu difokuskan pada infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang dapat mendukung kesejahteraan orang tua.

Data demografi juga menjadi dasar perencanaan untuk penyediaan fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, transportasi, dan layanan sosial lainnya. Misalnya, data terbaru dari Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menuntut adanya peningkatan infrastruktur pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Selain itu, data migrasi masuk dan keluar wilayah memberikan gambaran tentang dinamika tenaga kerja dan mobilitas sosial di masyarakat, yang sangat penting dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan. Di kawasan yang mengalami migrasi tenaga kerja keluar secara masif, perlu disiapkan strategi untuk menarik investasi lokal guna menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Perencanaan berbasis demografi tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan ekonomi dan sosial. Analisis distribusi penduduk membantu perencanaan dalam memetakan daerah yang perlu dikembangkan untuk memperkuat perekonomian lokal. Di

era digital saat ini, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi sangat penting. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia produktif di beberapa wilayah menunjukkan tren peningkatan yang membuka peluang untuk pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian modern, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan demikian, analisis demografi tidak hanya berperan dalam memetakan kebutuhan infrastruktur, tetapi juga dalam menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing wilayah.

a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah, karena jumlah, pertumbuhan, dan kepadatannya secara langsung memengaruhi kebutuhan terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, serta arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika kependudukan di Kabupaten Rejang Lebong menjadi bagian penting dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Berikut merupakan rincian jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 16
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Padang	12.412	12.436	12.473	12.518	12.552
Padang Ulak Tanding	19.781	19.917	20.076	20.395	20.602
Sindang Kelingi	13.366	13.433	13.515	13.289	13.161
Curup	26.971	27.017	27.093	26.815	26.762
Bermani Ulu	13.643	13.767	13.907	14.243	14.448
Selupu Rejang	36.045	36.459	36.924	38.758	39.703
Curup Utara	18.668	18.976	19.311	19.924	20.360
Curup Timur	25.787	26.220	26.690	27.546	28.156
Curup Selatan	23.355	23.680	24.037	24.733	25.208
Curup Tengah	34.935	34.995	35.094	34.954	34.957
Binduriang	8.919	8.971	9.032	9.194	9.287
Sindang Beliti Ulu	11.400	11.414	11.440	11.334	11.311
Sindang Dataran	10.417	10.438	10.417	10.471	10.488
Sindang Beliti Ilir	9.123	9.139	9.164	9.191	9.213
Bermani Ulu Raya	11.823	11.931	12.054	12.345	12.523
Kabupaten Rejang Lebong	276.645	278.793	281.281	285.710	288.832

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka, BPS 2020-2025

Tabel di atas menyajikan data jumlah penduduk di berbagai kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan jumlah penduduk di wilayah ini, meskipun terdapat variasi dalam pertumbuhan di setiap kecamatan.

Dari data yang ditampilkan, populasi di Kabupaten Rejang Lebong secara total meningkat dari 278.645 jiwa pada tahun 2020 menjadi 288.832 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan populasi ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup stabil, meskipun ada beberapa kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk.

Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dari tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Rejang Lebong juga memberikan gambaran penting tentang gambaran demografi wilayah ini.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

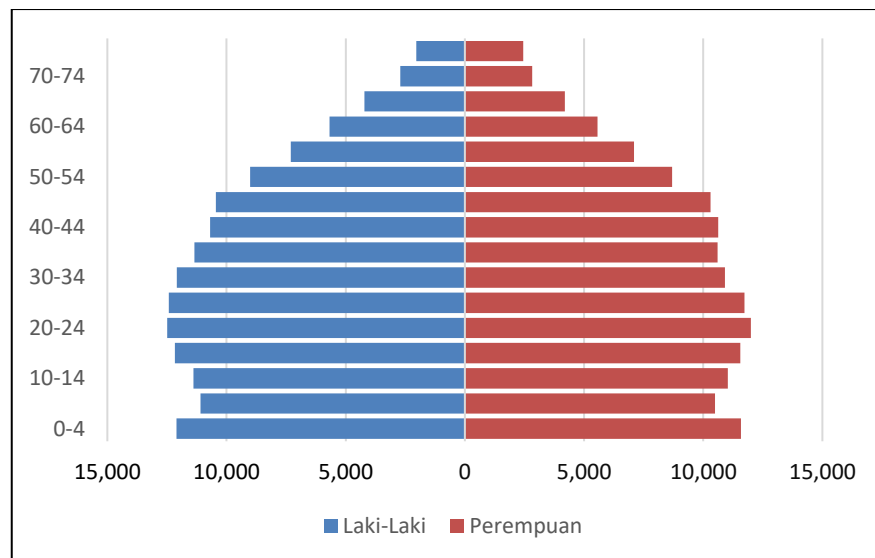
Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	141.341	142.493	143.645	145.397	147.148
Perempuan	135.304	136.814	138.324	140.004	141.684
Rasio Jenis Kelamin (Lk/Pr)	104,46	104,15	103,85	103,86	104,00

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka, BPS 2020-2025

Setiap tahun, jumlah penduduk baik laki-laki (Lk) maupun perempuan (Pr) menunjukkan peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, jumlah total laki-laki mencapai 141.341 orang dan perempuan 135.304 orang. Peningkatan ini terus berlanjut, dan pada tahun 2024, jumlah laki-laki menjadi 147.148 orang, sementara perempuan mencapai 141.684 orang. Rasio jenis kelamin menunjukkan dominasi laki-laki dengan nilai rasio yang sedikit menurun dari 104,46 pada tahun 2020 menjadi 103,86, akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 104,00. Perkembangan rasio tersebut membawa sejumlah dampak yang perlu diperhatikan dalam konteks sosial, ekonomi, maupun pembangunan daerah. Dalam aspek ekonomi, jumlah laki-laki yang relatif lebih tinggi dapat memperbesar ketersediaan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang umumnya didominasi laki-laki seperti pertanian, perkebunan, konstruksi, maupun perdagangan. Situasi ini tentu bisa menjadi peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi pada saat yang sama menuntut tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup agar tidak menimbulkan persaingan ketat dan meningkatkan angka pengangguran. Dalam jangka panjang, keseimbangan rasio jenis kelamin yang berada pada kisaran 100 hingga 104 dapat menjadi modal bagi Kabupaten Rejang Lebong untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi, dengan catatan bahwa pembangunan sumber daya manusia dilakukan secara merata dan berkeadilan bagi laki-laki maupun perempuan.

Struktur penduduk menurut komposisi umur cenderung menunjukkan Piramida Penduduk Ekspansif diperlihatkan dari kondisi penduduk yang ditandai dengan tingkat kelahiran lebih tinggi dari angka kematian, komposisi penduduk muda lebih besar dari penduduk usia tua. Selain itu, terlihat pula bahwa Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah penduduk usia produktif lebih

banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki laki cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan pada tahun 2024 dengan selisih sekitar 5.464 jiwa orang. Jumlah penduduk usia produktif yang dominan menunjukkan adanya potensi sumberdaya manusia yang cukup besar dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka peningkatan keahlian dan tingkat pendidikan menjadi sasaran tujuan kebijakan yang harus diperhatikan dengan baik.

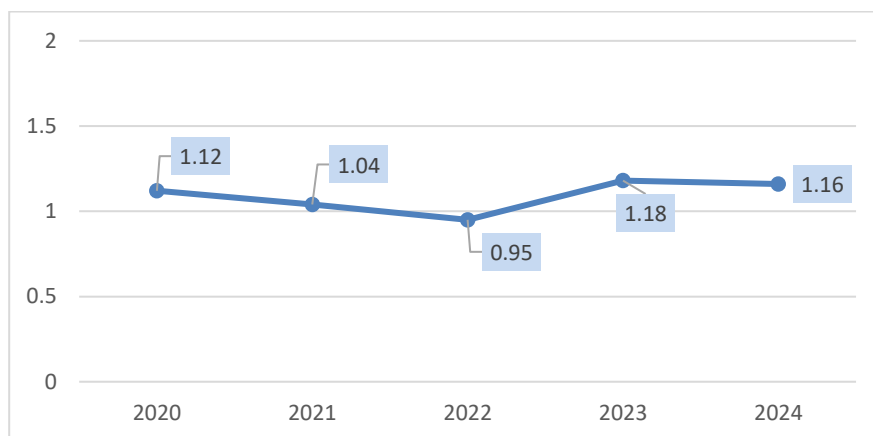


Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2. 10
Piramida Penduduk Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

b. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren positif meskipun terdapat variasi antar kecamatan. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun adalah sekitar 1.392 jiwa, dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Pertumbuhan terbesar terjadi antara tahun 2022 dan 2023, yaitu sebanyak 4.429 jiwa. Berdasarkan grafik, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 0.95 persen, sedangkan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.18 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 1.16 persen. Data ini mencerminkan dinamika migrasi, perkembangan infrastruktur, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut, sehingga menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan berbasis data.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2. 11
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati, dihitung dengan cara jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah. Semakin besar angkanya maka semakin padat wilayahnya, sebaliknya semakin kecil angkanya maka semakin renggang penduduknya. Kepadatan penduduk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Padang	65,32	65,19	65,51	65,75	65,93
Padang Ulak Tanding	81,43	80,87	82,63	83,94	84,79
Sindang Kelingi	164,08	163,26	196,32	193,04	192,65
Curup	4.350,56	4.343,16	5.200,19	5.146,83	5.133,78
Bermani Ulu	107,66	106,69	114,80	117,57	119,28
Selupu Rejang	243,97	241,20	223,38	234,47	240,20
Curup Utara	171,87	169,08	410,09	423,10	432,41
Curup Timur	2.434,54	2.394,34	2.583,74	2.666,60	2.726,51
Curup Selatan	811,51	800,38	669,55	688,94	698,62
Curup Tengah	2.002,00	1.998,57	1.842,20	1.834,86	1.834,86
Binduriang	201,73	200,56	203,10	206,75	208,85
Sindang Beliti Ulu	81,27	81,17	79,88	79,14	78,97
Sindang Dataran	124,42	124,17	129,61	129,61	129,83
Sindang Beliti Ilir	55,06	54,97	54,68	54,84	54,97
Bermani Ulu Raya	81,01	80,28	57,95	59,35	60,21
Jumlah	179,83	178,45	181,44	184,30	186,31

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka, BPS 2021-2025

Kepadatan penduduk terbesar pada tahun terakhir yaitu tahun 2024, mencapai 186,31 jiwa per km² tertinggi berada di Kecamatan Curup yang mencapai 5.133,78 jiwa per km². Karakter kepadatan yang sangat tinggi di kawasan pusat kota yaitu Curup mendorong kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi umum, jalan sempit, sanitasi, serta layanan pendidikan dan kesehatan konsentrasi tinggi. Perencanaan lahan dan ruang publik (taman atau drainase) juga menjadi prioritas. Sementara itu, daerah dengan kepadatan sedang seperti Curup Tengah atau Timur perlu dikembangkan agar tidak mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali. Penyediaan fasilitas dasar di wilayah yang lebih jarang penduduk perlu tetap dijaga untuk menghindari ketimpangan pelayanan antar wilayah.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

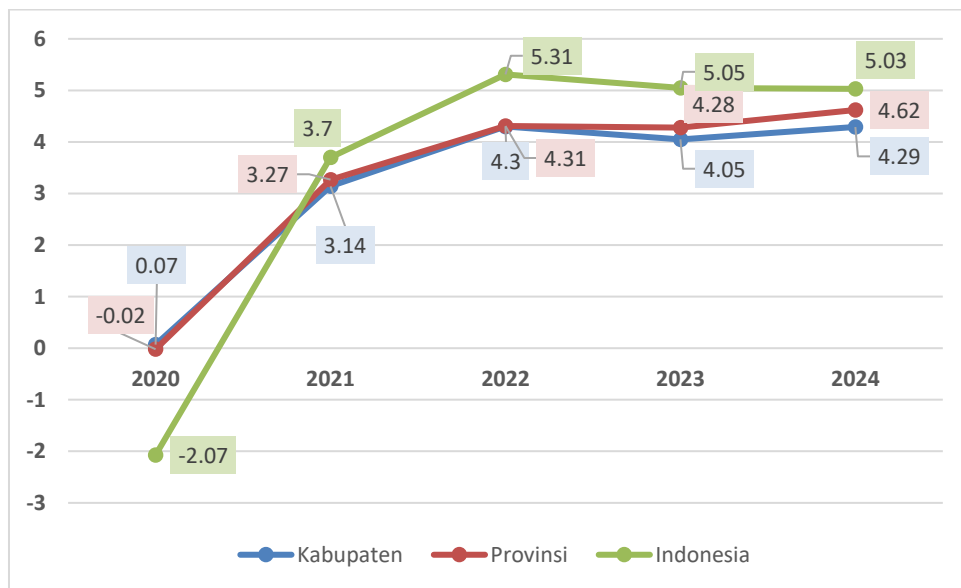
Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Kondisi kesejahteraan masyarakat secara langsung mencakup aspek ekonomi dan aspek sosial.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu fungsi dari tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Distribusi manfaat secara merata dan adil menjadi tugas Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial,

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 tahun 2020 mempengaruhi perekonomian nasional dan provinsi, Namun, berbeda dengan nasional dan provinsi, Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik meskipun terdampak pandemi, dengan pertumbuhan positif 0,07% di tahun 2020. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mulai meningkat menjadi 4,29%, dan mendekati pertumbuhan provinsi yang berada di 4,62%, Hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi, berkat perbaikan infrastruktur, dukungan pemerintah daerah, serta sektor-sektor utama yang berkontribusi pada pemulihan tersebut, pertumbuhan ekonomi yang stabil ini menunjukkan prospek positif untuk pembangunan di masa depan.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, BPS Provinsi Bengkulu, BPS Indonesia, 2025

Gambar 2. 12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024

b. Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan data PDRB ADHB Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2020-2024, terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah ini. Nilai sektor ini terus meningkat setiap tahun, dari Rp 2,93 triliun pada 2020 hingga mencapai Rp 4,24 triliun pada 2024. Sektor ini mencerminkan peran penting ekonomi primer dalam struktur perekonomian Kabupaten Rejang Lebong, di mana sebagian besar masyarakat bergantung pada kegiatan agraris. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, dengan nilai mencapai Rp 2,12 triliun pada 2024, menunjukkan aktivitas ekonomi perdagangan yang dinamis di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, tren PDRB ADHB Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan pertumbuhan yang stabil di hampir semua sektor. Kontribusi terbesar berasal dari sektor primer, seperti pertanian, serta sektor tersier, seperti perdagangan dan jasa. Peningkatan di sektor industri pengolahan dan konstruksi mengindikasikan adanya potensi industrialisasi dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong diversifikasi ekonomi. Pertumbuhan positif di hampir semua sektor menunjukkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong memiliki pondasi ekonomi yang kokoh dan berpotensi terus berkembang di masa depan.

Sementara itu, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2020 hingga 2024 mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang stabil. PDRB ADHK adalah ukuran ekonomi yang mengevaluasi volume output tanpa memperhitungkan pengaruh inflasi, sehingga memungkinkan analisis

pertumbuhan ekonomi secara lebih akurat. Berdasarkan data yang ada, PDRB Kabupaten Rejang Lebong meningkat dari Rp6,08 triliun pada 2020 menjadi Rp7,10 triliun pada 2024. Ini menunjukkan peningkatan produktivitas ekonomi yang moderat, mencerminkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan meskipun tidak mengalami lonjakan yang signifikan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Rejang Lebong. Sektor ini tumbuh dari Rp1,81 triliun pada 2020 menjadi Rp2,05 triliun pada 2024, mencerminkan stabilitas output sektor primer yang masih menjadi andalan utama. Walaupun pertumbuhannya bersifat gradual, sektor ini menunjukkan pentingnya peran pertanian dan kegiatan agraris lainnya bagi perekonomian lokal, meskipun belum terjadi akselerasi signifikan dalam produktivitasnya. Sektor ini mungkin memerlukan peningkatan teknologi dan inovasi pertanian untuk mempercepat pertumbuhan.

Sektor industri pengolahan dan konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun dalam skala yang relatif lambat. Industri pengolahan tumbuh dari Rp. 249,34 miliar pada 2020 menjadi Rp. 277,35 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan produksi barang olahan, namun kontribusinya terhadap PDRB masih terbatas. Sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan dari Rp. 240,64 miliar pada 2020 menjadi Rp.269,43 miliar pada 2024, yang menunjukkan pembangunan infrastruktur yang stabil, meskipun belum terjadi akselerasi besar dalam kegiatan konstruksi. Kedua sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih kuat jika diberikan perhatian lebih dalam bentuk investasi dan kebijakan.

Di sektor tersier, perdagangan dan transportasi memperlihatkan pemulihan yang signifikan setelah dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 pada 2020. Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, mengalami pemulihan dari Rp. 1,08 triliun pada 2020 menjadi Rp. 1,26 triliun pada 2024. Sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan output meningkat dari Rp. 364,98 miliar pada 2020 menjadi Rp. 423,33 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas logistik dan transportasi yang semakin vital dalam mendukung aktivitas ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong.

Sektor jasa pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jasa pendidikan tumbuh dari Rp. 612,87 miliar pada 2020 menjadi Rp. 728,14 miliar pada 2024, sedangkan jasa kesehatan meningkat dari Rp. 169,57 miliar menjadi Rp. 235,85 miliar dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan permintaan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia. Sektor ini menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Untuk melihat laju pertumbuhan dari masing-masing sektor lapangan usaha dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 hingga 2024, maka

dilakukan analisis yang hasilnya menggambarkan perkembangan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan sektor- sektor ekonomi. Analisis terhadap data ini mengungkapkan beberapa dinamika ekonomi penting, termasuk dampak pandemi COVID-19 serta tren pemulihan di berbagai sektor. Secara umum, laju pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan pasca-pandemi dengan variasi yang signifikan di tiap sektor, mencerminkan karakteristik dan respon sektor-sektor tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Rejang Lebong pada periode ini mengalami peningkatan bertahap setelah sempat terdampak oleh pandemi. Tingkat pertumbuhan total PDRB yang mencapai 4,29% pada 2024 menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Sektor-sektor jasa seperti informasi, kesehatan, dan jasa lainnya menjadi pendorong utama pemulihan ini. Tren ini menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor utama guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan resilien di masa mendatang.

Gambaran distribusi kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total PDRB Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun terakhir (2020-2024) diperlihatkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 19
Distribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Sektor PDRB ADHB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,81	30,98	31,43	31,34	32,48
Pertambangan dan Penggalian	1,35	1,32	1,26	1,25	1,16
Industri Pengolahan	4,12	4,10	4,10	4,01	3,84
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
Konstruksi	4,34	4,32	4,26	4,25	4,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,76	16,86	17,13	16,98	16,27
Transportasi dan Pergudangan	5,60	5,70	5,89	6,28	5,88
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,03	1,97	2,00	2,05	2,11
Informasi dan Komunikasi	2,59	2,62	2,66	2,74	2,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,12	3,30	3,27	2,94	2,86
Real Estate	3,57	3,42	3,28	3,30	3,15
Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,16	0,16	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,82	10,55	9,76	9,76	9,75
Jasa Pendidikan	10,19	10,00	9,98	9,87	10,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,95	3,12	3,17	3,29	3,38

Sektor PDRB ADHB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa lainnya	1,33	1,34	1,40	1,53	1,58
PDRB Kab. Rejang Lebong Atas Dasar Harga Berlaku	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Data pada tabel diukur dalam persentase dari total PDRB, yang memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi daerah ini dan perubahan komposisi sektor-sektor ekonomi selama periode tersebut. Secara umum, sektor-sektor primer seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB, sementara sektor-sektor jasa dan industri lainnya menunjukkan fluktuasi yang beragam.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan secara konsisten mendominasi ekonomi Kabupaten Rejang Lebong, dengan kontribusi yang terus meningkat dari 30,81% pada 2020 menjadi 31,43% pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 31,34% pada 2023, namun kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 32,48%. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang kuat pada sektor agraris, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini. Meskipun demikian, sektor ini harus diwaspadai karena penurunan kecil pada 2023 menunjukkan potensi risiko dari stagnasi pertumbuhan di sektor primer ini.

Di sisi lain, Industri Pengolahan tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar 4,12 % terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 3,84% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan masih terbatasnya pengembangan kegiatan hilirisasi dan pengolahan produk di daerah, terutama terhadap hasil-hasil pertanian dan sumber daya lokal lainnya. Rendahnya kontribusi industri pengolahan juga dapat mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Rejang Lebong masih sangat bergantung pada sektor primer, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan nilai tambah yang relatif kecil dari sektor sekunder. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM), memperkuat rantai pasok lokal, serta meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi teknologi guna menggerakkan sektor industri pengolahan secara lebih signifikan. Peningkatan kinerja sektor ini di masa mendatang diharapkan dapat mendiversifikasi struktur ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal secara berkelanjutan.

Sementara itu, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan kontribusi dari 1,35% pada 2020 menjadi 1,16% pada 2024, menunjukkan penurunan aktivitas di sektor ini, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam atau penurunan permintaan pasar. Sektor jasa, seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada dalam kisaran yang relatif stabil, yaitu antara 16,27% hingga 17,13%. Kontribusi tertinggi

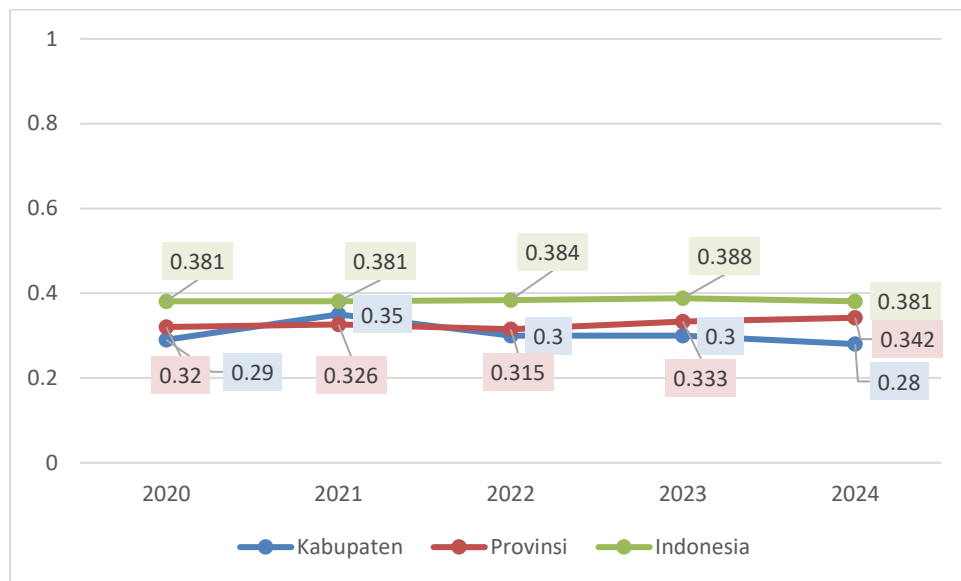
pada tahun 2022, yakni sebesar 17,13%, sebelum mengalami penurunan menjadi 16,27% pada tahun 2024. Stabilitas dan peran dominan sektor ini mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat, serta perputaran ekonomi lokal yang cukup dinamis, terutama di pusat-pusat layanan dan kawasan permukiman padat.

Penurunan pada tahun terakhir dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti tekanan daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi, atau perlambatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Meski demikian, sektor ini tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah yang potensial. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi salah satu sektor yang mengalami peningkatan kontribusi yang signifikan, dari 5,60% pada 2020 menjadi 6,28% pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan pentingnya sektor transportasi dalam mendukung pertumbuhan perdagangan dan distribusi di daerah ini, terutama dengan meningkatnya mobilitas pasca-pandemi. Penurunan pada tahun 2024 perlu dicermati sebagai sinyal perlunya peningkatan kapasitas dan modernisasi sistem transportasi serta fasilitas logistik yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, penguatan sektor transportasi dan pergudangan menjadi aspek strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun sektor Informasi dan Komunikasi terus mengalami pertumbuhan, dari 2,59% pada 2020 menjadi 2,79% pada 2024, mengindikasikan peningkatan digitalisasi dan adopsi teknologi dalam perekonomian.

Secara keseluruhan, komposisi PDRB Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa sektor-sektor tradisional seperti pertanian masih mendominasi ekonomi, sementara sektor jasa seperti transportasi, perdagangan, dan komunikasi memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif. Meski demikian, ada beberapa sektor seperti industri pengolahan dan pertambangan yang memerlukan perhatian untuk memastikan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan terdiversifikasi.

c. Rasio gini

Rasio gini merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah atau negara. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), dan 1 mencerminkan ketimpangan yang ekstrem (satu individu memiliki seluruh pendapatan, sementara yang lain tidak memiliki apa-apa). Rasio gini sangat penting dalam analisis ekonomi karena memberikan informasi tentang sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dinikmati oleh seluruh penduduk secara adil. Nilai Rasio gini yang rendah menunjukkan bahwa distribusi pendapatan relatif merata, sedangkan nilai yang lebih tinggi mengindikasikan adanya ketimpangan yang lebih besar.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, BPS Provinsi Bengkulu, BPS Indonesia, 2025

Gambar 2. 13
Rasio gini Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional
Tahun 2020-2024

Tren Rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan cenderung stabil dengan beberapa fluktuasi, terutama di Kabupaten Rejang Lebong. Meskipun Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, peningkatan nilai indeks di Indonesia menunjukkan bahwa secara umum, ketimpangan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, untuk memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata.

d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Istilah kemiskinan merujuk pada kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pencapaian tujuan ini membutuhkan sinergi antara kebijakan ekonomi, sosial, dan infrastruktur, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan.

Tabel 2. 20
Profil Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk miskin	Ribu Jiwa	41,47	43,30	43,18	41,18	41,16
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,85	15,85	15,65	14,79	14,65

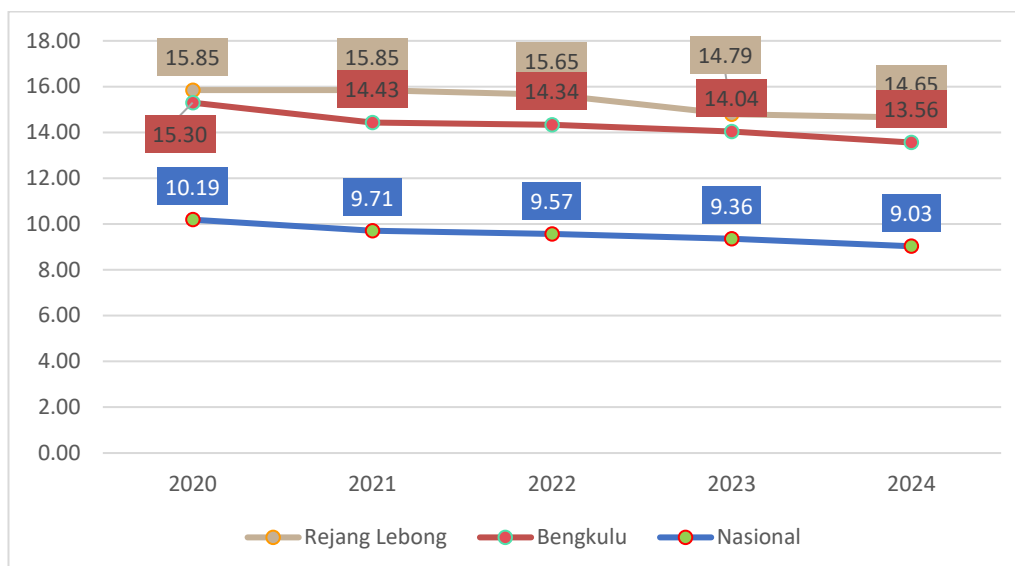
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Garis Kemiskinan	rupiah/kapita/bulan	472.555	487.490	530.029	566.433	595.125

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong , 2024.

Berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 41,47 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2021, meskipun garis kemiskinan meningkat menjadi Rp487.490, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 43,30 ribu jiwa, namun persentase tingkat kemiskinan tetap berada di angka 15,85%. Pada tahun 2022, terlihat sedikit penurunan dalam jumlah penduduk miskin menjadi 43,18 ribu jiwa, dengan persentase tingkat kemiskinan yang turun menjadi 15,65%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal pengurangan kemiskinan, walaupun garis kemiskinan terus naik hingga mencapai Rp530.029. Peningkatan garis kemiskinan ini mencerminkan kenaikan harga kebutuhan dasar, yang harus dicapai masyarakat untuk tidak dikategorikan miskin.

Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan signifikan menjadi 41,18 ribu jiwa dan 41,16 ribu jiwa. Ini adalah pencapaian penting karena menandakan penurunan persentase kemiskinan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan garis kemiskinan yang terus bertambah hingga Rp566.433 menunjukkan bahwa meskipun standar minimum untuk tidak termasuk kategori miskin semakin tinggi, usaha penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil menurunkan jumlah dan persentase kemiskinan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, tren yang ditunjukkan dalam tabel di atas mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong, dengan penurunan signifikan pada tahun 2024 meskipun garis kemiskinan terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Walaupun mengalami penurunan tiap tahun, namun persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu dan Nasional. Perbandingan persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, BPS Provinsi Bengkulu, BPS Nasional, 2025

Gambar 2. 14
Grafik Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024

Penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah persentase penduduk diatas garis kemiskinan, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Persoalan Kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong cenderung meningkat. Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong sebesar 1.79 persen kemudian meningkat menjadi 1,99 persen pada tahun 2024. Jika semakin besar Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, rata-rata pengeluaran penduduk dari garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong berada dibawah rata-rata pengeluaran penduduk dari garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu.

Tabel 2. 21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Rejang Lebong	1.79	2.04	2.67	2.81	1,99
2	Provinsi Bengkulu	2.4	2.57	2.43	2.14	2,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong yang menunjukkan nilai yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat maka Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong meningkat menjadi 0.38 persen pada tahun 2024 dari sebesar 0.35 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong berada dibawah Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu.

Tabel 2. 22
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Rejang Lebong	0.35	0.4	0.67	0.79	0,38
2	Provinsi Bengkulu	0.56	0.62	0.58	0.52	0,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

Jika dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pendapatan per kapita tercatat sebesar Rp34,47 juta, kemudian naik menjadi Rp36,20 juta pada 2021, dan terus meningkat hingga mencapai Rp45,24 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang ditopang oleh peningkatan aktivitas ekonomi daerah, produktivitas sektor unggulan, serta membaiknya daya beli masyarakat. Meski demikian, upaya pemerataan distribusi pendapatan dan pengendalian inflasi tetap perlu diperhatikan agar peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya terlihat secara agregat, tetapi juga benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 23
Pendapatan Perkapita Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	34,47	36,20	39,08	41,65	45,24

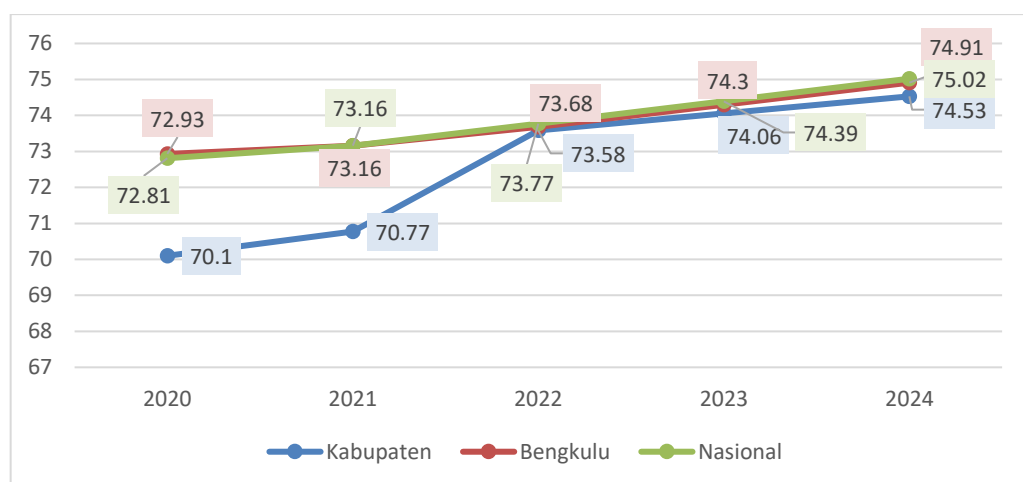
Sumber : LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu daerah atau negara dalam aspek pembangunan manusia. IPM memberikan gambaran tentang kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi ini mencakup berbagai aspek penting yang memengaruhi kesejahteraan individu secara keseluruhan.

Dimensi kelangsungan hidup diukur melalui harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan memperpanjang usia produktif. Semakin tinggi harapan hidup, semakin baik akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan kebijakan kesehatan yang efektif. Di sisi lain, pengetahuan diukur berdasarkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang mencerminkan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik merupakan kunci untuk memberdayakan individu dan memperkuat daya saing suatu daerah di tingkat nasional maupun global.

Dimensi terakhir, standar kehidupan yang layak, diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. Hal ini mencerminkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan akses terhadap barang dan jasa lainnya yang mendukung kehidupan yang bermartabat. Standar hidup yang layak juga mencakup aspek akses terhadap pekerjaan yang layak dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Secara keseluruhan, IPM menjadi alat penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. IPM juga memberikan dasar bagi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh wilayah. Dalam konteks global, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan kemajuan suatu negara dalam mencapai target pembangunan manusia yang lebih baik dan seimbang. Data dari BPS Rejang Lebong menggambarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu selama periode 2020-2024. Indeks ini mencerminkan tingkat pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Dari grafik, terlihat bahwa baik Kabupaten Rejang Lebong maupun Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan IPM selama lima tahun terakhir.



Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong , BPS Provinsi Bengkulu, BPS Indonesia, 2025

Gambar 2. 15
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rejang Lebong dan
Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten Rejang Lebong meskipun berada sedikit di bawah rata-rata IPM Provinsi Bengkulu, menunjukkan perbaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Kenaikan IPM baik di Kabupaten Rejang Lebong maupun Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat, telah memberikan dampak positif. Dengan tren yang konsisten ini, diharapkan Rejang Lebong dapat terus memperkecil kesenjangan dengan provinsi dan mencapai angka IPM yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin terwujud.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Konsep Kesehatan untuk Semua mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tinjauan terhadap kondisi derajat kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta cakupan layanan kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan.

a. Angka Harapan Hidup

Berdasarkan data pada tabel, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, AHH tercatat sebesar 68,57 tahun dan meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 69,42 tahun pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 0,85 tahun selama lima tahun ini mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, serta peningkatan taraf hidup secara umum. Peningkatan AHH ini merupakan indikator positif dalam pembangunan manusia, karena menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Rejang Lebong memiliki peluang hidup yang lebih panjang. Namun demikian, peningkatan ini masih tergolong moderat, sehingga tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesehatan, gizi, lingkungan, dan pelayanan dasar guna mendorong angka harapan hidup yang lebih tinggi di masa mendatang.

Tabel 2. 24
Angka Harapan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,57	68,75	69,00	69,22	69,42

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong ,2025

b. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Penyelenggaraan urusan kesehatan merupakan salah satu dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja sektor kesehatan adalah Angka Kematian Bayi. Secara umum, trend capaian angka kematian bayi sangat fluktuatif. Terjadi kenaikan angka kematian bayi yang cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu 25 per seribu kelahiran hidup dibanding tahun 2022 yaitu 6,7 per seribu kelahiran hidup namun pada tahun 2024 menurun menjadi 5,65 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi tentunya perlu untuk terus ditekan dan masih perlu adanya upaya untuk memastikan angka kematian bayi benar-benar mengalami perbaikan dengan mengupayakan sosialisasi dan pelayanan kesehatan bayi yang lebih ditingkatkan.

Tabel 2. 25
Realisasi AKI dan AKB Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	AKB/1.000	Per 1000 Kelahiran Hidup	5,27	5,67	6,7	25	5,65
2	AKI/100.000	Per 100.00 Kelahiran Hidup	41,89	206,20	21,77	172,48	113,1

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Disamping Angka Kematian Bayi, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor kesehatan adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 172,48 per 100.000 kelahiran hidup, dibanding tahun 2021 yaitu hanya 21,77 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka kematian ibu menurun pada tahun 2024 menjadi 113,1. Namun angka ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelayanan kesehatan maternal, terutama dalam hal deteksi dini risiko kehamilan, penanganan komplikasi, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, meskipun penanganan kesehatan bayi sudah menunjukkan hasil positif, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menekan angka kematian ibu melalui penguatan sistem rujukan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

c. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,198, nilai ini menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 sebesar 0,141. Namun nilai ini masih menunjukkan bahwa derajat kesehatan keluarga di wilayah ini masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Nilai ini mencerminkan bahwa sebagian besar keluarga belum memenuhi sebagian besar dari 12 indikator kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seperti pemenuhan imunisasi dasar, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, kepesertaan JKN, pemantauan ibu hamil dan balita, serta pengendalian penyakit tidak menular.

Rendahnya IKS ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta tantangan dalam distribusi layanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terarah dan menyeluruh melalui program-program promotif dan preventif, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan keluarga. Upaya perbaikan IKS sangat penting sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan.

Tabel 2. 26
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,141	0,159	0,198	0,198	0,198

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, 2025

d. Indeks Kesehatan Masyarakat

Nilai Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yaitu 90,37. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum derajat kesehatan masyarakat di wilayah ini berada dalam kategori tinggi dan relatif baik. Indeks ini diukur dari empat komponen dengan bobot perhitungan yang sama, yaitu usia harapan hidup, persentase persalinan ditolong tenaga Kesehatan, persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita dengan gizi normal.

Tabel 2. 27
Nilai Komponen Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

No	Komponen	Nilai
1	Usia Harapan Hidup	73,87
2	Persentase persalinan ditolong tenaga Kesehatan	97,40%
3	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	87,40%
4	Balita dengan gizi normal	97,61%

Sumber : LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Capaian tinggi pada ketiga indikator terakhir mencerminkan keberhasilan dalam pelayanan kesehatan dasar dan gizi anak, meskipun angka usia harapan hidup masih relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya. Secara keseluruhan, nilai indeks ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat berada pada kategori baik dan menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan.

e. Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan fisik pada anak, selain ditandai dengan bertubuh pendek atau kerdil, stunting juga ditandai dengan terganggunya perkembangan otak. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yg

ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Bila masalah ini berlanjut maka dapat berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Pembangunan SDM erat kaitannya dengan asupan gizi setiap individu. Berbagai upaya dilaksanakan pemerintah untuk menekan angka prevalensi stunting dan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar, kondisi gizi anak telah menunjukkan perbaikan.

Tabel 2. 28
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Stunting Baduta (Bawah Dua Tahun)	27,8	26	20,2	28,6	24,7

Sumber : SSGI 2019, SSGI 2021, SSGI 2022 dan SKI 2023, 2024

Data yang di peroleh merupakan data dari SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI). Pada Tahun 2021 berdasarkan survey Kabupaten Rejang Lebong termasuk kedalam lima besar prevalensi Stunting di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022 prevalensi stunting menurun sebesar 5,8% menjadi 20,2%. Akan tetapi pada tahun 2023 angka prevalensi stunting meningkat menjadi sebesar 28,6% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 24,7%. Angka ini menjadikan Kabupaten Rejang Lebong menjadi kabupaten dengan angka prevalensi stunting tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya keras untuk perbaikan gizi yang harus terus didukung dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan pusat serta berbagai pemangku kepentingan non pemerintah seperti dunia usaha, kelompok masyarakat, masyarakat sipil, perguruan tinggi mitra pembangunan, organisasi profesi dan masyarakat secara luas.

f. Fasilitas Kesehatan

Kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang seimbang, yang memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan dengan produktif. Untuk mendukung kondisi kesehatan masyarakat, diperlukan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk tenaga medis yang terampil. Jumlah dokter, bidan, tenaga farmasi, dan ahli gizi di Kabupaten Rejang Lebong terus meningkat selama periode 2020 hingga 2024, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan jumlah bidan, dari 251 menjadi 387 orang, mencerminkan fokus pada kesehatan ibu dan anak, sementara peningkatan jumlah perawat hingga 284 orang pada tahun 2024 memastikan layanan perawatan yang memadai.

Tabel 2. 29
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Tenaga Kesehatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter	22	27	28	33	33
2	Perawat	169	272	286	279	284
3	Bidan	251	383	368	388	387
4	Farmasi	9	22	23	31	34
5	Ahli Gizi	12	31	34	35	41

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka Tahun 2021-2024.

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong mengalami variasi dalam pertumbuhannya selama lima tahun terakhir. Jumlah rumah sakit umum meningkat dari 1 unit pada tahun 2020 menjadi 3 unit pada 2024. Namun, jumlah klinik pratama menurun dari 14 unit pada 2020 menjadi 10 unit pada 2024. Jumlah puskesmas tetap stabil dengan 21 unit selama empat tahun terakhir, dan jumlah posyandu menurun. Secara umum hal ini menunjukkan upaya peningkatan layanan kesehatan dasar untuk masyarakat.

Tabel 2. 30
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit Umum	1	2	2	3	3
2	Klinik Pratama	14	15	14	9	10
3	Puskesmas	21	21	21	n.a	21
4	Posyandu	214	214	216	n.a	9

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2021-2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Komitmen terhadap penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, gambaran umum mengenai capaian, tantangan, dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang mengukur jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas, baik yang telah menyelesaikan pendidikan maupun yang tidak. RLS memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian pendidikan yang sebenarnya di suatu wilayah dan penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Semakin tinggi RLS, semakin banyak tahun pendidikan yang dapat menyelesaikan lebih banyak tahun pendidikan formal. Ini mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan serta kebijakan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di kabupaten tersebut. Faktor-faktor seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan program

beasiswa juga turut berperan dalam peningkatan ini.

Tabel 2. 31
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	RLS Kabupaten Rejang Lebong	8,28	8,33	8,55	8,80	8,81
2	RLS Provinsi Bengkulu	8,84	8,87	8,91	9,03	9,04
3	RLS Indonesia	8,48	8,54	8,69	8,77	9,22

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong; BPS Provinsi Bengkulu; BPS Indonesia, 2024

Dibandingkan dengan rata-rata nasional, rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi penduduk terhadap pendidikan. Pada tahun 2020, RLS di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebesar 8,28 tahun, kemudian meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 8,81 tahun pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 0,53 tahun ini menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam pencapaian pendidikan masyarakat di daerah tersebut.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, pada tahun 2020 RLS nasional berada di angka 8,48 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Rejang Lebong. Namun, meskipun selisih ini tetap ada hingga tahun 2024—di mana RLS nasional mencapai 9,22 tahun sementara Rejang Lebong 8,81 tahun—gap antara keduanya relatif kecil dan menunjukkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong hampir menyamai pencapaian nasional. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang pendidikan, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai atau bahkan melampaui rata-rata nasional.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dijalani oleh seseorang di suatu wilayah. Indikator ini sangat penting untuk menilai tingkat akses pendidikan dan kualitas sistem pendidikan di suatu daerah. HLS dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pengajar, serta kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Peningkatan HLS menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Tabel 2. 32
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Nasional
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	HLS Kabupaten Rejang Lebong	13,83	13,93	14,01	14,19	14,20

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	HLS Provinsi Bengkulu	13,61	13,67	13,68	13,74	13,75
3	HLS Indonesia	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024; BPS Indonesia, 2024.

Peningkatan HLS di Kabupaten Rejang Lebong dari 13,83 tahun pada 2020 menjadi 14,20 tahun pada 2024 mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam aksesibilitas pendidikan formal. Meskipun Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Provinsi Bengkulu dan nasional, tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah kabupaten, terutama di daerah terpencil, tetap perlu mendapat perhatian lebih. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan program-program pendidikan yang inklusif harus terus diperkuat untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam harapan lama sekolah dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

c. Ketersediaan Sekolah

Secara umum, ketersediaan sekolah di Kabupaten Rejang Lebong terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di jenjang RA, yang mencapai rasio 2,13 pada tahun 2024. Sebaliknya, rasio terendah tercatat pada jenjang SMA dan SMK dengan masing-masing sebesar 0,32. Peningkatan rasio ini menunjukkan distribusi sekolah yang lebih merata, yang berpotensi meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan preferensi pilihan sekolah bagi masyarakat. Hal ini juga berdampak positif dalam memperbesar peluang siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2. 33
Jumlah Sekolah Setiap Jenjang Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	TK	31	39	40	42	42
2	RA	19	19	8	23	23
3	SD	189	189	178	179	180
4	MI	12	12	12	14	14
5	SMP	54	55	56	56	59
6	MTs	9	9	9	9	9
7	SMA	18	18	18	20	20
8	SMK	14	14	15	15	15
9	MA	5	5	5	6	6

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka, BPS 2021-2025.

d. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi siswa usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Di Kabupaten Rejang Lebong, APM menunjukkan

peningkatan yang konsisten di berbagai jenjang, yang mencerminkan keberhasilan daya serap sistem pendidikan, terutama pada jenjang SD dan SMP. Dalam rangka menjamin ketersediaan SDM unggul di masa depan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang. Data pendidikan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan variasi yang signifikan.

Tabel 2. 34
Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	98.01	97.99	99,63	99,35	98,23
2	SMP/MTs	72.08	72.06	72,05	72,51	74,26
3	SMA/SMK/MA	61.47	62.95	62,91	66,59	68,56

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

Tabel 2. 35
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	22,00	27,10	41,28	37,00	49,98
2	SD/MI	109,78	109,66	110,02	109,14	109,11
3	SMP/MTs	84,04	84,50	84,91	78,53	95,98
4	SMA/SMK/MA	102,93	104,32	102,72	103,16	96,06

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

Berdasarkan data APM dan APK di Kabupaten Rejang Lebong antara 2020 dan 2024, dapat ditarik beberapa temuan utama. Pertama, pada jenjang PAUD, dilihat dari nilai APK tahun 2024 hanya sebesar 49,98 menandakan bahwa hanya sekitar separuh penduduk usia sekolah yang dapat mengakses pendidikan pada jenjang tersebut. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya namun angka ini masih tergolong rendah dan mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pemerataan akses pendidikan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata, serta faktor sosial budaya yang membuat sebagian masyarakat kurang mementingkan pendidikan formal. Rendahnya APK juga menjadi sinyal perlunya kebijakan afirmatif dalam meningkatkan partisipasi, baik melalui perluasan sarana pendidikan, bantuan biaya, maupun penguatan peran masyarakat dalam mendukung anak usia sekolah.

Pada jenjang SD/MI, APM hampir mendekati ideal—dengan sedikit peningkatan dari 98,01 % ke 98,23 %—yang menandakan hampir seluruh anak usia SD terlayani. Penurunan APK dari 109,78 % ke 109,11 % mengindikasikan berkurangnya siswa yang belajar di luar rentang usia (*early/late entrants*). Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa sistem pendaftaran dan penegakan usia masuk sekolah semakin baik, namun adanya potensi siswa rentan yang tersisih saat kebijakan usia ketat diberlakukan.

Ketiga, pada tingkat SMP/MTs, APM meningkat dari 72,08 % menjadi 74,26 %, mengonfirmasi lebih banyak anak usia SMP yang bersekolah sesuai jenjangnya, APK juga meningkat dari 84,04 % ke 95,98 %. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan jenjang pertama. Secara umum, peningkatan APK dan APM pada jenjang SMP selama periode 2020–2025 mencerminkan perbaikan dalam aspek akses dan partisipasi pendidikan, serta keberhasilan kebijakan strategis bidang pendidikan. Namun, perlu terus diupayakan peningkatan kualitas dan efektivitas pembelajaran agar sejalan dengan peningkatan partisipasi, sekaligus menekan kesenjangan antara APK dan APM.

Terakhir, jenjang SMA/MA memperlihatkan kemajuan paling kuat. APM meningkat dari 61,47 % ke 68,56 %, sedangkan APK menurun dari 102,93 % ke 96,06%. Peningkatan APMD menegaskan perbaikan transisi dari SMP ke SMA, didorong dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan insentif beasiswa. Walaupun terdapat penurunan pada APK namun hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan jenjang SMA menjadi lebih tepat sasaran dan lebih sesuai usia, yang mencerminkan perbaikan dalam efektivitas sistem Pendidikan. Namun Pemerintah daerah perlu terus memastikan bahwa upaya pemerataan akses pendidikan tetap menjangkau semua kelompok usia, baik melalui jalur formal, nonformal, maupun alternatif pendidikan lainnya

e. Angka Partisipasi Sekolah

Dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia dalam kegiatan belajar/ sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 7-12 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan Dasar (7-12 tahun) yang sudah tamat atau masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan 7-12 tahun. APS usia 13-15 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah pertama (13-15 tahun) yang sudah tamat atau masih menempuh pendidikan menengah pertama per jumlah penduduk usia pendidikan 13-15 tahun. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun terakhir (tahun 2020- 2024) menunjukan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Angka partisipasi menurut jenjangnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 36
Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	APS SD/MI	99,68	99,91	99,63	99,35	99,35

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	APS SMP/MTs	96,08	95,65	98,63	98,50	98,50

Sumber : Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka, BPS 2025

f. Indeks Pembangunan literasi masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebesar 62,12. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat berada pada kategori sedang, namun masih memerlukan banyak peningkatan untuk mencapai kategori tinggi. Angka tersebut mencerminkan bahwa sebagian masyarakat Rejang Lebong telah memiliki akses dan kemampuan dasar dalam membaca, menulis, serta memanfaatkan informasi, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mengembangkan budaya literasi yang berkelanjutan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi capaian ini antara lain keterbatasan sarana prasarana seperti perpustakaan yang representatif, rendahnya minat baca, serta belum meratanya program literasi ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Untuk meningkatkan IPLM, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan fasilitas literasi yang inklusif, penguatan peran taman bacaan masyarakat (TBM), serta pelaksanaan program literasi yang menjangkau semua kelompok usia. Peningkatan indeks ini menjadi penting sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan adaptif terhadap perkembangan informasi serta mampu bersaing di era digital.

Tabel 2. 37
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	n/a	1,05	62,15

Sumber : LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

g. Angka Putus sekolah

Angka putus sekolah adalah indikator yang menunjukkan persentase siswa yang berhenti sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Angka ini mencerminkan tingkat keberlanjutan partisipasi pendidikan serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan akses pendidikan. Semakin rendah angkanya, semakin baik keberhasilan daerah dalam menjaga anak tetap bersekolah. Berdasarkan Tabel di bawah ini, terlihat bahwa angka putus sekolah pada jenjang SD/MI relatif rendah dan cenderung stabil, meskipun sempat meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,74, kemudian menurun kembali hingga berada pada kisaran 0,51–0,56 pada tahun 2022–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menekan angka putus sekolah di tingkat dasar cukup berhasil sehingga mampu menjaga konsistensi angka yang relatif kecil. Sementara itu, angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam. Pada tahun

2020 angka putus sekolah tercatat sebesar 2,20, turun signifikan pada 2021 menjadi 1,00, namun melonjak tajam pada 2022 menjadi 2,81. Setelah itu, angka kembali menurun pada 2023 menjadi 2,19, tetapi kembali meningkat menjadi 2,20 pada 2024. Pola ini menggambarkan bahwa masalah putus sekolah di jenjang menengah pertama masih cukup dinamis dan memerlukan perhatian khusus. Faktor ekonomi, motivasi belajar, serta keterjangkauan fasilitas pendidikan kemungkinan menjadi penyebab utama tingginya fluktuasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Rejang Lebong relatif berhasil menekan angka putus sekolah di tingkat SD/MI, tantangan besar masih dihadapi pada jenjang SMP/MTs yang membutuhkan intervensi lebih terarah agar dapat menurunkan angka putus sekolah secara konsisten.

Tabel 2. 38
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,56	0,74	0,54	0,51	0,56
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	2,20	1,00	2,81	2,19	2,20

Sumber : LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

a. Keadaan Ketenagakerjaan

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa meskipun jumlah penduduk usia kerja mengalami peningkatan, terdapat penurunan partisipasi angkatan kerja dan penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun dari 77,86% pada 2023 menjadi 74,94% di tahun 2024, dengan penurunan signifikan pada kelompok perempuan (dari 67,14% menjadi 63,72%). Penurunan ini mengindikasikan adanya kelompok usia kerja, khususnya perempuan, yang memilih atau terpaksa keluar dari pasar kerja, baik karena alasan domestik, sosial, maupun keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak.

Dalam konteks ini, penting untuk mengaitkan kondisi ketenagakerjaan tersebut dengan kebutuhan akan perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif adalah sistem perlindungan sosial yang mampu merespons secara fleksibel terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk kondisi ketenagakerjaan yang dinamis. Penurunan partisipasi kerja dan fluktuasi pengangguran menunjukkan pentingnya skema perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat bantuan langsung tunai atau jaminan sosial dasar, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta akses terhadap layanan pendukung ketenagakerjaan seperti *child care* dan transportasi publik.

Implementasi perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Rejang Lebong perlu diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan yang cenderung terpinggirkan dari pasar kerja,

seperti perempuan, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah terpencil. Dengan demikian, sistem perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong inklusi ekonomi, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi, serta menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Tabel 2. 39
Status keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Rejang Lebong

No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja	205.673	208.392	211.065	218.721	221.643
2	Angkatan Kerja	160.288	158.557	157.156	170.298	166.059
	- Bekerja	154.361	154.677	153.568	165.297	162.022
	- Pengangguran	5.927	3.880	3.588	5.001	4.037
4	Bukan Angkatan kerja	45.385	49.835	53.909	48.423	55.584
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,70	2,45	2,28	2,94	2,43
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,32	76,09	74,46	77,86	74,92
	- Laki-laki	87,60	85,76	85,73	88,18	85,73
	- Perempuan	68,05	66,22	62,99	67,14	63,72

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi daerah. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 3,70%, yang menunjukkan kondisi pengangguran yang cukup tinggi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi dan penutupan usaha, sehingga mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2022 dan 2023 angka ini sempat menurun.

Selanjutnya pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali dalam angka pengangguran, dengan TPT naik menjadi 2,94%. Kenaikan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tantangan struktural dalam ekonomi lokal, seperti keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru atau kurangnya investasi. Meski tingkat pengangguran meningkat, tren fluktuatif ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan pasca- pandemi, tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Rejang Lebong masih perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.

Berdasarkan data keadaan Angkatan kerja tahun 2020-2024 di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa sektor pertanian mendominasi struktur lapangan kerja di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah sangat bergantung pada sektor primer, hal ini ditunjukkan dengan 88.582 penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara umum, dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan adanya pergeseran antar status pekerjaan, dengan kecenderungan peningkatan peran pekerja formal seperti buruh/ karyawan/pegawai meskipun pekerjaan informal masih mendominasi.

b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 mencapai 98,13%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk di wilayah tersebut telah memiliki akses terhadap layanan jaminan kesehatan, baik melalui skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan maupun bentuk kepesertaan lainnya yang termasuk dalam cakupan SJSN. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*), yang bertujuan untuk menjamin seluruh penduduk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa menghadapi kesulitan finansial.

Tabel 2. 40
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	68	74	77	88	98.13

Sumber : BPJS Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Tingginya angka kepesertaan ini juga berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan kontinuitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Namun demikian, keberhasilan ini harus diimbangi dengan peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta penguatan sistem rujukan agar jaminan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar efektif dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan secara tepat dan bertanggung jawab juga perlu terus didorong agar program SJSN dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

c. Indikator Kinerja Urusan Sosial

Indikator persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial di Kabupaten Rejang Lebong meningkat dari 2,46% pada 2020 menjadi 32,58% pada 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah PMKS yang menerima bantuan, meskipun juga mencerminkan adanya peningkatan jumlah PMKS di daerah tersebut. Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial tetap stagnan dari 2021 hingga 2023 dan meningkat menjadi 100% tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau keluarga miskin di Kabupaten Rejang Lebong. Program tanggap darurat untuk korban bencana mencapai 100% selama lima tahun terakhir, mencerminkan respons yang baik terhadap

kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana. Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga meningkat dari 9.497 jiwa pada 2022 menjadi 11.233 jiwa pada 2023.

Tabel 2. 41
Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	2,46	3,69	5,53	32,58	32,58
2	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	75,31	71,85	71,85	71,85	100
3	Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100
4	Jumlah Program Bantuan yang Diterima						
	-Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	KK	17.654	17.654	17.868	16.455	n/a
	-Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	KK	17.659	15.907	17.048	16.455	n/a
	-Program Keluarga Harapan (PKH)	KK	12.010	11.000	9.497	11.233	n/a

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Pengamalan Nilai Keagamaan

Indikator Indeks pengamalan nilai keagamaan diukur dari komponen persentase tempat ibadah aktif, persentase masyarakat berprestasi yang mendapat kesempatan perjalanan ibadah umroh, persentase Guru Agama Desa aktif, dan persentase perangkat agama yang dibina. Data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 mencatat sebanyak 563 tempat ibadah, dan yang aktif sebanyak 562. Sementara itu 50 orang dari penduduk di Kabupaten Rejang Lebong yang berprestasi memperoleh kesempatan untuk melakukan perjalanan ibadah umroh dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong memiliki 153 orang Guru Agama Desa yang aktif membina kegiatan keagamaan pada desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan indikator tersebut maka diketahui indeks pengamalan nilai keagamaan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah 78,62. Nilai ini menunjukkan bahwa adanya bentuk peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pembinaan tokoh agama, pemberian penghargaan terhadap tokoh agama teladan.

b. Indeks Pelestarian Budaya

Indeks pelestarian budaya Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 adalah sebesar 80,49. Indeks pelestarian budaya Kabupaten Rejang Lebong dihitung dari enam komponen, yakni persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya dengan kinerja sebesar 100% terlaksana, persentase kelompok kesenian yang aktif sebesar 93,75%, persentase pelaku pelestari budaya yang aktif sebanyak 99,47%, persentase benda/situs dan Kawasan cagar budaya yang terpelihara dalam kondisi baik sebesar 33,93% serta jumlah desa budaya sebanyak 1 desa dan Jumlah Gedung kesenian yang aktif adalah nol atau tidak ada gedung kesenian di Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 76 kelompok kesenian yang aktif dari sebanyak 80 kelompok kesenian yang terdata di Kabupaten Rejang Lebong. Sementara itu terdata jumlah BMA di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 38 BMA Kabupaten, 102 BMA Kelurahan, dan sebanyak 732 BMA Desa

c. Kebudayaan

Kabupaten Rejang Lebong, dengan populasi sebanyak 288.832 jiwa pada tahun 2024, merupakan daerah yang sangat plural dalam aspek keagamaan, budaya, suku, dan ras. Keberagaman ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik budaya dan kebiasaan di setiap kecamatan, yang memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu bentuk keberagaman tersebut terlihat dari adat istiadat dan kesenian yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, budaya sebagai kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti tradisi "Bekulo" yang berarti berunding dengan menggunakan bahasa sastra yang penuh sopan santun. Kedua, budaya dalam bentuk kesenian, seperti lagu-lagu daerah, tarian tradisional, dan alat musik khas daerah. Kedua aspek ini menjadi identitas kultural yang kaya dan harus dilestarikan. Selama 2019 hingga 2023, jumlah festival seni dan budaya mengalami variasi. Pada 2019 dan 2020, festival seni dan budaya digelar dua kali, tetapi pada 2021 tidak ada penyelenggaraan karena pandemi COVID-19. Pada 2022 dan 2023, festival kembali digelar masing-masing dua dan tiga kali. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan minat wisatawan serta memberikan hiburan kepada masyarakat lokal.

Objek budaya yang dilestarikan selama periode tersebut tetap stagnan di angka 7. Kondisi serupa juga terjadi pada jumlah kelompok seni seperti teater, musik tradisional, tari, dan sanggar kesenian. Stagnasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pelestarian, masih diperlukan langkah-langkah untuk menarik wisatawan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya. Penambahan objek budaya yang dilestarikan serta pembentukan sanggar kesenian baru dapat membuka peluang belajar bagi masyarakat lokal maupun wisatawan, yang pada akhirnya meningkatkan pariwisata dan perekonomian lokal.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, IPG Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dan tinggi, dengan nilai berkisar antara 93,72 hingga 94,24. Nilai IPG yang mendekati 100 mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di wilayah ini relatif kecil, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, nilai IDG menunjukkan tren yang cenderung menurun, dari 64,82 pada tahun 2020 menjadi 63,13 pada tahun 2024. Penurunan IDG ini mengindikasikan masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, keterwakilan di lembaga legislatif, dan peran strategis di sektor ekonomi formal. Gap antara IPG yang tinggi dan IDG yang rendah menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah menikmati akses yang relatif setara dalam pembangunan, namun keterlibatan mereka dalam posisi strategis dan pengambilan kebijakan masih belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan pemberdayaan perempuan menjadi isu penting yang harus diperkuat dalam perencanaan pembangunan ke depan, guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang lebih substansial di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 2. 42
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	93,78	93,72	93,83	94,24	94,24
2	Indeks Pemberdayaan Gender	64,82	65,70	63,57	63,13	63,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

b. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,392. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IKG mendekati angka 0 menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Dengan demikian, nilai 0,392 mengindikasikan bahwa meskipun sudah terdapat kemajuan dalam mendorong kesetaraan gender, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, khususnya dalam hal akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam pasar kerja formal.

Tabel 2. 43
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender	0,469	0,537	0,460	0,450	0,392

Sumber: LKJIP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Ketimpangan ini juga tercermin dalam data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024, di mana TPAK perempuan tercatat sebesar 63,72%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 85,73%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mengakses peluang ekonomi dan posisi strategis di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan intervensi yang lebih kuat dalam pemberdayaan perempuan, termasuk penyediaan akses pendidikan yang setara, pelatihan keterampilan berbasis gender, fasilitas penunjang seperti layanan penitipan anak, serta penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Upaya untuk menurunkan IKG menjadi penting dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Kabupaten Rejang Lebong.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan dua pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi dan sosial memperhitungkan dimensi gender. Selama periode 2020-2024, IPG di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren penurunan. Partisipasi tenaga kerja perempuan di lembaga-lembaga swasta juga menjadi salah satu indikator penting pemberdayaan perempuan. Pada 2022, lebih dari 57,21% tenaga kerja di sektor swasta di Kabupaten Rejang Lebong adalah perempuan. Namun, angka ini menurun pada 2023 menjadi 52,81%, yang mengindikasikan adanya tantangan terkait keberlanjutan kesetaraan gender dalam pasar kerja. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami apakah penurunan ini disebabkan oleh perubahan permintaan tenaga kerja atau karena adanya hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Kesempatan yang lebih besar untuk perempuan dapat meningkatkan produktivitas dan diversifikasi tenaga kerja, namun juga perlu memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses yang adil terhadap berbagai kesempatan ekonomi dan profesional.

d. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebesar 63,82. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga berada pada kategori sedang, dengan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk perbaikan. Indeks

ini disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Nilai 63,82 mengindikasikan bahwa sebagian keluarga di Rejang Lebong telah memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang memadai, namun belum sepenuhnya merata. Masih terdapat tantangan dalam aspek kemandirian ekonomi keluarga, kualitas pengasuhan anak, serta stabilitas hubungan dalam keluarga.

Tabel 2. 44
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	63,82

Sumber: Badan Pusat statistic Kabupaten Rejang Lebong 2020-2024

Capaian ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah karena pembangunan keluarga merupakan fondasi bagi keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan. Rendahnya nilai pada aspek-aspek tertentu, seperti akses pendidikan keluarga, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap anggota keluarga rentan, bisa menjadi faktor penghambat peningkatan indeks ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Rejang Lebong perlu diarahkan pada penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat melalui edukasi keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, peningkatan layanan konseling keluarga, dan sinergi antarprogram lintas sektor. Hal ini penting untuk menciptakan keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sebagai pondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

e. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 mencapai angka 64,45, yang menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak-anak yang memerlukan perhatian khusus telah berada pada tingkat sedang, namun masih membutuhkan peningkatan signifikan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi rentan, seperti anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak yang terdampak bencana atau eksploitasi. Nilai 64,45 menandakan bahwa sebagian besar intervensi dan kebijakan perlindungan sudah mulai berjalan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan optimal di seluruh wilayah Rejang Lebong.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi capaian ini antara lain keterbatasan layanan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan, belum optimalnya sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga layanan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Meningkatkan indeks ini bukan hanya tentang menanggulangi kasus, tetapi juga menciptakan sistem pencegahan yang kuat agar seluruh anak di Kabupaten Rejang Lebong dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan yang mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Evaluasi terhadap aspek daya saing ini mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan daerah untuk merumuskan strategi peningkatan daya saing secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, regulasi, dan konektivitas menjadi penentu utama dalam upaya meningkatkan posisi ekonomi suatu wilayah di pasar yang lebih luas.

2.1.3.1 Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebanyak 202.733 jiwa atau sebesar 70,19% dari total populasi, sedangkan penduduk usia non-produktif berjumlah 86.099 jiwa atau 29,81%. Komposisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong saat ini berada dalam fase bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada usia yang secara potensial mampu bekerja dan berkontribusi secara ekonomi. Kondisi ini merupakan peluang besar bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila diiringi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, akses pendidikan dan pelatihan vokasional, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Nilai rasio ketergantungan sebesar 42,47% menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung beban sekitar 42 orang penduduk usia non-produktif, baik anak-anak maupun lansia. Rasio ini tergolong rendah dan ideal untuk mendorong produktivitas ekonomi, karena beban tanggungan relatif ringan. Namun, peluang ini bisa menjadi tantangan apabila penduduk usia produktif tidak terserap dalam pasar kerja secara optimal atau tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan momentum bonus demografi ini melalui perencanaan pembangunan yang fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan sektor-sektor produktif agar potensi demografi ini dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Rejang Lebong.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas ekonomi Daerah

a. Inovasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah, serta menjelaskan bahwa perlu adanya inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah hingga lapisan masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, dinyatakan bahwa kunci kemajuan suatu daerah adalah kemampuan daerah untuk berinovasi dan menciptakan kreativitas serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rejang Lebong meningkat dari angka 40,69 di tahun 2023 menjadi 47,62 di tahun 2024. Namun posisi Kabupaten Rejang Lebong berada di peringkat ke-184 (inovatif) dari posisi sebelumnya 136 (inovatif) pada tahun 2023 dari 415 Kabupaten yang dilakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah seluruh Indonesia. Pada tingkat kabupaten/kota seprovinsi Bengkulu, posisi Kabupaten Rejang Lebong naik dari posisi ke-3 pada tahun 2023 menjadi pada posisi ke-2 pada tahun 2024. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan perhitungan dan rentang skor penilaian pada tahun 2020 sehingga menghasilkan nilai yang berbeda dengan tahun-tahun setelahnya. Dalam upaya untuk meningkatkan motivasi dalam berinovasi, Pemerintah Daerah mengadakan lomba inovasi daerah. Lomba ini wajib di ikuti oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (badan/dinas/bagian/kecamatan) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong minimal 1 inovasi setiap perangkat daerah.

Tabel 2. 45
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah	784 (inovatif)	44,07 (inovatif)	51,32 (inovatif)	40,69 (inovatif)	47,62 (inovatif)

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Adapun tingkat realisasi inovasi daerah dihitung dengan membandingkan antara Jumlah perangkat daerah yang memiliki inovasi dan Jumlah seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Sebanyak 28 dari 44 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga tingkat realisasi inovasi daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 dari 100% target yang ditetapkan hanya tercapai sebesar 63,64%

b. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2024 diukur dari Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2023. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

IDSD 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan IDSD 2023. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

Tabel 2. 46
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Daya Saing Daerah	n/a	2,41 (sedang)	2,94 (tinggi)	2,94 (tinggi)	3,19 (tinggi)

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

c. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah menggambarkan seberapa baik wilayah tersebut dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian terhadap kemampuan ekonomi daerah melibatkan berbagai aspek, seperti pengeluaran per kapita, komposisi pengeluaran, dan kondisi keuangan umum daerah. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren peningkatan dalam pengeluaran konsumsi per kapita. Kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2019 hingga 2023 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2020, realisasi pendapatan menunjukkan penurunan dari 1.094,94 miliar rupiah menjadi 998,56 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2021, pendapatan daerah kembali meningkat menjadi 1.010,04 miliar rupiah, meskipun tahun 2022 mencatatkan penurunan lagi. Pada tahun 2023, pendapatan daerah kembali menunjukkan kenaikan dengan realisasi sebesar 1.016,76 miliar rupiah. peningkatan persentase realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020, capaian pendapatan secara keseluruhan terus membaik dan mendekati atau bahkan melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan yang telah direncanakan. Sedangkan untuk belanja daerah di Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2019 hingga 2023 mengalami tren fluktuatif, namun cenderung meningkat. Meskipun ada

penurunan signifikan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, belanja daerah kembali meningkat dan mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir pada tahun 2023, yakni sebesar 996,46 miliar rupiah. Persentase realisasi belanja daerah juga mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 95,76%. Selain itu, pada tahun 2019 dan 2020, belanja daerah melebihi jumlah pendapatan yang mengakibatkan defisit anggaran, namun dari tahun 2021 hingga 2023, jumlah belanja lebih kecil daripada pendapatan, menciptakan surplus anggaran. Kondisi surplus ini dapat dimanfaatkan sebagai cadangan keuangan yang berpotensi meningkatkan ketahanan fiskal Kabupaten Rejang Lebong di masa depan.

d. Rasio Kewirausahaan

Sektor industri merupakan pilar penting dalam perekonomian Kabupaten Rejang Lebong. Pada 2023, terdapat 6 perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Rejang Lebong, yang mempekerjakan 198 tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor industri masih rendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Diperlukan peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan kerja agar mereka mampu bersaing di sektor industri dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

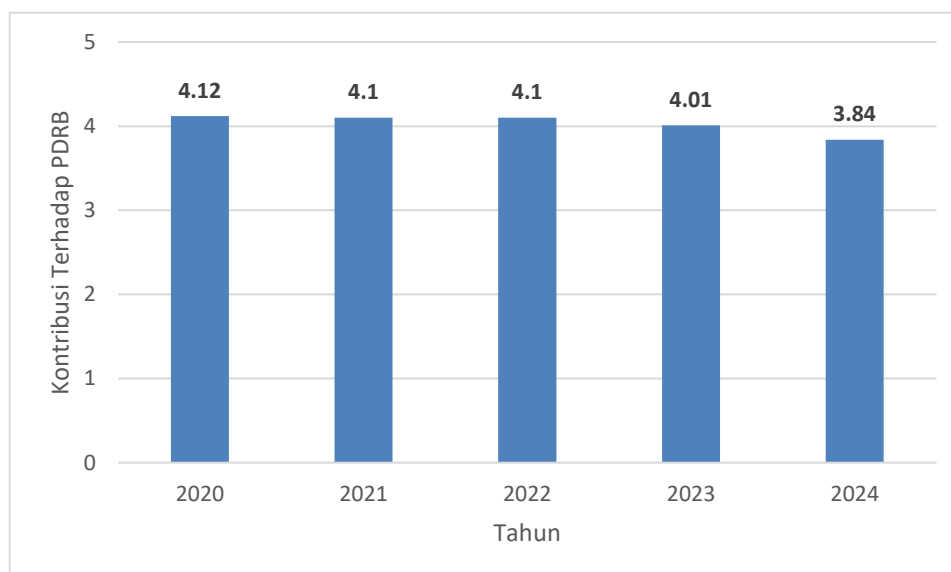
Tabel 2. 47
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Kab/Kota	Jumlah Perusahaan Sedang dan Besar	Tenaga Kerja pada Perusahaan Sedang dan Besar (orang)
Bengkulu Selatan	2	275
Rejang Lebong	6	198
Bengkulu Utara	14	1309
Kaur	3	-
Seluma	7	407
Mukomuko	16	1193
Lebong	1	22
Kepahiang	4	307
Bengkulu Tengah	7	690
Kota Bengkulu	21	647
Provinsi Bengkulu	81	5048

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong cenderung menurun, dari 4,12% pada 2020 menjadi 3,84 % pada 2024. Penurunan ini mencerminkan dampak pandemi global terhadap aktivitas industri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya pemulihan industri melalui pengembangan teknologi dan peningkatan investasi perlu dilakukan

agar sektor ini dapat kembali berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian lokal.

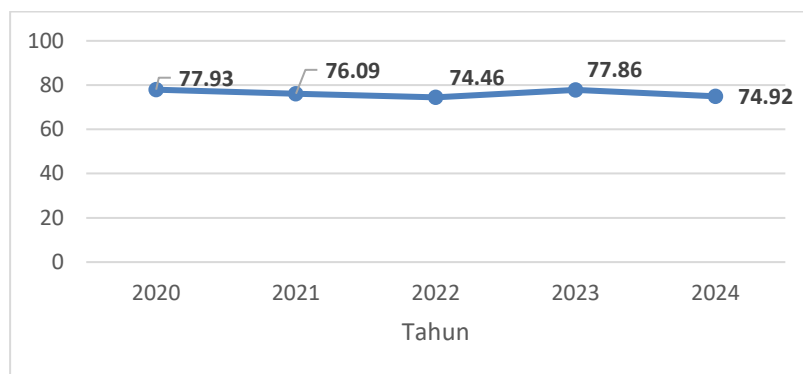


Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024.

Gambar 2. 16
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2020-2024

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio yang mengukur jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan populasi usia kerja, yang dinyatakan dalam persentase. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai individu yang berusia 15 tahun ke atas. Data statistik selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah individu yang terlibat pada berbagai tingkat pendidikan. Pada tahun 2022, tercatat peningkatan yang tajam pada jumlah individu yang menempuh pendidikan di tingkat SMA dan universitas, dengan masing-masing mencapai 1.247 dan 342 orang. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan, di mana jumlah individu pada tingkat SMA turun menjadi 55 orang dan di tingkat universitas menjadi 20 orang. Peningkatan yang drastis pada tahun 2022 mungkin disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, didukung oleh program beasiswa, peningkatan aksesibilitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan baru. Penurunan pada tahun 2023 dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang membatasi akses terhadap pendidikan tinggi, seperti penurunan dana beasiswa, perubahan preferensi karier, atau keraguan masyarakat terhadap manfaat pendidikan tinggi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.



Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024.

Gambar 2. 17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Berikut merupakan data jumlah pencari kerja terdaftar menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 2. 48
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Tahun	Tidak sekolah	Belum tamat SD	SD	SMP	SMA Sederajat	Diploma I/II/II/Akademi	Universitas	Total
2020	1	0	0	2	75	21	56	155
2021	0	0	0	2	61	40	112	215
2022	0	0	75	257	1247	342	222	2143
2023	27	0	2	3	55	9	20	116
2024	0	0	43	12	1187	114	105	1461

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020-2024.

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Rejang Lebong mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah pencari kerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 2.143 orang, yang sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pada tahun 2023, jumlah pencari kerja menurun drastis menjadi 116 orang, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 1.461 orang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pencari kerja di Kabupaten Rejang Lebong adalah lulusan SMA, diikuti oleh lulusan perguruan tinggi (universitas) dan diploma. Sementara itu, jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan rendah, seperti tidak sekolah, belum tamat SD, dan lulusan SD, relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pencari kerja umumnya berasal dari kelompok usia produktif yang telah menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi.

Tingginya angka pencari kerja dari lulusan SMA dan perguruan tinggi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dan pelatihan kerja, agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Dengan memahami pola dan latar belakang pendidikan pencari kerja, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran, serta mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Rejang Lebong.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Rejang Lebong merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi daerah memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, serta pemerataan manfaat bagi masyarakat. Melalui indeks ini dapat dilihat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup, misalnya melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pengendalian emisi dan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, serta perlindungan kawasan ekosistem penting. Bagi Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pariwisata alam, penerapan konsep ekonomi hijau menjadi sangat relevan. Indeks ini dapat menjadi alat evaluasi dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi, seperti pemanfaatan lahan, pengembangan destinasi wisata, maupun kegiatan industri kecil dan menengah, tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang berdampak negatif bagi keberlanjutan. Selain itu, ekonomi hijau juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru, mendorong inovasi usaha ramah lingkungan, serta meningkatkan daya tarik investasi berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan capaian Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Rejang Lebong bukan hanya mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang. Pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasi lintas sektor, memperluas program hijau berbasis masyarakat, serta memastikan kebijakan pembangunan sejalan dengan prinsip ramah lingkungan agar indeks ini terus mengalami peningkatan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Komunikasi dan informasi merupakan fondasi penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi di era digital. Kabupaten Rejang Lebong terus meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dengan penambahan Base Transceiver Station (BTS) yang signifikan dari 2020 hingga 2023. Peningkatan ini meningkatkan akses terhadap jaringan seluler dan internet, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Akses yang lebih baik terhadap teknologi informasi juga membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan meningkatkan kualitas hidup.

Pada tahun 2024, persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Rejang Lebong hanya sebesar 6,8%, sedangkan persentase aplikasi yang dikembangkan mencapai 37,4%. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pengembangan sistem digital (aplikasi) dengan kesiapan infrastruktur yang menopang pemanfaatannya. Rendahnya ketersediaan infrastruktur TIK – yang mencakup jaringan internet, perangkat keras, pusat data, serta fasilitas penunjang lainnya – menjadi hambatan utama dalam mendukung transformasi digital yang inklusif dan efisien di daerah. Hal ini dapat berdampak pada keterbatasan akses layanan digital, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil yang infrastruktur TIK-nya belum memadai.

Sementara itu, tingginya persentase aplikasi yang dikembangkan (37,4%) menunjukkan bahwa secara kebijakan dan inisiatif, pemerintah daerah sudah memiliki komitmen dan upaya untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Namun tanpa infrastruktur yang memadai, aplikasi-aplikasi tersebut berisiko tidak digunakan secara optimal, bahkan menjadi tidak relevan bagi sebagian besar masyarakat yang tidak dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang terintegrasi antara pengembangan sistem digital dan pembangunan infrastruktur dasar TIK. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu mempercepat pembangunan jaringan internet yang merata, meningkatkan kapasitas SDM TIK, serta memperluas literasi digital masyarakat agar seluruh potensi digitalisasi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong efisiensi layanan, partisipasi publik, dan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

2.1.3.5 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Infrastruktur Wilayah

Indeks Infrastruktur wilayah merupakan indikator pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas infrastruktur yang ada di suatu wilayah. Berdasarkan data Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, terlihat bahwa kondisi infrastruktur mengalami penurunan dalam periode 2022–2024. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 29,95, namun menurun menjadi 26,75 pada 2023, dan kembali turun signifikan menjadi 16,94 pada tahun 2024. Tren penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam ketersediaan maupun kualitas infrastruktur wilayah, baik dari aspek aksesibilitas, jaringan transportasi, maupun sarana pendukung lainnya. Penurunan indeks ini dapat berimplikasi pada berkurangnya daya saing daerah serta keterhambatan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan infrastruktur secara merata, perawatan sarana yang ada, serta optimalisasi pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang perlu ditempuh agar indeks infrastruktur wilayah dapat kembali meningkat dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah.

Tabel 2. 49
Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Wilayah	n/a	n/a	29,95	26,75	16,94

Sumber : LPPD Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024

1) Kondisi Jalan

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren perkembangan yang positif dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, jalan beraspal mendominasi jenis permukaan jalan, dengan peningkatan panjang dari 509,363 km pada tahun 2020 menjadi 540,062 km pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan upaya pemerintah daerah dalam pengaspalan jalan guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah. Sementara itu, panjang jalan dengan permukaan beton relatif stabil, berkisar antara 2,500 km hingga 3,584 km, menunjukkan bahwa jalan beton belum menjadi pilihan utama dalam pembangunan jalan di daerah ini. Di sisi lain, jalan berkerikil dan jalan tanah mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan signifikan pada jalan tanah, dari 74,100 km pada tahun 2020 menjadi 41,100 km pada tahun 2024. Penurunan panjang jalan tanah ini dapat diartikan sebagai keberhasilan konversi jalan tidak mantap menjadi jalan yang lebih baik secara teknis dan fungsional. Meskipun demikian, masih adanya jalan berkerikil dan tanah dalam jumlah cukup besar menunjukkan perlunya perhatian berkelanjutan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat aksesibilitas rendah. Dengan demikian, penguatan infrastruktur jalan tetap menjadi aspek strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akselerasi pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Tabel 2. 50
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Tahun	Aspal	Beton	Kerikil	Tanah
2020	509,363	3,584	71,320	74,100
2021	486,537	2,500	106,030	63,300
2022	536,447	2,500	67,070	52,350
2023	529,532	2,500	68,185	58,150
2024	540,062	2,700	74,508	41,100

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2022-2025

2) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Selama lima tahun terakhir, rasio rumah layak huni di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, rasio rumah layak huni tercatat sebesar 0,221 dan meningkat tajam menjadi 0,539 pada tahun 2024. Peningkatan ini merupakan sinyal positif terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dari semakin banyaknya rumah dengan kondisi layak huni. Sementara itu, persentase luas kawasan

kumuh menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, luas kawasan kumuh tercatat sebesar 0,057%, kemudian menurun menjadi 0,027% pada tahun 2021–2022. Namun, pada tahun 2023 angka ini kembali naik menjadi 0,038% dan bertahan pada level yang sama hingga 2024. Meski tergolong kecil, tren peningkatan pada dua tahun terakhir perlu menjadi perhatian agar kawasan kumuh tidak berkembang kembali.

Sejalan dengan itu, persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani juga mengalami fluktuasi. Dari 56,13% pada tahun 2020, angka ini meningkat hingga mencapai 80,08% pada tahun 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan drastis menjadi 19,45% dan tidak mengalami perubahan hingga 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam upaya penanganan kawasan kumuh, baik dari sisi pendanaan, prioritas program, maupun kendala teknis di lapangan. Secara keseluruhan, kemajuan pada indikator rumah layak huni menjadi capaian penting yang perlu dipertahankan, namun fluktuasi pada penanganan kawasan kumuh menuntut evaluasi menyeluruh. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan upaya yang lebih konsisten dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh, melalui penguatan program, kolaborasi lintas sektor, dan pelibatan aktif masyarakat.

Tabel 2. 51
Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio (unit/jiwa)	0,221	0,224	0,224	0,539	0,539
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Persen	0,057	0,027	0,027	0,038	0,038
3	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani	persen	56,13	79,54	80,08	19,45	19,45

Sumber: Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rejang Lebong, 2025

Rekomendasi strategis untuk mempercepat perbaikan kawasan permukiman, pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran data kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni secara berkala agar intervensi program lebih tepat sasaran dan menghindari duplikasi. Penanganan kawasan kumuh harus mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran swasta, masyarakat, dan program pemerintah melalui skema *Community Action Plan* (CAP), CSR, padat karya tunai, serta pemanfaatan DAK, Dana Desa, dan program KOTAKU atau BSPS. Pelaksanaan program perlu dilakukan secara bertahap berbasis zonasi prioritas, menyasar wilayah dengan kepadatan tinggi, infrastruktur minim, dan risiko sosial atau lingkungan terbesar, disertai rencana pengelolaan pasca-penanganan agar kawasan yang sudah tertangani tidak kembali kumuh. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, jalan lingkungan, dan akses air bersih harus menjadi prioritas, dengan penyediaan rumah layak huni yang memperhatikan keterjangkauan, keamanan, dan akses terhadap layanan publik. Selain itu, penguatan

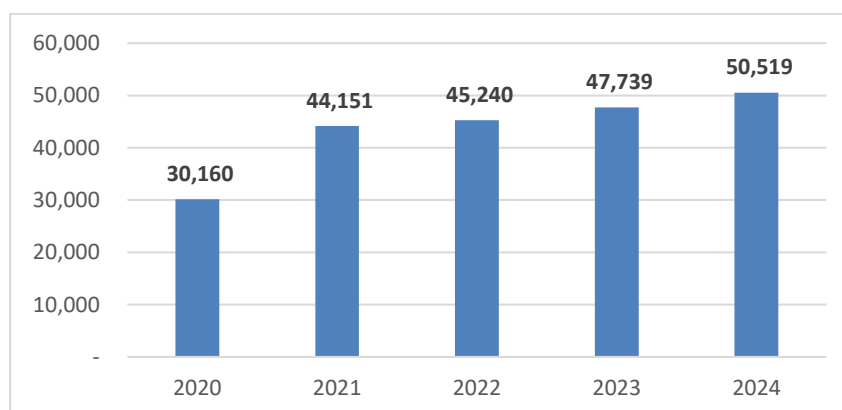
kelembagaan lokal serta pengawasan partisipatif perlu dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

3) Jaringan Irigasi

Pada tahun 2024, kualitas jaringan irigasi di Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam kondisi baik mencapai 84,68%. Meskipun capaian ini tergolong cukup tinggi, data dari Dinas PUPRPKP menunjukkan bahwa masih terdapat jaringan irigasi dengan kondisi rusak sepanjang 24,118 km dari total panjang irigasi 221,429 km. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian infrastruktur irigasi kewenangan daerah masih membutuhkan perhatian khusus, mengingat keberfungsianannya sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan layanan irigasi dan produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, perbaikan, pemeliharaan, serta peningkatan kualitas jaringan irigasi perlu menjadi prioritas dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

b. Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode 2020–2024, dengan rata-rata kunjungan tahunan sebesar 43.526 wisatawan. Tahun 2024 mencatat jumlah kunjungan tertinggi, yakni 50.519 wisatawan, sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 30.160 wisatawan akibat pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19. Setelah mengalami penurunan signifikan di tahun 2020, jumlah wisatawan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 44.151 wisatawan.



Sumber: Dinas Pariwisata 2020-2024

Gambar 2. 18
Jumlah Pengunjung Wisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Tren pertumbuhan ini terus berlanjut hingga 2024, mengindikasikan pemulihan sektor pariwisata daerah yang relatif cepat serta efektivitas strategi promosi dan pengembangan destinasi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Kenaikan kunjungan wisata ini mencerminkan semakin meningkatnya daya tarik Kabupaten Rejang Lebong sebagai tujuan wisata, baik dari sisi keberagaman destinasi alam dan budaya maupun perbaikan sarana

pendukung pariwisata. Namun, meskipun tren positif telah terbentuk, masih terdapat peluang pengembangan, terutama dalam peningkatan kualitas infrastruktur, diversifikasi paket wisata, serta perluasan jangkauan promosi ke pasar wisatawan domestik dan mancanegara.

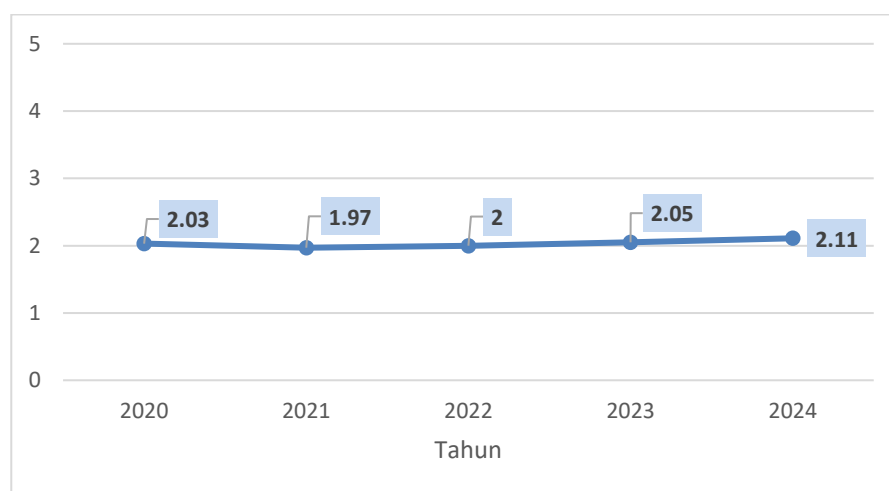
Jika dilihat dari jumlah kunjungan wisata ke tiga destinasi unggulan di Kabupaten Rejang Lebong yakni Suban Air Panas, Danau Mas Harun Bastari, dan Bukit Kaba mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, baik dari wisatawan lokal maupun asing. Fenomena ini menjadi indikator penting bahwa sektor pariwisata daerah belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID- 19 serta belum menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Pada destinasi wisata Suban Air Panas memiliki rata-rata kunjungan sekitar 13.290 pengunjung per tahun, dengan tren penurunan konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun termasuk destinasi legendaris dan memiliki nilai historis maupun potensi ekowisata, penurunan ini mengindikasikan adanya kejenuhan pasar, terbatasnya inovasi atraksi wisata, dan kurangnya revitalisasi infrastruktur serta promosi yang dilakukan. Selanjutnya pada destinasi wisata Danau Mas Harun Bastari juga menunjukkan penurunan kunjungan yang lebih tajam, baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan rata-rata kunjungan sekitar 11.398 pengujung per tahun, hal ini mencerminkan turunnya daya tarik dan minimnya pembaruan atraksi atau program berbasis wisata keluarga dan budaya local. Berbeda dengan dua destinasi sebelumnya, destinasi Bukit Kaba yang merupakan destinasi dengan potensi wisata alam dan geowisata menjadi destinasi wisata dengan rata-rata kunjungan tertinggi dengan rata-rata kunjungan sekitar 18.488 pengunjung per tahun. Dengan potensi alam berupa keindahan gunung api dan jalur pendakian yang menantang, Bukit Kaba berpeluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi unggulan Rejang Lebong, terutama jika didukung oleh peningkatan aksesibilitas, promosi yang lebih luas, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Berdasarkan fenomena fluktuasi jumlah pengunjung tersebut, maka rekomendasi strategis peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan revitalisasi produk dan atraksi wisata, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, pemasaran dan promosi digital yang lebih massif, pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif, kemitraan dan investasi pariwisata, monitoring dan evaluasi kunjungan secara berkala

Tabel 2. 52
Jumlah Pengunjung Tempat Wisata Tahun 2020-2024

Tempat Wisata		2020	2021	2022	2023	2024
Suban Air Panas	Lokal	10.148	16.697	11.400	14.498	13.700
	WNA	5	-	-	-	-
Danau Mas Harun	Lokal	8.002	9.343	16.276	14.750	8.621
	WNA	-	-	-	-	-
Bukit Kaba	Lokal	12.010	18.111	17.564	18.494	26.162
	WNA	10	-	22	32	34

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Kontribusi sektor pariwisata yang tercermin dari lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Periode 2020-2024 mencatat adanya kenaikan kontribusi, meskipun tergolong moderat. Namun, dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 menyebabkan penurunan signifikan, dengan kontribusi sektor ini hanya mencapai 1,97 persen dari total PDRB. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan pembatasan sosial dan penurunan drastis kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Mulai tahun 2022 dan berlanjut ke 2024, sektor ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Peningkatan kontribusi terhadap PDRB serta pertumbuhan jumlah wisatawan mengindikasikan bahwa sektor pariwisata mulai kembali menggeliat, seiring pelonggaran kebijakan mobilitas, promosi wisata lokal, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata berbasis alam dan budaya.



Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2022-2024.

Gambar 2. 19
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

Meskipun demikian, secara relatif kontribusi sektor ini masih tergolong rendah dibandingkan sektor-sektor utama lainnya seperti pertanian, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sektor pariwisata di Rejang Lebong belum dioptimalkan secara maksimal. Rendahnya kontribusi ini dapat disebabkan oleh beberapa factor, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan, belum optimalnya diversifikasi produk wisata dan atraksi budaya local, minimnya investasi swasta dalam fasilitas akomodasi dan jasapenunjang wisata, dan lemahnya sinergi antar-stakeholder dan promosi digital yang masih terbatas.

Kontribusi PAD sektor pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong meningkat dari 0,23 tahun 2022 menjadi 0,35 tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata, baik melalui peningkatan kunjungan

wisatawan, perbaikan tata kelola pajak dan retribusi, maupun penyelenggaraan event yang menarik minat pengunjung. Meski demikian, angka kontribusi tersebut masih relatif kecil terhadap total PAD, sehingga sektor pariwisata belum menjadi penopang utama keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas destinasi, penguatan promosi, serta pengelolaan penerimaan yang lebih optimal perlu terus dilakukan agar pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pendapatan daerah.

Tabel 2. 53
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	n/a	n/a	0,23	0,25	0,35

Sumber: LKJIP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Rekomendasi strategis terhadap penguatan sektor pariwisata Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

1. Pemetaan dan Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan (*flagship Tourism*) dimana fokus pada pengembangan destinasi dengan keunikan lokal seperti wisata alam (Suban Air Panas, Danau Mas Harun Bastari), wisata budaya, dan wisata agro (kopi, hortikultura), serta penguatan kalender event tahunan daerah.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Penunjang Pariwisata seperti pembangunan dan perbaikan akses jalan ke destinasi, fasilitas MCK, papan informasi wisata, pusat oleh-oleh, serta digitalisasi layanan informasi pariwisata (melalui website atau aplikasi).
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Pelaku Ekonomi Kreatif seperti pelatihan bagi pelaku usaha wisata, homestay, kuliner lokal, dan UMKM ekonomi kreatif, dengan menanamkan nilai-nilai *hospitality*, *storytelling* lokal, serta *digital marketing*.
4. Kolaborasi dengan Swasta dan Masyarakat dalam Model Ekowisata dan Desa Wisata melalui kemitraan pemerintah-swasta-komunitas dalam pengelolaan destinasi berbasis keberlanjutan, penguatan kelembagaan Pokdarwis, dan pengembangan desa wisata tematik.
5. Optimalisasi Promosi Pariwisata Berbasis Digital dan Jejaring Regional Bangun sistem informasi wisata yang terintegrasi dengan peta digital, media sosial, *virtual tour*, dan koneksi ke portal nasional seperti *Indonesia.travel*, serta jalin kerja sama promosi lintas kabupaten/kota dalam satu kawasan strategis (e.g. Rejang Lebong–Curup–Kepahiang).
6. Integrasi Sektor Pariwisata dengan Ekonomi Kreatif dan Produk Lokal dengan mengembangkan rantai nilai dari pariwisata dengan memperkuat produk lokal seperti kopi khas Rejang Lebong, kerajinan tangan, kuliner khas, hingga seni budaya lokal agar menjadi daya tarik ekonomi baru.

c. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Rejang Lebong terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun peningkatannya relatif lambat. IDM mencerminkan kondisi pembangunan desa dan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar, menciptakan peluang ekonomi, serta mengurangi kemiskinan. Indeks desa membangun Kabupaten Rejang Lebong naik 0,069 dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Pembangunan desa semakin membaik dari tahun ke tahun,

Di sisi lain, persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang atau maju mencapai 40,98% pada 2022-2024. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih diperlukan upaya lebih untuk mendorong BUMDesa agar dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

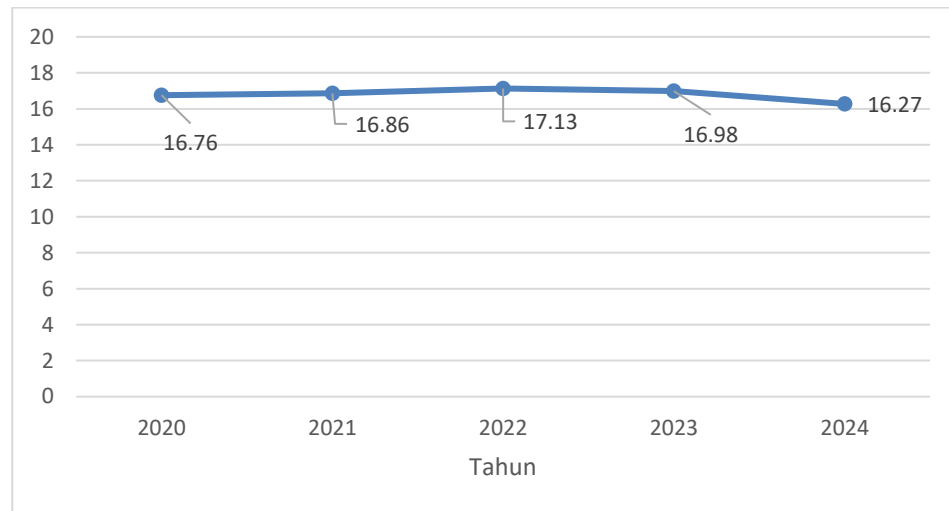
Tabel 2. 54
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa Membangun	0,6212	0,6461	0,6740	0,6909	0,6909
2	Persentase BUMDesa yang berkembang atau maju	26,23	8,19	40,98	40,98	40,98

Sumber: LKJIP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

d. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong, yang diukur melalui sektor Perdagangan Besar dan Eceran, menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, sektor ini tetap menjadi salah satu penyumbang utama terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020, sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 16,76 persen, nilai ini merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi secara luas. Seiring dengan proses pemulihan ekonomi, kontribusi sektor ini kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 16,93 persen dan 17,13 persen. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 kontribusinya kembali menurun tipis. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa pemulihan sektor perdagangan pasca pandemi masih berlangsung dan belum sepenuhnya stabil, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti daya beli masyarakat, transformasi pola konsumsi, dan adaptasi terhadap digitalisasi perdagangan.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2025

Gambar 2. 20
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2020-2024

Dari perspektif struktural, sektor perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong menghadapi sejumlah tantangan seperti dominasi pelaku usaha informal, keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan teknologi, serta kurangnya diversifikasi produk yang berdampak pada rendahnya nilai tambah. Selain itu, infrastruktur logistik yang belum optimal turut memengaruhi efisiensi distribusi barang dan konektivitas antarwilayah. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke arah digital juga belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan ekosistem perdagangan lokal, sehingga pelaku usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam beradaptasi.

Dalam konteks ini, diperlukan upaya sistematis dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk memperkuat fondasi sektor perdagangan melalui berbagai strategi yang bersifat transformasional. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas UMKM, modernisasi pasar rakyat, pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi perdagangan, serta peningkatan akses terhadap pasar dan pembiayaan. Perluasan kemitraan antara pelaku usaha besar dan kecil, penguatan promosi produk lokal, serta penyusunan regulasi daerah yang mendukung iklim usaha yang sehat menjadi elemen penting dalam mendorong sektor perdagangan menjadi lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten, sektor perdagangan diharapkan tidak hanya kembali ke tingkat kontribusi pra-pandemi, tetapi juga berkembang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

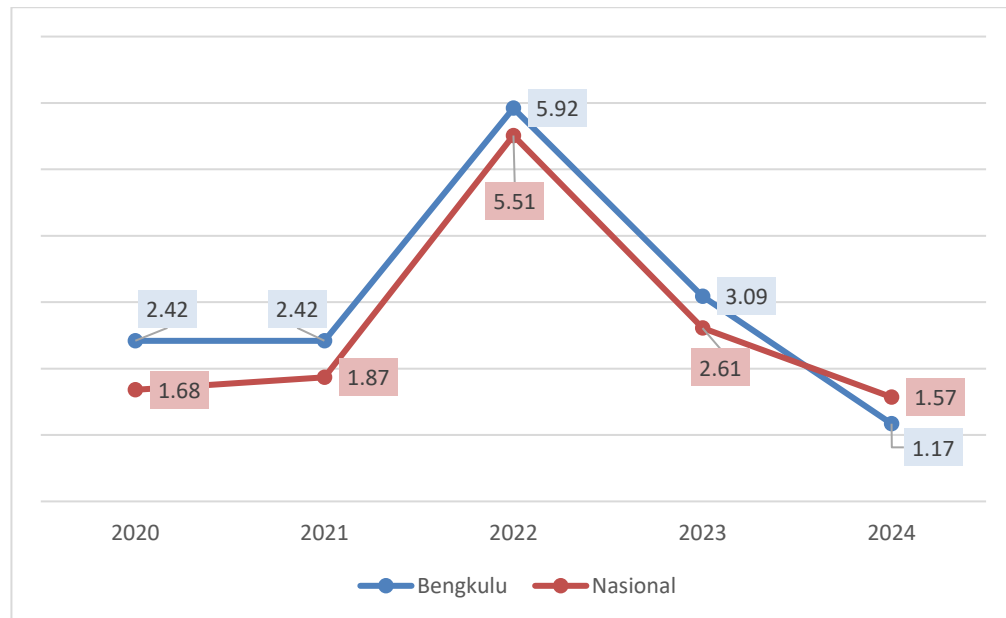
a. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas perekonomian suatu wilayah. Secara konseptual, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Kenaikan inflasi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, seperti meningkatkan suku bunga yang pada akhirnya memperlambat iklim investasi. Sebaliknya, inflasi yang terkendali berpotensi menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan kondusif bagi pertumbuhan. Inflasi di Kota Bengkulu sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur inflasi di seluruh Provinsi Bengkulu, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dikarenakan kota tersebut berfungsi sebagai pusat ekonomi regional, sehingga pergerakan inflasinya cenderung merepresentasikan tren yang terjadi di wilayah sekitarnya.

Pada periode tahun 2020-2024, laju inflasi di Kota Bengkulu cenderung mengalami fluktuasi. Nilai inflasi Kota Bengkulu cenderung lebih tinggi dari inflasi nasional. Nilai inflasi Kota Bengkulu pada tahun 2022 mengalami perubahan, pada angka 5,92 persen. Inflasi tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada bulan April sebesar 1,45 persen di mana Kota Bengkulu menempati urutan ke-13 dari 90 kota yang dipantau tingkat inflasinya. Pemicu inflasi pada bulan April 2022 ini disebabkan oleh naiknya harga minyak goreng, mobil, kue kering berminyak, rokok kretek filter, rokok putih, angkutan udara, cabai merah, ikan dencis, daging ayam ras, dan beras. Nilai Inflasi terendah Kota Bengkulu adalah pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,17 persen. Hal ini disebabkan karena penurunan kebutuhan penting seperti pangan dan distribusi perhubungan. Secara nasional, harga komoditas tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023. Penurunan tahun 2024 ini seiring dengan pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global. Harga komoditas utamanya energi dan pangan global yang mengalami penurunan di tahun 2024 berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral berbagai negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi IHK pada Desember 2024 tercatat rendah sebesar 0,44% (mtm) sehingga inflasi IHK 2024 menjadi 1,57% (yoy). Perkembangan inflasi 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2023 yang tercatat sebesar 2,61% (yoy) dan berada di rentang sasaran yang telah ditetapkan pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar 2,5 –1,0 persen. Inflasi yang terjaga dalam kisaran sasarannya merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah termasuk beras dan komoditas pangan strategis lainnya, dari dampak El Nino. Selain itu, terjaganya inflasi juga dipengaruhi oleh terbatasnya penyesuaian harga energi yang dilakukan oleh pemerintah, sinergi

kebijakan pengendalian inflasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta suku bunga acuan yang dijaga pada tingkat moderat. Pada tahun 2024, Kota Bengkulu mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, tercatat hanya sebesar 1,17 persen, lebih rendah dibanding capaian nasional yang berada diangka 1,57 persen. Kondisi ini menandai penurunan signifikan dibanding tahun 2022 dan 2023, Ketika pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu mencapai 5,92 persen dan 3,09 persen, melebihi capaian nasional.

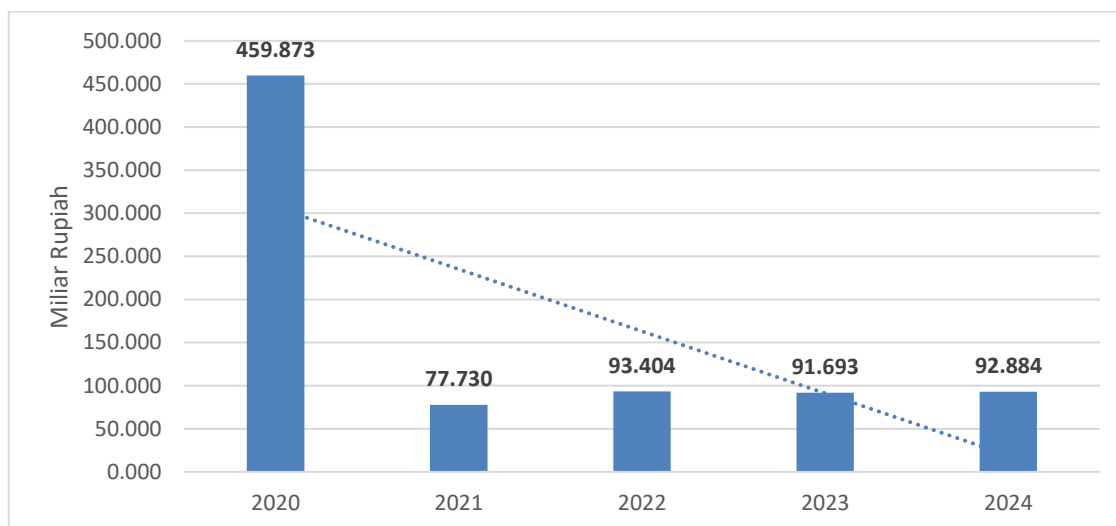


Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Gambar 2. 21
Laju Inflasi Kota Bengkulu dan Nasional Tahun 2020-2024

b. Nilai Investasi Daerah

Nilai investasi daerah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun tajam dibandingkan awal periode. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat sangat tinggi yaitu Rp459,87 miliar, namun pada tahun 2021 turun drastis menjadi Rp77,73 miliar. Meskipun sempat mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2022 sebesar Rp93,40 miliar, capaian investasi kembali stagnan pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai masing-masing Rp91,69 miliar dan Rp92,88 miliar. Pola ini mengindikasikan bahwa setelah lonjakan besar di awal periode, arus investasi ke daerah belum mampu kembali ke level yang sama, sehingga perlu perhatian serius dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Upaya peningkatan daya tarik investasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, promosi potensi unggulan daerah, serta penguatan kerja sama dengan pihak swasta dan investor strategis. Dengan strategi tersebut, diharapkan nilai investasi daerah dapat kembali meningkat secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Gambar 2. 22
Nilai Investasi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Perencanaan Pembangunan

Kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 yaitu sebesar 22,10, dimana meningkat dari nilai sebesar 18,27 pada tahun 2020. Sedangkan untuk nilai pengukuran kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 15,66, meningkat dari tahun 2020 dengan nilai 12,83.

Tabel 2. 55
Nilai Perencanaan Pembangunan dan Pengukuran Kinerja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Perencanaan Kinerja	18,27	19,34	21,83	22,03	22,10
2	Nilai Pengukuran Kinerja	12,83	14,07	14,55	14,82	15,66

Sumber: Kemenpan RB, 2024

b. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.. Pada dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 menyebutkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Tahun 2024 merupakan tahun keenam bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memperoleh opini WTP dari BPK, capaian ini merupakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Tabel 2. 56
Opini BPK Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, Pemkab Rejang Lebong 2025

c. Kepegawaian

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebesar 58,87, dengan persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi mencapai 80,29%. Angka indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN masih berada pada kategori sedang. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 76,25. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penguatan dalam berbagai aspek, seperti integritas, etika kerja, kemampuan teknis, serta pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Meskipun mayoritas ASN telah memenuhi standar kompetensi secara formal, hal ini belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja dan profesionalisme secara keseluruhan. Kesenjangan antara tingkat kompetensi dan nilai indeks profesionalitas menunjukkan bahwa pemenuhan kompetensi teknis saja belum cukup, melainkan perlu diiringi oleh penguatan aspek perilaku kerja, loyalitas terhadap organisasi, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat.

Tabel 2. 57
Perkembangan Kepegawaian di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

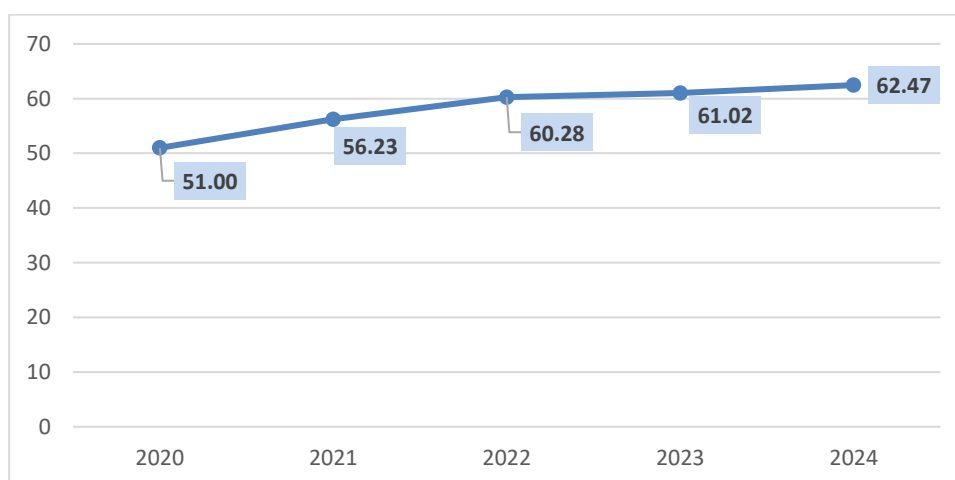
No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalitas ASN	41,16	73,59	63,22	76,25	58,87

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Kondisi ini menandakan pentingnya peningkatan kapasitas ASN secara berkelanjutan melalui pelatihan berbasis kebutuhan riil, pembinaan etika birokrasi, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan dan objektif. Selain itu, reformasi birokrasi yang mendorong budaya kerja profesional, inovatif, dan berorientasi hasil juga menjadi kunci dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN. Dengan profesionalitas yang lebih tinggi, diharapkan ASN di Kabupaten Rejang Lebong mampu menjadi motor penggerak pelayanan publik yang efektif dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

d. Akuntabilitas

Definisi Operasional Nilai SAKIP adalah Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Oleh Kementerian PAN dan RB. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Capaian kinerja nilai SAKIP menunjukkan kenaikan yang signifikan membaik selama tahun 2016 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 SAKIP Kabupaten Rejang Lebong berhasil memperoleh predikat B untuk pertama kali dengan nilai 60,28 dan meningkat 0,74 poin pada tahun 2023 dengan nilai 61,02 serta hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 62,47 dengan predikat “B”.

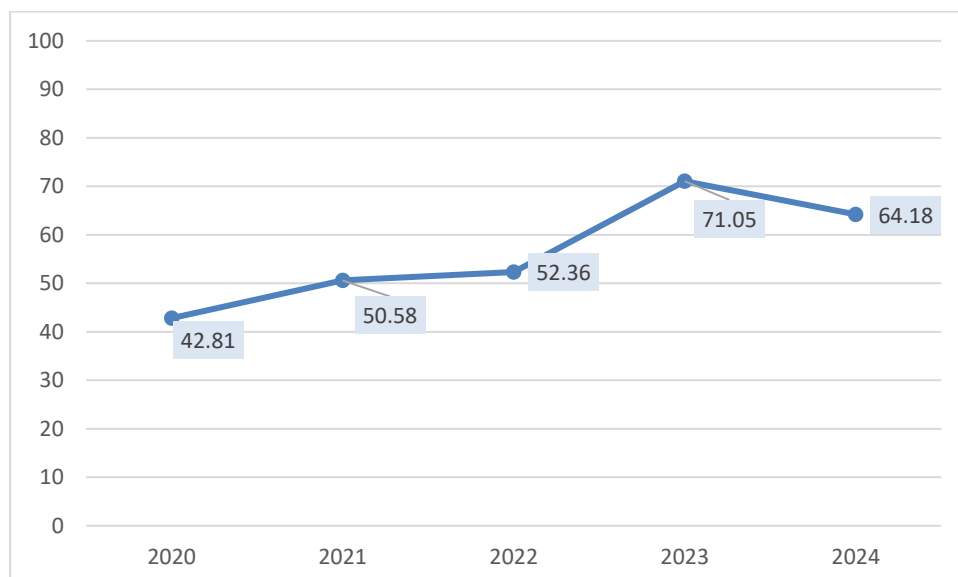


Sumber : LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, Pemkab Rejang Lebong 2025

Gambar 2. 23

Progress Nilai SAKIP Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020-2024

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan realisasi BB. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai komitmen tentang reformasi birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong, diantaranya dengan langsung mengadakan monitoring pada unsur-unsur reformasi birokrasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Rejang Lebong maupun Wakil Bupati Rejang Lebong, seperti monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan



Sumber : LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, Pemkab Rejang Lebong 2025

Gambar 2. 24

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

e. Kepatuhan dan kerangka hukum

Pada tahun 2024, Kabupaten Rejang Lebong mencatat capaian yang sangat baik dalam aspek legislasi daerah, dengan persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mencapai 100%, serta ketepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD juga berada pada angka 100%. Capaian ini mencerminkan kinerja legislatif dan eksekutif daerah yang solid, efektif, dan terkoordinasi dalam menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Penetapan seluruh Ranperda menunjukkan bahwa agenda legislasi yang telah dirancang dapat diwujudkan secara penuh sesuai dengan target tahunan, sementara ketepatan penetapan Perda APBD menjadi indikator penting atas kepatuhan terhadap siklus penganggaran serta kesiapan daerah dalam menjamin kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik.

Interpretasi dari capaian ini mengarah pada adanya tata kelola pemerintahan daerah yang relatif baik, khususnya dalam hal perencanaan hukum dan fiskal. Namun demikian, meskipun capaian kuantitatif sudah optimal, perlu ditinjau pula dari sisi kualitas substansi regulasi dan implementasinya di lapangan. Efektivitas pelaksanaan Perda dan realisasi program yang dibiayai melalui APBD tetap menjadi tolok ukur utama dari keberhasilan legislatif. Oleh karena itu, capaian 100% ini sebaiknya menjadi motivasi untuk menjaga kualitas penyusunan kebijakan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan benar-benar membawa dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

Indeks reformasi hukum merupakan alat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan regulasi yang telah berjalan. Tujuannya memastikan regulasi yang diterapkan tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan regulasi tingkat atas. Indeks reformasi hukum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 mencapai 76,86 dengan predikat BB (baik), nilai ini mengikat dari tahun sebelumnya yaitu 76,74 dengan predikat BB(baik). Peningkatan ini menunjukkan bahwa peraturan yang berjalan di Kabupaten Rejang lebong sudah tepat guna dan tepat sasaran.

Tabel 2. 58
Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	n/a	n/a	n/a	76,74 BB(Baik)	76,86 BB(Baik)

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

f. Pemberdayaan Masyarakat

1) Indeks Keberdayaan Masyarakat

Indeks keberdayaan masyarakat dihitung dari tiga komponen yakni persentase pemberdayaan kelompok masyarakat, persentase desa/kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bintal, dan persentase pemuda berdaya saing. Pada komponen persentase pemberdayaan kelompok masyarakat meliputi pelaksanaan kegiatan fasilitasi yang dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Kelompok Pemanfaat Teknologi Tepat Guna. Sebanyak 85 BUMDesa telah terfasilitasi dari jumlah keseluruhan sebanyak 122 BUMDesa. Dan Sebanyak 491 kelompok Pemanfaat Teknologi Tepat Guna di 14 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong juga telah memperoleh fasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Pada komponen persentase desa/Kelurahan yang menjadi sasaran penerima pelatihan bina mental spiritual, terdapat 67 desa/Kelurahan dari sebanyak 156 desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong telah mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya jumlah pemuda berdaya saing yang terdiri dari pemuda kader, pemuda wirausaha, pemuda berprestasi dan pemuda pelopor sebanyak 842 orang. Dari jumlah tersebut pembinaan dilakukan terhadap 20 orang pemuda kader, 200 orang pemuda wirausaha, dan 100 orang pemuda pelopor. Kegiatan yang menysasar kelompok Pemuda Pelopor bertujuan untuk menempa sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian. Berdasarkan komponen tersebut maka diketahui nilai Indeks keberdayaan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 adalah 39,22.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren positif selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKM berada pada angka 80,68 (kategori Baik). Nilai tersebut meningkat menjadi 84,15 pada tahun 2024, atau naik sebesar 3,35 poin. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja pelayanan publik yang konsisten, sekaligus menunjukkan bahwa berbagai program perbaikan tata kelola dan inovasi pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Peningkatan IKM ini tidak hanya sekadar menunjukkan kualitas layanan yang lebih baik, tetapi juga mengindikasikan perbaikan pada aspek-aspek kunci pelayanan publik, seperti kecepatan, ketepatan prosedur, responsivitas petugas, transparansi biaya, dan ketersediaan sarana prasarana.

Tabel 2. 59
Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,68	83,23	83,11	84,25	84,15

Sumber: LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

g. Pemanfaatan Teknologi

Indeks SPBE Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3,24. Penilaian ini naik secara signifikan dari nilai yang ditargetkan, dan akan tetap ditingkatkan kualitas penerapan SPBE dan kualitas pelayanan publik pada intansi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Penilaian Indeks SPBE ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dimulai pada Tahun 2024. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pemerintah Daerah melaksanakan prinsip terintegrasi dan terpadu dalam menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Tabel 2. 60
Indeks Sistem Pemertintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	1.62	1.84	2.80	3.23	3.24

Sumber: RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026, Bappeda 2025

Penerapan SPBE diukur dengan model Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan Nilai Indeks SPBE Kabupaten Rejang Lebong meningkat dari tahun 2020 hanya sebesar 1.62 menjadi 3.24. Nilai ini terdiri atas 4 (empat) Indeks yaitu Domain Kebijakan SPBE dengan nilai 3,60, Domain Tata Kelola SPBE dengan nilai 3,00, Domain Manajemen SPBE dengan nilai 2,09, dan Domain Layanan SPBE dengan nilai sebesar 3,69. Indeks SPBE ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya pemerintah digital dalam kerangka transformasi digital pemerintah.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, Demokrasi Substansial

a. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode 2020 hingga 2024, indikator ketenteraman di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan perbaikan. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 tetap stabil di angka 99% dari 2021 hingga 2023. Namun, persentase pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2019 menjadi 90,5% pada 2023. Selain itu, indeks risiko bencana meningkat dari 100,71 pada 2019 menjadi 119,28 pada 2023, yang menunjukkan peningkatan potensi bencana. Namun, persentase kesiapsiagaan dan pencegahan bencana meningkat signifikan dari 25,58% pada 2019 menjadi 110% pada 2023, yang mencerminkan upaya mitigasi dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2. 61
Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

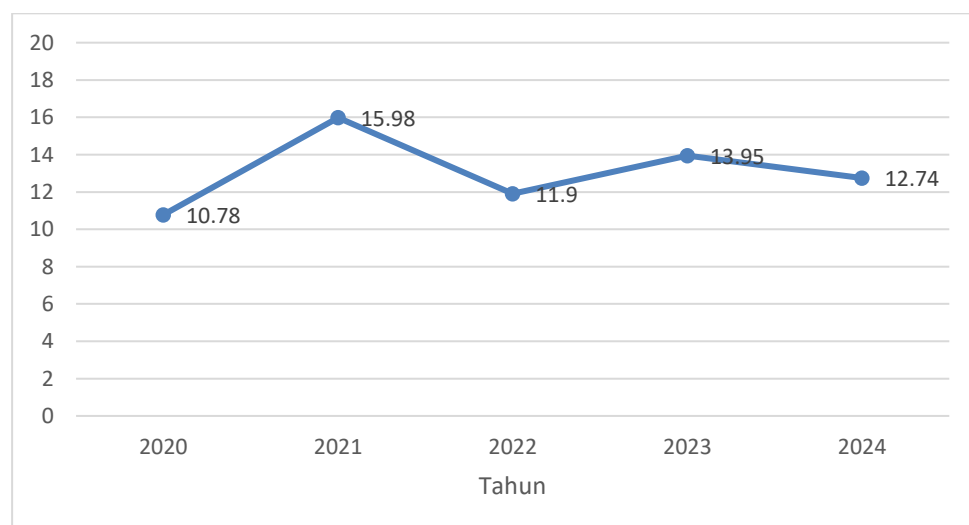
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	100	90,5	90,5	100
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Persen	92,86	99	99	99	99
3	Indeks Risiko Bencana	persen	100,71	92,58	100,51	119,28	112,35
4	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	persen	25,58	12,00	110	110	110
5	Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi oleh SATPOL PP	Kasus	n/a	76	74	76	76

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Pelanggaran K3 yang Terselesaikan	Kasus	n/a	76	74	76	76
7	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Sarana dan Prasaran untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	n/a	n/a	4	2	...
9	Pelanggaran Perda	Kasus	n/a	30	76	76	76
10	Penyelesaian Penegakan Perda	kasus	n/a	22	76	76	76
11	Persentase Perda yang ditegakkan	Persen	n/a	30,99	100	100	53,57

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, 2025; Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, 2025; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2025

b. Angka Kriminalitas

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan. Kesejahteraan ini menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana kedamaian dan keamanan terjaga dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan pencapaian kesejahteraan ekonomi adalah terkendalinya angka kriminalitas. Ketika kesejahteraan meningkat, Tingkat kriminalitas cenderung menurun, karena tekanan ekonomi yang memicu tindak kejahatan berkurang. Penurunan angka kriminalitas menunjukkan adanya stabilitas sosial dan ekonomi, serta distribusi sumber daya yang lebih merata dalam masyarakat, yang merupakan prinsip penting dalam kebijakan makroekonomi yang berhasil.



Sumber : LPPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Gambar 2. 25
Angka Kriminalitas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

Pada tahun 2023, angka kriminalitas kembali mengalami peningkatan menjadi 13,95. Meskipun tidak setinggi puncak tahun 2021, tren ini menunjukkan bahwa masalah keamanan dan ketertiban masih memerlukan perhatian. Namun tahun 2024 angka kriminalitas Kembali menurun. Kesenambungan antara kebijakan ekonomi dan sosial, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan lapangan kerja, akan sangat penting untuk menekan angka kriminalitas secara konsisten.

2.1.5 KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Perusahaan Daerah Rena Skalawi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rejang Lebong didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perusahaan daerah Rena Skalawi dengan tujuan strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, terutama di sektor agribisnis yang meliputi bidang ; a. Usaha hortikultura dan sayur mayur; b. Usaha peternakan; c. Usaha perikanan; d. Usaha perkebunan; e. Industri dan processing (pengolahan); f. Percetakan; 9. Distributor; dan/atau h. Lain-lain kegiatan yang menguntungkan.

Sejak pendirian perusahaan daerah renah skalawi sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan penyertaan modal mencapai 3,2 miliar rupiah. BUMD ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan hasil bumi. Namun, PD Rena Skalawi mengalami permasalahan struktural yang serius dalam tata kelola dan manajemennya, yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan selama lebih dari satu dekade.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 mengidentifikasi beberapa kelemahan fundamental, termasuk ketidakadaan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi dan minimnya mekanisme pengawasan oleh pengurus. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai kinerja laba-rugi serta kekaburan mengenai posisi ekuitas perusahaan atas penyertaan modal pemerintah. Selain itu, kondisi pasar agribisnis yang kompetitif, kurangnya inovasi dalam rantai pasokan, serta terbatasnya akses pasar turut memperburuk posisi PD Rena Skalawi di tengah persaingan.

Untuk menghadapi kondisi yang kompleks ini, rekomendasi strategis yang diusulkan adalah Restrukturisasi PD Rena Skalawi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagaimana amanat PP 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya dalam rangka penyehatan BUMD untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD. Melalui Restrukturisasi BUMD diharapkan agar Perusahaan

Daerah Rena Skalawi dapat beroperasi kembali secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

Perkembangan perumda selanjutnya lebih terfokus pada bidang Agribisnis, Eko-Agro Wisata, dan Jasa Layanan yang menyentuh langsung Masyarakat. pengembangan usaha, terutama melalui inovasi teknologi dan perluasan pasar sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Dengan fokus pada pengembangan agribisnis dan eko-agro wisata yang berpotensi besar di pasar domestik dan internasional, Perumda ini diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekspor serta meningkatkan daya saing komoditas lokal.

Potensi Unggulan Kabupaten Rejang antara lain kopi dan aren. Melihat tren permintaan pasar kopi dan produk-produk organik yang terus meningkat, dan dengan perbaharuan manajemen BUMD Kabupaten Rejang Lebong yang modern, diharapkan Rejang Lebong dapat menjadi pusat pengembangan agribisnis dan eko-agro wisata berkelanjutan.

Langkah ini juga akan memberikan dampak positif bagi petani lokal. Peningkatan kesejahteraan petani dapat diwujudkan melalui akses yang lebih luas ke pasar dan sumber daya investasi yang lebih besar. Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, penelitian akademis juga mendukung bahwa keberhasilan agribisnis tidak hanya bergantung pada dukungan finansial, tetapi juga pada penerapan teknologi inovatif, penguatan rantai pasok, dan akses pasar yang terdiversifikasi. Dengan demikian, Restrukturisasi BUMD ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor agribisnis di Kabupaten Rejang Lebong serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara moneter, termasuk aset daerah yang terkait dengan pelayanan publik dan pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif sangat penting untuk menjamin keberlanjutan fiskal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah (Halim, 2017).

Analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas fiskal daerah dalam mendanai program pembangunan, yang diukur melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu diperlukan kajian perkembangan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta neraca daerah (aset, utang, dan ekuitas dana) sebagai indikator kesehatan keuangan daerah.

Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif terhadap data APBD Kabupaten Rejang Lebong periode 2020-2024. Indikator yang digunakan meliputi:

1. Pendapatan Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan

daerah, dan lain-lain.

- 2) Pendapatan Transfer: Dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan transfer lainnya.
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah: Hibah dan pendapatan lain sesuai peraturan.
2. Belanja Daerah:
 - 1) Belanja Operasi (gaji, pemeliharaan), Belanja Modal (infrastruktur), Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
3. Pembiayaan Daerah:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan (pinjaman, sisa lebih anggaran).
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan (pembayaran utang, investasi).

Analisis juga ditujukan untuk mengukur kemandirian fiskal daerah yang mencakup rasio rasio keuangan seperti:

1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (RKKD): PAD terhadap total pendapatan.
2. Rasio Ketergantungan: Transfer pusat terhadap total pendapatan.
3. Rasio Efektivitas Belanja Modal: Kontribusi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2024

2.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah elemen fundamental dalam struktur keuangan pemerintah daerah. Ini mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu daerah otonom memiliki sumber-sumber pendapatan yang bervariasi, baik yang bersumber dari potensi lokal (Pendapatan Asli Daerah/PAD) maupun dari transfer pemerintah pusat dan provinsi. Analisis terhadap pendapatan daerah periode 2020-2024 dapat memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi indikator untuk mengevaluasi kebijakan fiskal daerah.

Sebagai bagian integral dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, analisis terhadap capaian realisasi pendapatan APBD menjadi indikator krusial dalam menilai efektivitas perencanaan fiskal. Berikut disajikan tabel komparatif antara anggaran pendapatan dan realisasinya selama periode 2020-2024, yang mengungkap dinamika kinerja fiskal pemerintah daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi, termasuk pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Data ini tidak hanya menunjukkan tingkat pencapaian target pendapatan dalam persentase, tetapi juga memberikan dasar empiris untuk mengidentifikasi pola-pola struktural, tantangan sistemik, serta peluang perbaikan dalam pengelolaan APBD. Tabel berikut dilengkapi dengan analisis deskriptif yang memungkinkan pemahaman tren makro, variasi kinerja antar tahun, serta kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan fiskal daerah.

Tabel 2. 62
Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Pendapatan terhadap APBD
2020	1.074.955.270.123,09	998.564.715.728,17	92,89
2021	1.053.729.449.415,00	1.010.044.776.350,81	95,85
2022	1.007.770.887.262,37	1.001.737.466.557,93	99,40
2023	1.060.683.868.913,00	1.016.764.426.861,19	95,86
2024	1.164.623.522.680,00	1.081.649.717.303,39	92,88

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2020-2024; Kementerian Keuangan 2025.

Tabel di atas menunjukkan data rencana anggaran pendapatan (APBD) dan realisasi pendapatan pemerintah selama lima tahun (2020–2024), beserta persentase realisasi terhadap target. Secara deskriptif, terlihat bahwa realisasi pendapatan selalu lebih rendah dari anggaran. Anggaran tertinggi terjadi pada 2024 (Rp1.164 triliun), sedangkan yang terendah pada 2022 (Rp1.007 triliun). Realisasi terbaik terjadi di 2022 (99,40%), sementara yang terburuk di 2024 (92,88%), menunjukkan variasi kinerja yang dipengaruhi faktor eksternal maupun internal.

Data realisasi pendapatan daerah selama periode 2020-2024 memperlihatkan dinamika yang menarik dalam pengelolaan keuangan daerah. Tren alokasi anggaran menunjukkan pola fluktuasi dengan bentuk kurva-U, di mana nilai anggaran sempat mengalami penurunan dari Rp1,074 triliun pada 2020 ke titik terendah Rp1,007 triliun di 2022, sebelum akhirnya kembali naik mencapai Rp1,164 triliun di 2024. Namun yang patut menjadi perhatian adalah realisasi pendapatan yang secara konsisten berada di bawah target, dengan rata-rata pencapaian sebesar 95,61% dan deviasi standar 2,19%, mengindikasikan adanya kesenjangan yang bersifat sistemik antara perencanaan dan implementasi.

Tahun 2020 menjadi tahun dengan realisasi terburuk sebesar 92,89%, sebuah penurunan signifikan sebesar 7,11 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi nasional sebesar 2,07% serta penurunan pendapatan pajak daerah hingga 20%. Di sisi lain, tahun 2022 justru mencatat prestasi terbaik dengan realisasi mencapai 99,40%, mendekati target yang ditetapkan. Pencapaian ini kemungkinan besar didorong oleh efek pemulihan ekonomi pasca pandemi serta berbagai langkah efisiensi dalam administrasi pendapatan daerah.

Secara lebih mendalam, analisis mengungkap beberapa masalah struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Lemahnya korelasi antara perubahan anggaran dan peningkatan realisasi menunjukkan adanya bias optimisme dalam proses perencanaan. Hal ini terlihat jelas pada periode 2023-2024 dimana terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp80 triliun namun

tidak diikuti dengan peningkatan yang signifikan dalam realisasi pendapatan. Selain itu, tingginya deviasi standar kinerja antar tahun mengindikasikan variasi kapasitas fiskal yang besar, yang mungkin disebabkan oleh ketergantungan berlebihan pada sumber pendapatan yang tidak terkendali seperti transfer pusat.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi perbaikan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja, penguatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, serta peningkatan kapasitas administrasi keuangan daerah. Transformasi digital dalam sistem pemungutan pajak dan penerapan sistem monitoring *real-time* dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Dengan berbagai pembenahan ini, diharapkan kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran dapat semakin diminimalisir, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Untuk meningkatkan kinerja ke depan, pemerintah perlu memperbaiki akurasi perencanaan anggaran, memperkuat basis pendapatan daerah, dan mengantisipasi guncangan ekonomi. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengevaluasi sumber pendapatan (PAD, transfer, hibah) untuk mengidentifikasi sektor yang paling bermasalah.

Tabel 2. 63
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi					Rerata Pertumbuhan (% per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	PENDAPATAN	998,564,715,728.17	1,010,044,776,350.81	1,001,737,466,557.93	1,016,764,426,861.1₉	1,081,649,717,303.39	+1.61
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	69,190,495,179.09	69,785,794,622.81	73,997,889,433.93	63,646,344,564.19	62,942,583,363.39	-1.88
4.1.1.	Pajak Daerah	13,683,226,133.00	14,746,102,795.42	16,909,677,686.25	18,742,623,855.50	17,364,389,572.00	+4.88
4.1.2.	Retribusi Daerah	1,883,767,824.00	2,373,989,650.00	1,681,368,280.00	3,268,178,978.00	2,717,800,850.00	+7.61
4.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1,789,389,098.79	2,158,663,422.26	1,425,402,316.68	2,014,534,035.68	1,761,169,260.77	-0.32
4.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	51,834,112,123.30	50,507,038,755.13	53,981,441,151.00	39,621,007,695.01	41,099,223,680.62	-4,54
4.2.	Pendapatan Transfer	883,069,152,972.08	903,981,624,728.00	926,638,577,124.00	937,825,990,324.00	979,693,032,554.00	+2.10
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	866,997,078,491.00	859,013,362,900.00	875,546,549,544.00	895,200,676,843.00	946,408,561,036.00	+1.77
4.2.1.1	Dana Perimbangan	736,291,503,291.00	730,518,465,300.00	765,020,946,144.00	783,334,917,143.00	830,184,276,036.00	+2.43
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	18,029,763,000.00	15,951,233,000.00	6,277,307,000.00	5,758,419,000.00	8,936,579,000.00	-13.10
4.2.1.5	Dana Desa	112,675,812,200.00	112,543,664,600.00	104,248,296,400.00	106,107,340,700.00	107,287,706,000.00	-0.98
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16,072,074,481.00	44,968,261,828.00	51,092,027,580.00	42,625,313,481.00	33,284,471,518.00	+15.67
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	16,072,074,481.00	44,968,261,828.00	50,992,027,580.00	42,625,313,481.00	33,284,471,518.00	+15.67
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	100,000,000.00	-	-	

No.	Uraian	Realisasi					Rerata Pertumbuhan (% per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	46,305,067,577.00	36,277,357,000.00	1,101,000,000.00	15,292,091,973.00	39,014,101,386.00	-3.37
4.3.1	Pendapatan Hibah	38,653,767,577.00	36,277,357,000.00	1,101,000,000.00	2,874,000,000.00	1,032,000,000.00	-51.55
4.3.2	Dana Darurat	7,651,300,000.00	-	-	-	24,466,275,000.00	+26.17
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	12,418,091,973.00	13,515,826,386.00	+4.33

a. Analisis Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong terbagi dalam tiga komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Masing-masing komponen tersebut mengalami perkembangan yang bervariasi selama periode 2020–2024, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan yang berfluktuasi. Pertumbuhan rata-rata ini menjadi kunci untuk memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah, serta potensi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan lokal. Berdasarkan data yang ada, rata-rata pertumbuhan PAD selama periode 2020–2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, Realisasi PAD tercatat sebesar Rp. 69,19 miliar, namun di akhir periode pada tahun 2024, realisasi PAD menurun menjadi Rp. 62,94 miliar. Rata-rata pertumbuhan tahunan PAD adalah negatif (-1,88%). Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya lokal atau penurunan dalam efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.

1. Pendapatan Pajak Daerah mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,88% per tahun. Dari Rp.13,68 miliar di tahun 2020, pendapatan ini mencapai Rp.17,36 miliar di tahun 2024. Peningkatan ini merupakan sinyal positif dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas basis pajak.
2. Pendapatan Retribusi Daerah, meskipun fluktuatif, menunjukkan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7.61%. Retribusi daerah meningkat dari Rp.1,88 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.2,72 miliar pada tahun 2024. Ini menandakan adanya peningkatan intensitas pelayanan publik yang diiringi oleh kebijakan penyesuaian tarif retribusi.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar -0,32%. Nilai tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar Rp.2,16 miliar, namun turun menjadi Rp.1,76 miliar pada 2024. Penurunan ini menunjukkan tantangan dalam pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, yang mungkin disebabkan oleh penurunan pendapatan dari investasi atau pengelolaan aset.

4. Lain-lain PAD yang Sah juga mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan -4,54% per tahun. Dari Rp. 51,83 miliar pada tahun 2020, komponen ini turun drastis menjadi Rp. 41,09 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan pendapatan daerah atau hilangnya beberapa sumber penerimaan yang tidak masuk kategori utama PAD.

Secara keseluruhan, PAD sebagai komponen yang murni bersumber dari kemampuan daerah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena penurunan signifikan pada Lain-lain PAD yang Sah, yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur PAD. Ini menandakan perlunya evaluasi dan inovasi dalam kebijakan fiskal daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mencakup transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Komponen ini adalah bagian terbesar dari pendapatan daerah dan memiliki peran krusial dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan ini merupakan transfer dari pemerintah pusat dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 1.77%. pendapatan ini terdiri dari komponen :

1) Dana Perimbangan

Anggaran ini merupakan sub-komponen terbesar dalam Pendapatan Transfer. Dana ini tumbuh secara moderat dengan rata-rata pertumbuhan 2,43% per tahun. Pada tahun 2020, nilai Dana Perimbangan tercatat sebesar Rp.736,29 miliar dan meningkat menjadi Rp. 830,18 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan moderat ini mencerminkan stabilitas dalam aliran dana dari pusat.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran ini mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -13,10% per tahun. Dana ini turun dari Rp. 18,03 miliar pada 2020 menjadi Rp. 8.94 miliar pada 2024. Anggaran ini diberikan sebagai penghargaan kinerja oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020 anggaran ini dialokasikan untuk penanganan covid-19, sedangkan pada tahun 2021 dialokasikan untuk penanganan stunting.

3) Dana Desa

Anggaran ini mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -0,98% per tahun. Dana ini turun dari Rp. 112,68 miliar pada 2020 menjadi Rp. 107,29 miliar

pada 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya perubahan kebijakan pusat yang berdampak pada alokasi dana penyesuaian atau dana desa.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15.67% per tahun. Pada tahun 2020, nilai dana ini hanya Rp. 16,07 miliar, tetapi pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 33,28 miliar. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan bagi hasil dari provinsi dari sektor pajak, bea balik nama dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok.

2) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan hanya ada pada 1 tahun dalam periode lima tahun terakhir. Realisasi anggaran ini hanya pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 100 Juta yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Secara keseluruhan, Pendapatan Transfer tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2.10%. Transfer ini memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung anggaran daerah, meskipun ketergantungan pada dana dari pusat dan provinsi dapat meningkatkan risiko fiskal apabila terjadi perubahan kebijakan yang mendadak.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan komponen yang bersifat insidental dan tidak rutin, namun tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

1. Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan -51,55% per tahun, dari Rp. 38,65 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp. 1,03 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa pendapatan hibah bersifat tidak terduga dan sangat tergantung pada kebijakan pemberi hibah, baik dari pemerintah pusat maupun swasta.

2. Dana Darurat

Dana ini hanya muncul di dua tahun, yaitu 2020 dan 2024, dengan nilai yang cukup signifikan pada 2024 sebesar Rp. 24,47 miliar. Dana darurat ini mungkin terkait dengan penanganan situasi darurat seperti bencana alam atau kondisi krisis lainnya.

3. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pendapatan ini hanya ada dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 12,42 miliar menjadi Rp. 13,52 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 4.33%. Pendapatan ini merupakan realisasi atas Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas.

Secara keseluruhan, Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,37% per tahun, mencerminkan sifat insidental dan ketidakpastian dari pendapatan jenis ini.

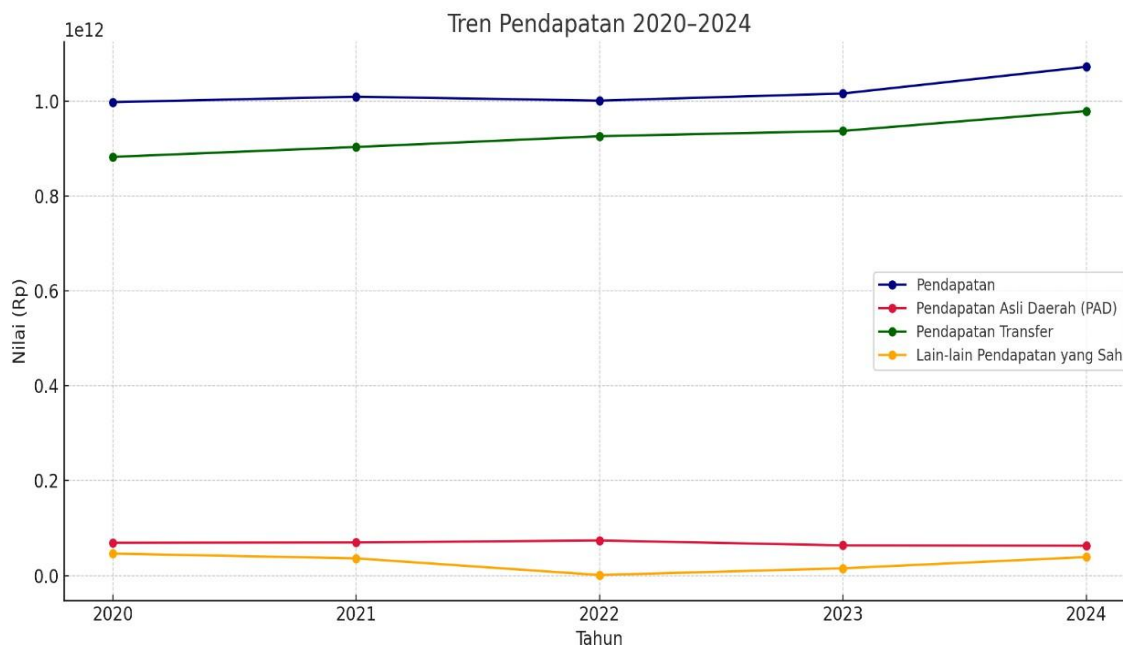
Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2020–2024 mengalami pertumbuhan yang bervariasi pada setiap komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tekanan dengan rata-rata pertumbuhan negatif, sementara Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan provinsi menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa sub-komponen. Ketergantungan pada pendapatan transfer, terutama dana perimbangan dan bagi hasil sumber daya alam, masih sangat tinggi, yang menunjukkan perlunya strategi diversifikasi pendapatan untuk mengurangi risiko fiskal di masa mendatang.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam menggali potensi lokal, memperluas basis pajak, serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Selain itu, upaya penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi juga sangat penting untuk memastikan stabilitas aliran dana transfer. Analisis rata-rata pertumbuhan menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa sumber pendapatan yang tumbuh positif, tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan pertumbuhan ini dan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber pendapatan yang tidak stabil atau bersifat insidental.

Dengan memperhatikan dinamika ini, kebijakan fiskal yang adaptif dan inovatif akan sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong.

b. Kemandirian Fiskal Pendapatan

Kemandirian fiskal merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai belanja dan pembangunan dari sumber daya keuangannya sendiri. Dalam konteks ini, rasio PAD terhadap total pendapatan atau terhadap pendapatan transfer menjadi salah satu ukuran langsung. Kecilnya rasio PAD menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal, yang berdampak pada fleksibilitas pengambilan kebijakan dan alokasi sumber dayapembangunan.



Gambar 2. 26
Tren Total Pendapatan APBD Rejang Lebong 2020-2024

Struktur pendapatan daerah pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang timpang antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Secara nominal, PAD hanya berkontribusi sekitar 6–7% dari total pendapatan daerah per tahun, sementara porsi pendapatan transfer mencapai lebih dari 85%. Hal ini menandakan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi, yang menjadi isu struktural dalam kemandirian keuangan daerah.

Kesenjangan antara PAD dan pendapatan transfer mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang rendah, yang dapat diukur dari rasio PAD terhadap total pendapatan atau terhadap pendapatan transfer. Rendahnya kontribusi PAD mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai belanja secara mandiri tanpa bantuan transfer. Akibatnya, ruang fiskal untuk berinovasi, mendanai program strategis, dan merespons kebutuhan lokal menjadi sangat terbatas karena bergantung pada ketentuan pusat.

Tingkat kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada besar kecilnya pendapatan transfer, tetapi juga pada sejauh mana daerah mampu menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan positif pada pendapatan pajak dan retribusi menunjukkan bahwa terdapat peluang yang bisa diperluas. Namun, kelemahan dalam pengelolaan aset daerah, minimnya kontribusi BUMD, serta penurunan tajam dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan perlunya revitalisasi strategi PAD.

Beberapa faktor penghambat yang dapat didiagnosis meliputi: keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam pemungutan pajak/retribusi, lemahnya basis data objek pajak, belum optimalnya digitalisasi sistem perpajakan daerah, serta rendahnya partisipasi pelaku ekonomi lokal dalam menciptakan nilai tambah yang dapat dikenakan pungutan daerah. Selain itu, dukungan kebijakan fiskal pusat yang belum sepenuhnya asimetris dan insentif untuk meningkatkan PAD juga masih terbatas.

Kemandirian fiskal harus dibangun dari dua sisi: peningkatan kapasitas penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta efisiensi belanja dan alokasi anggaran agar menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan aset-aset daerah seperti tanah, bangunan, fasilitas publik, dan potensi pariwisata harus ditata ulang sebagai sumber pendapatan potensial, termasuk melalui skema kerja sama investasi (PPP) yang sehat dan berkelanjutan.

Grafik batang berikut menunjukkan perbandingan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2020–2024. Terlihat jelas bahwa kontribusi PAD sangat rendah dan stagnan, berkisar antara 6% hingga 7% per tahun. Sebaliknya, Pendapatan Transfer mendominasi struktur penerimaan daerah dengan porsi lebih dari 85% setiap tahunnya. Fenomena ini menandakan ketimpangan yang mencolok dalam komposisi sumber pendanaan, di mana daerah masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk membiayai kebutuhan fiskalnya.

Ketergantungan yang tinggi terhadap Pendapatan Transfer menandakan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. PAD yang idealnya mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan membiayai urusan pemerintahan sendiri justru berada pada titik lemah. Ketidakseimbangan ini dapat berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal daerah untuk berinovasi, menyesuaikan kebijakan pembangunan secara mandiri, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD menjadi kunci krusial dalam memperkuat otonomi fiskal daerah dan mengurangi risiko fiskal akibat fluktuasi transfer dari pemerintah pusat.



Gambar 2. 27
PAD dan Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan

Berdasarkan hasil diagnosis, dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten masih berada pada level rendah, tercermin dari dominasi pendapatan transfer dan lemahnya kontribusi PAD yang bahkan mengalami penurunan rata-rata. Ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi menciptakan kerentanan fiskal, mengurangi fleksibilitas kebijakan pembangunan daerah, dan memperlemah kedaulatan fiskal.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah melalui pendataan ulang objek pajak, digitalisasi layanan perpajakan, dan reformasi peraturan daerah yang sudah tidak relevan.
- Pengembangan unit usaha milik daerah dan aset produktif, serta revitalisasi peran BUMD dalam menciptakan nilai tambah ekonomi lokal.
- Peningkatan kapasitas SDM fiskal daerah, termasuk aparatur pengelola PAD dan perencana keuangan daerah.
- Kolaborasi lintas sektor dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal untuk menggali potensi ekonomi mikro dan kreatif yang dapat dikenakan pungutan secara sah.
- Penyusunan *roadmap* peningkatan PAD dengan indikator tahunan yang terukur dan disinergikan dengan target-target makro RPJMD serta kebijakan fiskal nasional.

Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, peningkatan PAD bukan sekadar opsi teknis, melainkan jalan menuju fiskal daerah yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.2.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam pencapaian pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Tabel berikut menyajikan data belanja dan transfer daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2020 hingga 2024. Data tersebut tidak hanya menunjukkan nilai absolut, melainkan juga mencerminkan tren pertumbuhan tiap komponen anggaran. Dalam analisis ini, rata-rata pertumbuhan tahunan (*Compound Annual Growth Rate/CAGR*) dihitung untuk mengetahui laju pertumbuhan yang sesungguhnya selama lima tahun periode tersebut. Pendekatan melalui perhitungan CAGR membantu mengeliminasi fluktuasi antar tahun sehingga menghasilkan gambaran tren yang lebih akurat dan dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan fiskal. Dengan demikian, analisis akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai:

1. Pertumbuhan belanja operasional dan modal,
2. Perubahan pada sub-komponen seperti belanja pegawai, belanja barang, investasi infrastruktur, serta
3. Stabilitas aliran dana transfer.

Sehingga dengan pemahaman ini, dalam pengambilan kebijakan diharapkan dapat merumuskan strategi yang efisien guna mengoptimalkan pengeluaran serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan investasi daerah.

Tabel 2. 64
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	BELANJA	1,033,916,525,051.88	996,206,558,327.44	983,787,598,866.37	996,460,377,864.60	1,095,100,426,165.43	+6,13
5.1	Belanja Operasi	731,286,606,727.25	716,109,013,207.44	711,826,234,913.27	706,849,952,736.82	779,033,584,616.43	+1,57
5.1.1	Belanja pegawai	419,337,862,301.00	470,435,686,677.44	441,876,852,276.27	420,919,669,469.60	481,225,245,773.03	+2.79
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	264,151,816,221.25	197,956,419,233.00	213,688,926,836.00	219,533,382,135.22	247,888,797,295.40	-1.26
5.1.5	Belanja Hibah	47,584,163,205.00	47,716,907,297.00	55,140,435,801.00	66,396,901,132.00	49,919,541,548.00	+0.96
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	212,765,000.00	-	1,120,020,000.00	-	-	N/a
5.2	Belanja Modal	84,679,969,726.63	104,031,642,891.00	98,362,158,753.10	120,764,334,327.78	145,185,172,749.00	+11.39
5.2.1	Belanja Modal Tanah	127,357,000.00	1,593,000,000.00	-	-	-	N/a
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,612,739,440.00	18,579,741,516.00	23,126,849,797.00	18,999,946,237.00	29,392,569,746.00	-0.81
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,058,178,303.00	31,361,987,963.00	30,406,257,756.10	31,525,906,804.78	35,600,040,906.00	+0.89
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	18,046,448,732.73	52,274,113,412.00	44,649,701,200.00	70,024,029,286.00	76,418,041,197.00	+33,46
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1,835,246,250.90	222,800,000.00	179,350,000.00	214,452,000.00	2,703,420,900.00	+8.05
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	1,071,100,000.00	N/a
5.3	Belanja Tak Terduga	46,955,885,698.00	6,680,156,229.00	491,965,050.00	75,530,000.00	-	-79.97
5.3.1	Belanja Tak Terduga	46,955,885,698.00	6,680,156,229.00	491,965,050.00	75,530,000.00	-	-79.97
5.4	Belanja Transfer	170,994,062,900.00	169,385,746,000.00	173,107,240,150.00	168,770,560,800.00	170,881,668,800.00	-0.01
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	170,994,062,900.00	169,385,746,000.00	173,107,240,150.00	168,770,560,800.00	170,881,668,800.00	-0.01
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(35,351,809,323.71)	13,838,218,023.37	17,949,867,691.56	20,304,048,996.59	(13,450,708,862.04)	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024, 2025

a. Analisis Realisasi Belanja

Realisasi total belanja daerah menunjukkan nilai yang meningkat dari Rp. 1,033.92 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,095.10 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan sebesar 6,13% per tahun mengindikasikan bahwa alokasi dana untuk belanja daerah mengalami peningkatan moderat, yang merupakan refleksi dari peningkatan kapasitas dan alokasi anggaran daerah guna memenuhi tuntutan operasional dan investasi.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi kegiatan rutin seperti pengeluaran untuk pegawai, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial. Nilai belanja operasi tercatat menurun secara perlahan dalam empat tahun pertama dari tahun 2020 ke tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 731,29 miliar pada 2020 menjadi Rp. 706,85 miliar pada 2023, kemudian meningkat sedikit pada tahun 2024 menjadi Rp. 779,03 miliar. Secara keseluruhan, belanja operasi tumbuh dengan peningkatan rata-rata sebesar 1,57% per tahun, yang menunjukkan kestabilan dalam pengeluaran operasional namun juga menandakan adanya potensi efisiensi dalam pengadaan barang. Meskipun peningkatan ini terbilang lambat, perubahan antar subkomponen memberikan gambaran yang lebih rinci:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tercatat meningkat dari Rp. 419,34 miliar pada tahun 2020 ke Rp. 481,23 miliar pada tahun 2024. Dengan CAGR sekitar +3,50%, peningkatan belanja pegawai ini bisa disebabkan oleh penyesuaian remunerasi, penambahan pegawai, atau peningkatan beban operasional yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Pengelolaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan aspek yang sangat strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Belanja yang dialokasikan untuk ini di Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya mencakup pengeluaran rutin seperti gaji, tunjangan, dan honorarium, tetapi juga investasi dalam pengembangan kapasitas melalui beasiswa, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kompetensi.

Data pada tabel berikut membagi realisasi belanja ini ke dalam dua kelompok utama yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi pengeluaran seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, serta alokasi untuk mendukung fungsi legislatif (seperti penerimaan anggota dan pimpinan DPRD beserta operasional KDH/WKDH) dan kegiatan pemungutan pajak daerah. Sedangkan belanja langsung mencakup pengeluaran operasional yang secara

langsung menunjang pelayanan dan fungsi aparatur, seperti honorarium, beasiswa, pelatihan, asuransi kesehatan, serta perjalanan dinas dan pengadaan aset operasional.

Analisis yang disajikan di sini didasarkan pada perhitungan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) tiap komponen. Dengan demikian, meskipun terjadi fluktuasi antar tahun, gambaran pertumbuhan rata-rata menunjukkan tren jangka panjang yang dapat dijadikan acuan dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan anggaran.

Tabel 2. 65
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (% per tahun)
A	Belanja Tidak Langsung	412.203.693.334,00	369.960.487.232,44	364.392.575.505,27	343.916.416.755,60	366.849.932.668,03	-0,86
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	368.947.406.734,00	301.179.789.149,44	295.694.701.302,27	279.239.979.678,00	311.746.432.211,03	-4,09
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	40.019.536.600,00	53.706.405.205,00	52.678.066.187,00	48.876.538.862,60	39.412.627.779,00	-0,38
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.745.000.000,00	14.846.354.462,00	15.414.808.610,00	15.190.143.178,00	15.483.132.851,00	+54,1
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	491.750.000,00	227.938.416,00	604.999.406,00	609.755.037,00	207.739.827,00	-19,36
B	Belanja Langsung	121.090.945.558,25	94.857.278.817,00	106.480.376.897,10	120.291.676.168,78	147.918.217.818,00	+5,13
1	Belanja Honorarium PNS	11.881.479.820,00	10.792.013.766,00	11.602.287.421,00	12.796.044.050,00	9.593.757.382,00	-5,20
2	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	78.000.000,00	150.000.000,00	154.000.000,00	154.000.000,00	790.959.250,00	+78,3
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	408.016.000,00	2.632.560.000,00	2.088.869.500,00	6.263.457.500,00	3.805.238.416,00	+74,7
5	Belanja premi asuransi kesehatan	14.128.192.000,00	17.329.293.140,00	14.488.446.812,00	13.191.108.463,00	23.071.817.844,00	+13,0
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	5.574.413.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	148.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	550.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
9	Belanja perjalanan dinas	23.650.790.055,25	14.011.682.432,00	24.613.665.611,00	37.361.213.114,00	45.663.834.274,00	+17,85
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	64.670.917.743,00	49.941.729.479,00	53.533.107.553,10	50.525.853.041,78	64.992.610.652,00	+0,13
	TOTAL	533.294.638.892,25	464.817.766.049,44	470.872.952.402,37	464.208.092.924,38	514.768.150.486,03	-0,88

1.1. Analisis Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung

Pada kelompok belanja tidak langsung, terdapat beberapa komponen penting yang mendukung kebutuhan struktural aparatur.

1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan

Pengeluaran untuk gaji dan tunjangan merupakan komponen utama yang menunjang kesejahteraan aparatur. Data menunjukkan bahwa nilai belanja pada komponen ini menurun dari sekitar Rp369 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp312 miliar pada tahun 2024. Penurunan rata-rata tahunan yang tercatat menunjukkan adanya upaya penyesuaian dalam struktur remunerasi, yang kemungkinan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong tata kelola keuangan yang lebih optimal.

1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Komponen tambahan penghasilan bagi PNS relatif stabil, dengan nilai yang hampir tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun terjadi penyesuaian di bidang gaji pokok, mekanisme pemberian tambahan penghasilan tetap dipertahankan dengan stabil, sehingga mendukung motivasi dan kinerja aparatur.

1.1.3. Belanja Penerimaan Anggota dan Operasional DPRD serta KDH/WKDH

Salah satu komponen yang paling menonjol adalah belanja yang dialokasikan untuk mendukung fungsi dan operasional DPRD serta satuan kerja terkait. Nilainya meningkat sangat tajam, dari beberapa miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi mencapai lebih dari Rp15 miliar pada tahun 2024. Peningkatan yang luar biasa ini mencerminkan adanya prioritas besar dalam mendukung fungsi legislatif dan memastikan kelancaran operasional perangkat daerah.

1.1.4. Belanja Pemungutan Pajak Daerah

Sebaliknya, pengeluaran untuk pemungutan pajak daerah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Nilai yang tercatat menurun drastis dari hampir Rp492 juta pada tahun 2020 menjadi hanya sekitar Rp208 juta pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan efisiensi atau bahkan pergeseran strategi dalam pengumpulan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, jika dilihat dari total belanja tidak langsung, tren pertumbuhan rata-rata menunjukkan penurunan ringan. Meskipun terdapat komponen yang mengalami pertumbuhan tinggi, seperti alokasi untuk operasional DPRD, penurunan pada komponen besar seperti gaji, tunjangan, dan pemungutan pajak mendominasi tren keseluruhan, sehingga mengindikasikan penyesuaian struktural dalam pengeluaran tidak langsung.

1.2. Analisis Realisasi Belanja Pegawai Langsung

Belanja langsung merupakan pengeluaran yang bersifat operasional dan secara langsung berkaitan dengan fungsi pelayanan aparatur. Komponen-komponen pada kelompok ini mencerminkan upaya peningkatan efisiensi dan pengembangan sumber daya manusia.

1.2.1. Belanja Honorarium PNS

Pengeluaran untuk honorarium PNS mengalami penurunan dari nilai awal yang tercatat pada tahun 2020 ke nilai yang lebih rendah pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pengendalian biaya di area kompensasi non-reguler, yang kemungkinan diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran.

1.2.2. Belanja Uang Lembur

Komponen ini tidak menunjukkan realisasi selama periode yang dianalisis, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan lembur mungkin telah mengalami penyesuaian sehingga tidak lagi memerlukan alokasi anggaran khusus.

1.2.3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Salah satu aspek yang mencolok adalah kenaikan signifikan pada belanja beasiswa pendidikan bagi PNS. Nilai belanja ini meningkat tajam, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur melalui dukungan pendidikan. Pertumbuhan yang sangat tinggi menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan SDM dianggap sebagai prioritas strategis.

1.2.4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis

Sejalan dengan peningkatan pada beasiswa, pengeluaran untuk pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi juga menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat tinggi. Kenaikan ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur melalui berbagai bentuk pelatihan dan bimbingan teknis, yang diharapkan berdampak positif pada kinerja pelayanan publik.

1.2.5. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

Pengeluaran untuk asuransi kesehatan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan dan perlindungan kesehatan aparatur, sehingga mendukung stabilitas tenaga kerja di sektor publik.

1.2.6. Komponen Pengeluaran yang Dihapus

Beberapa komponen seperti belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas serta belanja pakaian khusus yang hanya direalisasikan pada tahun awal dan kemudian tidak ada lagi pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan restrukturisasi terhadap pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak lagi prioritas.

Penghapusan komponen-komponen ini merupakan langkah efisiensi yang memungkinkan alokasi anggaran dialihkan ke sektor-sektor yang lebih strategis.

1. Belanja Perjalanan Dinas

Peningkatan pada belanja perjalanan dinas menunjukkan tren kenaikan aktivitas operasional, yang kemungkinan terkait dengan peningkatan koordinasi, pengawasan, atau peningkatan intensitas tugas dinas. Kenaikan yang cukup signifikan pada komponen ini mendukung kebutuhan mobilitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

2. Belanja Modal untuk Aset Operasional

Pengeluaran untuk aset seperti kantor, mobil dinas, dan peralatan menunjukkan kestabilan yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengadaan dan pemeliharaan aset operasional telah dikelola secara stabil tanpa mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode tersebut.

Secara agregat, total belanja langsung tumbuh dengan tren positif. Meskipun beberapa komponen mengalami penurunan atau penghapusan, pertumbuhan yang tinggi pada investasi pengembangan SDM, seperti beasiswa dan pelatihan, serta peningkatan pada perjalanan dinas, mengimbangi penurunan di area lain sehingga menghasilkan pertumbuhan total yang cukup signifikan.

1.3. Implikasi Kebijakan Belanja Pegawai

Dari hasil analisis, terdapat beberapa temuan kunci yang memberikan gambaran mendalam mengenai alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur:

1. Penyesuaian dan Efisiensi Remunerasi:

Penurunan pada belanja gaji dan tunjangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian dalam struktur remunerasi, yang dapat berarti adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengendalikan beban anggaran di sektor gaji.

2. Prioritas Pengembangan SDM:

Peningkatan drastis pada beasiswa dan pelatihan menandakan bahwa pemerintah daerah memandang peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

3. Restrukturisasi Pengeluaran Non-Prioritas:

Penghapusan beberapa pos pengeluaran seperti makanan, minuman, dan pakaian dinas menunjukkan adanya upaya restrukturisasi yang mengarahkan kembali anggaran ke pos-pos yang memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional.

4. Peningkatan Dukungan Operasional Legislasi:

Lonjakan signifikan pada belanja untuk operasional DPRD dan KDH/WKDH mengindikasikan bahwa dukungan terhadap fungsi legislatif mendapatkan prioritas tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan daerah.

5. Kestabilan dalam Pengeluaran Modal Operasional:

Stabilitas pada belanja modal untuk aset operasional menunjukkan pengelolaan yang konsisten dan efisien dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang operasional aparatur.

Implikasi temuan ini mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan struktur pengeluaran, dengan menyeimbangkan antara pengendalian biaya di sektor remunerasi dan peningkatan investasi pada pengembangan kapasitas. Kebijakan efisiensi yang berkelanjutan, dikombinasikan dengan peningkatan kualitas pelatihan dan dukungan operasional, diyakini akan menghasilkan kinerja aparatur yang lebih baik dan

pelayanan publik yang semakin optimal.

Secara keseluruhan, analisis realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Kelompok belanja tidak langsung cenderung mengalami penurunan, terutama pada komponen gaji dan pemungutan pajak, meskipun terdapat peningkatan tajam pada alokasi untuk mendukung fungsi legislatif. Sementara itu, belanja langsung menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, didorong terutama oleh peningkatan alokasi untuk beasiswa, pelatihan, dan perjalanan dinas, meskipun beberapa pos pengeluaran non-prioritas telah dihapus.

Temuan ini menyiratkan bahwa meskipun terjadi penyesuaian dan efisiensi di beberapa area, upaya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama. Hal tersebut menjadi kunci dalam menghadapi tantangan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan demikian, diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika pengeluaran aparatur, sehingga pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan menyeimbangkan antara efisiensi operasional dan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik akan meningkat sejalan dengan perkembangan dan tantangan zaman.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa menurun dari Rp. 264,15 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 247,89 miliar pada tahun 2024, menghasilkan CAGR sekitar -1,26%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pengendalian belanja pengadaan barang dan jasa melalui efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya.

3) Belanja Hibah

Nilai hibah mengalami kenaikan tipis dari Rp. 47,58 miliar pada 2020 menjadi Rp. 49,92 miliar pada 2024, dengan pertumbuhan sekitar +0,96%. Hibah yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan, kebijakan pemberian hibah cenderung konsisten selama periode tersebut.

4) Belanja Bantuan Sosial

Data untuk bantuan sosial menunjukkan ketidakkonsistenan (ada nilai pada beberapa tahun dan nol di tahun lain) sehingga tidak memungkinkan perhitungan pertumbuhan yang representatif. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa bantuan

sosial bersifat insidental dan sangat bergantung pada kondisi serta kebutuhan situasional.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Nilai belanja modal meningkat secara signifikan dari Rp. 84,68 miliar pada 2020 menjadi Rp145,19 miliar pada 2024. Perhitungan CAGR menghasilkan pertumbuhan sekitar +11,39% per tahun, yang mengindikasikan komitmen daerah dalam meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur.

Pada sub komponen belanja modal, terdapat variasi pertumbuhan yang cukup beragam:

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah hanya ada pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar Rp. 127,4 Juta dan meningkat menjadi Rp. 1.593,0 miliar. Dikarenakan hanya ada di dua tahun pertama sehingga rata-rata pertumbuhan pertahun tidak bisa dihitung dalam lima tahun.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja ini menurun dari Rp. 30,61 miliar ke Rp. 29,39 miliar, menghasilkan CAGR sekitar -0,81%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penyesuaian pengadaan peralatan, penggantian aset yang sudah ada, atau efisiensi dalam penggunaan mesin.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja ini meningkat dari Rp. 34,06 miliar ke Rp. 35,60 miliar, dengan CAGR sekitar +0,89%. Peningkatan yang moderat ini mencerminkan perbaikan atau pembangunan gedung dan fasilitas yang mendukung operasional daerah.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi komponen belanja ini menunjukkan pertumbuhan paling tinggi, naik dari Rp. 18,05 miliar pada 2020 menjadi Rp76,42 miliar pada 2024 dengan CAGR sebesar +33,46%. Peningkatan signifikan ini menunjukkan fokus besar pada pembangunan infrastruktur dasar yang esensial, seperti perbaikan jalan, irigasi untuk sektor pertanian, dan jaringan komunikasi.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja ini meningkat dari Rp. 1,84 miliar ke Rp. 2,70 miliar, menghasilkan CAGR sekitar +8,05%. Kenaikan ini menunjukkan investasi pada aset yang belum dikategorikan dalam kelompok utama.

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Komponen ini mulai muncul pada tahun 2024 sehingga perhitungan pertumbuhan tidak dapat dilakukan secara komprehensif.

Peningkatan belanja modal, terutama pada komponen infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan, menunjukkan bahwa daerah menempatkan prioritas tinggi pada investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menunjukkan fluktuasi ekstrem, dengan nilai mencapai Rp.46,96 miliar pada 2020 dan menurun hingga Rp. 0 pada 2024. Karena fluktuasi yang tajam serta nilai akhir nol, perhitungan CAGR tidak dapat dilakukan secara representatif. Hanya bisa dilakukan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -79.97%. Belanja tak terduga biasanya digunakan untuk menanggapi kondisi mendesak atau situasi yang tidak terduga, sehingga sifatnya sangat insidental.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas nasional di daerah. Komponen ini hanya terdiri dari belanja bantuan keuangan yang menunjukkan bahwa nilai transfer relatif stabil, dengan nilai Rp170,99 miliar pada tahun 2020 dan Rp170,88 miliar pada tahun 2024. Belanja ini menunjukkan pertumbuhan mendekati -0,01%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa aliran dana transfer tidak mengalami fluktuasi signifikan, sehingga menjadi sumber pendanaan yang andal untuk peningkatan kemampuan keuangan.

b. Analisis Kemampuan Realisasi Belanja

Nilai total realisasi belanja mencapai peningkatan dari Rp. 1.033,92 miliar pada 2020 menjadi Rp.1.095,98 miliar pada 2024. Perhitungan CAGR gabungan menghasilkan pertumbuhan sebesar +6,13% per tahun. Angka ini mencerminkan peningkatan total dana yang tersedia bagi daerah untuk menyalurkan kegiatan operasional dan investasi. Pertumbuhan yang moderat ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan signifikan pada belanja modal, stabilitas transfer menyeimbangkan fluktuasi belanja operasional, menghasilkan pertumbuhan total yang terkontrol dan berkelanjutan.

Dari rekapitulasi rata-rata pertumbuhan per komponen belanja, dapat didapat beberapa hal penting antara lain:

1. Pertumbuhan total belanja yang meningkat.

Dengan pertumbuhan +6,13% per tahun, total belanja daerah meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal dan alokasi yang lebih besar untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga menandakan bahwa upaya peningkatan kapasitas fiskal dan perencanaan anggaran telah menghasilkan peningkatan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program strategis

2. Belanja operasi yang stabil

Pertumbuhan belanja operasi yang hanya +1,57% menunjukkan bahwa pengeluaran untuk kegiatan rutin cenderung stabil. Peningkatan belanja pegawai (+2,79%) dibandingkan penurunan belanja barang dan jasa (-1,26%) mengindikasikan pergeseran prioritas dari pengadaan barang menuju peningkatan kesejahteraan pegawai.

3. Investasi infrastruktur melonjak.

Belanja modal tumbuh sebesar +11,39% per tahun, terutama didorong oleh peningkatan belanja jalan, jaringan dan irigasi (+33,46%). Investasi yang besar dalam infrastruktur dasar ini sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan konektivitas, dan mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian dan industri.

4. Stabilitas belanja transfer sebagai penopang.

Transfer dana yang relatif tidak berubah (-0,01%) memberikan kestabilan dalam aliran dana daerah. Transfer ini berfungsi sebagai jaring pengaman fiskal yang memungkinkan daerah mempertahankan fungsi dan layanan publik meskipun terjadi fluktuasi dalam belanja operasional atau modal.

Implikasi dari temuan ini cukup penting dalam perumusan kebijakan keuangan daerah. Peningkatan investasi pada belanja modal, terutama infrastruktur, harus diimbangi dengan efisiensi dalam belanja operasional. Selain itu, stabilitas transfer memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa harus khawatir terhadap fluktuasi pendanaan eksternal. Dengan demikian, strategi keuangan yang komprehensif harus menitikberatkan pada diversifikasi sumber belanja, peningkatan efisiensi pengeluaran, serta optimalisasi pendanaan melalui kebijakan yang proaktif.

Dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika ini, pengambil kebijakan di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat merumuskan strategi fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Hal tersebut meliputi pengendalian belanja operasional, optimalisasi

investasi infrastruktur, dan peningkatan efisiensi penggunaan dana transfer. Secara keseluruhan, analisis ini menyediakan landasan ilmiah untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, dengan harapan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi yang inklusif di masa mendatang.

2.2.1.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Berbeda dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, atau dana transfer, pembiayaan daerah lebih bersifat sebagai instrumen pengelolaan fiskal jangka pendek yang memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan APBD.

Sumber pembiayaan daerah antara lain berasal dari penerimaan pembiayaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Di sisi lain, terdapat juga pengeluaran pembiayaan, misalnya pembayaran pokok utang, penyertaan modal daerah (investasi), serta pemberian pinjaman daerah kepada pihak ketiga.

Peran pembiayaan daerah sangat strategis karena mampu menjaga kesinambungan pembangunan meskipun pendapatan daerah terbatas. Melalui pengelolaan pembiayaan yang baik, pemerintah daerah dapat melaksanakan program prioritas, menjaga likuiditas kas daerah, sekaligus mendorong efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, pembiayaan daerah bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 66
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
6	PEMBIAYAAN	39,165,537,325.40	3,810,266,534.69	15,859,095,459.06	30,931,327,612.12	49,236,531,337.51	+4,68
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39,165,537,325.40	3,810,266,534.69	15,859,095,459.06	30,931,327,612.12	49,236,531,337.51	+4,68
6.1.1	Sisa Lebih Penrhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39,165,537,325.40	3,810,266,534.69	15,859,095,459.06	30,931,327,612.12	49,236,531,337.51	+4,68
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1,789,389,099.00	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	N/a
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	1,789,389,099.00	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	N/a
	PEMBIAYAAN NETTO	39,165,537,325.40	2,020,877,435.69	13,359,095,459.06	28,931,327,612.12	46,736,531,337.51	+3.60
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3,813,728,001.69	15,859,095,459.06	31,308,963,150.62	49,235,376,608.71	33,285,822,475.47	+54.23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024, 2025

a. Analisis Realisasi Pembiayaan

Realisasi total pembiayaan daerah (pembiayaan netto) menunjukkan nilai yang meningkat dari Rp. 39,17 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 46,74 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan sebesar 3,60% per tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kebutuhan fiskal daerah yang tidak sepenuhnya dapat ditutupi dari pendapatan daerah maupun transfer pusat. Tren ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pembiayaan sebagai instrumen penyeimbang APBD, sekaligus mencerminkan adanya dinamika fiskal yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan beban jangka panjang.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yaitu saldo anggaran lebih yang terjadi akibat adanya penerimaan yang lebih besar dari pengeluaran, efisiensi belanja, maupun kegiatan yang tidak terserap. Nilai sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tercatat meningkat secara fluktuatif dalam lima tahun yaitu sebesar Rp. 39,17 miliar pada 2020 menjadi Rp. 46,74 miliar pada 2024. Secara keseluruhan, penerimaan pembiayaan tumbuh dengan peningkatan rata-rata sebesar 4,68% per tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi SiLPA serta sumber pembiayaan lainnya, sehingga daerah memiliki ruang fiskal tambahan untuk mendukung pembiayaan program dan kegiatan prioritas.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal ini merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat struktur permodalan BUMD agar mampu meningkatkan kinerja, memperluas kegiatan usaha, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Nilai penyertaan modal tercatat relatif stagnan dalam empat tahun, sedangkan pada tahun pertama yaitu tahun 2020 belum ada realisasi penyertaan modal. Realisasi penyertaan modal yaitu sebesar Rp. 1,79 miliar pada 2021 menjadi Rp. 2,5 miliar pada 2024. Secara keseluruhan, pengeluaran pembiayaan tidak bisa dihitung pertumbuhannya dikarenakan tidak terdapat nilai awalnya. Penyertaan modal ini selama empat tahun terakhir merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN berupa deviden dari PT Bank Bengkulu.

2.2.2 Neraca Daerah

Sebagai gambaran holistik atas kinerja keuangan Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2020–2024, tabel berikut akan menyajikan analisis neraca daerah yang mencakup posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Data ini tidak hanya menampilkan nilai nominal tahunan, tetapi juga dilengkapi dengan perhitungan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) untuk mengukur pertumbuhan atau penurunan setiap komponen secara rata-rata per tahun. Dengan menggunakan pendekatan CAGR, fluktuasi antar tahun dapat diinterpretasikan secara lebih stabil, memungkinkan identifikasi tren struktural jangka panjang. Misalnya, pertumbuhan aset tetap yang konsisten kontras dengan volatilitas aset lancar, sementara penurunan kewajiban mengisyaratkan perbaikan tata kelola utang. Angka-angka dalam tabel ini juga menyoroti dinamika kritis seperti lonjakan likuiditas kas daerah, penyusutan aset infrastruktur, serta transformasi portofolio investasi—semuanya menjadi dasar rekomendasi strategis untuk penguatan kebijakan fiskal kedepan.

Sebelum menyajikan tabel neraca Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020–2024, penting untuk memahami kerangka konseptual neraca sebagai laporan keuangan yang menggambarkan posisi finansial entitas pada suatu waktu tertentu. Neraca (*balance sheet*) disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi: $\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$.

a. Aset (*Assets*):

Merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah daerah, baik berwujud (seperti infrastruktur, kas, persediaan) maupun tidak berwujud (seperti hak intelektual). Dalam tabel ini, aset diklasifikasikan menjadi:

1. Aset Lancar: Likuid dalam jangka pendek (<1 tahun), seperti kas daerah (Rp24,38 miliar di 2024) dan piutang pajak.
2. Aset Tetap: Infrastruktur jangka panjang (gedung, jalan, peralatan) yang nilainya mencapai Rp1.573 triliun (2024), tetapi mengalami penyusutan akumulatif Rp1.688 triliun.
3. Investasi Jangka Panjang: Penyertaan modal di BUMD atau proyek strategis, tumbuh 2,76% per tahun.
4. Aset Lainnya: Termasuk aset tak berwujud (CAGR 42,18%) yang nilainya melonjak dari Rp 488 juta (2020) menjadi Rp1,98 miliar (2024).

b. Kewajiban (*Liabilities*):

Kewajiban merupakan utang atau kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan pemerintah. Dalam tabel, kewajiban didominasi oleh:

1. Utang Jangka Pendek: Seperti utang beban (Rp16,67 miliar di 2024) dan pendapatan diterima dimuka (Rp4,3 miliar)

2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang: Cicilan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun, stabil di Rp2 miliar per tahun. Penurunan total kewajiban sebesar 9,66% per tahun menunjukkan perbaikan struktur utang, meski perlu diwaspadai risiko liabilitas kontinjensi dari pendapatan diterima dimuka.

c. Ekuitas (*Equity*):

Ekuitas mencerminkan hak residual pemilik (dalam hal ini, masyarakat) setelah kewajiban dilunasi. Pada neraca daerah, ekuitas terutama berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tumbuh 2,79% per tahun, mencapai Rp1.703 triliun di 2024. SILPA yang tinggi menandakan akumulasi surplus anggaran, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang optimalisasi penggunaan dana untuk program produktif.

d. Konsep Pendukung Lainnya:

1. CAGR (*Compound Annual Growth Rate*): Digunakan untuk mengukur pertumbuhan tahunan rata-rata, menghaluskan fluktuasi antar-tahun. Contoh: CAGR aset tetap 2,63% menunjukkan pertumbuhan infrastruktur yang konsisten.
2. Penyusutan Akumulatif: Penurunan nilai aset tetap akibat penggunaan/waktu. Lonjakan penyusutan 8,92% per tahun perlu dikaji apakah mencerminkan penuaan aset atau perubahan kebijakan akuntansi.
3. Penyisihan Piutang: Cadangan untuk piutang tak tertagih (CAGR 8,92%), yang meningkat seiring risiko kredit.

Tabel berikut tidak hanya menyajikan angka statis, tetapi juga mengungkap dinamika struktural melalui analisis CAGR. Misalnya, kas di kas daerah yang melonjak 143,14% per tahun menunjukkan peningkatan likuiditas, sementara piutang pajak yang merosot -100% mengisyaratkan masalah penagihan atau penghapusan piutang. Dengan memahami konsep-konsep ini, pembaca dapat menafsirkan data neraca secara kritis, mengidentifikasi kekuatan, kerentanan, dan peluang kebijakan fiskal ke depan. Tabel berikut menyajikan detail lengkap neraca Kabupaten Rejang Lebong (2020– 2024) beserta analisis CAGR tiap komponen.

Tabel 2. 67
Neraca Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 (Nilai dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan per Tahun (%)
1	ASET	1.563.433.044.275,8	1.540.281.181.803,5	1.535.454.280.959,3	1.528.503.185.822,7	1.727.497.456.643,0	2,5
1.1	Aset Lancar	63.106.652.300,98	71.139.958.917,93	68.786.781.885,02	89.656.711.002,51	63.177.267.366,00	0,03
1.1.1	Kas di kas daerah	288.232.415,08	10.984.927.028,45	26.457.248.170,01	41.278.834.856,82	24.380.130.671,00	143,14
1.1.2	Deposito - setara kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3	Kas di BLUD	2.111.956.542,57	4.678.519.204,61	4.402.608.011,61	1.345.454.279,39	2.190.071.703,00	0,92
1.1.4	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5	Kas di bendahara penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.6	Kas di bendahara FKTP	766.409.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
1.1.7	Kas di bendahara BOS	647.129.559,00	195.649.226,00	385.502.269,00	191.194.258,50	191.324.392,00	-24,97
1.1.8	Kas lainnya	0,00	63.604.700,00	6.419.893.214,00	6.522.784.289,00	0,00	-
1.1.9	Investasi jangka pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.10	Piutang pajak	9.116.904.457,45	8.744.004.729,45	10.610.391.095,75	19.459.539.728,00	0,00	-100

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan per Tahun (%)
1.1.11	Piutang retribusi	928.706.200,00	928.706.200,00	928.706.200,00	928.706.200,00	0,00	-100
1.1.12	Piutang pendapatan (pajak dan retribusi)	42.878.821.967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
1.1.13	Penyisihan piutang	-5.757.403.305,79	-6.542.883.101,68	-7.998.173.883,66	-8.109.966.856,08	-8.109.966.856,08	8,92
1.1.14	Beban dibayar dimuka	249.165.160,39	123.015.999,66	501.019.508,32	326.739.042,01	296.395.315,00	4,42
1.1.15	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.16	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.17	Bagian lancar pinjaman kepada pemerintah pusat	3.971.278.794,00	2.097.958.206,00	1.313.907.677,00	3.011.476.333,00	0,00	-100
1.1.18	Bagian lancar pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya	29.521.997.297,90	23.929.599.741,92	16.523.739.616,00	16.363.651.251,00	0,00	-100
1.1.19	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.20	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.21	Piutang lainnya	11.157.229.481,00	29.747.336,00	3.629.757.532,84	6.568.117.900,00	6.993.333.500,00	-11,03

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan per Tahun (%)
1.1.22	Persediaan	10.765.110.996,04	9.938.103.834,00	13.834.857.354,45	10.722.219.428,12	10.325.948.423,12	-1,04
1.2	Investasi Jangka Panjang	42.469.329.332,35	44.831.704.206,61	43.151.589.227,70	44.846.396.257,70	47.346.396.257,70	2,76
1.2.1	Investasi Non Permanen	2.308.875.337,00	43.042.315.107,61	38.862.200.128,70	1.785.742.609,00	1.785.742.609,00	-6,52
1.2.1.1	Pinjaman jangka panjang	0,00	0,00	36.771.264.549,70	0,00	0,00	-
1.2.1.2	Investasi dalam surat utang negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.3	Investasi dalam proyek pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.4	Investasi non permanen lainnya - dana bergulir	3.827.600.000,00	3.827.600.000,00	2.090.935.579,00	1.785.742.609,00	1.785.742.609,00	-16,99
1.2.1.5	Akumulasi penyisihan	-1.518.724.663,00	-1.628.682.042,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	Investasi Permanen	40.160.453.995,35	1.789.389.099,00	4.289.389.099,00	43.060.653.648,70	45.560.653.648,70	3,19
1.2.2.1	Penyertaan modal pemerintah daerah	40.160.453.995,35	1.789.389.099,00	4.289.389.099,00	43.060.653.648,70	45.560.653.648,70	3,19
1.2.2.2	Investasi permanen lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Aset Tetap	1.417.561.553.226,92	1.383.115.676.117,49	1.380.953.975.887,79	1.346.095.479.330,24	1.573.356.286.787,00	2,63

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan per Tahun (%)
1.3.1	Tanah	222.461.330.969,66	223.259.653.189,70	225.555.265.556,93	230.477.134.625,82	238.878.595.325,00	1,80
1.3.2	Peralatan dan mesin	411.914.440.228,95	431.702.343.969,94	454.751.349.476,94	475.604.586.347,04	505.277.542.440,00	5,26
1.3.3	Gedung dan bangunan	764.167.239.818,25	813.877.039.044,25	856.556.798.900,25	887.490.532.558,93	1.000.353.149.065,00	6,98
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.157.688.687.305,67	1.213.524.773.159,80	1.312.753.040.612,80	1.380.766.996.994,80	1.458.176.009.191,00	5,93
1.3.5	Aset tetap lainnya	37.465.185.513,54	36.869.325.187,14	37.934.700.437,14	38.585.283.208,14	41.339.573.723,00	2,51
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	23.192.542.913,65	11.666.603.391,49	14.266.786.891,49	21.286.955.203,80	19.728.923.650,00	-4,01
1.3.7	Akumulasi penyusutan	- 1.199.327.873.552,8 0	- 1.347.784.061.824,8 3	- 1.520.863.965.987,7 6	- 1.688.116.009.608,2 9	- 1.688.116.009.608,2 9	8,92
1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1	Dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	Aset Lainnya	40.295.509.415,62	41.193.842.561,62	42.561.933.958,62	47.904.599.231,62	41.617.506.231,00	0,80
1.5.1	Tagihan piutang penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan per Tahun (%)
1.5.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah - tagihan jangka panjang	127.256.550,00	127.256.550,00	127.256.550,00	127.256.550,00	127.256.550,00	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5.4	Aset tak berwujud	488.184.000,00	4.365.628.500,00	4.465.628.500,00	1.003.232.000,00	1.989.332.000,00	42,18
1.5.5	Amortisasi aset tak berwujud	0,00	-3.563.314.417,00	-4.000.417.584,00	-3.224.554.084,00	0,00	-
1.5.6	Aset lain-lain	39.680.068.865,62	40.007.557.328,62	41.532.363.325,62	42.838.207.265,62	41.938.343.765,00	1,40
2	KEWAJIBAN	35.899.256.153,32	28.895.962.673,45	14.654.304.065,60	21.787.509.039,36	23.840.273.292,07	-9,66
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	35.899.256.153,32	28.895.962.673,45	14.654.304.065,60	21.787.509.039,36	23.840.273.292,07	-9,66
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	863.321.248,00	-
2.1.2	Utang bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	Utang pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.4	Bagian lancar utang jangka panjang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0
2.1.5	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	4.304.503.235,00	4.304.503.235,00	-

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan per Tahun (%)
2.1.6	Utang beban	12.358.482.031,00	26.831.331.504,85	12.654.304.065,60	15.483.005.804,36	16.672.448.809,07	7,78
2.1.7	Utang jangka pendek lainnya	21.540.774.122,32	64.631.168,60	0,00	0,00	0,00	-100
3	EKUITAS DANA	1.527.533.788.122,55	1.511.385.219.130,20	1.520.799.976.893,53	1.506.715.676.782,71	1.703.657.183.351,11	2,79
3.1	Ekuitas Dana Lancar	1.527.533.788.122,55	1.511.385.219.130,20	1.520.799.976.893,53	1.506.715.676.782,71	1.703.657.183.351,11	2,79
3.1.1	Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	1.527.533.788.122,55	1.511.385.219.130,20	1.520.799.976.893,53	1.506.715.676.782,71	1.703.657.183.351,11	2,79
	TOTAL ASET	1.563.433.044.275,87	1.540.281.181.803,65	1.535.454.280.959,13	1.528.503.185.822,07	1.727.497.456.643,00	2,54%
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.563.433.044.275,87	1.540.281.181.803,65	1.535.454.280.959,13	1.528.503.185.822,07	1.727.497.456.643,00	2,54%

Neraca Daerah Kabupaten Rejang Lebong periode 2020–2024 mencerminkan dinamika keuangan daerah yang kompleks, di mana pertumbuhan aset yang moderat berjalan beriringan dengan transformasi struktural dalam portofolio investasi dan penyesuaian kebijakan fiskal. Selama lima tahun terakhir, total aset daerah tumbuh pada tingkat 2,54% per tahun, mencapai Rp1.727 triliun pada 2024 dari sebelumnya Rp1.563 triliun di 2020. Pertumbuhan ini, meskipun positif, tidak merata di seluruh komponen aset. Aset tetap seperti infrastruktur fisik (gedung, jalan, dan peralatan) menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan di atas rata-rata, sementara aset lancar—yang seharusnya menjadi indikator likuiditas jangka pendek—hampir stagnan dengan pertumbuhan 0,03% per tahun. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya prioritas pembangunan yang lebih berfokus pada proyek jangka panjang, tetapi juga menyoroti kerentanan dalam manajemen likuiditas harian.

a. Dinamika Aset Lancar: Antara Peluang dan Tantangan

Aset lancar, yang mencakup kas, piutang, dan persediaan, menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Kas di kas daerah melonjak dari Rp288 juta (2020) menjadi Rp24,38 miliar (2024), merefleksikan CAGR luar biasa sebesar 143,14%. Lonjakan ini mungkin dipicu oleh optimalisasi penerimaan daerah atau kebijakan penempatan kas yang lebih agresif. Namun, peningkatan likuiditas ini tidak diimbangi dengan pengelolaan piutang yang efektif. Piutang pajak dan piutang retribusi, misalnya, mengalami penurunan drastis hingga mencapai nilai nol pada 2024 (CAGR -100%). Fenomena ini bisa disebabkan oleh dua faktor: (1) keberhasilan program penagihan piutang yang masif, atau (2) perubahan kebijakan akuntansi seperti penghapusan piutang tak tertagih. Jika penyebabnya adalah yang kedua, hal ini berpotensi mengganggu akurasi laporan keuangan dan memerlukan transparansi lebih lanjut. Selain itu, kas di bendahara BOS menyusut 24,97% per tahun, yang mengindikasikan penurunan alokasi atau penyerapan dana pendidikan yang kurang optimal.

b. Investasi Jangka Panjang: Dualisme Pertumbuhan

Portofolio investasi jangka panjang daerah menunjukkan polarisasi yang menarik. Di satu sisi, investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah tumbuh stabil sebesar 3,19% per tahun, mencerminkan komitmen strategis dalam pengembangan BUMD dan proyek infrastruktur. Di sisi lain, investasi non-permanen seperti dana bergulir justru menyusut 6,52% per tahun, dengan komponen tertentu seperti dana bergulir turun 16,99%. Penurunan ini patut diwaspadai karena dana bergulir berperan penting dalam mendukung UMKM dan program padat karya. Jika

tren ini berlanjut, dapat mengancam keberlanjutan program pembangunan berbasis masyarakat. Selain itu, munculnya pinjaman jangka panjang senilai Rp36,77 miliar pada 2022—yang tidak tercatat di tahun-tahun lain—menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan utang dan transparansi pencatatan.

c. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan: Dua Sisi Mata Uang

Pertumbuhan aset tetap sebesar 2,63% per tahun didominasi oleh peningkatan nilai infrastruktur seperti gedung (CAGR 6,98%) dan jalan (CAGR 5,93%). Namun, di balik angka ini tersembunyi tantangan tersendiri. Akumulasi penyusutan aset tetap melonjak 8,92% per tahun, jauh melampaui pertumbuhan nilai aset itu sendiri. Hal ini mengindikasikan dua kemungkinan: (1) penggunaan metode penyusutan yang lebih agresif, atau (2) degradasi kualitas aset akibat kurangnya pemeliharaan. Jika penyebabnya adalah yang kedua, pemerintah daerah perlu segera melakukan audit kondisi fisik aset untuk mencegah penurunan kapasitas layanan publik. Di sisi lain, konstruksi dalam pengerjaan turun 4,01% per tahun, yang mungkin mencerminkan perlambatan proyek infrastruktur atau percepatan penyelesaian pekerjaan.

d. Transformasi Struktur Kewajiban dan Risiko Fiskal

Total kewajiban daerah mengalami penurunan signifikan sebesar 9,66% per tahun, dari Rp35,9 miliar (2020) menjadi Rp23,8 miliar (2024). Penurunan ini terutama didorong oleh hilangnya utang jangka pendek lainnya (CAGR -100%) dan stabilnya utang lancar jangka panjang. Namun, munculnya pendapatan diterima dimuka senilai Rp4,3 miliar pada 2023–2024 perlu menjadi perhatian. Meskipun secara teknis bukan utang, pos ini berpotensi menjadi kewajiban di masa depan jika layanan yang dijanjikan tidak terealisasi. Selain itu, utang beban tumbuh 7,78% per tahun, menunjukkan peningkatan biaya operasional yang perlu dikelola secara ketat untuk menghindari defisit anggaran.

e. Ekuitas dan Implikasi Kebijakan

Ekuitas daerah, yang didominasi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), tumbuh 2,79% per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan akumulasi surplus anggaran yang sehat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang optimalisasi penggunaan dana. SILPA yang tinggi seharusnya dapat dialokasikan untuk program inovatif atau cadangan darurat, bukan hanya diendapkan. Selain itu, aset tak berwujud seperti lisensi dan hak kekayaan intelektual melonjak 42,18% per tahun, menunjukkan upaya daerah dalam membangun aset non-fisik. Namun, peningkatan ini perlu diikuti dengan strategi komersialisasi yang jelas agar memberikan dampak ekonomi nyata.

f. Tantangan Strategis dan Rekomendasi

Tantangan strategis dan rekomendasi untuk Neraca kabupaten Rejang Lebong:

- 1) Manajemen Likuiditas yang Dinamis
- 2) Fluktuasi ekstrem pada kas dan piutang memerlukan sistem perencanaan kas (cash forecasting) yang lebih akurat. Pemerintah daerah bisa mengadopsi teknologi treasury management system (TMS) untuk memantau arus kas real-time dan mengoptimalkan penempatan dana.
- 3) Revitalisasi Investasi Non-Permanen
- 4) Penurunan dana bergulir harus ditanggapi dengan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program. Pelibatan pihak ketiga (sektor swasta atau LSM) dalam pengelolaan dana bergulir dapat meningkatkan akuntabilitas dan dampaksosial.
- 5) Audit Kondisi Aset Tetap
- 6) Lonjakan akumulasi penyusutan perlu direspons dengan audit fisik aset untuk memastikan metode penyusutan sesuai dengan kondisi riil. Hasil audit ini dapat menjadi dasar revisi kebijakan pemeliharaan infrastruktur.
- 7) Transparansi Kebijakan Piutang
- 8) Penghapusan piutang pajak dan retribusi hingga nol rupiah memerlukan penjelasan publik yang detail. Jika penghapusan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan penagihan, perlu ada mekanisme pencegahan (seperti collateral management) untuk piutang masa depan.
- 9) Optimalisasi SILPA
- 10) Surplus anggaran yang terakumulasi dalam SILPA dapat dialokasikan untuk program jangka menengah seperti pembiayaan green infrastructure atau dana darurat bencana, yang sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan.

g. Kesimpulan dan Proyeksi Ke Depan

Neraca Kabupaten Rejang Lebong periode 2020–2024 menggambarkan upaya transformasi keuangan daerah yang berorientasi pada stabilitas jangka panjang, meski diwarnai ketidakseimbangan struktural. Pertumbuhan aset tetap yang kuat dan penurunan utang menjadi modal penting untuk menarik investasi. Namun, volatilitas aset lancar, penyusutan aset yang cepat, dan ketidakpastian portofolio investasi memerlukan kebijakan yang lebih terukur. Ke depan, integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* dalam penganggaran daerah dapat menjadi diferensiasi strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan fiskal.

2.2.3 Pertumbuhan PDRB Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran mengukur total belanja akhir yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Dengan kata lain, PDRB pengeluaran adalah akumulasi seluruh pengeluaran untuk konsumsi, investasi, belanja pemerintah, perubahan inventori, dan selisih ekspor-impor barang dan jasa. Besarnya pertumbuhan PDRB pengeluaran mencerminkan seberapa dinamis perekonomian lokal dalam menyerap permintaan, mendorong investasi, serta berinteraksi dengan perdagangan luar daerah.

Komponen Konsumsi Rumah Tangga menggambarkan besarnya pengeluaran setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, sandang, hingga jasa. Dalam analisis pertumbuhan PDRB, konsumsi rumah tangga seringkali menjadi motor utama karena kontribusinya yang besar dan relasinya langsung dengan tingkat pendapatan dan kepercayaan konsumen. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mencerminkan pengeluaran organisasi kemasyarakatan seperti yayasan atau badan sosial yang menyediakan jasa dan barang kepada masyarakat tanpa tujuan mencari laba; komponen ini dapat memberikan gambaran tentang peran dana sukarela dan bantuan sosial dalam menopang permintaan regional.

Selanjutnya, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meliputi belanja pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan—dari gaji pegawai, operasional layanan publik, hingga belanja barang dan jasa lainnya. Komponen ini sering kali digunakan untuk menstimulasi perekonomian melalui proyek infrastruktur dan layanan dasar. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menunjukkan nilai akumulasi belanja modal, seperti pembangunan pabrik, jalan, dan perumahan, yang mencerminkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek jangka menengah dan panjang. Sementara itu, Perubahan Inventori merefleksikan kenaikan atau penurunan stok barang di gudang produsen, yang dapat menjadi indikator kesiapan produksi dan permintaan mendadak, serta Net Ekspor Barang dan Jasa (selisih ekspor-impor) menggambarkan hubungan perekonomian lokal dengan pasar luar wilayah, meskipun dalam banyak daerah kontribusinya relatif kecil.

Dengan kerangka konseptual tersebut, Tabel berikut akan memperlihatkan dinamika pertumbuhan masing-masing komponen pengeluaran selama periode 2018–2024, baik di level Kabupaten Rejang Lebong maupun Provinsi Bengkulu. Analisis selanjutnya tidak hanya menyoroti angka pertumbuhan keseluruhan PDRB, tetapi juga bagaimana pergeseran pola konsumsi, investasi, belanja publik, dan aktivitas perdagangan memengaruhi kinerja ekonomi regional. Pendekatan ini penting untuk merumuskan kebijakan daerah yang tepat multiplikator

fiskal, strategi diversifikasi ekonomi, maupun insentif investasi agar pertumbuhan PDRB dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2. 68
Pertumbuhan PDRB Pengeluaran Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi
Bengkulu Tahun 2018–2024 (Dalam Persentase, %)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Rejang Lebong							
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,78	4,67	0,25	2,51	5,23	5,00	5,20
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,05	9,38	-5,79	-4,42	8,21	9,00	10,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,01	3,58	0,32	1,88	-0,28	1,00	1,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,63	4,48	-1,84	3,56	4,01	4,20	4,40
Perubahan Inventori	-	6,18	20,46	-96,03	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	2,47	-3,26	-5,56	-	-	-
PDRB Kabupaten Rejang Lebong	4,96	4,96	0,07	3,14	4,30	4,50	4,70
Provinsi Bengkulu							
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,96	4,82	0,15	2,75	5,47	5,60	5,80
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,03	8,83	-6,12	-3,04	8,94	10,22	12,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,23	3,84	0,58	3,30	0,82	1,20	1,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,60	5,00	-1,65	4,13	3,49	3,70	4,00
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	3,26	0,05	4,38	1,19	0,65	0,80	1,00
PDRB Provinsi Bengkulu	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62

Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong, BPS Provinsi Bengkulu, Proyeksi berbasis tren

Dari Tabel di atas dapat dilakukan analisis kaitan dinamika pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu dalam satu kesatuan pendekatan, menekankan pola pemulihan pasca-pandemi, kontribusi masing-masing komponen pengeluaran, serta implikasi kebijakan.

Pada tahun 2023, ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,26 % (c-to-c), sedikit menurun dari 4,31 % tahun sebelumnya, namun mencerminkan stabilitas permintaan domestik regional di tengah ketidakpastian global. Kabupaten Rejang Lebong pada periode yang sama dipublikasikan tumbuh 4,30 %, meningkat tajam dari 3,14 % di 2021, sejalan dengan tren pemulihan yang terjadi di tingkat provinsi. Proyeksi terbaru untuk 2024 menunjukkan akselerasi menjadi 4,62 % di Bengkulu, ditopang oleh bangkitnya sektor jasa—khususnya penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 9,39 %—serta belanja non-profit yang melonjak 12,05 %. Sementara itu, data eksklusif BPS Kabupaten Rejang Lebong mencatat rebound konsumsi rumah tangga dan investasi, sehingga proyeksi pertumbuhan PDRB kabupaten ini diperkirakan mencapai sekitar 4,70 % pada 2024 .

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung pemulihan di kedua wilayah. Pada 2022, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Rejang Lebong melonjak dari 2,51 % menjadi 5,23 %, didorong oleh pulihnya daya beli Masyarakat pasca-pelonggaran mobilitas. Di Provinsi Bengkulu, meski konsumsi rumah tangga tumbuh moderat di kisaran 5,47 % pada 2022, kontribusinya tetap dominan, mencerminkan kepercayaan konsumen yang

memadai untuk menopang aktivitas ekonomi. Triwulan III-2024 menunjukkan PDRB Bengkulu atas dasar harga konstan tumbuh 4,57 % year-on-year, menegaskan bahwa konsumsi domestik masih menjadi motor utama pemulihan.

Pengeluaran konsumsi lembaga non-profit (PK-LNPRT) mengalami lonjakan signifikan, yang menjadi salah satu keunikan struktur pengeluaran di wilayah ini. Pada 2023, PK-LNPRT di Bengkulu tumbuh 13,40 %, tertinggi di antara semua komponen pengeluaran, menandakan peran sentral lembaga sosial dan donasi publik dalam menopang permintaan regional. Kenaikan berlanjut pada 2024 hingga 12,05 %, sekaligus memunculkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan fiskal tanpa terlalu bergantung pada sumber pendanaan ini. Di Rejang Lebong, data PK-LNPRT tidak dipublikasikan terpisah, namun tren provinsi menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat melalui lembaga non-profit turut mendorong laju pertumbuhan kabupaten.

Belanja pemerintah dan investasi juga memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi pemulihan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Rejang Lebong rebound dari kontraksi 1,84 % pada 2020 menjadi 4,01 % pada 2022, mencerminkan kelanjutan proyek infrastruktur dan property. Provinsi Bengkulu menunjukkan tren serupa dengan PMTB stabil di kisaran 3–4 % sejak 2021, menandakan keberlanjutan investasi publik. Meski kontribusi net ekspor relatif kecil—terlihat fluktuasi pada angka 0,65 % di 2022 dan diproyeksikan hanya meningkat menjadi sekitar 1,00 % pada 2024—upaya diversifikasi produk ekspor dan peningkatan konektivitas logistik menjadi kunci untuk memperkuat neraca perdagangan regional.

Secara diagnostik, sinergi kebijakan fiskal provinsi dan kabupaten terlihat pada ekspansi belanja pemerintah yang mulai mendukung investasi swasta dan aktivitas konsumsi, menciptakan multiplier effect di sektor jasa dan konstruksi. Namun, tingginya ketergantungan pada PK-LNPRT menuntut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangan sektor unggulan agar sumber pembiayaan lebih beragam. Di sisi investasi, peningkatan insentif untuk proyek hijau dan digitalisasi akan memperkuat pertumbuhan PMTB yang berkelanjutan serta mengurangi gejolak pada perubahan inventori yang selama ini masih fluktuatif.

Secara keseluruhan, hubungan antara Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu dalam konteks PDRB pengeluaran menunjukkan keterkaitan erat: konsumsi rumah tangga dan non-profit menjadi pilar utama, belanja pemerintah dan investasi memastikan kesinambungan ekonomi, sementara net ekspor masih perlu didorong melalui diversifikasi dan peningkatan nilai tambah. Ke depan, kebijakan terpadu untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengakselerasi investasi hijau, dan memperluas basis ekspor akan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan di atas rata-rata nasional dan meningkatkan ketahanan ekonomi regional.

Perbedaan performa ekonomi kedua wilayah ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang berbasis pada karakteristik dan potensi lokal. Bagi Rejang Lebong, percepatan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor hilir dan peningkatan daya saing ekspor menjadi keniscayaan. Sedangkan bagi Bengkulu, tantangannya adalah mempertahankan momentum pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kedua wilayah sama-sama membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih resilien di masa depan.

2.2.4. Analisis Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk periode 2020– 2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengadopsi pendekatan berbasis skenario untuk memitigasi ketidakpastian ekonomi dan memastikan perencanaan fiskal yang responsif. Tiga skenario yang digunakan—pesimis, *business as usual* (BaU), dan optimis—dikembangkan berdasarkan variabel makroekonomi kunci, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, realisasi belanja, dan efektivitas proyek strategis. Berikut penjelasan masing-masing skenario:

1. Skenario Pesimis

Skenario ini mempertimbangkan kondisi ekonomi dengan pertumbuhan rendah (low-growth) yang disertai tingkat inflasi tinggi. Kombinasi ini berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) akibat penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Di sisi belanja, tekanan inflasi dapat meningkatkan alokasi belanja wajib (seperti subsidi dan tunjangan), sementara belanja pembangunan terhambat karena keterbatasan fiskal. Skenario ini menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi risiko, terutama dalam menghadapi guncangan eksternal (misalnya, krisis komoditas atau gejolak global).

2. Skenario Business as Usual (BaU)

Skenario BAU bersifat moderat dan mengasumsikan kelanjutan tren ekonomi saat ini, dengan inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi stabil sesuai rata-rata historis. Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat secara bertahap seiring dengan konsistensi pemungutan pajak daerah dan retribusi. Belanja daerah tetap teralokasi secara proporsional, dengan porsi signifikan untuk pelayanan publik dan pemeliharaan infrastruktur. Skenario ini berfungsi sebagai baseline untuk mengevaluasi penyimpangan kinerja fiskal.

3. Skenario Optimis

Skenario ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi tinggi yang didukung oleh inflasi rendah dan keberhasilan implementasi proyek strategis (misalnya, pengembangan kawasan industri atau pariwisata). Peningkatan PAD diproyeksikan berasal dari investasi swasta, ekspansi sektor produktif, dan efisiensi administrasi pendapatan. Di sisi belanja, pemerintah

dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan inovasi pelayanan publik. Skenario ini mensyaratkan stabilitas makroekonomi dan koordinasi kebijakan yang kuat antar-pemangku kepentingan.

Penerapan tiga skenario ini mencerminkan pendekatan adaptive fiscal planning Kabupaten Rejang Lebong dalam merespons dinamika ekonomi. Pertumbuhan tinggi dengan inflasi terkendali (skenario optimis) tidak hanya mendorong stabilitas fiskal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, skenario pesimis mengingatkan pentingnya dana darurat dan diversifikasi sumber pendapatan.

Proyeksi ini menggunakan data historis, elastisitas pendapatan terhadap PDRB, dan simulasi kebijakan. Namun, terdapat keterbatasan, seperti asumsi stabilitas politik dan tidak adanya bencana besar. Penelitian lanjutan dapat memperkaya model dengan analisis sensitivitas dan integrasi variabel sosial-lingkungan. Dengan demikian, penyusunan skenario ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjadi instrumen risk management dan perencanaan strategis jangka.

2.2.4.1. Analisis Proyeksi Pendapatan

Berdasarkan analisis tiga skenario (*Business as Usual/BaU*, *Pesimis*, dan *Optimis*), proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2025–2029:

1. Skenario Business as Usual (BaU):

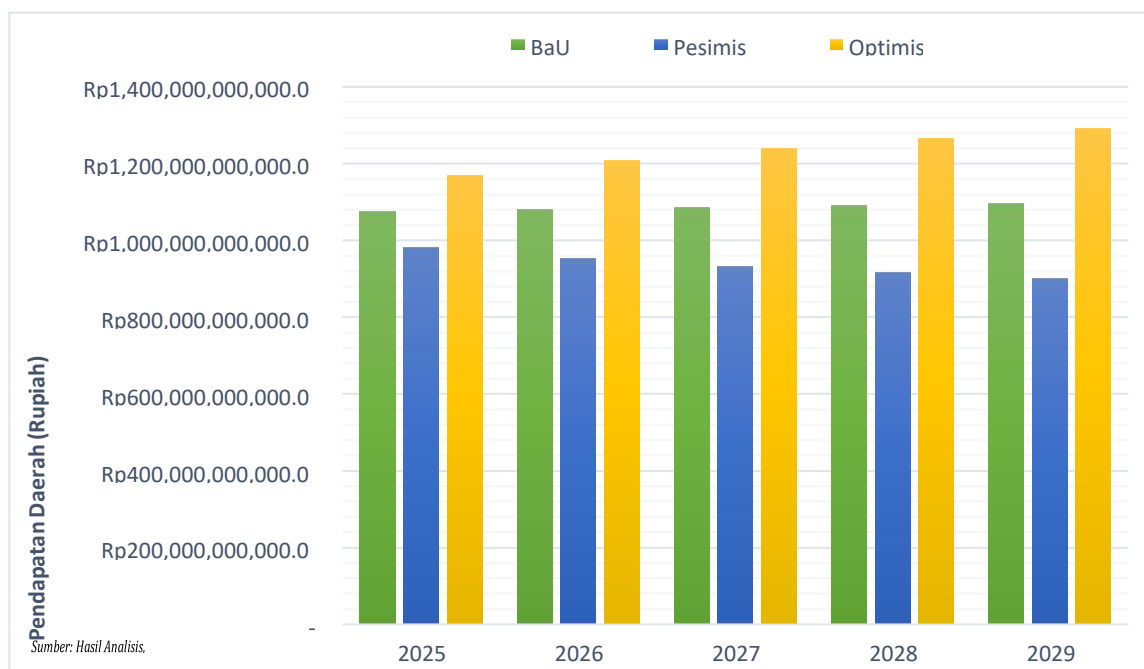
Pendapatan diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Rp1.078,01 miliar (2025) menjadi Rp1.098,96 miliar (2029), dengan laju pertumbuhan kumulatif hanya 0,01% selama periode tersebut. Stagnansi ini mengindikasikan keterbatasan ekspansi fiskal dalam kondisi ekonomi tanpa perubahan struktural.

2. Skenario Pesimis:

Pendapatan daerah mengalami kontraksi, turun dari Rp983,63 miliar (2025) menjadi Rp904,22 miliar (2029), dengan pertumbuhan negatif (-1,22%) per tahun. Tren ini merefleksikan dampak inflasi tinggi dan penurunan aktivitas ekonomi terhadap kapasitas fiskal daerah.

3. Skenario Optimis:

Pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif, meningkat dari Rp1.172,39 miliar (2025) menjadi Rp1.293,71 miliar (2029). Namun, laju pertumbuhan tahunan melambat dari 3,23% (2026) menjadi 1,96% (2029), turun 1,27 poin persentase. Perlambatan ini mengisyaratkan tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan meskipun dalam kondisi optimal



Gambar 2. 28
Proyeksi Pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

2.2.4.1.1. Analisis Tren dan Implikasi Kebijakan

1. Inflasi dan Tekanan Fiskal (Skenario Pesimis):

Pertumbuhan negatif pada skenario pesimis mengonfirmasi kerentanan pendapatan daerah terhadap gejolak makroekonomi. Kebijakan antisipatif seperti diversifikasi sumber PAD (misalnya, pengembangan sektor non-pajak) dan penguatan cadangan fiskal menjadi kritikal.

2. Stagnansi dalam Skenario BaU:

Pertumbuhan hampir nol (0,01%) menunjukkan ketergantungan pada tren existing tanpa terobosan kebijakan. Perlu stimulus fiskal selektif dan efisiensi pemungutan pajak daerah untuk menghindari jebakan pertumbuhan rendah.

3. Perlambatan Pertumbuhan pada Skenario Optimis:

Penurunan laju pertumbuhan dari 3,23% menjadi 1,96% mengindikasikan diminishing returns dari kebijakan pro-growth. Strategi seperti peningkatan investasi publik-swasta (PPP) dan penguatan ekosistem UMKM diperlukan untuk mempertahankan ekspansi.

2.2.4.1.2. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan temuan di atas, langkah-langkah berikut direkomendasikan:

1. Diversifikasi Sumber Pendapatan:

- 1) Pengembangan potensi sektor unggulan (e.g., pariwisata, agroindustri) untuk mengurangi ketergantungan pada pajak konvensional.

- 2) Optimalisasi aset daerah melalui skema public asset management.
2. Pengendalian Risiko Makroekonomi:
 - 1) Pembentukan dana stabilisasi fiskal untuk mitigasi dampak inflasi dan guncangan eksternal.
 - 2) Pemantauan ketat indikator ekonomi makro (pertumbuhan, inflasi, investasi) sebagai *early warning system*.
3. Percepatan Proyek Strategis:
 - 1) Fokus pada proyek infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi (e.g., jalan tol, kawasan ekonomi khusus).
 - 2) Sinergi dengan pemerintah pusat dalam program national strategic projects.

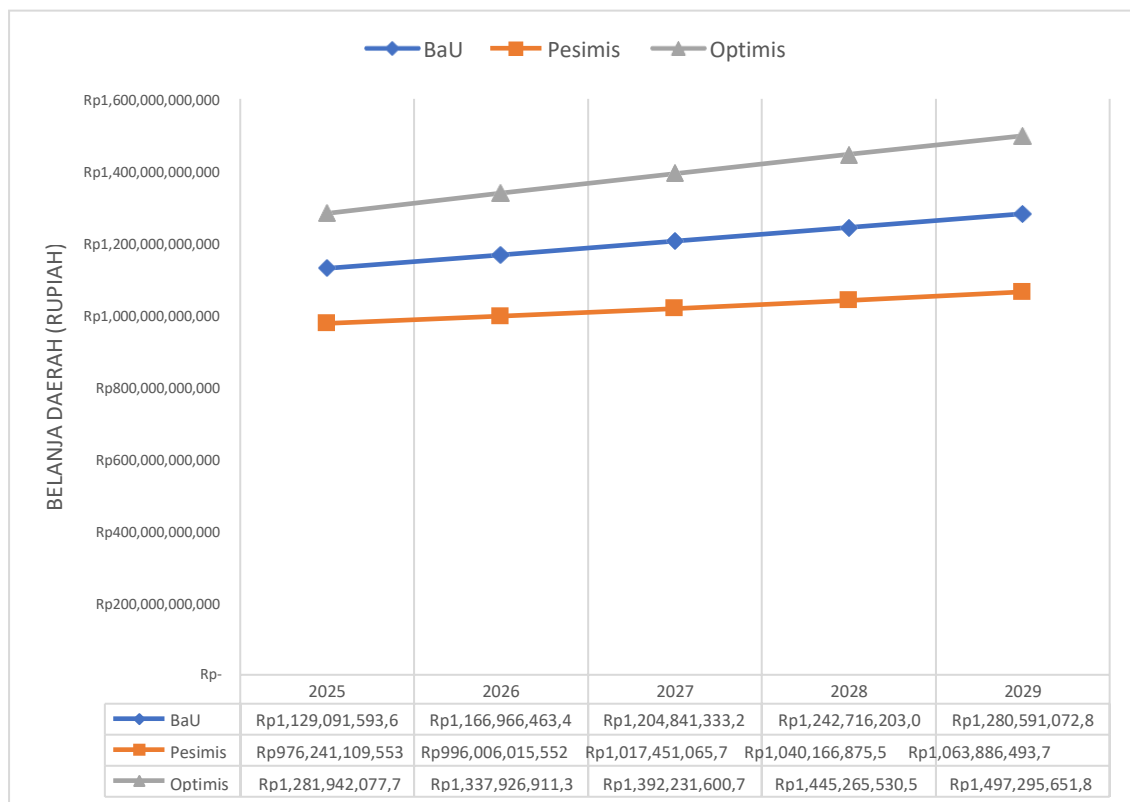
Proyeksi ini menggunakan data historis dan asumsi elastisitas pendapatan terhadap PDRB, dengan tiga skenario sebagai kerangka analisis. Keterbatasan utama meliputi:

- 1) Tidak mempertimbangkan guncangan eksternal ekstrem (seperti pandemi, bencana alam).
- 2) Asumsi stabilitas politik dan kebijakan yang mungkin tidak tercapai.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 menunjukkan ketergantungan kuat pada lingkungan ekonomi eksternal dan efektivitas kebijakan fiskal. Perlambatan bahkan dalam skenario optimis menegaskan perlunya reformasi struktural dan manajemen fiskal adaptif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

2.2.4.2. Analisis Proyeksi Belanja

Berdasarkan analisis proyeksi belanja daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2019 hingga 2029, terlihat pola pertumbuhan yang bervariasi pada tiga skenario yang ditetapkan. Pada skenario Business as Usual (BaU), belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1.129.091.593.641 di tahun 2019 menjadi Rp1.280.591.072.829 di tahun 2029. Namun, laju pertumbuhan tahunannya menunjukkan tren penurunan, dari 3,35% di tahun 2026 menjadi 3,05% di tahun 2029, dengan penurunan sebesar 0,30 poin persentase. Pola ini mengindikasikan stabilitas fiskal yang moderat, di mana belanja daerah berkembang sesuai dengan tren ekonomi yang ada tanpa adanya akselerasi yang signifikan.



Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Gambar 2. 29
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

Skenario pesimis menunjukkan nilai belanja terendah di antara ketiga skenario, dimulai dari Rp976.241.109.000 di tahun 2019 dan mencapai Rp1.063.886.493.794 di tahun 2029. Yang menarik, skenario ini justru menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan dari 2,02% di tahun 2026 menjadi 2,28% di tahun 2029, dengan kenaikan sebesar 0,26 poin

persentase. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari tekanan fiskal yang muncul dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, di mana pemerintah daerah mungkin perlu meningkatkan belanja untuk mengatasi dampak inflasi atau kebutuhan belanja darurat, meskipun dengan nilai absolut yang tetap lebih rendah dibandingkan skenario lainnya.

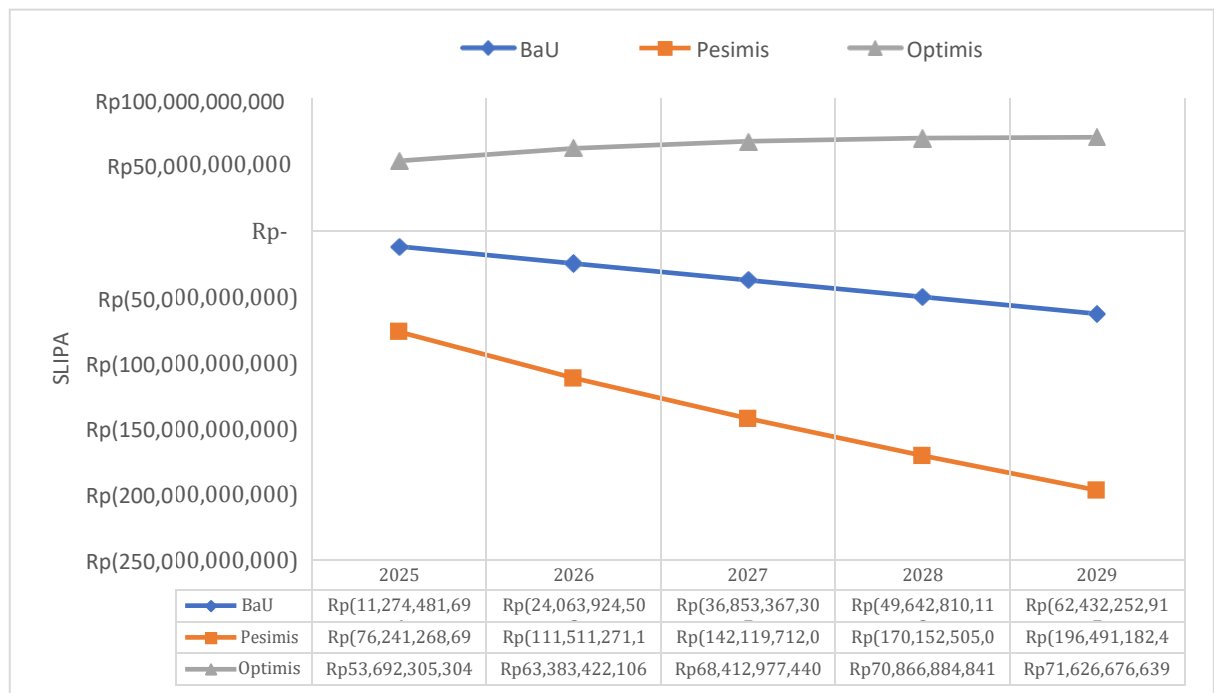
Di sisi lain, skenario optimis mencatat nilai belanja tertinggi, mulai dari Rp1.281.942.077.729 di tahun 2019 dan mencapai Rp1.497.295.651.864 di tahun 2029. Namun, laju pertumbuhan tahunannya mengalami penurunan paling signifikan di antara ketiga skenario, dari 4,27% di tahun 2026 menjadi 3,60% di tahun 2029, turun sebesar 0,67 poin persentase. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi ekonomi yang paling menguntungkan sekalipun, terdapat tantangan dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan belanja yang tinggi secara berkelanjutan.

Analisis persentase pertumbuhan mengungkapkan dinamika yang menarik. Skenario pesimis justru menunjukkan peningkatan pertumbuhan belanja, sementara skenario BaU dan optimis mengalami penurunan. Pada skenario BaU, penurunan sebesar 0,30 poin persentase (dari 3,35% menjadi 3,05%) mengindikasikan ekonomi yang cenderung stabil dengan penyerapan belanja yang terkendali. Sedangkan pada skenario optimis, penurunan yang lebih besar (0,67 poin persentase) menunjukkan bahwa peningkatan belanja yang cepat di awal periode mungkin sulit dipertahankan secara konsisten.

Pola pertumbuhan belanja yang lebih lambat pada skenario BaU dan optimis, dibandingkan dengan peningkatan pada skenario pesimis, memberikan beberapa implikasi kebijakan penting. Pertama, perlambatan pertumbuhan belanja dalam kondisi ekonomi stabil (BaU) dan menguntungkan (optimis) menunjukkan perlunya evaluasi efektivitas penyerapan anggaran, khususnya dalam mengalokasikan belanja ke sektor- sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kedua, peningkatan pertumbuhan belanja dalam skenario pesimis meskipun dengan nilai absolut terendah, mengisyaratkan pentingnya penyiapan mekanisme pengendalian belanja yang fleksibel untuk menghadapi tekanan fiskal di masa sulit.

Catatan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pengelolaan belanja yang adaptif, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan skenario ekonomi. Dalam kondisi optimis sekalipun, penurunan laju pertumbuhan belanja mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dan optimalisasi alokasi belanja. Sementara itu, pola pertumbuhan pada skenario pesimis menunjukkan perlunya penyiapan instrumen fiskal yang dapat merespon cepat terhadap gejolak ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang.

2.2.4.3. Analisis Proyeksi SILPA



Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Gambar 2. 30
Proyeksi SILPA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

Proyeksi Saldo Kas Akhir Tahun (SiLPA) Kabupaten Rejang Lebong mengungkapkan dinamika kesehatan fiskal yang berbeda secara signifikan pada ketiga skenario yang dianalisis. Temuan ini memberikan dasar penting untuk perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

1. Skenario Business as Usual: Ancaman Defisit Struktural

Analisis menunjukkan tren negatif SiLPA yang konsisten dalam skenario Business as Usual (BaU). Nilai defisit yang terus meningkat setiap tahun mengindikasikan adanya ketidakseimbangan struktural antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan:

- 1) Akumulasi defisit yang menggerogoti kapasitas fiskal daerah
- 2) Peningkatan ketergantungan pada pembiayaan utang
- 3) Penurunan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik

2. Skenario Pesimis: Krisis Fiskal Potensial

Skenario pesimis menggambarkan situasi yang lebih buruk, dengan defisit yang berkembang secara eksponensial. Beberapa faktor kritis yang dapat memicu skenario ini meliputi:

- 1) Kontraksi ekonomi regional yang berdampak pada penurunan PAD

- 2) Penurunan efektivitas pemungutan pajak daerah
 - 3) Lonjakan belanja tak terduga akibat keadaan darurat atau kenaikan harga komoditas
 - 4) Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kondisi ini berpotensi menyebabkan krisis fiskal dalam kurun waktu 3-5 tahun.
3. Skenario Optimis: Peluang Konsolidasi Fiskal
- Berbeda dengan dua skenario sebelumnya, skenario optimis menunjukkan tren positif SiLPA yang konsisten. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui:
- 1) Peningkatan efektivitas pemungutan PAD (minimal 15% per tahun)
 - 2) Implementasi program efisiensi belanja (penghematan 10-15% belanja rutin)
 - 3) Optimalisasi aset daerah yang menghasilkan pendapatan tambahan
 - 4) Peningkatan kualitas belanja modal untuk stimulasi ekonomi

Implikasi Kebijakan Strategis:

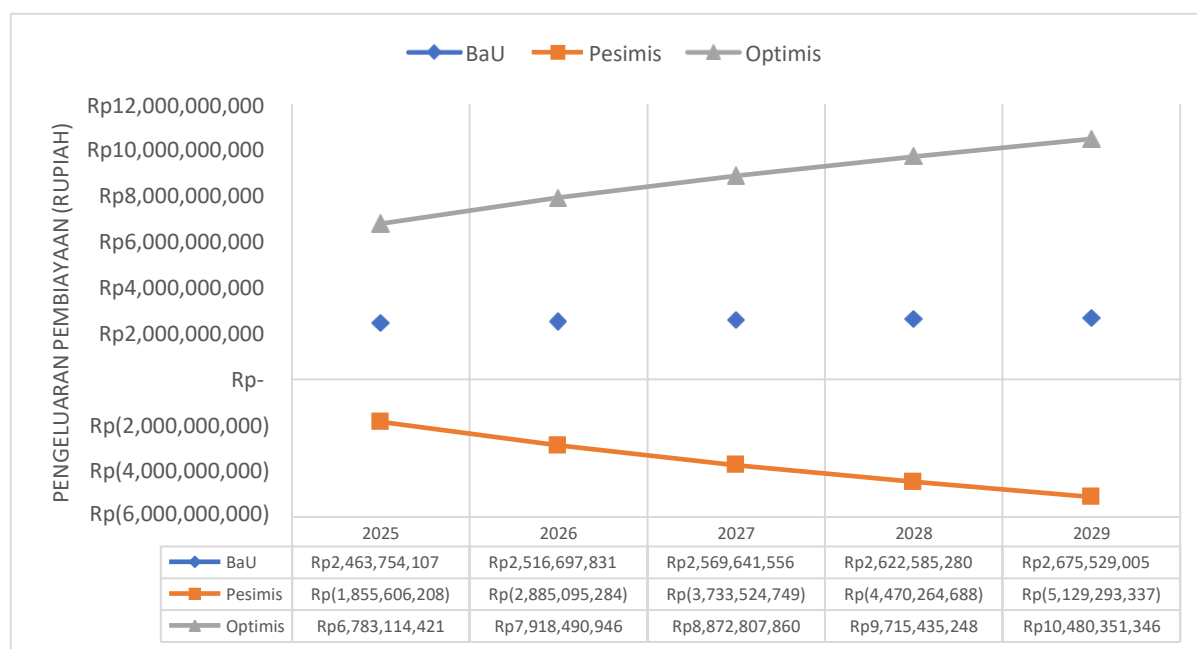
1. Manajemen Risiko Fiskal:
 - 1) Pengembangan sistem peringatan dini fiskal
 - 2) Penyusunan rencana kontinjensi untuk skenario pesimis
 - 3) Pembentukan dana cadangan fiskal (minimal 5% dari APBD)
2. Penguatan Pendapatan Daerah:
 - 1) Diversifikasi basis PAD melalui pengembangan sektor unggulan
 - 2) Reformasi sistem administrasi perpajakan daerah
 - 3) Optimalisasi potensi retribusi yang belum tergarap maksimal
3. Efisiensi Belanja:
 - 1) Penerapan zero-based budgeting untuk belanja rutin
 - 2) Penguatan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah
 - 3) Penajaman prioritas belanja berdasarkan analisis cost-benefit

Rekomendasi Jangka Menengah:

- 1) Penyusunan roadmap konsolidasi fiskal 5 tahunan
- 2) Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah
- 3) Penguatan koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat
- 4) Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja

Dari sini menegaskan pentingnya pendekatan proaktif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi, pemerintah daerah dapat menyusun strategi fiskal yang lebih resilien dan berkelanjutan.

2.2.4.4. Analisis Pengeluaran Pembiayaan



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 2. 31
Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

Proyeksi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Rejang Lebong periode 2025-2029 menunjukkan dinamika yang berbeda secara signifikan pada ketiga skenario yang dianalisis. Dalam skenario *Business as Usual* (BaU), terlihat peningkatan yang stabil dari Rp2,463,754,107 di tahun 2025 menjadi Rp2,675,529,005 di tahun 2029, dengan pertumbuhan tahunan berkisar 2%. Pola ini mencerminkan pengelolaan pembiayaan yang berjalan sesuai rutinitas tanpa perubahan kebijakan atau gejolak ekonomi berarti. Namun, perlu dicermati adanya tren penurunan pertumbuhan sebesar 0,13% selama periode 2026-2029 yang mengindikasikan perlunya kewaspadaan terhadap potensi stagnansi fiskal.

Skenario pesimis justru menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan dengan peningkatan defisit pembiayaan dari -Rp1,855,606,208 di tahun 2025 menjadi -Rp5,129,293,337 di tahun 2029. Fluktuasi yang tajam, dengan lonjakan pertumbuhan 55,48% di tahun 2026 yang kemudian anjlok 40,74% di tahun-tahun berikutnya, mengungkap kerentanan struktural dalam sistem pembiayaan daerah. Situasi ini kemungkinan besar dipicu oleh ketidakseimbangan kronis antara pendapatan dan belanja, penurunan kapasitas fiskal, atau membengkaknya kebutuhan belanja mendesak yang tidak terantisipasi dalam anggaran.

Di sisi lain, skenario optimis menawarkan gambaran yang lebih positif dengan peningkatan dari Rp6,783,114,421 di tahun 2025 menjadi Rp10,480,351,346 di tahun 2029. Meskipun menunjukkan pertumbuhan awal yang kuat sebesar 16,74% di tahun 2026, terjadi perlambatan progresif hingga mencapai 7,78% di tahun 2029. Pola ini mengisyaratkan bahwa meskipun dalam kondisi optimal sekalipun, terdapat tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan pembiayaan jangka panjang.

Proyeksi APBD berbasis skenario BaU yang bersifat moderat ini mengasumsikan inflasi terkendali dan stabilitas kebijakan fiskal. Dalam kondisi ini, daya beli masyarakat dan harga barang/jasa pemerintah relatif stabil, memungkinkan belanja daerah dapat diproyeksikan dengan tingkat kepastian yang memadai. Namun, margin fiskal yang sempit dalam skenario ini membuat keseimbangan anggaran menjadi rentan terhadap perubahan parameter ekonomi makro.

Temuan ini menggarisbawahi beberapa implikasi kebijakan krusial. Pertama, pentingnya penguatan buffer fiskal dan penyusunan rencana kontinjensi untuk mengantisipasi skenario pesimis. Kedua, kebutuhan akan optimalisasi sumber-sumber pembiayaan alternatif dan peningkatan efektivitas pengelolaan kas daerah. Ketiga, perlunya penajaman alokasi pembiayaan berbasis analisis cost-benefit serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.

Secara khusus, penurunan pertumbuhan yang konsisten dalam skenario optimis menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi untuk mempertahankan momentum pembiayaan. Sementara itu, fluktuasi ekstrim dalam skenario pesimis menegaskan urgensi reformasi sistem pendapatan daerah dan mekanisme pengendalian belanja.

Berdasarkan analisis ini, rekomendasi strategis yang dapat diajukan meliputi penyusunan skenario perencanaan fiskal multi-tahunan, penguatan kapasitas analisis fiskal di tingkat daerah, serta implementasi sistem penganggaran yang lebih responsif. Yang terpenting, temuan ini menegaskan bahwa pendekatan proaktif dan berbasis bukti dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin krusial di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

2.2.5. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 – 2030

Penyusunan proyeksi keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai kerangka fiskal untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong, proyeksi fiskal tahun 2026–2030 dirancang secara realistis namun progresif, mencerminkan optimisme terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah serta sinergi dengan kebijakan fiskal nasional. Analisis dimaksudkan untuk menguraikan tren dan dinamika komponen pendapatan dan belanja daerah selama periode tersebut, menilai konsistensi dan keberlanjutan

fiskal, serta memberikan dasar argumentatif bagi penyusunan kebijakan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*) dan keadilan sosial.

2.2.5.1. Struktur dan Tren Pendapatan Daerah 2026-2030

Secara umum, total pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong diproyeksikan meningkat dari Rp. 1.145.188.793.300,00 pada tahun 2026 menjadi Rp. 1.134.027.177.042,74 pada tahun 2029, dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar -0.20%. Pertumbuhan berarti secara rata-rata setiap tahun pendapatan justru mengalami kontraksi (penurunan tipis). Hal ini disebabkan adanya penurunan pada asumsi Dana Alokasi Khusus dari tahun 2026 ke tahun selanjutnya, akibat adanya kebijakan fiskal nasional yang mengurangi porsi anggaran ini untuk dialihkan untuk program strategis nasional tertentu. Sementara untuk asumsi pendapatan lainnya mencerminkan pendekatan kehati-hatian (*prudential budgeting*) namun tetap mencerminkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal daerah. Pada tahun 2026, PAD ditargetkan sebesar Rp.96.657.780.852,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp.108.857.194.047,00 pada tahun 2029, dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 2,41%. Tren ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sumber-sumber penerimaan lokal, terutama dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Peningkatan PAD ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui digitalisasi perpajakan, optimalisasi pendataan objek pajak, dan reformasi retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

b. Pendapatan Transfer

Penerimaan dari dana transfer tetap menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah, mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa dan Insentif Fiskal. Komponen ini cenderung menurun karena adanya asumsi penurunan terhadap akibat penyesuaian kebijakan DAK Tahun 2026 ke Tahun 2027. Untuk dana bagi hasil cenderung tetap (stagnan) dan dana insentif fiskal diasumsikan tidak ada mengingat tahun 2025 anggaran ini tidak tersedia untuk Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Desa tetap meningkat secara bertahap. Pada komponen pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak diasumsikan tetap dalam lima tahun. Sehingga secara keseluruhan pendapatan transfer cenderung menurun dari

Rp.1.033.595.277.167,00 (2026) menjadi Rp. 1.006.006.595.407,74 (2030), dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,54% pertahun.

Kenaikan ini mencerminkan proyeksi rasional atas perekonomian nasional serta penyesuaian alokasi fiskal dari pusat ke daerah berdasarkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal. Namun demikian, ketergantungan terhadap transfer pusat yang masih tinggi menandakan pentingnya strategi diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi risiko fiskal.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos ini diproyeksikan meningkat dari Rp.14.935.735.281,00 menjadi Rp.19.163.387.588,00 selama periode lima tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5.11%. Kontribusi anggaran ini masih kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah (<2%), namun peningkatan ini menunjukkan potensi pengembangan dimana untuk Kabupaten Rejang Lebong masih bersumber pada pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

2.2.5.2. Struktur dan Tren Belanja Daerah 2026-2030

Belanja daerah dirancang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Total belanja daerah meningkat dari Rp. 1.212.899.852.210 pada tahun 2026 menjadi Rp.1.376.026.554.354,54 pada tahun 2030, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 2,56%. Kenaikan ini lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan daerah, yang mengindikasikan pentingnya pengelolaan defisit dan pembiayaan secara hati-hati.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi masih mendominasi struktur belanja, mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Meskipun diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan stabilitas birokrasi, rasio belanja operasi terhadap total belanja perlu dimonitor agar tidak menekan ruang fiskal untuk belanja modal dan program pembangunan strategis.

b. Belanja Modal

Belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta penguatan sistem kesehatan dan pendidikan serta optimalisasi aset daerah (pembangunan gedung kantor, pengelolaan kawasan wisata serta revitalisasi BUMD agar aktif).

c. Belanja Tidak Terduga

Alokasi belanja tidak terduga disiapkan untuk situasi khusus diluar rencana seperti antisipasi risiko bencana dan ketidakpastian ekonomi. Fleksibilitas anggaran dan disiplin fiskal menjadi kunci dalam pengelolaan kedua pos ini.

d. Belanja Transfer

Komponen ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten terhadap penguatan pembangunan desa. Proyeksi peningkatan belanja transfer ke desa juga konsisten dengan kebijakan Dana Desa dan strategi penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

2.2.5.3. Struktur dan Tren Pembiayaan Daerah 2026-2030

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang diproyeksikan pada tahun 2026 sebesar Rp. 25.002.162.475,18, sedangkan pada tahun berikutnya selama periode RPJMD tidak dimasukkan asumsi SILPA.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD atau entitas lain yang mendukung kebijakan strategis. Jumlahnya diperkirakan berkisar Rp. 2.500.000.000,00 per tahun, disesuaikan dengan kebutuhan investasi daerah.

c. Pembiayaan Netto

Kondisi fiskal Kabupaten Rejang Lebong secara umum menunjukkan defisit yang terkendali dan ditutupi oleh pembiayaan netto.

Hasil analisis dan proyeksinya diperlihatkan pada tabel di bawah yang juga disertai dengan uraian analisis Komprehensif Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026–2030.

Tabel 2. 69
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026-2030
Kabupaten Rejang Lebong

Kode	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN DAERAH	Rp 1,081,649,717,303.39	Rp 1,145,188,793,300.00	Rp 1,091,863,704,988.85	Rp 1,107,442,844,751.33	Rp 1,121,594,471,252.65	Rp 1,134,027,177,042.74
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp 62,942,583,363.39	Rp 96,657,780,852.00	Rp 98,351,128,149.75	Rp 101,855,298,862.00	Rp 105,336,667,420.00	Rp 108,857,194,047.00
4. 1. 01	Pajak Daerah	Rp 17,364,389,572.00	Rp 44,331,694,402.00	Rp 45,704,310,711.00	Rp 49,061,810,711.00	Rp 52,419,310,711.00	Rp 55,776,810,711.00
4. 1. 02	Retribusi Daerah	Rp 2,717,800,850.00	Rp 3,838,200,000.00	Rp 4,025,683,000.00	Rp 4,125,337,151.00	Rp 4,228,416,509.00	Rp 4,382,551,336.00
4. 1. 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 1,761,169,260.77	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00
4. 1. 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 41,099,223,680.62	Rp 45,987,886,450.00	Rp 46,121,134,438.75	Rp 46,168,151,000.00	Rp 46,188,940,200.00	Rp 46,197,832,000.00
4. 2.	Pendapatan Transfer	Rp 979,693,032,554.00	Rp 1,033,595,277,167.00	Rp 976,794,577,581.10	Rp 987,646,084,201.33	Rp 997,948,089,793.65	Rp 1,006,006,595,407.74
4. 2. 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 946,408,561,036.00	Rp 973,353,909,351.00	Rp 916,553,209,765.10	Rp 927,404,716,385.33	Rp 937,706,721,977.65	Rp 945,765,227,591.74
4. 2. 01 05	Dana Desa	Rp 107,287,706,000.00	Rp 106,446,361,350.00	Rp 111,768,679,417.50	Rp 117,357,113,388.38	Rp 123,224,969,057.79	Rp 129,386,217,510.68
4. 2. 01 06	Insentif Fiskal	Rp 8,936,579,000.00					
4. 2. 01 07	Dana Bagi Hasil	Rp 38,591,847,000.00	Rp 25,566,852,000.00	Rp 25,566,852,000.00	Rp 25,566,852,000.00	Rp 25,566,852,000.00	Rp 25,566,852,000.00
4. 2. 01 08	Dana Alokasi Umum	Rp 605,857,429,716.00	Rp 602,218,384,380.00	Rp 602,411,981,147.60	Rp 602,415,853,082.95	Rp 602,415,930,521.66	Rp 602,415,932,070.43
4. 2. 01 09	Dana Alokasi Khusus	Rp 185,734,999,320.00	Rp 239,122,311,621.00	Rp 176,805,697,200.00	Rp 182,064,897,914.00	Rp 186,498,970,398.20	Rp 188,396,226,010.62
4. 2. 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 33,284,471,518.00	Rp 60,241,367,816.00	Rp 60,241,367,816.00	Rp 60,241,367,816.00	Rp 60,241,367,816.00	Rp 60,241,367,816.00
4. 2. 02 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 33,284,471,518.00	Rp 60,241,367,816.00	Rp 60,241,367,816.00	Rp 60,241,367,816.00	Rp 60,241,367,816.00	Rp 60,241,367,816.00

Kode	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 39,014,101,386.00	Rp 14,935,735,281.00	Rp 16,717,999,258.00	Rp 17,941,461,688.00	Rp 18,309,714,039.00	Rp 19,163,387,588.00
4. 3. 01	Pendapatan Hibah	Rp 1,032,000,000.00	-	-	-	-	-
4. 3. 02	Dana Darurat	Rp 24,466,275,000.00	-	-	-	-	-
4. 3. 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 13,515,826,386.00	Rp 14,935,735,281.00	Rp 16,717,999,258.00	Rp 17,941,461,688.00	Rp 18,309,714,039.00	Rp 19,163,387,588.00
5.	BELANJA DAERAH	Rp 1,095,100,426,165.43	Rp 1,212,899,852,210.10	Rp 1,275,660,002,106.04	Rp 1,312,349,058,663.76	Rp 1,363,300,337,133.28	Rp 1,376,026,554,354.54
5. 1.	Belanja Operasi	Rp 779,033,584,616.43	Rp 898,514,082,309.10	Rp 953,293,198,422.52	Rp 981,429,828,259.22	Rp 1,023,540,864,414.67	Rp 1,027,048,507,171.99
5. 1. 01	Belanja Pegawai	Rp 481,225,245,773.03	Rp 552,099,733,499.14	Rp 557,476,475,924.54	Rp 562,874,928,903.79	Rp 568,327,366,412.83	Rp 574,549,552,296.96
5. 1. 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 247,888,797,295.40	Rp 319,448,926,809.96	Rp 368,581,746,277.97	Rp 391,072,672,762.81	Rp 427,431,299,759.55	Rp 424,439,034,651.06
5. 1. 05	Belanja Hibah	Rp 49,919,541,548.00	Rp 26,955,422,000.00	Rp 27,224,976,220.00	Rp 27,497,225,982.20	Rp 27,772,198,242.03	Rp 28,049,920,224.45
5. 1. 06	Belanja Bantuan Sosial	Rp 0.00	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00
5. 2.	Belanja Modal	Rp 145,185,172,749.00	Rp 144,160,884,913.00	Rp 147,032,308,351.26	Rp 149,970,914,518.29	Rp 152,968,292,808.65	Rp 156,025,618,664.82
5. 2. 01	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-	-
5. 2. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 29,392,569,746.00	Rp 32,541,359,913.00	Rp 33,192,187,111.26	Rp 33,856,030,853.49	Rp 34,533,151,470.55	Rp 35,223,814,499.97
5. 2. 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 35,600,040,906.00	Rp 27,452,874,000.00	Rp 28,001,931,480.00	Rp 28,561,970,109.60	Rp 29,133,209,511.79	Rp 29,715,873,702.03
5. 2. 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 76,418,041,197.00	Rp 84,055,088,000.00	Rp 85,736,189,760.00	Rp 87,450,913,555.20	Rp 89,199,931,826.30	Rp 90,983,930,462.83
5. 2. 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 2,703,420,900.00					
5. 2. 06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 1,071,100,000.00	Rp 111,563,000.00	Rp 102,000,000.00	Rp 102,000,000.00	Rp 102,000,000.00	Rp 102,000,000.00

Kode	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3.	Belanja Tidak Terduga	Rp 0.00	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00
5. 3. 01	Belanja Tidak Terduga	-	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00
5. 4.	Belanja Transfer	Rp 170,881,668,800.00	Rp 169,224,884,988.00	Rp 174,334,495,332.26	Rp 179,923,316,496.67	Rp 185,791,179,909.96	Rp 191,952,428,517.73
5. 4. 02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 170,881,668,800.00	Rp 169,224,884,988.00	Rp 174,334,495,332.26	Rp 179,923,316,496.67	Rp 185,791,179,909.96	Rp 191,952,428,517.73
	SURPLUS/DEFISIT	-Rp 13,450,708,862.04	-Rp 67,711,058,910.10	-Rp 183,796,297,117.19	-Rp 204,906,213,912.43	-Rp 241,705,865,880.36	-Rp 241,999,377,312.27
6.	PEMBIAYAAN DAERAH						
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 49,236,531,337.51	Rp 25,002,162,475.18	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
6. 1. 01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp 49,236,531,337.51	Rp 25,002,162,475.18	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00
6. 2. 02	Penyertaan Modal Daerah	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 46,736,531,337.51	Rp 22,502,162,475.18	-Rp 2,500,000,000.00	-Rp 2,500,000,000.00	-Rp 2,500,000,000.00	-Rp 2,500,000,000.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp 33,285,822,475.47	-Rp 45,208,896,434.92	-Rp 186,296,297,117.19	-Rp 207,406,213,912.43	-Rp 244,205,865,880.36	-Rp 244,499,377,312.27

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Bappeda (diolah), 2025

2.2.5.4. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026– 2030 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang hati-hati, realistis, dan terukur. Pertumbuhan PAD yang stabil, optimalisasi dana transfer, dan peningkatan belanja pembangunan merupakan indikator positif, namun tantangan struktural berupa ketergantungan pada transfer pusat dan dominasi belanja operasi harus diatasi.

Rekomendasi strategis yang dapat diusulkan antara lain:

1. Penguatan PAD melalui transformasi digital pajak dan retribusi, pengembangan database wajib pajak yang terintegrasi, serta insentif bagi pelaku usaha lokal untuk berkontribusi terhadap pendapatandaerah.
2. Reformasi belanja daerah berbasis hasil, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap program dan kegiatan, serta evaluasi belanja rutin yang mengedepankan efisiensi.
3. Diversifikasi pembiayaan pembangunan, melalui KPBU, skema hibah luar negeri, CSR, dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber penerimaan alternatif.
4. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan keuangan, terutama dalam penggunaan *fiscal tools* dan analisis fiskal berbasis evidence, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
5. Penerapan prinsip keadilan fiskal antarwilayah, dengan alokasi belanja berbasis kebutuhan wilayah (spasial), indeks kemiskinan, dan kapasitas desa sebagai upaya memperkuat *fiscal justice* di tingkat lokal.

Dengan demikian, RPJMD yang disusun berbasis proyeksi fiskal yang kuat dan strategis akan menjadi fondasi penting bagi Rejang Lebong dalam mencapai pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif di era transformasi digital dan ekonomi hijau.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi umum wilayah serta evaluasi terhadap dokumen perencanaan jangka menengah periode sebelumnya, teridentifikasi sejumlah tren kritis dalam aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Temuan ini mengindikasikan adanya kondisi-kondisi problematik yang memerlukan penanganan strategis di Kabupaten Rejang Lebong.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 45), permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan dengan realitas empiris pada saat perencanaan disusun. Fenomena ini mengungkap suatu dinamika perencanaan yang kerap dihadapkan pada ketidakselarasan antara aspirasi pembangunan jangka panjang-menengah dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pendekatan sistematis melalui analisis prioritas masalah menjadi krusial untuk mengidentifikasi dan memetakan isu-isu kunci yang perlu diintervensi guna meminimalkan disparitas tersebut. Berikut adalah hasil identifikasi masalah pokok pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 2. 70
Analisis Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	ANALISIS
ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS		
Sumber Daya Alam	Minimnya diversifikasi tanaman	Produksi pangan didominasi oleh sayuran dan kopi. Diversifikasi tanaman masih minim yang berdampak pada ketahanan dan stabilitas pasokan
Indeks Ketahanan Pangan	Belum optimalnya stabilitas pasokan dan aksesibilitas pangan	Nilai indeks ketahanan pangan tahun 2024 yaitu 73,1, hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, memperluas akses pasar serta menjaga harga pangan agar stabil dan terjangkau
Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi	Kondisi konsumsi pangan masyarakat menunjukkan tren yang tidak stabil	Ketidakstabilan ini ditunjukkan dengan nilai pravelensi ketidaktercukupan konsumsi pangan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 yaitu 12,54, ini mengindikasikan adanya kerentanan dalam sistem ketahanan pangan daerah, baik dari sisi

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	ANALISIS
		aksesibilitas, ketersediaan, maupun keterjangkauan pangan bergizi.
Rumah Tangga dengan Askes Air minum	Belum optimalnya akses terhadap air minum layak	Rumah tangga dengan akses air minum layak tahun 2024 yaitu hanya 45,46%
Pengelolaan Persampahan	Rendahnya persentase pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan persampahan tahun 2024 yaitu 42,87% yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat untuk mendukung kelestarian lingkungan
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi	Belum meratanya akses terhadap sanitasi layak	Tahun 2024 hanya 76,61% masyarakat yang memiliki sanitasi layak sedangkan sisanya masih belum yang mana dapat menimbulkan resiko pencemaran lingkungan
Indeks Resiko Bencana	Masih adanya potensi resiko bencana	meskipun indeks risiko bencana cenderung menurun dalam jangka panjang, masih terdapat fluktuasi kecil yang menunjukkan bahwa risiko belum sepenuhnya stabil
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Rasio Gini	Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Rasio gini Kabupaten Rejang Lebong yaitu 0,28, hal ini menunjukkan bahwa masih adanya perbedaan distribusi pendapatan masyarakat Rejang Lebong
Kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu dan Nasional.
Indeks Keluarga Sehat	Derajat kesehatan keluarga masih berada pada tingkat yang sangat rendah	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,198, hal ini menunjukkan kebutuhan intervensi yang lebih terarah dan menyeluruh melalui program-program promotif dan preventif, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	ANALISIS
Pravelensi Stunting	Masih tingginya angka stunting	angka pravelensi stunting pada anak baduta tahun 2024 yaitu 24,7, Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya keras untuk perbaikan gizi yang harus terus didukung dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah
Angka Partisipasi Sekolah	Rendahnya APK PAUD	Nilai APK PAUD tahun 2024 hanya sebesar 49,98 menandakan bahwa hanya sekitar separuh penduduk usia sekolah yang dapat mengakses pendidikan pada jenjang tersebut.
Angka Putus Sekolah	Masih terdapat kasus putus sekolah	angka putus sekolah SD/MI tahun 2024 yaitu 0,56 dan angka putus sekolah SMP/MTS 2,20
Indeks Pembangunan Literasi	Tingkat literasi masyarakat berada pada kategori sedang, namun masih memerlukan banyak peningkatan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebesar 62,12
Keadaan Tenagakerjaan	Angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SMP dan SD kebawah	54,47% angkatan kerja merupakan lulusan SMP dan SD Ke bawah, hal ini membatasi kemampuan tenaga kerja untuk berkontribusi optimal dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi.
	Tingginya angka pengangguran	tingkat pengangguran tahun 2024 diangka 2,43%
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih belum optimal	nilai TPAK kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 menurun menjadi 74,92, Penurunan ini mengindikasikan adanya kelompok usia kerja, khususnya perempuan, yang memilih atau terpaksa keluar dari pasar kerja, baik karena alasan domestik, sosial, maupun keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak.

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	ANALISIS
	rendahnya latar belakang pendidikan pencari kerja	pencari kerja didominasi oleh lulusan SMA, tercatat tahun 2024 sebanyak 1187 pencari kerja merupakan lulusan SMA, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka
	Tingginya jumlah tenaga kerja di sektor informal	Dari total 162.022 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, hanya 34.258 penduduk yang bekerja di sektor formal
Indeks Pembangunan Keluarga	Belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 tercatat sebesar 63,82. Nilai ini mengindikasikan bahwa sebagian keluarga di Rejang Lebong telah memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang memadai, namun belum sepenuhnya merata
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
Indeks Infrastruktur wilayah	Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas infrastruktur	nilai indeks infrastruktur wilayah tahun 2024 yaitu 16,94, hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam ketersediaan maupun kualitas infrastruktur wilayah, baik dari aspek aksesibilitas, jaringan transportasi, maupun sarana pendukung lainnya
Kondisi Jalan	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan	Masih adanya jalan berkerikil dan tanah dalam jumlah cukup besar menunjukkan perlunya perhatian berkelanjutan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat aksesibilitas rendah
Rumah Tangga dengan Akses hunian layak	Masih rendahnya akses terhadap rumah layak huni	rasio rumah layak huni tahun 2024 yaitu 0,539 yang menunjukan bahwa masih banyak rumah tangga yang membutuhkan akses hunian layak

INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	ANALISIS
Jaringan Irigasi	Masih banyaknya irigasi kewenangan daerah dalam kondisi rusak	terdapat jaringan irigasi dengan kondisi rusak sepanjang 24,118 km dari total panjang irigasi 221,429 km. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian infrastruktur irigasi kewenangan daerah masih membutuhkan perhatian khusus
Potensi Pariwisata dan ekonomi kreatif	Belum optimalnya pengembangan pariwisata, daya tarik wisata dan ekonomi kreatif	Belum tersusunnya dokumen Perda RIPARKAB, Aksesibilitas dan konektivitas ke destinasi wisata masih rendah, fasilitas pendukung pariwisata tidak memadai, rendahnya kapasitas SDM dan Pelaku usaha wisata, promosi dan branding wisata belum optimal, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata masih rendah dan belum adanya inoasi digitaliasi sistem informasi wisata
BUMDes berkembang dan maju	Belum optimalnya BUMDes yang berkembang dan maju	hanya 40,98% BUMDes yang berkembang dan maju, hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk mendorong BUMDes agar berkembang dan maju
ASPEK PELAYANAN UMUM		
indeks profesionalitas ASN	Masih rendahnya kompetensi ASN	Tahun 2024 Indeks Profesionalitas ASN tercatat sebesar 58,87, Kondisi ini menandakan pentingnya peningkatan kapasitas ASN secara berkelanjutan melalui pelatihan berbasis kebutuhan riil, pembinaan etika birokrasi, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan dan objektif
Indeks Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yaitu 64,18 menurun dari tahun sebelumnya
Pemanfaatan Teknologi	Belum optimalnya peneranapn sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3,24
Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimalnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 yaitu 84,15, hal ini menunjukkan masih

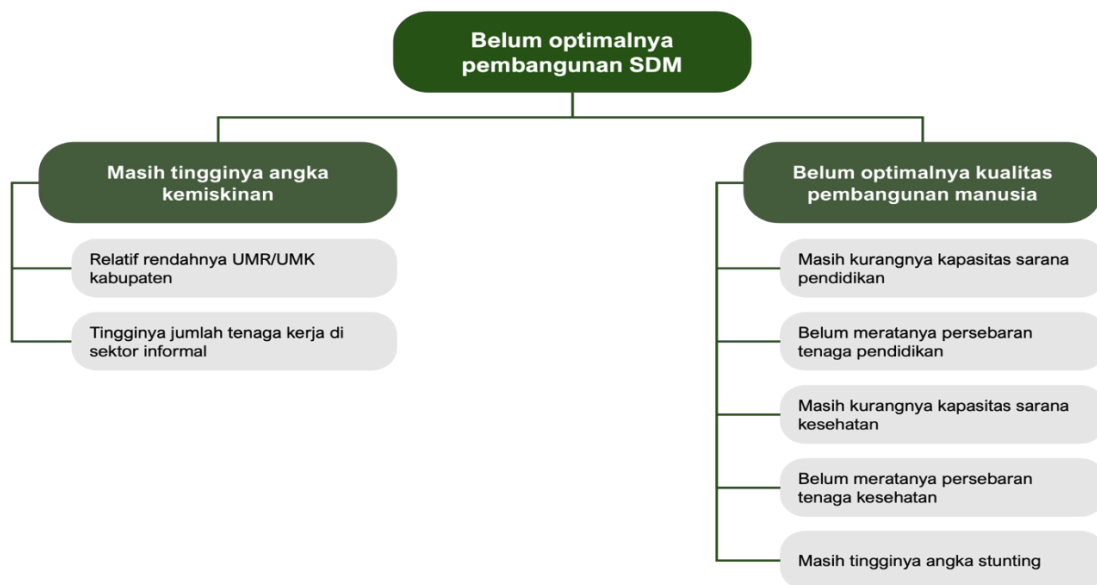
INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	ANALISIS
		dibutuhkan optimalisasi pelayanan publik

Sumber : Analisis 2025

Melalui hasil analisis, dapat dirumuskan sejumlah permasalahan pembangunan strategis yang menjadi prioritas daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2025–2029. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan, strategi pembangunan, serta program prioritas yang akan dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan.

1. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun mendatang. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi tingginya angka kemiskinan serta belum optimalnya kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Rumusan permasalahan pokok dan akar penyebabnya dapat dijelaskan sebagaimana berikut:



Gambar 2. 32
Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Rejang Lebong masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan Gambar diatas, permasalahan pokok yang diidentifikasi meliputi dua dimensi utama, yaitu tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya kualitas pembangunan manusia. Tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh relatif rendahnya Upah Minimum Kabupaten serta dominasi tenaga kerja di sektor informal

yang umumnya tidak memiliki jaminan sosial dan pendapatan tetap. Di sisi lain, kualitas SDM juga belum optimal, yang tercermin dari kurangnya kapasitas sarana dan tenaga pendidikan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta tingginya angka stunting.

Permasalahan tersebut selaras dengan data indikator makro pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, yang mencakup tiga dimensi esensial, yaitu: pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (usia harapan hidup saat lahir), dan daya beli masyarakat (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). Meskipun jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren peningkatan, capaian dimensi pendidikan masih perlu ditingkatkan secara lebih signifikan.

Data capaian tahunan menunjukkan adanya fluktuasi dan kecenderungan penurunan angka partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang dasar dan menengah. Kondisi ini menuntut evaluasi komprehensif terhadap sistem pendidikan, termasuk penguatan kapasitas lembaga pendidikan, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan layanan pendidikan agar mampu menunjang pengembangan SDM secara berkelanjutan.

Selain sektor pendidikan, tantangan juga dihadapi dalam sektor kesehatan. Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan masih di bawah standar. Saat ini, hanya sekitar 59% puskesmas di Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai ketentuan standar. Di sisi lain, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 89%, namun belum mencakup seluruh populasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya percepatan cakupan layanan kesehatan universal yang menjamin hak kesehatan seluruh penduduk dan meningkatkan kehadiran nyata pemerintah daerah dalam pelayanan dasar.

Sementara itu, dari sisi pendapatan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rejang Lebong pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.507.079, juga masih di bawah Upah Minimum Provinsi Bengkulu. Permasalahan ini berkorelasi dengan efektivitas kebijakan fiskal daerah, termasuk pengelolaan insentif perpajakan, tarif pajak penghasilan, serta optimalisasi stimulus ekonomi yang berdampak terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat. Kondisi pembangunan SDM yang belum optimal berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebesar 14,65% atau sekitar 41.160 jiwa. Angka ini mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi dalam perencanaan pembangunan inklusif dan berkeadilan. Lebih lanjut, prevalensi stunting di Kabupaten Rejang Lebong juga masih tinggi, yakni sebesar 28,6% berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu (20,2%) maupun nasional (21,6%). Kondisi ini menandakan perlunya

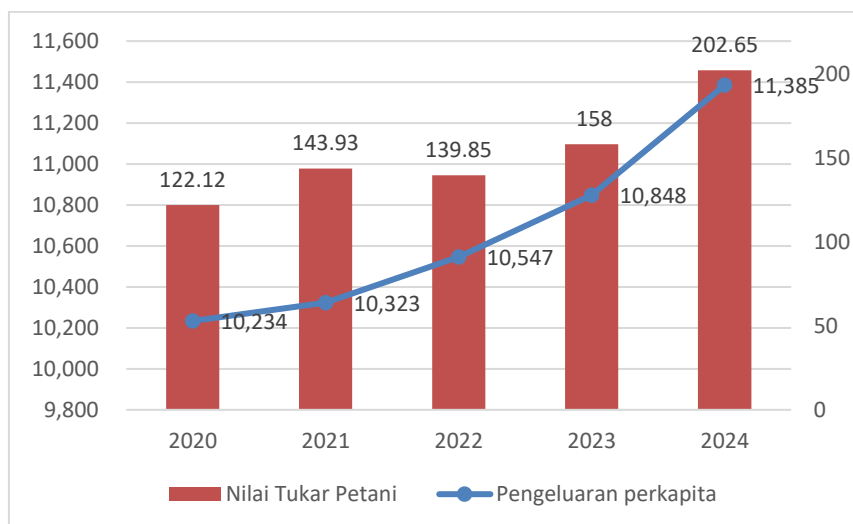
intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak serta ibu hamil.

Berbagai indikator di atas menunjukkan bahwa pembangunan SDM di Kabupaten Rejang Lebong masih memerlukan perhatian serius dan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, akses dan mutu layanan kesehatan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan angka stunting dan kemiskinan perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, guna memastikan keberhasilan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

2. Belum Optimalnya Aktivitas Ekonomi untuk peningkatan nilai tambah komoditas unggulan

Berdasarkan capaian pembangunan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun terakhir, teridentifikasi bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) daerah ini relatif rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional. Penurunan LPE sejak tahun 2022 disebabkan oleh tingginya ketidakpastian ekonomi global, yang tidak hanya berdampak pada Kabupaten Rejang Lebong, melainkan juga dirasakan oleh sebagian besar wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa aktivitas ekonomi yang tetap berkontribusi positif terhadap perekonomian domestik, seperti peningkatan produksi di sektor-sektor tertentu, meningkatnya mobilitas masyarakat, realisasi investasi melalui belanja modal APBN dan APBD, serta respons kebijakan fiskal dan moneter, khususnya pengendalian inflasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif di Kabupaten Rejang Lebong, terutama melalui peningkatan nilai tambah komoditas unggulan sektor pertanian dan perkebunan.

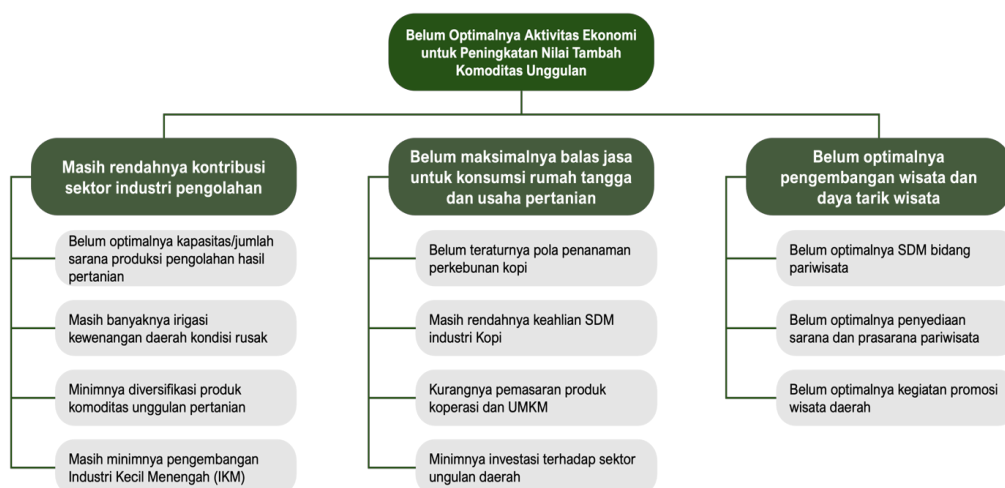
Data Profil Ekonomi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 0% hingga 4% per tahun. Angka ini lebih rendah dari rata-rata LPE Provinsi Bengkulu, yang mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor ekonomi unggulan belum berjalan optimal.



Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong; BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Gambar 2. 33
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Rejang Lebong (Ribu Rupiah) Dan Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu

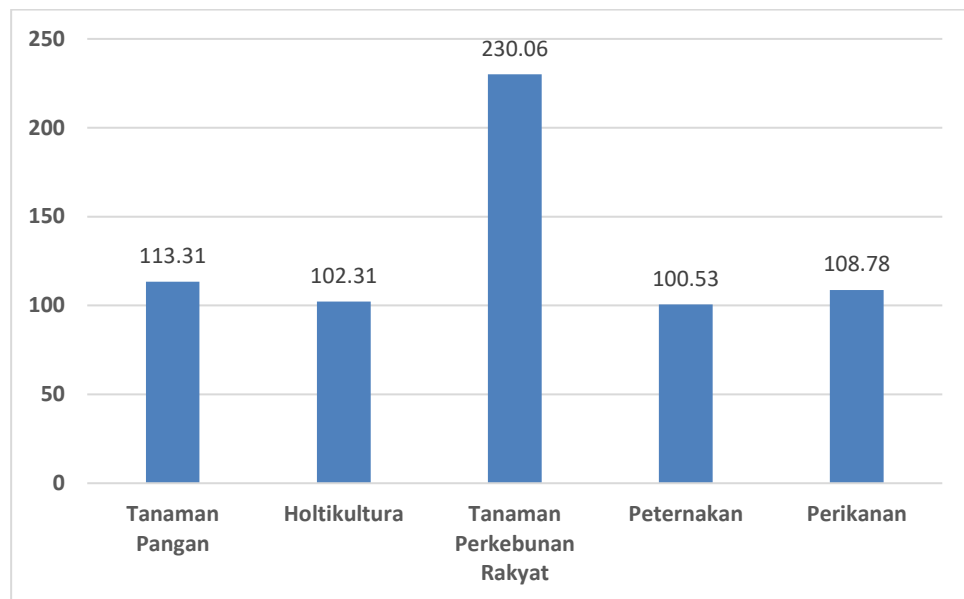
Selain rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan, pendapatan rumah tangga petani juga belum mengalami peningkatan signifikan. Upaya untuk meningkatkan balas jasa atau upah dalam rumah tangga pertanian masih menghadapi hambatan struktural. Pendapatan petani di Kabupaten Rejang Lebong cenderung rendah dan berfluktuasi, yang berdampak pada daya beli masyarakat yang stagnan.



Gambar 2. 34
Pohon Masalah Belum Optimalnya Aktivitas Ekonomi untuk Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan

Kabupaten Rejang Lebong menghadapi tantangan besar dalam pengembangan hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2024, NTP tertinggi dicapai oleh subsektor tanaman Perkebunan

rakyat (230,06), diikuti oleh tanaman pangan (113,31), perikanan (108,78), holtikultura (102,31) dan peternakan (100,53) yang mencerminkan bahwa subsektor tersebut mampu memberikan balas jasa cukup terhadap biaya produksi dan konsumsi rumah tangga petani.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Gambar 2. 35
Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu Berdasarkan Subsektor Tahun 2024

Namun demikian, subsektor peternakan menunjukkan performa terlemah, yang mengindikasikan bahwa pendapatan yang diperoleh peternak tidak mencukupi untuk menutup biaya produksi dan konsumsi minimum rumah tangga. Rendahnya balas jasa pada sektor peternakan disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu sarana dan prasarana pertanian dan peternakan yang belum memadai, produktivitas hasil pertanian dan perkebunan yang masih rendah dan terbatasnya edukasi dan penyuluhan terhadap petani dan peternak terkait kualitas dan nilai tambah hasil produksi.

Dengan demikian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan di Kabupaten Rejang Lebong membutuhkan pendekatan terpadu yang mencakup penyediaan infrastruktur penunjang, penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta fasilitasi akses pasar dan teknologi hilirisasi untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Struktur Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 menunjukkan lima sektor ekonomi utama yang berkontribusi besar terhadap struktur perekonomian daerah. Sektor yang paling dominan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 32,48 %, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,27%, serta Jasa Pendidikan sebesar 10,24%. Dua sektor lainnya, yaitu

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,75% serta Transportasi dan Pergudangan, berkontribusi sebesar 5,88%. Sementara itu, Industri Pengolahan hanya menyumbang 3,84% dari total strukturekonomi. Data ini mencerminkan bahwa hasil dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang optimal. Minimnya pengolahan pascapanen dan inovasi dalam industri hilir mengakibatkan produk unggulan, khususnya di sektor pertanian, belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rejang Lebong cenderung stagnan.

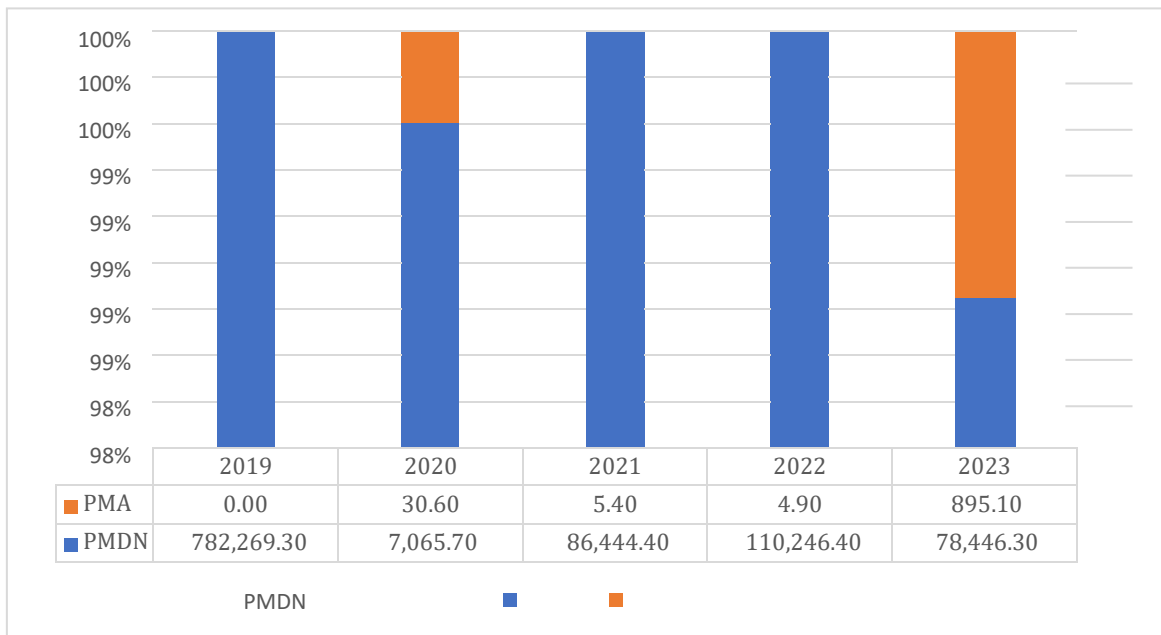
Berdasarkan data dari BPS tahun 2025, komoditas unggulan sayuran dan buah-buahan semusim meliputi: terung (635.098 kuintal/tahun), kubis (626.900 kuintal/tahun), wortel (325.843 kuintal/tahun), cabai besar (290.488 kuintal/tahun), dan petsai/sawi (292.664 kuintal/tahun). Selain itu, komoditas kopi juga menjadi unggulan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dengan status Indikasi Geografis (IG) dan kualitas tinggi (biji kopi petik merah). Luas lahan perkebunan kopi mencapai 29.854,50 hektar, menjadikan Rejang Lebong sebagai kabupaten dengan areal perkebunan kopi terluas di Provinsi Bengkulu, yakni sekitar sepertiga dari total luas perkebunan kopi provinsi. Produktivitas kopi sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 dari 16.771,52 ton pada 2022 menjadi 13.721 ton pada 2023. Namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 24.826,89. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan produksi yaitu minimnya inovasi dalam budidaya dan pengolahan kopi, rendahnya keterampilan sumber daya manusia, dan ketidakteraturan pola tanam serta lemahnya manajemenlahan.

Kendala serupa juga terjadi pada komoditas unggulan lainnya. Kurangnya diversifikasi produk dan keterbatasan sarana prasarana pengolahan menjadi hambatan utama. Salah satu indikatornya adalah kondisi sistem irigasi yang belum memadai. Dari total luas irigasi permukaan sebesar 8.172,75 hektare, hanya 3.154 hektare (38,61%) yang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya mengalami kerusakan ringan (2.555Ha), sedang (1.557 Ha), dan berat (907,4 Ha), yang mencakup sekitar 11,10% dari total luas irigasi.

Di sisi pemasaran dan kelembagaan ekonomi lokal, tantangan masih cukup besar. Pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya berbasis komoditas unggulan, belum berkembang optimal. Dari total 221 unit koperasi yang tercatat pada 2024, hanya 71 unit yang masih aktif, jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah koperasi aktif tiap tahun disebabkan oleh lemahnya manajemen keuangan, kualitas kelembagaan, dan kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah. Perdagangan berskala menengah dan besar juga belum berkembang dengan baik, sehingga industri pengolahan berbasis komoditas unggulan masih sangat terbatas dan belum mampu

menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Sebagai upaya diversifikasi ekonomi, sektor pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong juga belum tergarap secara maksimal. Padahal daerah ini memiliki potensi wisata alam yang besar, seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, Air Terjun Suban, dan kawasan agrowisata. Hambatan utama pengembangan sektor ini meliputi keterbatasan infrastruktur penunjang (aksesibilitas jalan dan fasilitas akomodasi), lemahnya promosi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata



Sumber: Statistik Badan Kordinasi Penanaman Modal Indonesia, 2023

Gambar 2. 36
Nilai PMDN (Juta Rupiah) dan PMA (Ribuan USD) Kabupaten Rejang Lebong

Gambar menampilkan perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019–2023. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa tingkat investasi di Kabupaten Rejang Lebong masih sangat rendah. Pada tahun 2024, Provinsi Bengkulu berada di peringkat 23 dari 37 provinsi dalam penerimaan PMA, dengan nilai investasi sebesar USD 65,7 juta atau hanya 0,40% dari total PMA nasional. Rata-rata pertumbuhan PMA selama sepuluh tahun terakhir juga mengalami kontraksi, yakni sebesar -2,5%. Sedangkan nilai PMDN mengalami kenaikan ke peringkat 13 tahun 2024 dari sebelumnya peringkat 20 pada tahun 2021.

Rendahnya arus investasi ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, serta lemahnya daya tarik Kabupaten Rejang

Lebong sebagai tujuan investasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas iklim investasi menjadi hal yang sangat mendesak. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya pemetaan sektor ekonomi unggulan dan perencanaan pengembangan sektor strategis secara sistematis.

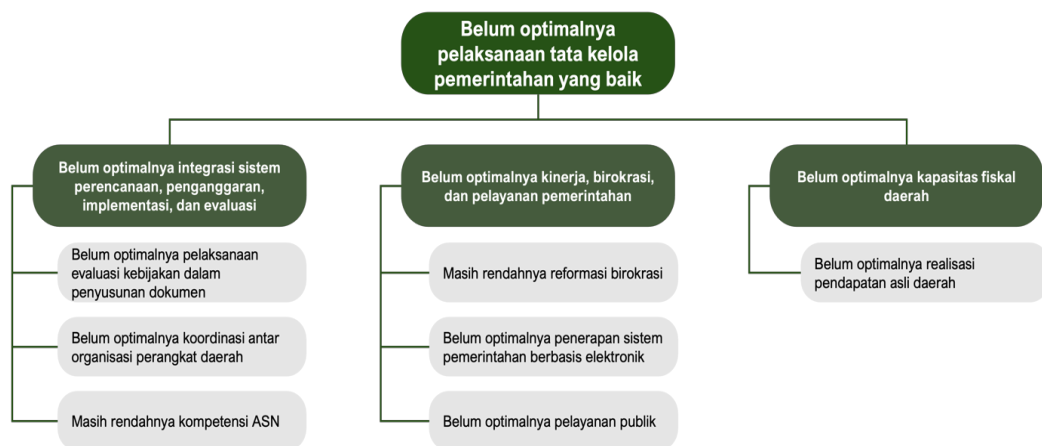
Ke depan, perlu dirumuskan kebijakan yang menysasar peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor prioritas melalui:

1. Perbaikan infrastruktur pendukung,
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi lokal,
3. Revitalisasi sistem irigasi dan pengolahan pascapanen, serta
4. Penguatan sinergi lintas sektor dalam mendorong investasi dan diversifikasi ekonomi.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Ketidaktempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola ini dapat menjadi hambatan signifikan dalam akselerasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu elemen strategis yang harus ditransformasikan secara menyeluruh dalam lima tahun ke depan. Permasalahan tata kelola di Kabupaten Rejang Lebong dapat dirangkum dalam beberapa aspek berikut:



Gambar 2. 37
Pohon Masalah Transformasi Tata Kelola Belum Terlaksana dengan Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Rejang Lebong dikategorikan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah, dengan rasio kapasitas fiskal sebesar 0,921. Capaian ini

menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih terbatas, karena pendanaan pembangunan masih sangat bergantung pada intervensi pemerintah pusat melalui mekanisme Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Salah satu penyebab rendahnya kapasitas fiskal adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Berdasarkan data APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 yang tercatat dalam SIKD DJPK Kementerian Keuangan, realisasi PAD hanya mencapai Rp63,65 miliar, sedangkan TKDD terealisasi sebesar Rp895,20 miliar. Dengan demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 6,26%, sementara rasio TKDD terhadap PAD mencapai 88,04%. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas fiskal lokal melalui optimalisasi sumber- sumber PAD yang berkelanjutan.

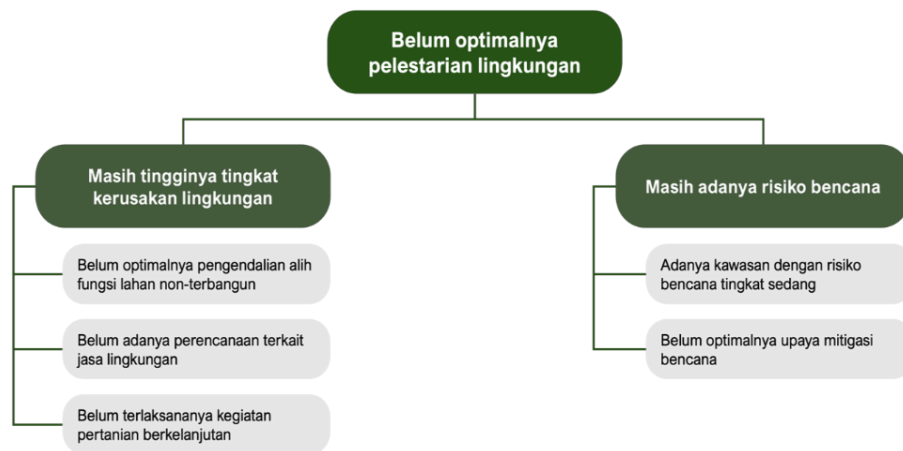
Selain itu, aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting. Tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Rejang Lebong masih perlu ditingkatkan, sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Profesional ASN tahun 2024 tercatat sebesar 58,87. Hal ini diperkuat oleh capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berada pada kategori baik dengan nilai 3,24 pada tahun 2024. Selain itu terdapat tren positif dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu B pada 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut belum cukup dan masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong saat ini juga masih berada pada kategori baik. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah kesenjangan kinerja antar perangkat daerah, pengaruh reformasi yang belum signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta masih adanya potensi maladministrasi dan korupsi di lingkup birokrasi. Kendati demikian, capaian pelayanan publik telah menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2023, kualitas layanan publik dinilai "baik", yang diperkuat dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibangun dan diresmikan pada tahun 2024. Kehadiran MPP ini menjadi inisiatif strategis untuk mendorong percepatan dan integrasi layanan publik yang prima bagi masyarakat.

4. Belum Optimalnya Pelestarian Lingkungan

Pembangunan wilayah yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari isu pelestarian lingkungan. Kabupaten Rejang Lebong, secara geografis memiliki karakteristik wilayah berbukit dan berlembah, yang secara alamiah menyimpan potensi risiko terhadap lingkungan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, Kabupaten Rejang Lebong

dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat risiko bencana *sedang*. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan menjadi suatu keharusan.



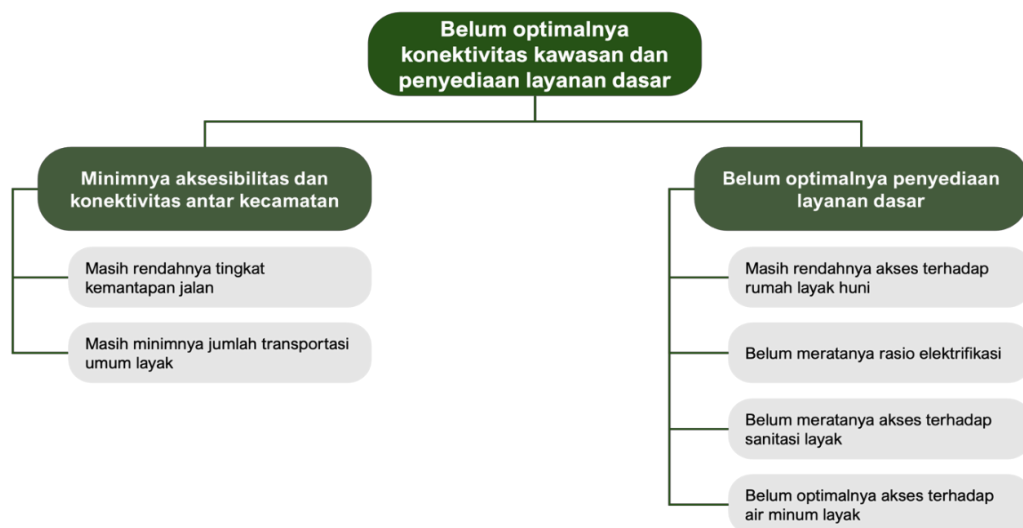
Gambar 2. 38
Pohon Masalah Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Lingkungan

Salah satu permasalahan utama dalam aspek lingkungan adalah belum optimalnya implementasi konsep pangan berkelanjutan. Hal ini antara lain disebabkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan spasial, serta belum maksimalnya pemenuhan aspek spasial dalam peraturan dan pemetaan lahan pertanian berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat berdampak pada ketidaktercapaian sasaran pembangunan wilayah yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maupun rencana zonasi. Oleh karena itu, implementasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan dan regulasi harus dijadikan prioritas. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) secara optimal dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan, konsistensi, dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan berbasis wilayah. Lebih jauh lagi, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, keberlanjutan sumber daya alam, dan ketahanan ekosistem daerah. Dengan demikian, transformasi lingkungan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang.

5. Belum Optimalnya Konektivitas Kawasan dan Penyediaan Layanan Dasar

Permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Rejang Lebong merupakan isu klasik yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Keterbatasan infrastruktur transportasi berdampak pada mobilitas masyarakat serta efektivitas kegiatan ekonomi lintas wilayah. Berdasarkan hasil survei dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Rejang Lebong, teridentifikasi bahwa salah satu isu utama adalah kebutuhan akan transportasi umum yang layak dan terjangkau guna meningkatkan aksesibilitas antarkecamatan maupun antarkabupaten.

Pada tahun 2024, tingkat kemantapan jalan kabupaten di Rejang Lebong tercatat sebesar 63,11% sementara tingkat kemantapan jalan provinsi hanya mencapai 62,84%. Angka ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan konektivitas jaringan jalan untuk menunjang keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi mobilitas masyarakat. Peningkatan tersebut juga bertujuan untuk memperpendek waktu tempuh antarkecamatan, sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif.



Gambar 2. 39
Pohon Masalah Infrastruktur Konektivitas yang Kurang Memadai

Selain konektivitas, aspek layanan dasar merupakan bagian esensial dari tanggung jawab pemerintah daerah yang wajib dipenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, di antaranya: alokasi dan realisasi anggaran yang belum secara optimal mencerminkan pencapaian pelayanan dasar; karakteristik penerima layanan yang bersifat dinamis dan sulit diprediksi; keterbatasan sumber daya manusia; serta kurangnya pembaruan data secara berkala, sehingga memengaruhi validitas dan akurasi pencapaian layanan dasar.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar di Kabupaten Rejang Lebong juga masih menghadapi berbagai tantangan. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak pada tahun 2024 baru mencapai 45,46%. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak hanya sebesar 76,61%. Untuk akses hunian layak, persentase di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebesar 40,84%. Selain itu, rasio elektrifikasi di Kabupaten Rejang Lebong belum mencapai 100%, yang menandakan masih adanya wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik secara merata. Hal ini berdampak pada kesenjangan akses terhadap layanan dasar, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan perhatian dan intervensi pembangunan yang lebih intensif.

2.3.2 Isu Strategis

Pembangunan jangka menengah dalam kerangka RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 memiliki peran strategis sebagai fondasi awal untuk mewujudkan target Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Dalam prosesnya, pembangunan daerah akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika yang terus berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang tepat dan adaptif sangat diperlukan untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi risiko dalam mencapai sasaran pembangunan lima tahun ke depan.

2.3.2.1. Isu Strategis Global

Isu-isu strategis global atau internasional merupakan faktor eksternal yang perlu diantisipasi karena memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan, baik secara global maupun antardaerah. Pemahaman mendalam terhadap isu-isu ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang tanggap terhadap dinamika global.

Kabupaten Rejang Lebong, dalam konteks sebagai bagian dari wilayah fungsional pembangunan nasional, diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam menghadapi tantangan global. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam forum internasional, penguatan kerja sama antardaerah dan antarnegara, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi global.

Sebagai bagian dari komitmen global, Indonesia telah mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai arah pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang saling terkait dan berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup manusia, serta keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Integrasi isu-isu strategis global ini menjadi sangat penting untuk

memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional dan internasional. Berikut penjabaran 17 tujuan SDGs:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat, termasuk pengurangan jumlah penduduk miskin ekstrem dan pemberdayaan masyarakat rentan.
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*)
Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, termasuk akses layanan kesehatan dan pengurangan angka kematian ibu dan anak.
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)
Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat.
5. Kesenjaraan Gender (*Gender Equality*)
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*)
Menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)
Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)
Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, dan produktif serta kesempatan kerja layak.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)
Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)
Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara, termasuk akses layanan dasar dan pemberdayaan kelompok marginal.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)
Mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)
Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)
Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

14. Ekosistem Laut (*Life Below Water*)

Melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut dan ekosistem perairan.

15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*)

Melindungi, merestorasi, dan mendorong penggunaan berkelanjutan ekosistem darat.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*)

Mendorong masyarakat damai dan inklusif serta membangun lembaga yang efektif dan akuntabel.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

Memperkuat kemitraan global dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui dukungan pendanaan, teknologi, dan kapasitas kelembagaan.

Selain itu terdapat beberapa isu global yang terjadi saat ini seperti perubahan iklim, distrupsi teknologi, dinamika sosial dan krisis sumber daya.

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu strategis global yang mencakup peningkatan suhu bumi (pemanasan global), perubahan drastis ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya polusi udara, air, dan tanah. Pemanasan global berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta badai tropis. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), apabila suhu global meningkat melebihi 1,5°C, dampak lingkungan dan sosial akan menjadi semakin parah dan sulit untuk diatasi secara efektif.

Selain itu, degradasi ekosistem dan kepunahan spesies secara masif mengancam keseimbangan alam yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Polusi lingkungan turut memperburuk kondisi kesehatan publik dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, isu perubahan iklim harus direspons secara komprehensif melalui kebijakan mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi lintas sektor.

2. Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi menjadi isu strategis yang berdampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Perkembangan pesat kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), otomatisasi, dan teknologi digital membawa tantangan baru, seperti potensi penggantian tenaga kerja manusia dan peningkatan ketimpangan ekonomi. Menurut *McKinsey Global Institute*, sekitar 30% pekerjaan saat ini berpotensi tergantikan oleh otomatisasi dan AI, menciptakan risiko sosial dan ekonomi yang perlu diantisipasi secara serius.

Selain itu, masalah keamanan siber menjadi perhatian utama. Ketidaksiapan dalam melindungi data pribadi dan infrastruktur digital dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu, lembaga, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan penguatan kapasitas keamanan siber serta transformasi digital yang inklusif dan beretika.

3. Dinamika Sosial

Dinamika sosial global ditandai oleh meningkatnya migrasi involunter, penyebaran misinformasi dan disinformasi, serta polarisasi sosial yang kian tajam. Migrasi paksa yang disebabkan oleh konflik bersenjata, bencana alam, dan dampak perubahan iklim menimbulkan tekanan signifikan terhadap negara-negara penerima. Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), jumlah pengungsi dan pencari suaka pada tahun 2023 telah melampaui 80 juta orang secara global.

Sementara itu, arus informasi yang tidak akurat melalui media sosial telah memperburuk polarisasi sosial dan instabilitas politik di berbagai negara. Penyebaran hoaks secara masif memengaruhi persepsi publik dan kepercayaan terhadap institusi negara. Untuk itu, dibutuhkan penguatan literasi digital, regulasi media, serta peningkatan ketahanan sosial dan demokrasi deliberatif.

4. Krisis Sumber Daya

Krisis sumber daya alam, khususnya air bersih, energi, dan bahan baku strategis, merupakan tantangan krusial yang dihadapi dunia dalam jangka menengah hingga panjang. Ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas di tengah peningkatan permintaan berisiko menimbulkan konflik, baik antar kelompok dalam negeri maupun antar negara. Laporan dari World Resources Institute (WRI) menyatakan bahwa lebih dari dua miliar penduduk dunia hidup di wilayah yang mengalami tekanan air tinggi.

Situasi ini mengharuskan pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, berbasis inovasi teknologi dan prinsip ekonomi sirkular. Kebijakan konservasi, efisiensi, dan diversifikasi sumber daya menjadi kunci untuk menjamin ketahanan energi dan lingkungan bagi generasi mendatang.

Implementasi SDGs di Kabupaten Rejang Lebong di evaluasi melalui dokumen KLHS RPJMD. Berdasarkan hasil pengkajian dari analisis capaian TPB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023. Pencapaian indikator capaian target tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang terdiri dari 17 TPB, 75 Target, dan 209 indikator

(95.00%) dari 220 indikator yang menjadi wewenang kabupaten. Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Rejang Lebong sangat tinggi. Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 111 indikator (53,11%), yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target sebanyak 35 indikator (16.75%), Indikator TPB yang tidak ada data sebanyak 61 indikator (29,19%), dan terdapat 2 indikator (0.96%) yang belum dilaksanakan. Adapun tujuan Pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan uji silang dengan isu strategis hasil FGD Pokja KLHS, dokumen RPPLH, dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2025, dan dokumen RPJP 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. TPB 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.
2. TPB 6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
3. TPB 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
4. TPB 9. Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
5. TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan

Dari hasil analisis untuk penentuan isu strategis dengan cara diskusi antara pemangku kepentingan, dan mengacu kepada beberapa dokumen perencanaan, seperti RPJP 2002-2025, RPJMD 2021-2025 dan RPPLH 2023-2053, tim pokja KLHS menyepakati isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 adalah :

1. Angka kemiskinan penduduk yang masih tinggi
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal
3. Pelayanan infrastruktur dasar air minum yang belum optimal
4. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
5. Pengelolaan lingkungan hidup, terutama sampah, yang belum optimal
6. Daerah rawan bencana alam
7. Pengangguran dan ketenagakerjaan

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025–2029), Indonesia menghadapi beragam isu strategis nasional yang harus dimitigasi secara sistematis guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. RPJMN ini merupakan bagian dari tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menempatkan Indonesia pada fondasi penting untuk menjadi negara maju berdaya saing global pada satu abad kemerdekaannya.

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025–2029, terdapat enam arah utama transformasi pembangunan nasional, yaitu:

1. Transformasi Sosial: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
2. Transformasi Ekonomi: Mempercepat hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri manufaktur bernilai tambah, dan digitalisasi ekonomi.
3. Transformasi Tata Kelola: Reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik berbasis data serta pengawasan yang transparan.
4. Transformasi Lingkungan Hidup: Transisi menuju ekonomi hijau, penanganan krisis iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana alam.
5. Transformasi Kewilayahan: Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya di luar Jawa, dan penguatan konektivitas antarwilayah.
6. Transformasi Ketahanan Sosial dan Budaya: Penguatan identitas kebangsaan, budaya lokal, serta toleransi dan demokrasi.

Beberapa isu strategis yang menonjol dan harus menjadi perhatian seluruh daerah, termasuk Kabupaten Rejang Lebong, mencakup:

- 1) Hilirisasi sumber daya alam untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri berbasis lokal.
- 2) Transformasi industri dan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja produktif dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer.
- 3) Transisi energi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan energi barudan terbarukan, sejalan dengan target penurunan emisi karbon.
- 4) Penguatan ketahanan pangan dan air, sebagai bagian dari adaptasi perubahan iklim dan ketahanan nasional.
- 5) Transformasi digital sebagai fondasi modernisasi pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal dan kewenangan, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan menjadi kunci untuk memastikan bahwa arah pembangunan nasional dapat tercermin dalam agenda pembangunan daerah. Keterpaduan perencanaan antara RPJMN, RKP, RPJMD, dan RKPD sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi vertikal dan horizontal, serta memastikan bahwa intervensi pembangunan memberikan dampak nyata bagi

masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 perlu memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan kerangka pembangunan nasional dan menjawab tantangan daerah, khususnya dalam aspek daya saing wilayah, ketahanan terhadap krisis, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah tahun 2023 dan laporan pengukuran kinerja pembangunan wilayah, terdapat beberapa isu strategis regional di Pulau Sumatra yang relevan dan perlu direspons secara spesifik oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Beberapa isu utama tersebut meliputi:

- 1) Kesenjangan pertumbuhan antarwilayah, khususnya antara kawasan pesisir, dataran tinggi, dan kawasan perbatasan.
- 2) Terbatasnya konektivitas infrastruktur antarwilayah, yang berdampak pada efisiensi distribusi logistik dan mobilitas barang/jasa.
- 3) Degradasi lingkungan dan tekanan terhadap kawasan lindung, termasuk kawasan hutan dan sumber daya air.
- 4) Kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
- 5) Tantangan transformasi ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata alam, dan ekonomikreatif.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan dan ekowisata yang berbasis pada pertanian berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas.

Beberapa isu dan prioritas yang dapat menjadi landasan strategis dalam dokumen RPJMD Rejang Lebong 2025-2029 mencakup:

- 1) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah,
- 2) Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja,
- 3) Reformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan digital,
- 4) Pengembangan sektor pertanian modern dan berbasis hilirisasi,
- 5) Pelestarian lingkungan dan mitigasi risiko bencana.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 harus tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga sebagai *instrument of alignment* terhadap agenda pembangunan nasional dan regional. Respons terhadap isu-isu strategis yang teridentifikasi harus mampu diartikulasikan dalam program yang nyata, terukur, dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Isu strategis yang merupakan kondisi atau permasalahan utama yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan karena mencerminkan aspek yang mendasar dan berdampak luas terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Berikut ini adalah isu-isu strategis yang diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029:

1. Belum Optimalnya Penerapan Prinsip-Prinsip *Good and Clean Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan fondasi utama untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun demikian, Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, yang menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang optimal.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan informasi pemerintahan. Akses terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program-program yang ada seharusnya terbuka dan jelas bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya, banyak informasi yang tidak disampaikan dengan baik. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Ketidaktepatan informasi ini berkontribusi pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, akuntabilitas pemerintah menjadi masalah yang juga perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah yang akuntabel seharusnya mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana anggaran digunakan serta hasil dari kebijakan atau program yang dilaksanakan. Namun, di Provinsi Bengkulu, sistem pengawasan dan evaluasi yang ada masih lemah, sehingga sulit untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan sudah memberikan hasil yang optimal. Hal ini berimplikasi pada ketidakpuasan masyarakat, yang merasa tidak mendapat informasi yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah.

Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintahan juga turut berperan dalam ketidakefektifan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Banyak aparatur pemerintahan yang belum terlatih dengan baik dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang diharapkan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan membuat mereka tidak sepenuhnya memahami atau mampu menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pekerjaan sehari-hari. Kinerja aparatur yang kurang optimal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga masih menjadi masalah besar di Provinsi Bengkulu. Meskipun ada upaya untuk memberantas praktik-praktik tersebut, masih banyak ditemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan yang lemah terhadap pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah memberi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga masih terbatas. Pemerintah seharusnya membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Namun, seringkali masyarakat merasa suaranya tidak didengar. Kurangnya saluran efektif untuk menyampaikan aspirasi dan kritik menghambat terciptanya kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu tepat sasaran dan tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.

Selain itu sistem pengaduan masyarakat juga masih belum efektif. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengaduan yang responsif harus dapat memberikan solusi atas keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Namun, pengaduan yang masuk sering kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai atau tidak ada tindak lanjut yang jelas. Kondisi ini menambah frustrasi masyarakat yang merasa keluhan mereka tidak direspons dengan serius oleh pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pemerintah perlu memperkuat transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, serta memanfaatkan teknologi untuk memperlancar akses informasi tersebut. Akuntabilitas juga harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah dan menyediakan laporan yang lebih terperinci tentang penggunaan anggaran. Selain itu, perlu ada peningkatan pelatihan dan pembekalan bagi aparatur pemerintahan agar mereka dapat bekerja dengan lebih profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Upaya pemberantasan korupsi harus diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat, serta memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan transparan dan bebas dari manipulasi. Partisipasi masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas melalui konsultasi publik dan forum diskusi yang lebih sering. Terakhir, sistem pengaduan harus diperbaiki agar setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

2. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan yang optimal merupakan salah satu kunci untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Namun, Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya ketahanan pangan yang memadai, sehingga mengancam keberlanjutan pembangunan daerah.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat produksi pangan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki potensi alam yang besar di sektor pertanian, hasil produksi pangan di daerah ini masih terbatas dan belum dapat mencakup seluruh kebutuhan pangan masyarakat. Penyebab utama dari masalah ini adalah penerapan pola pertanian yang sebagian besar masih mengandalkan teknik tradisional, serta kurangnya adopsi teknologi modern dalam proses produksi. Akibatnya, produktivitas pertanian rendah, sehingga pasokan pangan lokal menjadi terbatas dan harus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Keterbatasan infrastruktur distribusi pangan juga menjadi masalah yang signifikan dalam ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Banyak daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil, kesulitan dalam memperoleh pasokan pangan yang cukup. Sistem distribusi yang tidak efisien seringkali menyebabkan harga pangan tidak stabil dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama yang tinggal di luar pusat kota. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan fasilitas penyimpanan pangan yang memadai, sehingga banyak produk pangan yang rusak atau hilang sebelum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di sektor pertanian turut menghambat pencapaian ketahanan pangan. Sebagian besar petani di Provinsi Bengkulu masih mengandalkan pengetahuan pertanian tradisional yang diwariskan turun-temurun, tanpa adanya pendidikan atau pelatihan yang cukup mengenai teknik bertani modern dan pemanfaatan teknologi pertanian. Hal ini berdampak pada hasil pertanian yang kurang optimal dan lebih rentan terhadap kerugian akibat serangan hama, penyakit tanaman, atau bencana alam.

Perubahan iklim juga semakin memperburuk keadaan ketahanan pangan. Pola cuaca yang tidak menentu menyebabkan gangguan pada musim tanam, yang berakibat pada hasil panen yang tidak stabil. Ketidakpastian cuaca ini membuat petani kesulitan untuk merencanakan waktu tanam yang tepat, sehingga mengurangi potensi hasil pertanian yang dapat dipanen dan berdampak pada ketersediaan pangan di daerah.

Selain itu, rendahnya keberagaman pangan lokal di pasar juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Sebagian besar masyarakat di Provinsi Bengkulu masih

mengandalkan beberapa jenis pangan pokok seperti beras dan jagung, sementara potensi sumber pangan lokal lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, Provinsi Bengkulu memiliki keragaman produk pangan lokal yang melimpah, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya yang dapat mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberagaman pangan lokal ini menyebabkan rendahnya konsumsi pangan yang bergizi dan mendukung keberlanjutan sistem pangan.

Kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung sektor pertanian secara komprehensif juga menjadi hambatan. Meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, namun implementasinya seringkali tidak optimal. Program bantuan untuk petani sering kali tidak tepat sasaran atau sulit diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kebijakan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang belum sepenuhnya mendukung praktik pertanian berkelanjutan juga turut menghambat peningkatan produksi pangan di daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, Provinsi Bengkulu perlu memperkuat kebijakan ketahanan pangan dengan melibatkan berbagai sektor terkait, mulai dari peningkatan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur distribusi pangan, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Pendekatan yang lebih inklusif juga diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam membangun sistem ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi di sektor pertanian, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar daerah, serta meningkatkan kualitas pangan lokal yang tersedia bagi masyarakat.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mencapai ketahanan pangan yang optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3. Belum Berkembangnya Hilirisasi Komoditas Unggulan sehingga Menghambat Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Hilirisasi komoditas unggulan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing daerah di pasar global. Namun, di Provinsi Bengkulu, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat potensi ekonomi daerah untuk berkembang secara optimal.

Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dengan berbagai komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan hasil pertanian lainnya. Meskipun demikian, sebagian besar komoditas unggulan tersebut masih diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa adanya pengolahan lebih lanjut di tingkat daerah. Padahal, jika komoditas-komoditas tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, maka akan tercipta peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya hilirisasi di Bengkulu adalah terbatasnya fasilitas dan industri pengolahan yang tersedia. Sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas, mengakibatkan banyak komoditas unggulan yang diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan nilai ekonominya. Dengan adanya industri pengolahan yang berkembang, komoditas unggulan tersebut bisa diubah menjadi produk akhir yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global.

Selain itu, keterbatasan teknologi menjadi salah satu hambatan utama dalam proses hilirisasi. Banyak komoditas unggulan di Provinsi Bengkulu yang sebenarnya memiliki potensi untuk diolah menggunakan teknologi modern, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Namun, teknologi yang tersedia di daerah ini masih terbatas, sehingga proses pengolahan produk belum dapat dilakukan secara efisien dan belum mampu menghasilkan produk yang bersaing di pasar internasional. Akibatnya, komoditas unggulan dari Bengkulu hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan harga yang lebih rendah.

Tantangan lainnya adalah minimnya investasi di sektor industri pengolahan. Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, banyak investor yang masih enggan untuk menanamkan modal di daerah ini karena terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pendukung yang ada. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan yang buruk, keterbatasan pasokan energi, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan, menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi. Hal ini menjadikan sektor hilirisasi kurang menarik bagi para investor yang ingin berinvestasi dalam pengolahan komoditas unggulan.

Kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam mengembangkan hilirisasi. Pengembangan komoditas unggulan yang lebih optimal memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah yang memberikan kebijakan yang mendukung, pelaku usaha yang mengelola produksi dan distribusi, serta masyarakat yang menyediakan bahan baku. Tanpa adanya sinergi yang baik

antar pihak-pihak tersebut, pengembangan hilirisasi akan terhambat, meskipun potensi besar untuk pengolahan produk unggulan sebenarnya ada.

Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam bidang pengolahan juga menjadi faktor yang menghambat hilirisasi. Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki banyak petani dan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam sektor komoditas unggulan, banyak di antara mereka yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola proses produksi yang efisien dan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Kurangnya pelatihan teknis dan manajerial membuat pengolahan komoditas unggulan di Bengkulu tidak dapat berkembang secara optimal.

Dampak dari berbagai permasalahan ini adalah terbatasnya kemampuan Provinsi Bengkulu untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Bengkulu masih bergantung pada ekspor bahan mentah, yang harga jualnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Provinsi Bengkulu perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan. Langkah pertama adalah dengan mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan lokal. Pemerintah daerah perlu menciptakan kebijakan yang dapat menarik investasi, seperti memberikan insentif fiskal atau fasilitas lainnya untuk mempermudah para pengusaha dalam membangun industri pengolahan di daerah ini. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri pengolahan, agar para pelaku usaha dapat mengelola proses produksi secara efisien dan menghasilkan produk yang bersaing di pasar global.

Selain itu, penting untuk memperkenalkan dan menerapkan teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi di sektor pengolahan. Penggunaan teknologi yang tepat akan memungkinkan pengolahan komoditas unggulan menjadi lebih efisien dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi.

Dengan pengembangan hilirisasi yang baik, Provinsi Bengkulu tidak hanya akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi bagi Provinsi Bengkulu, serta menjadikan provinsi ini lebih kompetitif di pasar global.

4. Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Merata dan Berkualitas serta Konektivitas Wilayah

Isu ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu dalam mencapai pemerataan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Infrastruktur dasar yang mencakup jalan, jembatan, penyediaan air bersih, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Namun, kondisi infrastruktur di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi pemerataan maupun kualitasnya.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu masih terkendala oleh ketidakmerataan distribusi yang cukup signifikan, di mana sebagian besar pembangunan infrastruktur masih terfokus di wilayah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi, sementara daerah pedesaan dan kawasan terpencil masih mengalami keterbatasan dalam aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar. Kondisi jalan yang belum memadai, banyaknya ruas jalan yang rusak atau tidak teraspal, serta sulitnya akses menuju fasilitas layanan dasar seperti air bersih dan listrik, masih menjadi tantangan besar. Hal ini memperburuk ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan daerah-daerah pedesaan yang tertinggal, sehingga menghambat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terpencil.

Selain ketidakmerataan, kualitas infrastruktur yang ada juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Meskipun ada sejumlah pembangunan infrastruktur, namun kualitasnya tidak selalu sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Banyak jalan yang sudah dibangun, namun cepat mengalami kerusakan karena kualitas bahan yang kurang memadai dan tidak terjaga dengan baik. Selain itu, di sektor penyediaan air bersih dan sanitasi, meskipun terdapat berbagai program untuk penyediaan air bersih, distribusinya masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang lebih jauh dari pusat kota. Sementara itu, sektor energi juga masih menjadi permasalahan, di mana meskipun sebagian besar wilayah sudah teraliri listrik, namun akses listrik di daerah terpencil masih belum merata, sehingga menghambat perkembangan sektor ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya masih sangat terbatas. Keterbatasan kapasitas pelabuhan dan bandara menghambat kelancaran arus barang dan jasa serta mengurangi daya saing Provinsi Bengkulu dalam perdagangan dan investasi. Keterbatasan infrastruktur transportasi juga menghambat konektivitas antar daerah yang pada akhirnya mempengaruhi potensi ekonomi dan pariwisata daerah.

Terbatasnya alokasi anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur yang terhambat atau tidak berjalan sesuai rencana akibat keterbatasan dana. Meskipun ada program bantuan dari pemerintah pusat, tetapi anggaran yang tersedia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah provinsi. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan proyek infrastruktur juga masih perlu ditingkatkan agar implementasi pembangunan infrastruktur lebih efisien dan tepat sasaran.

Dampak dari permasalahan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan peningkatan biaya logistik, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tersebut. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Provinsi Bengkulu.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Provinsi Bengkulu perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Prioritas pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil, seperti perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan penyediaan akses listrik yang lebih merata. Selain itu, pengembangan infrastruktur strategis seperti pelabuhan dan bandara juga harus menjadi fokus utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai serta menggali potensi sumber pembiayaan alternatif, seperti kerjasama dengan pihak swasta, untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mengurangi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.

5. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Serta Mitigasi Kebencanaan

Sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Bengkulu, seperti hutan, lahan pertanian, dan sumber daya mineral, seharusnya dapat menjadi potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Namun, hingga saat ini, pengelolaan sumber daya alam tersebut belum optimal, yang berdampak pada rendahnya daya saing daerah dan potensi kerusakan

lingkungan yang semakin parah.

Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam adalah minimnya pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi, seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan, seperti pembukaan lahan secara besar-besaran tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, telah menyebabkan kerusakan alam yang serius, seperti deforestasi dan degradasi lahan. Selain itu, masih adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali mengarah pada kerugian jangka panjang, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengurangi potensi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah minimnya upaya mitigasi kebencanaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Provinsi Bengkulu, yang berada di wilayah rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, masih menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan masyarakat dan infrastrukturnya untuk menghadapi bencana. Meskipun terdapat beberapa upaya mitigasi, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, namun program-program tersebut belum berjalan secara maksimal karena terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas teknis. Akibatnya, ketika bencana terjadi, dampaknya sangat besar dan mengganggu kehidupan masyarakat serta kegiatan ekonomi.

Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana juga menjadi kendala besar. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih terbatas. Banyak daerah yang tidak memiliki sistem peringatan dini yang efektif, dan saat terjadi bencana, masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi yang dapat membantu mereka bertindak dengan cepat dan tepat.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi kebencanaan juga merupakan salah satu penghambat. Banyak aparatur yang belum memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk merancang dan menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta untuk merencanakan dan melaksanakan program mitigasi yang efektif. Hal ini berkontribusi pada rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan dan kebencanaan, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Provinsi Bengkulu perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan

terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, dan mendorong penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam berbagai sektor. Selain itu, pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana juga harus diperkuat.

Dalam hal mitigasi kebencanaan, Provinsi Bengkulu harus meningkatkan kapasitas teknis dan organisasi untuk merancang dan melaksanakan program mitigasi yang efektif. Ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan sistem mitigasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya mitigasi yang komprehensif dan terintegrasi akan sangat membantu dalam mengurangi dampak bencana, melindungi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mengelola sumber daya alamnya secara optimal, meningkatkan daya saing daerah, serta membangun ketahanan terhadap bencana yang dapat menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan pembangunan.

6. Ketimpangan Dalam Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, Kesempatan Kerja, Kesenjangan Gender, serta Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas

Ketimpangan dalam kualitas dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun ada kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan, masih terdapat disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelompok sosial ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sektor pendidikan, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, kualitas pendidikan di beberapa daerah masih rendah. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi, yang disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang terlatih, serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak anak di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang optimal, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan di masyarakat. Selain itu, ketidakmerataan ini juga memperburuk ketidaksetaraan kesempatan dalam mengakses pendidikan tinggi, yang berdampak pada peluang kerja dan mobilitas sosial.

Di sektor kesehatan, meskipun pelayanan kesehatan telah diperluas, namun kualitas layanan dan akses masih tidak merata. Banyak daerah, terutama yang jauh dari pusat kota, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Masalah ini

diperburuk dengan terbatasnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas. Kondisi ini menyebabkan angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular, tetap tinggi di beberapa wilayah. Ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan ini berkontribusi pada ketidakseimbangan dalam kesehatan masyarakat di seluruh provinsi.

Selain itu, ketimpangan dalam kesempatan kerja juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi ekonomi, banyak lapangan kerja yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak warga, terutama di daerah pedesaan, masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan tingkat pendapatan yang rendah. Di sisi lain, sektor industri dan ekonomi modern masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang lebih berkembang, sehingga kesenjangan kesempatan kerja semakin lebar. Hal ini menghambat penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan marginal.

Dalam hal kesetaraan gender, meskipun ada upaya untuk memberdayakan perempuan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa budaya dan norma sosial yang mengakar di masyarakat seringkali membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Keterbatasan ini menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, yang berkontribusi pada kesenjangan gender yang masih ada di provinsi ini.

Begitu juga dengan perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas yang masih memerlukan perhatian khusus. Anak-anak di daerah terpencil sering kali mengalami keterbatasan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, penyandang disabilitas sering kali mengalami stigma sosial dan kesulitan dalam mengakses layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa anak-anak dan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak-hak mereka, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang setara.

Ketimpangan yang terjadi dalam berbagai sektor ini memerlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapainya. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengoptimalkan program-program pembangunan yang mengedepankan keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perlu ada upaya maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan

kesempatan kerja yang lebih luas dan inklusif, serta memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan hak anak dan penyandang disabilitas. Dengan memperhatikan ketimpangan ini, Provinsi Bengkulu dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh masyarakatnya.

2.3.2.4. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045

Berdasarkan tinjauan terhadap muatan isu strategis nasional dan provinsi, Kabupaten Rejang Lebong mengidentifikasi sejumlah isu strategis daerah yang perlu diantisipasi melalui kewenangan Pemerintah Kabupaten. Secara umum, isu strategis jangka panjang memberikan gambaran tentang fokus dan prioritas penanganan yang memiliki pengaruh luas, signifikan, dan berdampak besar terhadap peningkatan kondisi masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di masa depan. Isu-isu strategis yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut.

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Berkelanjutan sebagai Perwujudan Kawasan Layak Huni (*Livability*)

Kabupaten Rejang Lebong memegang peran strategis sebagai pusat kegiatan lingkungan di Provinsi Bengkulu, mendukung aktivitas permukiman dan sektor pertanian. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang pesat belum diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Evaluasi dokumen RPJPD menunjukkan bahwa dari total 69.698 rumah tangga, sebanyak 57.325 telah memiliki akses terhadap air minum yang layak. Sementara itu, penanganan kawasan kumuh telah mencapai 180,61 hektar dari total 202,29 hektar. Sistem pengelolaan air limbah yang memadai hanya melayani 16.328 orang, dan pengelolaan sampah baru menangani 19.918 ton dari total 41.223 ton sampah pada tahun 2022. Panjang drainase yang berada dalam kondisi baik adalah 10.340 km dari total 11.925 km, dan hanya 3.339 unit penerangan jalan umum terpasang dari jumlah ideal 13.167 unit.

Mempertimbangkan peran Kabupaten Rejang Lebong sebagai pusat kegiatan lingkungan, terdapat beberapa isu krusial yang harus segera diatasi. Ketidakefektifan akses layanan air minum dan sanitasi berpotensi menurunkan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat. Selain itu, keterbatasan layanan pengelolaan sampah berisiko meningkatkan volume sampah rumah tangga yang berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan. Kondisi kawasan permukiman kumuh yang muncul akibat infrastruktur yang kurang memadai serta pemeliharaan sarana prasarana yang tidak optimal dapat mengancam ketahanan lingkungan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan peningkatan pemerataan akses sanitasi, air minum, pengelolaan sampah, serta revitalisasi kawasan kumuh. Upaya ini sejalan dengan agenda RPJPN terkait penyediaan hunian layak dan

pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif.

2. Peningkatan Konektivitas Wilayah dalam Mendukung Mobilitas dan Perekonomian Daerah

Sebagai pusat kegiatan lingkungan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi ekonomi yang beragam, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Kawasan strategis ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan infrastruktur, seperti jaringan jalan dan jembatan, menjadi fokus utama guna meningkatkan fungsi kota, terutama dalam hal aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Posisi Kabupaten Rejang Lebong yang strategis sebagai penghubung antara Kota Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan menjadikan konektivitas sangat vital untuk mendukung distribusi logistik di sektor pertanian. Pembangunan Jalan Usaha Tani yang baru berpotensi memperbaiki sistem akses distribusi hasil pertanian secara signifikan.

Jalan Usaha Tani dirancang untuk memudahkan akses pengangkutan hasil pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas lahan sawah. Infrastruktur desa ini memiliki berbagai manfaat, tidak hanya sebagai jalur transportasi hasil pertanian, tetapi juga sebagai fasilitas pendukung aktivitas masyarakat seperti jalur jogging bagi wisatawan lokal dan asing serta tempat swafoto. Rencana pengembangan Agro Edu Wisata semakin memperkuat potensi kawasan persawahan sebagai bagian dari kawasan wisata edukasi, yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial. Selain itu, Jalan Usaha Tani juga berfungsi sebagai akses pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah dan PAUD, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.

Analisis kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kondisi Jalan Usaha Tani yang berada dalam kategori baik mencapai 71,34%, dengan realisasi fisik sebesar 63,36%, sehingga tingkat keberhasilan mencapai 88,81%. Posisi geografis Kabupaten Rejang Lebong sebagai pintu gerbang antara Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan Kota Bengkulu menegaskan perannya dalam mendukung konektivitas antarprovinsi. Oleh karena itu, peningkatan hirarki jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten perlu dilakukan guna memperkuat kapasitas konektivitas di masa mendatang. Perbaikan konektivitas antarwilayah akan memperlancar mobilisasi distribusi dan mendukung sektor unggulan utama, khususnya pertanian.

Pengendalian Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan sebagai Perwujudan Ketahanan Daerah (Resiliency) Kabupaten Rejang Lebong menghadapi peluang pembangunan jangka panjang yang besar, sehingga diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pengendalian fungsi lahan dan

pembangunan menjadi aspek krusial untuk memastikan harmoni antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan lindung, terutama dari dampak aktivitas pariwisata, menuntut integrasi antara pengembangan wisata dan konservasi alam. Perlindungan kawasan hutan lindung dan lahan pertanian menjadi prioritas dalam menjaga ekosistem serta mencegah alih fungsi lahan non-terbangun yang tidak terkendali. Perencanaan pengelolaan kawasan hutan menjadi kunci dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implementasi alokasi ruang dan pembangunan jangka panjang harus mengadopsi pendekatan berbasis alam (nature-based solutions) guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan merupakan langkah strategis dalam mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, dan memperkuat ketahanan kota (city resiliency). Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak signifikan di Kabupaten Rejang Lebong dalam beberapa tahun ke depan, termasuk peningkatan frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan kota menjadi prioritas. Dengan mengintegrasikan pengendalian pembangunan dan perlindungan lingkungan serta menerapkan konsep Kota Tangguh, Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencapai keseimbangan berkelanjutan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

3. Optimalisasi Produktivitas Sektor Pertanian Unggulan Berkelanjutan

Melalui Pengembangan Riset, Inovasi, dan Implementasi Teknologi Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu berperan strategis sebagai wilayah penghasil utama produk pertanian. Dengan luas area pertanian yang signifikan, kabupaten ini menjadi lumbung utama sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan di provinsi tersebut. Kondisi geografis yang berada di antara perbukitan dan pegunungan memberikan keunggulan dalam kesuburan tanah dan keberagaman lahan, sehingga potensi pertanian mencakup berbagai komoditas prioritas. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Rejang Lebong, mencapai 31,43% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2022, nilai PDRB sektor ini diperkirakan sebesar 3.454,53 miliar rupiah, yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Produk pertanian unggulan yang dihasilkan, mulai dari padi dan kopi sebagai hasil tradisional hingga buah-buahan eksotis sebagai produk modern, mencerminkan keberagaman dan kualitas tinggi. Kualitas produk pertanian ini menarik perhatian berbagai institusi riset dan pendidikan tinggi yang aktif terlibat dalam kolaborasi untuk meningkatkan teknik budidaya, proses produksi, dan mutu hasil pertanian. Integrasi sistem irigasi yang solid menjadi fondasi penting dalam mendukung produktivitas sektor

pertanian. Jaringan irigasi terpadu yang baik memungkinkan pengelolaan lahan yang optimal. Kolaborasi antara institusi pendidikan, lembaga riset, dan pelaku industri lokal menjadi kunci utama dalam optimalisasi hasil pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini. Skema kemitraan berkelanjutan ini mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan tantangan global, memastikan transfer teknologi dan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti sensor dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Tujuan utama dari upaya tersebut adalah menciptakan inovasi berkelanjutan, praktik pertanian yang bijaksana, serta pengurangan dampak negatif, sehingga mendukung peningkatan efisiensi dan hasil produksi dalam menghadapi tantangan masa depan.

4. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Sektor Unggulan Daerah sebagai Kemandirian Fiskal Daerah dalam Perwujudan Agropolitan

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, memiliki peran strategis sebagai penyedia destinasi wisata yang potensial. Keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki kabupaten ini menjadi salah satu faktor utama yang menarik minat wisatawan. Potensi pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong sangat beragam, mulai dari keindahan alam pegunungan dan air terjun yang memukau hingga kekayaan budaya dan sejarah yang unik dan khas. Letak geografis yang strategis juga memberikan kemudahan aksesibilitas ke berbagai objek wisata, sehingga mempermudah kunjungan para pelancong.

Dalam upaya pengembangan sektor pariwisata, konsep ekowisata (*eco-tourism*), edukasi wisata (*edu-tourism*), dan agrowisata menjadi fokus utama yang diintegrasikan dengan kondisi alam setempat, khususnya kawasan hutan lindung. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan nilai edukatif dan konservasi. Pemeliharaan keseimbangan ekologi di kawasan wisata sangat penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan atau area yang dilindungi. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis pariwisata yang terpadu dengan konservasi lingkungan menjadi suatu keharusan agar kegiatan wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Selain sektor pariwisata, Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi signifikan pada produk unggulan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Produk seni lokal, kerajinan tangan, hasil pertanian organik, dan berbagai industri kreatif lainnya menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Diversifikasi kegiatan ekonomi kreatif menjadi strategi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Kemudahan akses dan proses bisnis bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sangat esensial untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam sektor ini. Melalui pengembangan ekonomi kreatif, terdapat peluang besar untuk diversifikasi sumber pendapatan. Inovasi

produk, pengembangan seni dan kerajinan, serta pemanfaatan teknologi modern dalam sektor ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara menyeluruh.

5. Pembangunan SDM Unggul, Berdaya Saing, dan Berakhlak sebagai Akselerasi Pembangunan Daerah

Kabupaten Rejang Lebong dengan jumlah penduduk sekitar 282.464 jiwa memiliki potensi bonus demografi yang cukup besar, di mana sebanyak 200.672 jiwa berada dalam rentang usia produktif 15-64 tahun. Kondisi demografis ini memberikan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, khususnya di sektor ekonomi perkotaan. Namun, tingkat pengangguran yang terus meningkat menjadi tantangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 5.927 orang yang tergolong dalam kategori pengangguran terbuka. Kenaikan angka pengangguran ini berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif seperti peningkatan kriminalitas dan kemiskinan, yang sebagian besar dipicu oleh kesulitan memperoleh mata pencaharian.

Selain itu, meskipun tingkat daya saing tenaga kerja relatif tinggi, keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi tuntutan pasar kerja. Rendahnya pemahaman dan pengalaman dalam nilai-nilai keagamaan turut tercermin pada tingginya laporan kasus kriminalitas. Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong, yang bersumber dari Polres Rejang Lebong, mencatat 449 kasus kejahatan hingga Desember 2021, meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kriminalitas Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 mencapai 15,98 per 1.000 penduduk, meningkat dari 10,78 pada tahun 2020, sementara target yang ditetapkan adalah 10,37. Kinerja indikator kriminalitas ini berada pada 46,17%, menunjukkan kategori kurang berhasil.

Tingkat pengangguran yang tinggi, angka kemiskinan yang masih signifikan, serta rendahnya kualitas akhlak generasi muda dapat menyebabkan gangguan dalam stabilitas sosial. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi tidak didukung dengan integrasi kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan keterampilan di lapangan, sehingga optimalisasi penyerapan tenaga kerja menjadi kurang maksimal.

6. Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah dan Manajemen Kinerja dalam Penguatan Integrasi Sistem Database, Perencanaan, dan Penganggaran Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi

Peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong membutuhkan langkah konkret untuk memperkuat kompetensi aparatur daerah serta manajemen kinerja. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mengindikasikan bahwa

implementasi tata kelola pemerintahan yang efektif masih belum optimal. Kinerja profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pelatihan teknis maupun fungsional masih tergolong rendah, yang mencerminkan keterbatasan kapasitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini berdampak pada koordinasi dan pengembangan kebijakan pemerintah daerah yang kurangmaksimal.

Permasalahan lain yang signifikan adalah ketidakintegrasian penyimpanan dan pengolahan data dengan sistem perencanaan serta penganggaran, yang menghambat kualitas produk perencanaan daerah. Apabila sistem basis data tidak dikelola secara baik dan berkualitas, hasil perencanaan tidak akan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Penguatan integrasi sistem database, perencanaan, dan penganggaran berbasis teknologi informasi (TI) menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan saat ini. Kurangnya integrasi data menyebabkan kesenjangan informasi antar departemen dan unit kerja, sehingga perlu dikembangkan database terintegrasi sebagai dasar perencanaan strategis, penganggaran yang efisien, dan penyediaan layanan publik berkualitas. Integrasi ini akan meningkatkan koordinasi antara perencanaan strategis dan alokasi anggaran, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terukur.

Implementasi digitalisasi melalui e-government dan smart governance akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Langkah ini juga mendukung pembangunan infrastruktur TI yang kuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, dengan akuntabilitas serta transparansi sebagai pilar utama dalam proses digitalisasi.

7. Bonus Demografi dan Populasi Lansia

Bonus demografi merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif melebihi jumlah penduduk non-produktif, seperti anak-anak dan lansia. Fenomena ini membuka peluang besar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara strategis. Di Kabupaten Rejang Lebong, populasi usia produktif yang signifikan memberikan potensi untuk meningkatkan daya saing ekonomi, produktivitas, dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, perencanaan strategis yang tepat diperlukan untuk memanfaatkan periode bonus demografi ini sebelum terjadi perubahan struktur usia penduduk yang signifikan hingga tahun 2045.

Namun demikian, perkembangan demografi menunjukkan kecenderungan peningkatan populasi lansia pada akhir periode RPJPD. Meskipun bonus demografi menjadi pendorong ekonomi, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menimbulkan tantangan tersendiri. Oleh karenanya, perluasan sistem perawatan kesehatan dan program sosial

yang berfokus pada kebutuhan lansia harus menjadi prioritas guna menjaga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif serta mendukung bagi semua kelompok umur.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong hingga tahun 2045 menunjukkan tren peningkatan signifikan. Berdasarkan data Tabel 0.20, populasi laki-laki dan perempuan terus bertambah dari tahun 2020 hingga 2035. Terdapat kenaikan sebesar 21,5% antara tahun 2025 dan 2030, yang mencerminkan dinamika demografis akibat peningkatan angka kelahiran dan penurunan angka kematian. Walaupun pertumbuhan sedikit melambat setelah tahun 2035, peningkatan jumlah penduduk masih berlanjut. Hal ini menandakan perlunya strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang ada.

Tabel 2. 71
Proyeksi Penduduk Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020-2035

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2020 (Ribuan Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)		
		2025	2030	2035
Laki-Laki	141,01	148,59	155,13	160,44
Perempuan	134,99	143,31	150,91	157,60
Rasio	104,46	103,69	102,79	101,80

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu, 2023

Penurunan rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan pada periode 2020 hingga 2035 berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor pembangunan. Meskipun kelebihan jumlah penduduk laki-laki kerap dianggap sebagai faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perencanaan yang matang perlu mempertimbangkan distribusi usia serta keseimbangan antara kedua jenis kelamin. Hal ini penting agar produktivitas dan partisipasi penduduk dalam aktivitas ekonomi dapat dioptimalkan secara efektif. Kabupaten Rejang Lebong harus memanfaatkan momentum bonus demografi dengan menerapkan strategi investasi yang tepat, terutama dalam bidang pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, persiapan layanan sosial dan kesehatan yang memadai untuk mendukung populasi lansia juga menjadi faktor krusial guna memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Analisis pada Tabel di atas yang menguraikan proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki mengalami pertumbuhan yang

relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun demikian, rasio jenis kelamin cenderung mengalami penurunan selama periode tersebut. Sementara itu, proyeksi penduduk menurut kelompok umur mengindikasikan tren penurunan persentase penduduk usia muda disertai dengan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Kondisi ini menandai tantangan demografis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur. Keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan kebijakan yang mendukung ketahanan ekonomi serta kesejahteraan sosial menjadi aspek fundamental dalam memaksimalkan potensi demografi yang tersedia.

Tabel 2. 72
Proyeksi Penduduk Rejang Lebong Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2020-2035

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2020 (%)	Proyeksi Penduduk 2035 (%)
0-14 Tahun	24,37	23,26
15-64 Tahun	70,44	70,06
> 65 Tahun	5,19	6,69
Angka Ketergantungan	41,96	42,74

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Rejang Lebong, 2023

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah penduduk pada awal periode RPJPD memberikan Kabupaten Rejang Lebong peluang signifikan berupa bonus demografi, yang dapat dimanfaatkan sebagai katalisator pembangunan daerah. Dengan ketersediaan tenaga kerja yang lebih banyak, sektor produksi berpotensi meningkat melalui penerapan inovasi, teknologi, serta peningkatan kualitas produk. Potensi ini sangat strategis dalam mendukung proses hilirisasi produk unggulan daerah dengan mengarahkan tenaga kerja berkualitas ke sektor-sektor prioritas. Melalui strategi pembangunan yang tepat, Kabupaten Rejang Lebong dapat menjadikan pertumbuhan penduduk sebagai aset berharga dalam mencapai visi hilirisasi secara berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan infrastruktur pendidikan dan perdagangan, dukungan intensif bagi UMKM, penyesuaian kompetensi lulusan vokasi dengan kebutuhan industri, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi secara efisien.

2.3.2.5. Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peranan krusial dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong. RTRW berfungsi sebagai pedoman strategis yang mengatur pemanfaatan ruang secara terintegrasi, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan serta pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien. Integrasi RTRW ke dalam RPJMD menjamin bahwa setiap komponen pembangunan—mulai dari pengembangan infrastruktur, pengelolaan kawasan permukiman, hingga pemanfaatan sumber daya alam—dilaksanakan secara terencana dan disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan spesifik Kabupaten Rejang Lebong. Pendekatan ini mendukung terciptanya pembangunan yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, langkah ini membantu mengoptimalkan penggunaan ruang, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tata ruang diwujudkan melalui dua komponen utama, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merujuk pada pengaturan pusat-pusat permukiman serta jaringan prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, yang memiliki keterkaitan fungsional dengan hierarki tertentu. Struktur ruang ini mencakup distribusi dan penyebaran elemen-elemen fisik serta fungsional yang menjadi dasar pengelolaan wilayah. Sebaliknya, pola ruang menggambarkan pengaturan wilayah berdasarkan fungsi dan penggunaan lahan yang memperhatikan keselarasan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Rejang Lebong periode 2022–2042, muatan struktur ruang dirinci melalui pengaturan pemanfaatan ruang tersebut beserta indikasi program-program prioritas yang telah disusun, sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 73
Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2042

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah										
Perwujudan Sistem Pusat Permukiman										
1	Pemantapan Fungsi PKW Curup	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Curup	Kecamatan Curup, Curup Tengah, Curup Utara, Curup Timur dan Curup Selatan							
		Penyusunan RTBL Kawasan Perkantoran Pemerintahan	Perkotaan Curup							
		Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Perkotaan Curup							
		Pengembangan fasos fasum	Perkotaan Curup							
2	Peningkatan dan pemantapan Fungsi PKL Kota Padang	Penyusunan RDTR Perkotaan Kota Padang	Kecamatan Kota Padang							
		Pengembangan fasos fasum pendukung PKL	Kecamatan Kota Padang							
3	Peningkatan dan pemantapan Fungsi PPK Tebat Tenong Luar, Air Duku	Penyusunan RDTR Perkotaan Tebat Tenong Luar	Kecamatan Bermani Ulu Raya							
		Penyusunan RDTR Perkotaan Air Duku	Kecamatan Selupu Rejang							
		Penyusunan RDTR Perkotaan Beringin Tiga	Kecamatan Sindang Kelingi							
		Penyusunan RDTR Perkotaan Padang Ulak Tanding	Kecamatan Padang Ulak Tanding							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
		Pengembangan Fasos dan Fasum pendukung PPK	Kecamatan Selupu Rejang, Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi, Bermani Ulu Raya, Sindang Dataran, Sindnag Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Bermani ulu dan Binduriang							
4	Peningkatan dan Pemantapan Fungsi PPL Kampung Melayu, Simpang Beliti, Lubuk Belimbing I, Lubuk Alai dan Bengko	Penyusunan Perdes Rencana Tata Ruang Desa	Kecamatan Bermani Ulu, Binduriang, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran							
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten										
1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
	Sistem Jaringan Jalan	Pemantapan Jaringan Jalan Arteri Primer, meliputi:								
		1. Sp. Tabamulan – BTS. Kota Curup								
		2. Ruas Jalan Thamrin (Curup)								
		3. Ruas Jalan Merdeka (Curup)								
		4. Ruas Jalan A. Yani (Curup)								
		5. Ruas Jalan Curup – Simpang Nangka								
		6. Ruas Jalan Sp. Nangka (Curup) – BTS. Provinsi Sumatera Selatan								

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
		Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), meliputi: 1. Ruas Sp. Taba Mulan – Sp. Nangka								
		Pembangunan/Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer 3: 1. Ruas Jalan Curup – Air Dingin 2. Ruas Jalan Bukit Kaba 3. Ruas Jalan Beringin III –Bengko 4. Ruas Jalan Air Lanang –Desa Apur 5. Ruas Jalan Palak Curup – Sp. III Karang Baru 6. Ruas Jalan PUT – Kota Padang – Derati – Tj. Enim								
		Pemantapan/ Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Kabupaten Rejang Lebong							
		Rencana Pembangunan Jalan Tol: Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu								
		Rencana Pembangunan Exit Tol di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong	Kecamatan Sindang Dataran							
		Pemantapan Terminal Tipe A	Terminal Simpang Nangka, Kecamatan Curup							
		Pemantapan Terminal Tipe C	Terminal Tabarenah, Kecamatan Curup Utara							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
		Pemantapan Jembatan Timbang	Kecamatan Padang Ulak Tanding							
	Sistem Jaringan Kereta Api	Rencana pembangunan jaringan kereta api jalur Kota Padang – Pulau Baa								
		Pemantapan Stasiun Kota Padang	Kecamatan Kota Padang							
		Rencana Pembangunan Stasiun Kepala Curup	Kecamatan Binduriang							
2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi									
	Infrastruktur pembangkit tenaga listrik	Pemantapan PLTMH Kepala Curup	Kecamatan Binduriang							
		Rencana Pembangunan PLTP Suban	Kecamatan Selupu Rejang							
		Rencana Pembangunan PLTM Kelingi	Kecamatan Sindang Kelingi							
		Rencana Pembangunan PLTM Belimbing	Kecamatan Sindang Beliti Ilir							
	Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik	Pemantapan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTA Musi – Curup – Lubuk Linggau: 150 kv	Kabupaten Rejang Lebong							
		Pemantapan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTA Tes – Bermani Ulu Raya – Curup – Kepahiang: 70 kv	Kabupaten Rejang Lebong							
		Rencana Pembangunan Gardu Induk	Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Binduriang, Kota Padang							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pemantapan/ Pengembangan jaringan tetap	Tersebar mengikuti ruas jaringan jalan							
		Rencana Pengembangan BTS	Setiap kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong							
4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Optimasi sarana prasarana	Kabupaten Rejang Lebong							
		Peningkatan kapasitas/ jumlah saluran irigasi	Kabupaten Rejang Lebong							
		Pembangunan sistem peringatan dini bahaya banjir dan longsor	Kabupaten Rejang Lebong							
		Normalisasi Sungai, rehabilitasi tanggul banjir, dan rehabilitasi bronjong penguat tebing	Kabupaten Rejang Lebong							
		Pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir	DAS Musi, DAS Ketahun, DAS Palik, DAS Ketahun							
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kabupaten Rejang Lebong							
		Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air	Kabupaten Rejang Lebong							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Perencanaan Jaringan Perpipaan SPAM IKK	Seluruh IKK Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong							
		Perencanaan Jaringan Bukan Perpipaan	Kawasan Perdesaan yang tidak terlayani jaringan perpipaan							
		Pembangunan SPAL terpusat skala kota	Perkotaan Curup							
		Peningkatan dan optimalisasi IPLT Tasik Malaya	Curup Utara							
		Pembangunan IPAL komunal	Semua Kecamatan di Rejang Lebong							
		Pembangunan Pengelolaan Limbah B3	Kabupaten Rejang Lebong							
		Optimalisasi TPA Jambu Keling	Kecamatan Bermani Ulu raya							
		Rencana Pembangunan TPA	Kecamatan Padang Ulak Tanding / Binduriang							
		Rencana Pembangunan TPS3R	Semua kecamatan di Rejang Lebong							
		Rencana Titik Lokasi Ruang Evakuasi Bencana								
		Pemantapan Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana							
		Pengembangan / Pemantapan Jaringan Drainase Primer dan Sekunder	Kabupaten Rejang Lebong							
		Normalisasi Sungai-Sungai dan Saluran Drainase	Kabupaten Rejang Lebong							
		Pengendalian Fungsi Bantaran Sungai								

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
		Pembangunan Tandon Air atau Sumur Resapan								
		Penataan Sistem penyaluran air hujan								
		Penyusunan <i>master plan</i> drainase wilayah perkotaan	Kawasan Perkotaan							
Perwujudan Rencana Pola Ruang										
1	Perwujudan Badan Air	Perlindungan/ Pengelolaan Badan Air untuk mencukupi kebutuhan kegiatan masyarakat	Kabupaten Rejang Lebong							
2	Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	- Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan lindung	Kecamatan Bermani Ulu,							
		- Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung	Bermani Ulu Raya							
		- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung	Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran							
3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	- Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai - Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	Disetiap kecamatan Kabupaten Rejang Lebong							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
		- Pembuatan struktur buatan pengaman sungai - Pengembangan struktur alami pengaman sungai								
		- Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau - Pemeliharaan kawasan sekitar danau dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau	Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Curup, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Sindang Beliti Ulu							
4	Perwujudan Kawasan Konservasi	Perlindungan dan pelestarian kawasan Cagar Alam Talang Ulu	Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Selupu Rejang							
		- Perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) - Rehabilitasi dan perawatan kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang mengalami kerusakan	Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Sindang Kelingi							
		- Perlindungan dan pelestarian Taman Wisata Alam Bukit Kaba	Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Kelingi							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
5	Perwujudan Kawasan Hutan Adat	Pengelolaan kawasan hutan adat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat	Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Bermani Ulu Raya							
6	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi	Pelestarian Kawasan lindung sebagai penyangga kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan	Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Kota Padang							
7	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya	Penataan kawasan cagar budaya yang berfungsi sebagai upaya pelestarian Kawasan cagar budaya di wilayah kabupaten	Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Utara							
8	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	- pelestarian Kawasan Hutan Produksi berupa Hutan Produksi terbatas	Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Curup Utara							
		- Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi								
9	Perwujudan Kawasan Pertanian	Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi	Seluruh Kecamatan							
		Penetapan Perda LP2B	Kabupaten Rejang Lebong							
		- Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi	Kabupaten Rejang Lebong							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
		- Pengembangan tanaman pertanian sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal. - Pemantapan dan pelestarian kawasan pertanian dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman pertanian daerah - Pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata								
10	Perwujudan Kawasan Perikanan	- Pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap - Pengendalian dan pengaturan kegiatan perikanan tangkap agar tetap lestari	Kecamatan Padang Ulak Tanding							
11	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi	Peningkatan sarana dan prasana kawasan pertambangan untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat	Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Surup Utara, Kecamatan Selupu Rejang							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
12	Perwujudan Kawasan Permukiman	Penyusunan Dokumen RP3KP	Kabupaten Rejang Lebong							
		Fasilitasi pembangunan PSU di Kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Curup, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Selupu Rejang							
		Penanganan kawasan kumuh perkotaan								
		Fasilitasi pembangunan PSU di Kawasan permukiman perdesaan.	Di semua kecamatan							
13	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan sarana pengelolaan limbah pada sentra IKM	Kabupaten Rejang Lebong							
		Pengembangan infrastruktur dasar & sarana pendukung usaha IKM	Kabupaten Rejang Lebong							
		Pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri	Kabupaten Rejang Lebong							
14	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Penyusunan Raperda Rencana Induk Pariwisata (RIPDA) Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong							

No	Rencana Pemanfaatan Ruang			Waktu Pelaksanaan dalam Periode RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJMD
	Indikasi Program	Kegiatan	Lokasi	Tahap I					Tahap II	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
		Penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata	Kabupaten Rejang Lebong							
		Pelestarian, pemantapan, dan pengembangan kawasan pariwisata alam.	Kabupaten Rejang Lebong							
		Rencana pengembangan UMKM dan industri kreatif di bidang pariwisata;	Disetiap kecamatan Kabupaten Rejang Lebong							
		Pemantapan dan pengelolaan kelembagaan kawasan pariwisata	Kabupaten Rejang Lebong							
15	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Kemanan	Penyusunan <i>master plan</i> kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Rejang Lebong							

2.3.2.6. Isu Strategis Kabupaten Rejang Lebong

Isu dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kemiripan yang signifikan dengan isu strategis yang berkembang di tingkat Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, identifikasi dan antisipasi isu strategis harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui tindakan mitigasi yang tepat serta pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Langkah ini bertujuan untuk mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Isu-isu strategis Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan salah satu fondasi penyusunan RPJMD 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar

Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di Kabupaten Rejang Lebong, potensi daerah dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana dasar telah menjadi fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, capaian tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum meratanya akses air minum layak, sanitasi, dan pengelolaan sampah di seluruh wilayah. Berdasarkan evaluasi dokumen RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006–2025, tercatat sebanyak 57.325 rumah tangga dari total 69.698 rumah tangga telah memiliki akses terhadap air minum layak. Meski demikian, hanya sekitar 16.328 jiwa yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik yang memadai, serta baru 19.918 ton dari total 41.223 ton timbunan sampah sepanjang tahun 2022 yang berhasil ditangani. Kondisi drainase juga menunjukkan masih adanya kesenjangan, di mana hanya 10.340 km dari total 11.925 km sistem drainase yang berada dalam kondisi baik.

Dalam konteks Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar di berbagai wilayah, yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Hal ini juga berkaitan erat dengan isu global sebagaimana tercantum dalam SDGs Tujuan 6, yaitu memastikan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dari perspektif isu lingkungan dinamis nasional, tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya kawasan kumuh serta perlunya peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak. Di tingkat regional, persoalan rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan strategis, serta pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, masih menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu strategis daerah terkait pelayanan dasar adalah belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana dasar yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan komprehensif dalam peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar, terutama di bidang air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, dan penataan kawasan kumuh. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, mendukung produktivitas masyarakat, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.

2. Terbatasnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah

Keterbatasan infrastruktur transportasi dan konektivitas antarwilayah masih menjadi kendala signifikan dalam distribusi barang dan jasa, serta mobilitas sumber daya manusia di Kabupaten Rejang Lebong. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya rantai pasok produk unggulan daerah dan terbatasnya akses pasar, yang pada akhirnya menurunkan daya saing daerah dalam konteks regional maupun nasional. Hasil analisis isu strategis daerah menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, baik antar kecamatan di dalam kabupaten maupun antara Rejang Lebong dengan wilayah sekitarnya. Hal ini sejalan dengan isu lingkungan dinamis nasional dan regional, yaitu terbatasnya konektivitas infrastruktur antarwilayah dan kurangnya pengembangan jaringan jalan strategis antar kabupaten/kota. Dalam konteks global, isu ini juga relevan dengan Tujuan SDGs 11 tentang pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian integral dari struktur ruang Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong memiliki posisi strategis sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Hal ini menempatkan daerah ini pada posisi penting dalam mendukung keterhubungan wilayah dan pemerataan pembangunan. Sektor ekonomi utama seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata memiliki peran besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan infrastruktur pendukung, terutama jalan dan sistem konektivitas antarwilayah, menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi potensi tersebut.

Salah satu kebutuhan mendesak adalah peningkatan kualitas dan cakupan Jalan Usaha Tani (JUT) sebagai tulang punggung logistik hasil produksi pertanian dan perkebunan. Selain itu, peningkatan jalan menuju kawasan wisata unggulan juga diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi waktu tempuh, sehingga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata lokal. Namun demikian, kemandapan jalan kabupaten di Rejang Lebong masih tergolong rendah. Permasalahan yang cukup dominan adalah belum tersedianya sistem drainase dan saluran air yang memadai, yang menyebabkan kerusakan jalan yang

cukup signifikan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kondisi infrastruktur, tetapi juga mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan perencanaan jalan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik jalan, tetapi juga mencakup perencanaan sistem drainase yang efektif, penyediaan infrastruktur keselamatan jalan, serta integrasi jaringan jalan yang terpadu dan berkelanjutan.

Peningkatan konektivitas, baik dari dan menuju Kabupaten Rejang Lebong, menjadi kunci utama dalam mendukung mobilisasi produk unggulan daerah, khususnya dari sektor pertanian dan komoditas strategis seperti kopi. Dengan adanya peningkatan konektivitas ini, daya saing produk lokal di pasar regional dan internasional dapat meningkat, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang langsung dirasakan oleh pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan daerah dan global.

3. Belum optimalnya Pengendalian Pembangunan dan pelestarian lingkungan

Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi ekosistem alam yang tinggi, khususnya melalui keberadaan kawasan hutan, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan kekayaan keanekaragaman hayati yang menyertainya. Potensi ini merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya sektor kehutanan, jasa lingkungan, dan ekowisata. Namun, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan belum sepenuhnya terjaga. Aktivitas manusia yang tidak terkontrol di wilayah sekitar kawasan hutan dan lindung masih menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, seperti alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko bencana alam, termasuk banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Berdasarkan perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum optimal, serta menunjukkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong termasuk wilayah yang rawan terhadap dampak bencana alam akibat degradasi lingkungan.

Secara global, isu ini sangat relevan dengan tantangan perubahan iklim dan deforestasi, yang telah menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan dunia. Isu ini juga beririsan dengan Tujuan SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan Tujuan SDGs 15 (Ekosistem Daratan). Dalam konteks nasional, arah kebijakan pembangunan menekankan pada penguatan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai upaya strategis untuk menanggulangi degradasi lingkungan. Di tingkat regional, isu yang mengemuka adalah perlunya optimalisasi pengelolaan kawasan lindung provinsi, yang

mencakup peningkatan fungsi ekologis kawasan hutan, pemulihan habitat alami, dan pelibatan masyarakat lokal dalam konservasi. Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut, maka isu strategis daerah yang dihadapi adalah belum optimalnya pengendalian pembangunan dan pelestarian lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan, penguatan kelembagaan pengelola kawasan lindung, serta penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dalam setiap sektor. Beberapa langkah prioritas yang dapat dilakukan adalah Pemulihan dan konservasi kawasan lindung serta habitat penting, Pengendalian alih fungsi lahan di sekitar hutan lindung dan TNKS, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, Penguatan sistem pengawasan lingkungan dan Integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang wilayah. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana.

4. Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian dan perkebunan

Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada komoditas pertanian dan perkebunan seperti kopi, karet dan kelapa sawit, Namun, proses hilirisasi yang masih terbatas menyebabkan produk unggulan tersebut cenderung dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan potensi pendapatan daerah dan kesejahteraan petani belum maksimal. Optimalisasi hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas peluang pasar, dan membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pengolahan dan industri hilir. Pendekatan strategis dalam pengembangan hilirisasi perlu memperhatikan aspek teknologi pengolahan, pengembangan pasar, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Modernisasi pertanian menjadi prioritas utama dengan penerapan teknologi pertanian mutakhir, seperti penggunaan alat dan mesin pertanian canggih serta penerapan praktik pertanian presisi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, diversifikasi produk pertanian sangat penting untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu jenis tanaman dan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian. Upaya penguatan sektor ini harus didukung dengan perluasan akses petani ke pasar, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta pengembangan fasilitas asuransi pertanian sebagai mitigasi risiko. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi yang handal, jaringan jalan tani, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian perlu ditingkatkan guna memperlancar proses produksi dan distribusi secara efisien.

Secara nasional, hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas RPJMN 2025–2029

untuk menaikkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Provinsi Bengkulu juga menekankan arah kebijakan pengembangan hilirisasi komoditas unggulan (kelapa sawit, karet, kopi) dan pariwisata kompetitif dalam RPJPD 2025–2045. Di tingkat kabupaten, Rejang Lebong mendorong pengolahan skala menengah untuk sawit menjadi minyak nabati, karet menjadi ban mikro, serta kopi robusta kemasan premium, sekaligus mengembangkan ekowisata Curug Sembilan dan wisata agro-coffee farm.

5. Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi wisata alam dan budaya yang kaya dan beragam, yang apabila dikembangkan secara optimal, dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Potensi ini tidak hanya terbatas pada daya tarik destinasi wisata alam seperti pegunungan, air terjun, dan perkebunan, tetapi juga mencakup kekayaan budaya, tradisi, dan kerajinan lokal yang bernilai ekonomi tinggi. Namun demikian, pengembangan sektor pariwisata saat ini belum optimal, baik dari sisi promosi, infrastruktur, maupun kualitas layanan. Selain itu, potensi pariwisata daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, kerajinan, seni pertunjukan, dan produk budaya lokal lainnya. Hal ini menyebabkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah, serta belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja secara signifikan.

Dari perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), isu utama yang muncul adalah belum optimalnya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Isu ini berkaitan erat dengan agenda global, khususnya wisata berkelanjutan dan ecotourism yang mengedepankan kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pelestarian budaya. Dalam konteks nasional, pembangunan sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi pariwisata unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi nasional. Sementara itu, dari sisi regional, Kabupaten Rejang Lebong merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bengkulu, yang didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan wisata berbasis alam dan budaya. Namun, pemanfaatan peluang ini masih terkendala oleh minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya kualitas sumber daya manusia pariwisata, dan belum adanya sinergi antar sektor.

Isu ini memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan, dengan fokus pada penguatan daya saing destinasi wisata berbasis keunikan lokal, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas menuju kawasan wisata, Integrasi sektor

pariwisata dengan pelaku ekonomi kreatif, Peningkatan kapasitas SDM local, dan Promosi wisata yang lebih inovatif dan digital. Dengan demikian, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan

Jumlah penduduk usia produktif lebih mendominasi di Kabupaten Rejang Lebong. Namun jika dilihat dari data Angkatan kerja, 54,47% Angkatan kerja merupakan lulusan SMP dan SD ke bawah, hal ini membatasi kemampuan tenaga kerja untuk berkontribusi optimal dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi. Kualitas pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu isu strategis utama yang harus diantisipasi untuk mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Salah satu fokus kebijakan adalah pembaruan kurikulum berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada keterampilan praktis dan kompetensi relevan sesuai kebutuhan dunia industri. Namun, pembagian kewenangan dalam sistem pendidikan menimbulkan tantangan koordinasi, karena Kabupaten Rejang Lebong hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tingkat SD dan SMP. Pendidikan tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, sedangkan pendidikan tinggi berada di bawah otoritas Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan kurikulum yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja serta mempersiapkan lulusan dengan kompetensi yang tepat.

Kondisi ini menuntut kebijakan strategis untuk menarik dan mempertahankan siswa di tingkat SMP dapat melalui program beasiswa, layanan pendampingan belajar, dan peningkatan sarana-prasarana, serta penguatan akses dan kualitas di SMA/MA. Mengingat lulusan SMP tahun ini akan memasuki jenjang menengah atas atau vokasi pada 2029, upaya peningkatan partisipasi SMP sangat krusial agar pendidikan vokasi tidak menghadapi kekurangan peserta didik. Dalam hal ini, perluasan dan peningkatan mutu program vokasi serta pendidikan teknik melalui kemitraan industri, kurikulum kompetensi, dan fasilitas praktik yang memadai harus dipadukan dengan intervensi terpadu di SMP. Dengan demikian, Kabupaten Rejang Lebong dapat menyiapkan lulusan yang terampil dan siap bersaing pada era 2029.

Oleh karena itu, strategi pembangunan pendidikan ke depan harus mencakup perluasan dan peningkatan mutu program vokasi melalui kemitraan industri, kurikulum berbasis kompetensi, dan fasilitas praktik memadai—serta intervensi terpadu di SMP agar setiap lulusan dapat melanjutkan ke jenjang yang sesuai, sehingga Kabupaten Rejang Lebong mampu menghasilkan tenaga kerja kompeten dan siap bersaing pada era 2029.

Selain itu, efektivitas bantuan keuangan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu harus diperkuat. Penyediaan beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu merupakan langkah strategis untuk memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas. Pendidikan inklusif perlu ditingkatkan dengan memperhatikan akses bagi kelompok marjinal, penyandang disabilitas, dan perempuan guna menjamin kesetaraan kesempatan belajar. Program khusus yang menargetkan peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal juga perlu dilaksanakan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

Dalam konteks kesejahteraan penduduk, Kabupaten Rejang Lebong masih dihadapkan pada tantangan penurunan angka kemiskinan yang dipengaruhi oleh kurangnya kreativitas masyarakat dalam mengoptimalkan potensi individu maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi sekolah sangat diperlukan untuk memaksimalkan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan formal. Bagi mereka yang sudah memiliki pendidikan, pengembangan keterampilan melalui program peningkatan kompetensi (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) menjadi sangat strategis agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri masa kini.

Pelaksanaan program sertifikasi profesi juga harus digalakkan untuk menjamin tenaga kerja memiliki standar kompetensi yang diakui secara resmi. Selain itu, penerapan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) perlu dipromosikan agar masyarakat dapat terus menyesuaikan keterampilan mereka sesuai dinamika pasar kerja. Sinergi antara institusi pendidikan dan dunia industri harus diperkuat, terutama melalui program magang dan praktik kerja, untuk memberikan pengalaman nyata yang relevan dan meningkatkan kesiapan kerja lulusan.

Dari perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), isu kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi tantangan serius yang harus ditangani dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDGs 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan SDGs 4: Pendidikan berkualitas untuk semua. Kedua tujuan ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi pembangunan yang inklusif. Secara nasional, tantangan pembangunan SDM juga tercermin dalam kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Di tingkat regional, fokus diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia, terutama di wilayah yang memiliki ketimpangan pembangunan SDM antar kecamatan.

Isu strategis ini perlu segera direspons melalui arah kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan vokasi, pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal, pengembangan program kewirausahaan dan ekonomi kreatif, penguatan sistem perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan penyediaan layanan kesehatan dasar yang berkualitas guna mendukung SDM yang sehat dan produktif. Dengan strategi yang tepat, potensi demografi Kabupaten Rejang Lebong dapat diubah menjadi bonus demografi yang produktif, mendorong daya saing daerah, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah maupun panjang secara berkelanjutan.

7. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

RPJMN 2025–2029 menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu delapan prioritas nasional, dengan fokus pada digitalisasi layanan publik, meritokrasi ASN, dan penataan kelembagaan adaptif. Provinsi Bengkulu mengadopsi strategi serupa dalam RPJPD 2025–2045, menekankan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan efektivitas pelayanan publik. Kabupaten Rejang Lebong merumuskan program reformasi birokrasi—penyederhanaan perizinan terintegrasi, e-governance OPD, dan audit kinerja berkala—agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih responsif dan transparan, sejalan dengan sasaran RPJMD 2025–2029.

Reformasi birokrasi merupakan isu strategis yang menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan. Salah satu fokus utama dalam reformasi ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang jelas, terukur, serta berorientasi pada percepatan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang prima. Implementasi sistem pelayanan terintegrasi melalui konsep layanan satu pintu (*one-stop service*) sangat penting untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan public. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penerapan sistem e-government, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Selain perbaikan sistem pelayanan, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi prioritas strategis. Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala akan meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial ASN secara menyeluruh. Penerapan sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir bertujuan untuk memastikan penempatan ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja individu yang objektif. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam reformasi birokrasi, dengan memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah dan mendeteksi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, pengembangan mekanisme

pelaporan dan monitoring yang transparan harus dioptimalkan agar program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah juga perlu didorong agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan publik.

Terkait penyelenggaraan penanaman modal, penyederhanaan birokrasi menjadi isu strategis yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan publik. Proses bisnis dan prosedur birokrasi yang kompleks harus disederhanakan agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan cepat. Desentralisasi kewenangan kepada unit pelaksana di tingkat bawah diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan serta pelaksanaan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*) sesuai amanat perencanaan pembangunan nasional, perlu dilakukan reformasi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan sistem informasi manajemen yang terpadu akan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dengan lebih akurat dan tepat waktu, sehingga reformasi birokrasi di Kabupaten Rejang Lebong dapat terimplementasi secara optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan masih menjadi tantangan di Kabupaten Rejang Lebong. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Perbaikan ini akan berdampak positif terhadap pelayanan publik, investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Tabel 2. 74
Isu Strategis Daerah Kabupaten Rejang Lebong

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sarana dan prasarana dasar yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat	Belum optimalnya penyediaan layanan dasar	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar	SDGS 6 : Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	Penurunan kawasan kumuh dan peningkatan akses sanitasi layak	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas	Belum optimalnya pembangunan Sarana dan Prasarana dasar
Letak geografis kabupaten yang strategis dan adanya potensi konektivitas wilayah	Minimnya aksesibilitas dan konektivitas antar kecamatan	Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal	SDGS 11: Kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Terbatasnya konektivitas infrastruktur antar wilayah serta Pemerataan pembangunan wilayah	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas	Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
Ekosistem hutan, TNKS dan keanekaragaman hayati yang potensial	- Masih tingginya Tingkat kerusakan lingkungan - Masih adanya resiko bencana	- Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal - Daerah rawan bencana alam	Perubahan iklim dan deforestasi	Penguatan perlindungan keanekaragaman hayati dalam upaya untuk mengatasi degradasi lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan	Belum optimalnya Pengendalian Pembangunan dan pelestarian lingkungan
Potensi pertanian dan perkebunan terutama produksi kopi, karet, aren, dan kelapa sawit serta komoditas unggulan lainnya	- Produktivitas pertanian dan perkebunan belum optimal - Masih rendahnya kontribusi sektor industry pengolahan	Rendahnya diversifikasi produk pertanian	SDGS 12: pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Hilirisasi produk pertanian dan peningkatan nilai tambah	1. Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing	Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian dan Perkebunan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					daerah 2. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	
Potensi wisata alam dan budaya untuk meningkatkan perekonomian lokal	Belum optimalnya pengembangan wisata dan daya tarik wisata	Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal	Wisata berkelanjutan & ecotourism	Pengembangan pariwisata unggulan nasional	Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan nonproduktif	- Masih tingginya angka kemiskinan - Belum optimalnya kualitas Pembangunan manusia	Angka kemiskinan penduduk yang masih tinggi	SDGS 4: Pendidikan yang berkualitas SDGS 1: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk	Peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja untuk menekan penurunan Tingkat kemiskinan	Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip <i>good and clean governance</i> dalam tata kelola pemerintahan	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif	• Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi • Belum optimalnya kinerja, birokrasi dan pelayanan pemerintahan • Belum oprimalnya kapasistas fiskal daerah	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Arus informasi yang tidak akurat dan risiko keamanan siber	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik digital	Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip <i>good and clean governance</i> dalam tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 VISI DAN MISI

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu, telah menetapkan Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2025-2029 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan"**.

Visi ini menjadi landasan utama dalam mengarahkan pembangunan daerah yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, juga mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing. Adapun penjelasan masing-masing elemen visi adalah sebagai berikut:

1. Maju:

Mempunyai pengertian bahwa pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ini, selalu dilandasi keinginan dan komitmen bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan yang lebih baik dari sisi perekonomian, sosial, budaya, infrastruktur, dalam mewujudkan akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing sehingga tercapai kesejahteraan seluruh masyarakat.

2. Mandiri:

Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang selalu berpikir positif, produktif, punya etos dan semangat kerja yang tinggi, dan mampu berusaha dengan mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara berkelanjutan berdaya guna dan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraannya.

3. Berakhlak:

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong berakhlak yang religius memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif, bijaksana yang tercermin dalam perilaku menjunjung tinggi kesucian agama yang dianut serta menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila.

4. Berkelanjutan:

Semangat untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong yang bersinergi dan keberlanjutan pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan yang berorientasi *green economic* sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dapat terjaga.

Visi Kabupaten Rejang Lebong merepresentasikan komitmen kolektif yang terintegrasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan secara merata, dengan fokus pada optimalisasi potensi lokal melalui pendekatan multidimensi. Tekad ini diwujudkan melalui akselerasi pembangunan infrastruktur permukiman dan konektivitas wilayah, serta penguatan sarana prasarana fisik strategis yang berbasis pada karakteristik geografis dan sosio ekonomi daerah. Prioritas utama tertuju pada peningkatan kemandirian ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak, diiringi eksplorasi sektor ekonomi potensial inklusif seperti agrowisata dan ekonomi kreatif berbasis digital. Sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi ini diharapkan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan inklusif serta mengurangi disparitas antarsektor.

Untuk memberikan panduan konkret dan rinci yang berfokus pada tindakan, strategi dan pendekatan dalam upaya perwujudan Visi RPJMD maka ditetapkan 5 misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 sebagai upaya perwujudan visi, sebagai berikut :

- Misi 1 : Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.
- Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah.
- Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.
- Misi 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah.
- Misi 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.

Adapun Penjabaran untuk masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut :

MISI PERTAMA:

Dalam melaksanakan Misi ini, penekanannya adalah reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dimana Bupati Rejang Lebong akan mengelolah tata pemerintahan yang baik harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat yang handal, dapat dipercaya dan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli sesuai dengan bidang dan ahlinya. Sumberdaya manusia

dan aparatur sipil juga harus berakhlak dan berintegritas serta etos kerja yang tinggi mengutamakan profesionalitas dan kerjasama saling mendukung untuk keberhasilan bersama.

MISI KEDUA:

Dalam melaksanakan Misi kedua ini, penekanannya adalah Bagaimana memajukan daerah sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Dalam hal ini pertumbuhan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ke depan berbasis pada perluasan wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan ramah lingkungan. Selanjutnya pertumbuhan daerah juga memperhatikan semua potensi dan daya dukung daerah yang dapat dimanfaatkan di kabupaten Rejang Lebong. Seperti potensi pertambangan, tanah yang subur, pemandangan alam yang indah dan lain sebagainya.

MISI KETIGA:

Dalam melaksanakan Misi ketiga ini, penekanannya adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik daerah. Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah terus ditingkat disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Rejang Lebong, pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah, memperkecil kesenjangan antarwilayah. Selanjutnya pemantapan dan pemerataan kualitas pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

MISI KEEMPAT:

Untuk melaksanakan Misi keempat ini, penekanannya adalah stabilitas perekonomian dan daya saing daerah dengan melibatkan semua unsur dan SDM yang ada terutama generasi muda (Gen Z). Dengan stabilitas yang terjaga dan kemandirian serta daya saing yang tinggi sehingga pertumbuhan berbasis pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta ekonomi kreatif dapat terus meningkat. Dalam melaksanakan usaha dan bisnis memanfaatkan transformasi digital yaitu proses yang diterapkan secara kolektif untuk mengintegrasikan teknologi digital disemua bidang bisnis dan tetap memperhatikan wawasan lingkungan hijau.

MISI KELIMA:

Untuk melaksanakan Misi yang kelima ini, penekanannya adalah kontinuitas dan keberlanjutan sebagai suatu mata rantai yang harus tetap dijaga keberlangsungannya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kecukupan ekonomi. Dalam prosesnya dilakukan pelestarian aset berupa pembangunan sumber daya alam dengan pengelolaan yang ramah lingkungan berbasis ekonomi hijau untuk yang mendukung kehidupan bermasyarakat serta sosiokultural sesuai dengan karakteristik daerah.

3.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Rejang Lebong periode 2025–2029 harus diuraikan secara terstruktur dan terukur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Proses ini menjadi kunci utama dalam merancang program-program strategis yang efektif dan terarah. Tujuan menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perumusan tujuan dilakukan melalui analisis mendalam terhadap potensi daerah, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan keselarasan terhadap prioritas nasional dan regional. Di sisi lain, sasaran dirancang sebagai indikator kinerja yang konkret, yang menunjukkan sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai. Sasaran ini merupakan hasil dari *outcome* program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sehingga mencerminkan dampak nyata dari setiap kegiatan pembangunan. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keterukuran antar elemen perencanaan tersebut, maka hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel berikut ini. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman serta menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan yang lebih operasional.

Tabel 3. 1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan										
Misi 1										
Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.	T1 : Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas	S1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65.68)	B (66.94)	B (67.57)	B (68.21)	B (69.47)	B (70.10)	
			I1 : Nilai SAKIP	B (63.75)	B (66.52)	B (69.29)	BB (72.07)	BB (74.84)	BB (77.61)	
			I2 : Indeks Profesionalitas ASN	61.81	64.9	68.15	71.56	75.14	78.89	
			I3 : Indeks SPBE	3.39	3.47	3.55	3.63	3.71	3.79	
			I4 : Predikat Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		S1.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	I1 : Indeks Kepuasan Masyarakat	84.68	85.47	86.27	87.06	87.86	88.66	
Misi 2										
Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	T2 : Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	4.5-4.8	4.8-5.0	5.0-6.5	5.11-6.8	5.23-7.0	5.3-7.2	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		S2.1 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan pariwisata	I1 : Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	32.89	33.26	33.63	34.00	34.37	34.74	
			I2: Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	
		S2.2. : Meningkatnya investasi daerah	I.1. Nilai Investasi Daerah (Miliar Rupiah)	100.890	106.232	111.858	117.781	124.018	130.586	
		S3.3 : Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	I.1. Tingkat Kemiskinan	14.14-14.51	13.77-14.14	13.41-13.77	13.04-13.41	12.67-13.04	12.30-12.67	
			I.2. Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)	50.66	56.96	59.49	62.15	64.95	68.53	
			I.3. Rasio Gini	0.279-0.292	0.279-0.291	0.279-0.290	0.279-0.289	0.279-0.288	0.278-0.286	
		S3.4 : Menurunnya angka pengangguran	I.1. Tingkat Pengangguran Terbuka	2.30-2.40	2.28-2.39	2.26-2.38	2.22-2.36	2.20-2.35	2.18-2.33	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 3										
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah	T3.1 : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar		Indeks Pembangunan Manusia	72.55-73.27	73.07-73.84	73.59-74.41	74.12-74.97	74.64-75.54	75.17-76.11	
		S3.1 : Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata	I1 : Rata-rata lama sekolah	8.96-9.14	9.14-9.32	9.32-9.50	9.50-9.68	9.68-9.87	9.87-10.05	
			I2 : Harapan Lama Sekolah	14.28-14.40	14.40-14.51	14.51-14.63	14.63-14.74	14.74-14.86	14.86-14.98	
		S3.2 : Meningkatnya Kesehatan yang merata dan berkualitas	I1: Umur Harapan Hidup	69.68	69.91	70.14	70.37	70.6	70.83	
	T3.2 : Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Daerah		Indeks Infrastruktur Wilayah	20.94	24.94	28.94	32.94	36.94	40.94	
		S3.3 : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	I1 : Indeks Infrastruktur Wilayah	20.94	24.94	28.94	32.94	36.94	40.94	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 4										
Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah	T4.1 : Meningkatnya Stabilitas Keamanan daerah		T4 : 1. Angka Kriminalitas	10	10	10	10	10	9	
		S4 1: Menurunnya angka kriminalitas daerah	I1: Angka Kriminalitas	10	10	10	10	10	9	
	T4.2 : Terwujudnya peningkatan daya saing daerah		T4.2 : Indeks Daya Saing Daerah	3.69	3.73	3.78	3.82	3.87	3.91	
		S4.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan melalui UMKM dan Ekonomi Kreatif	I1 : Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	17.17	17.26	17.35	17.44	17.54	17.63	
		S4.2 : Meningkatnya transformasi Digital dan Inovasi Daerah	I2 : Indeks Inovasi Daerah	48.17	48.67	49.17	49.67	50.17	50.67	
Misi 5										
Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	T5 : Meningkatnya Ekonomi Hijau dan keseimbangan Lingkungan yang berkelanjutan		T5 : Indeks Ekonomi Hijau	58.49	58.93	59.36	59.795	60.23	60.67	
		S5.1 : Terwujudnya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	I1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07	
			I2 : Persentase Penurunan Emisi GRK	20.37	24.31	28.25	32.19	36.13	40.07	

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dapat dijelaskan secara lebih terstruktur sebagai berikut :

Misi 1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional

Misi 1 menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Tujuan utama misi ini adalah **Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas**, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini menekankan pentingnya birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang cepat dan responsif. Hal ini memerlukan penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Tujuan ini selaras dengan Asta Cita, khususnya: (1) mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (2) membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas; serta (4) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui penguatan SDM aparatur. Tata kelola yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sasaran konkret misi ini terbagi menjadi dua dimensi: (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yang diukur melalui Nilai SAKIP, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks SPBE serta Predikat Opini BPK; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang diukur menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat.

Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah

Misi 2 berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi (**Mandiri**) melalui optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian organik, agrowisata, dan UMKM berbasis kearifan lokal. Tujuan utamanya adalah **Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah**, dengan indikator Pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini menekankan pentingnya pengembangan sektor-sektor strategis yang menjadi kekuatan ekonomi lokal, seperti pertanian, pariwisata, industri kecil menengah, dan ekonomi kreatif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah dari sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini selaras dengan Asta Cita 6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan menggerakkan sektor strategis yang dimiliki oleh daerah untuk menopang perekonomian nasional dari tingkat local.

Sasaran strategis misi ini mencakup: (1) Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan pariwisata, yang diukur melalui kontribusi PDRB sektor pertanian dan kontribusi PDRB sektor pariwisata; (2) Meningkatnya investasi daerah, indikator yang digunakan yaitu nilai investasi

daerah; (3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, diukur berdasarkan indikator tingkat kemiskinan, pendapatan per-kapita serta rasio gini; (4) Menurunnya angka pengangguran, yang diukur menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka.

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah

Misi 3 bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik. Tujuan utama misi ini adalah **Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar**, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya secara merata dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal dan perdesaan, sebagai prasyarat terciptanya masyarakat yang maju (**Maju**) dan berkeadilan (**Berakhlak**). Ketersediaan pelayanan dasar yang merata akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antardaerah. Tujuan ini sejalan dengan Asta Cita 3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sasaran prioritas meliputi: (1) Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata, dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta Harapan Lama Sekolah (HLS); (2) Meningkatnya Kesehatan yang merata dan berkualitas, yang diukur berdasarkan indikator Umur Harapan Hidup (UHH);

Tujuan kedua adalah **Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Daerah**, dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah. Pemerataan infrastruktur bukan hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam mempercepat distribusi layanan publik dan mendukung pemerataan pembangunan antarkecamatan dan antarwilayah. Dengan infrastruktur yang memadai dan merata, mobilitas masyarakat dan barang dapat meningkat, mendorong efisiensi ekonomi, serta memperkuat keterpaduan wilayah. Tujuan ini sesuai dengan Asta Cita 5, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata, indikator yang digunakan yaitu Indeks Infrastruktur Wilayah.

Misi 4: Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah

Misi 4 dirancang untuk memadukan modernisasi (**Maju**) dengan pelestarian identitas budaya (**Berakhlak**), sekaligus menjamin stabilitas sosial. Tujuan utamanya adalah **Meningkatnya Stabilitas Keamanan daerah**, dengan indikator Indeks Kriminalitas.

Keamanan dan ketertiban wilayah merupakan fondasi bagi seluruh proses pembangunan. Keamanan yang terjaga akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan memungkinkan aktivitas ekonomi serta sosial berjalan dengan lancar. Di samping itu, pelestarian budaya lokal sebagai kekuatan identitas daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat. Tujuan ini selaras dengan Asta Cita 1, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta mendukung ketahanan nasional dari tingkat lokal. Sasaran terukur meliputi: (1) Menurunnya angka kriminalitas daerah, yang diukur menggunakan Angka kriminalitas.

Tujuan kedua adalah **Terwujudnya peningkatan daya saing daerah** dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah. Daya saing daerah menjadi sangat penting dalam menghadapi persaingan global dan arus digitalisasi. Untuk itu, daerah harus mampu memanfaatkan potensi lokal, teknologi, dan kreativitas masyarakatnya guna menghasilkan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah dan kompetitif. Dengan demikian, peningkatan daya saing daerah tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong kemandirian daerah dalam jangka panjang. Tujuan ini sejalan dengan Asta Cita 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sasaran dari tujuan ini adalah (1) Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan melalui UMKM dan ekonomi kreatif, diukur berdasarkan indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB; (2) Meningkatnya transformasi digital dan inovasi daerah, dengan indikator Indeks Inovasi Daerah.

Misi 5: Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing

Misi 5 menjadi puncak integrasi seluruh dimensi visi, dengan fokus pada keberlanjutan ekologis (**Berkelanjutan**) dan kemandirian energi (**Mandiri**). Tujuan utamanya adalah **Meningkatnya Ekonomi Hijau dan keseimbangan Lingkungan yang berkelanjutan**, dengan indikator Indeks Ekonomi Hijau. Tujuan ini mengandung makna bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya alam, dan pengendalian terhadap dampak negatif lingkungan. Konsep ekonomi hijau mendorong integrasi antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, seperti melalui pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah terpadu, dan pelestarian hutan serta keanekaragaman hayati. Tujuan ini selaras dengan Asta Cita 8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa, yang mencakup pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta mendorong masyarakat untuk hidup selaras dengan alam. Sasaran utama misi ini yaitu: (1)

Terwujudnya pengurangan Gas Rumah Kaca dan peningkatan kualitas lingkungan, keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta Persentase penurunan emisi GRK.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara visi RPJMN, visi RPJMD Provinsi Bengkulu dengan visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Keselarasn Visi RPJMN 2025-2029, Visi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029

VISI RPJMN 2025-2029	VISI RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029	VISI RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029
“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan.	“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan” • Maju : Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, kontribusi PDN Maritim, kontribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat • Religius: Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan perilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun. • Sejahtera: Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik. • Berkelanjutan: Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.	"Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan" • Maju: pembangunan Kabupaten Rejang Lebong selalu dilandasi keinginan dan komitmen bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan yang lebih baik sehingga tercapai kesejahteraan seluruh masyarakat. • Mandiri: Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang selalu berpikir positif, produktif, punya etos dan semangat kerja yang tinggi. • Berakhlak: memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana. • Berkelanjutan: bersinergi dan keberlanjutan untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan yang berorientasi <i>green economic</i> sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dapat terjaga.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rejang Lebong yang telah disinkronkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Bengkulu serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka penjabaran Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong adalah :

Tabel 3.3
Keselarasan Misi RPJMN 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029	MISI RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius	Misi 1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan pemuda generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman	Misi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029	MISI RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029
Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan		
Prioritas Nasional 2 Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan	Misi 4: Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah.
Prioritas Nasional 2: Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan	Misi 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang memuat langkah-langkah atau upaya sistematis yang akan dilakukan untuk merespons dinamika lingkungan, guna mencapai tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi pembangunan yang dirumuskan harus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah serta mengoptimalkan potensi lokal secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, strategi menjadi jembatan antara kebijakan makro dengan program dan kegiatan konkret yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029, dalam rangka mewujudkan visi **“Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan”**, disusun secara sistematis, terukur, dan responsif terhadap isu-isu strategis daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tabel strategi ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga peta jalan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan *Sakato Plan*, sinergi antarprogram—seperti integrasi digitalisasi birokrasi dengan transformasi UMKM, atau pembangunan infrastruktur dengan pengembangan agrowisata—dijadikan fondasi untuk mencapai target 2029. Keselarasan dengan RPJMN 2025–2029 memperkuat kontribusi daerah terhadap tujuan nasional. Pemantauan evaluasi berkala dan alokasi anggaran berbasis kinerja akan menjadi kunci untuk memastikan implementasi yang efektif, sehingga visi pembangunan tidak hanya tertuang dalam tabel, tetapi terwujud sebagai warisan pembangunan yang bermakna bagi generasi mendatang. Adapun strategi pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut

Tabel 3. 4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
Visi : Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan				
1	Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas	S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Menyusun roadmap reformasi birokrasi dan regulasi pendukung 2. Menyiapkan infrastruktur aplikasi layanan publik dan sistem merit ASN 3. Meluncurkan aplikasi pelayanan publik terintegrasi (Implementasi

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
	yang berakhlak dan Profesional			e-government terdiri dari e-SAKIP, e-LKPj, e-LKPD) 4. Pelatihan integritas dan etika aparatur, sertifikasi kompetensi, dan survei etika internal berkala 5. Penyempurnaan sistem aplikasi dan layanan publik digital
			S1.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan ASN dan sertifikasi kompetensi; 2. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi integritas ASN secara bertahap; 3. Meningkatkan jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensi dan integritas; 4. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat melalui survey dan perbaikan layanan; 5. Mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam perbaikan SOP layanan publik.
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	S2.1 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan pariwisata	1. Pembentukan cluster agrowisata terintegrasi 2. Pendampingan wirausaha dan ekonomi kreatif dibidang pariwisata dan pertanian 3. Fasilitasi akses pasar digital Kampanye <i>brand-building destinasi, digital marketing</i> , dan pengembangan fasilitas wisata ramah lingkungan.
			S2.2. : Meningkatnya investasi daerah	Penyusunan regulasi insentif dan kelembagaan ekonomi daerah, Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pendukung investasi (jalan usaha tani, irigasi, listrik desa), Penyederhanaan proses perizinan usaha melalui MPP dan OSS daerah serta Promosi potensi investasi melalui pameran lokal, media sosial kabupaten, dan katalog digital potensi daerah.
			S3.3 : Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	1. Perluasan cakupan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
				2. Peningkatan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan masyarakat, pengembangan kewirausahaan sosial dan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi 4. Peningkatan program bantuan sosial melalui perluasan program bantuan untuk keluarga miskin, perlindungan jaminan kesehatan dan pemberian bantuan alat untuk penyandang disabilitas.
			S3.4 : Menurunnya angka pengangguran	1. Peningkatan keterampilan dan pendidikan penduduk usia kerja melalui pelatihan keterampilan spesifik dan sertifikasi, penyuluhan dan <i>job matcing</i> serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dengan dukungan operasional yang baik. 2. Peningkatan pemberdayaan sektor pertanian melalui diversifikasi pangan dan pengembangan budidaya potensial. Kerjasama dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas untuk penyerapan tenaga kerja lokal 3. Perluasan jaringan informasi lapangan kerja.
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah	T3.1 : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar	S3.1 : Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata	1. Pemetaan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten; 2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah di wilayah pedesaan; 3. Peningkatan kualitas guru (pelatihan, sertifikasi, distribusi merata);

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
				4. Penguatan program pendidikan nonformal dan kejar paket untuk menurunkan angka putus sekolah; 5. Integrasi sistem pendidikan digital & evaluasi sistem pemerataan akses pendidikan.
			S3.2 : Meningkatnya Kesehatan yang merata dan berkualitas	1. Pemetaan dan peningkatan layanan dasar kesehatan (puskesmas, posyandu, tenaga medis); 2. Program intervensi gizi dan sanitasi untuk penurunan stunting dan penyakit menular; 3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta lansia; 4. Digitalisasi layanan kesehatan dan integrasi sistem rujukan serta rekam medis elektronik; 5. Perluasan jangkauan layanan BPJS daerah dan penguatan kesehatan promotif-preventif.
		T3.2 : Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Daerah	S3.3 : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	Percepatan pembangunan jalan dan jembatan, program listrik rumah tangga, sanitasi dan air bersih.
4.	Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah	T4.1 : Meningkatnya Stabilitas Keamanan daerah	S4 1: Menurunnya angka kriminalitas daerah	Pemetaan wilayah rawan kriminalitas dan peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan aparat keamanan, peningkatan sarana dan prasarana keamanan (CCTV, penerangan, dan patroli terintegrasi), serta penguatan sistem pelaporan masyarakat berbasis teknologi dan evaluasi berkala kebijakan keamanan.
		T4.2 : Terwujudnya peningkatan daya saing daerah	S4.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan melalui UMKM dan Ekonomi Kreatif	Pemetaan potensi dan kendala pelaku UMKM serta sektor ekonomi kreatif di kabupaten, Fasilitasi perizinan, pelatihan manajemen usaha, dan akses pembiayaan UMKM, Digitalisasi UMKM, pelatihan e-commerce, dan platform marketplace lokal

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
			S4.2 : Meningkatnya transformasi Digital dan Inovasi Daerah	1. Penguatan akses teknologi informasi 2. Penguatan sistem inovasi daerah termasuk dukungan terhadap riset dan pengembangan berbasis potensi lokal. 3. Mendorong inovasi dalam pelayanan dan kebijakan publik
5.	Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	T5 : Meningkatkan Ekonomi Hijau dan keseimbangan Lingkungan yang berkelanjutan	S5.1 : Terwujudnya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	1. Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi lahan kritis dan kawasan hutan, serta perlindungan kawasan konservasi dan ekosistem penting. 3. Pengelolaan sampah terpadu dan kampanye <i>net-zero</i>.

3.2.2. STRATEGI PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

3.2.2.1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen krusial untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat secara merata, selaras dengan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan pemenuhan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, artinya sejak dari proses awal perencanaan program di daerah, harus memberikan prioritas kepada program-program pelayanan dasar dalam konteks SPM untuk memastikan SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dalam tingkatan minimal. Selanjutnya akan diuraikan strategi integrasi SPM ke dalam perencanaan pembangunan daerah, mulai dari kerangka hukum hingga implementasi teknis.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 mentransformasi SPM menjadi program konkret dengan output yang jelas dan terukur. Pada sektor pendidikan, mewujudkan target rasio guru-siswa yang ideal melalui rekrutmen guru honorer dan pelatihan kompetensi. Di bidang kesehatan, peningkatan cakupan imunisasi dasar dengan penguatan digitalisasi pelayanan Posyandu yang sistematis. Kemudian di sektor infrastruktur, Pembangunan jaringan pipa air bersih, misalnya, tidak hanya mengejar target akses 90% rumah tangga, tetapi

juga mempertimbangkan keberlanjutannya. Sementara itu, program perumahan layak huni bagi masyarakat miskin dirancang berbasis database yang ada untuk memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran.

Integrasi SPM dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SPM dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 bukan sekadar daftar target, melainkan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, tidak merasakan keadilan dalam akses layanan dasar.

3.2.2.2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda transformatif global yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, melalui Resolusi PBB A/RES/70/1 (2015). Di Indonesia, TPB/SDGs diinternalisasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Roadmap TPB/SDGs 2030, yang menyelaraskan target global dengan prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem (target 0% pada 2024) dan transisi energi (porsi EBT 23% pada 2025). Regulasi ini diperkuat oleh RPJPN Tahun 2025-2045 yang menetapkan SDG's sebagai *mainstream* kebijakan pembangunan, dengan indikator kinerja terukur seperti penurunan indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dari 1,84 (2023) menjadi 1,2 (2030).

Untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun strategi pencapaian target SDGs dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 sesuai dengan 17 tujuan SDGs yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5
Strategi Pencapaian SDG's dalam RPJMD 2025-2029

Tujuan SDGs	Strategi Pencapaian Target SDGs dalam RPJMD Rejang Lebong
SDG 1: Tanpa Kemiskinan	1. Memperluas program pemberdayaan UMKM dengan pelatihan keterampilan dan akses permodalan. 2. Mengembangkan agrowisata berbasis komunitas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
SDG 2: Tanpa Kelaparan	1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi ramah lingkungan. 2. Membangun sistem distribusi pangan yang efisien untuk mengurangi ketergantungan impor.
SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan	1. Memperluas cakupan layanan kesehatan dasar ke daerah terpencil. 2. Meningkatkan program sanitasi dan air bersih untuk mengurangi penyakit berbasis lingkungan.
SDG 4: Pendidikan Berkualitas	1. Membangun sarana pendidikan di wilayah terpencil dan meningkatkan kualitas guru. 2. Mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran.

Tujuan SDGs	Strategi Pencapaian Target SDGs dalam RPJMD Rejang Lebong
SDG 5: Kesetaraan Gender	1. Memberikan pelatihan khusus perempuan dalam pengelolaan UMKM. 2. Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
SDG 7: Energi Bersih	1. Mengembangkan energi mikrohidro dan tenaga surya untuk daerah terisolasi. 2. Mendorong penggunaan energi terbarukan di fasilitas publik.
SDG 8: Pekerjaan Layak	1. Menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. 2. Menyelenggarakan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan pasar.
SDG 9: Infrastruktur dan Inovasi	1. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas. 2. Mendorong inovasi teknologi dalam pengelolaan UMKM dan pertanian.
SDG 11: Kota Berkelanjutan	1. Meningkatkan pengelolaan limbah padat dan cair berbasis masyarakat. 2. Mengembangkan ruang terbuka hijau di perkotaan dan pedesaan.
SDG 13: Penanganan Iklim	1. Melaksanakan program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis 2. Mengintegrasikan kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan.
SDG 16: Lembaga yang Kuat	1. Memperkuat transparansi anggaran melalui platform digital. 2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik berbasis integritas.
SDG 17: Kemitraan Global	1. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk pendanaan infrastruktur. 2. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam riset pembangunan berkelanjutan.

3.2.2.3 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi kunci untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan dan implementasi program mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, memperkuat agency dan mendorong peran aktif perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membangun tata kelola pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan, melalui (a) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; (b) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (c) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (d) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; serta (e) penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan.

Pada Kabupaten Rejang Lebong, PUG tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi juga diwujudkan melalui program-program konkret dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Berdasarkan data BPS Kabupaten Rejang Lebong (2024), Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada pada angka 94.31, sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai 64,53. Beberapa isu krusial yang menghambat kesetaraan gender meliputi:

1. Partisipasi Politik: Hanya 20% kursi legislatif diduduki Perempuan (data BPS).
2. Kesenjangan Ekonomi dari segi Pendapatan di sektor informal antara Perempuan dan laki-laki.
3. Kesenjangan Akses Pendidikan dari segi Angka partisipasi sekolah, perempuan di wilayah pedesaan lebih rendah dibanding laki-laki.

Tantangan ini memerlukan intervensi sistematis, yang diintegrasikan ke dalam program pembangunan di RPJMD 2025–2029. Berikut strategi Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi.
2. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Gender.
4. Peningkatan Partisipasi Perempuan.

3.2.2.4 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong, masih menghadapi tantangan multidimensi dalam hal aksesibilitas, partisipasi sosial, dan perlindungan hak. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas fisik/non-fisik. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Inklusi Disabilitas, yang menekankan pendekatan berbasis hak (*rights-based appro*).

Strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pemetaan dan pendataan terpadu.
2. Penguatan ketrampilan dan pelatihan vokasional.
3. Dukungan aksesibilitas dan alat bantu.
4. Peningkatan aksesibilitas sekolah.
5. Bantuan pendidikan dan beasiswa.
6. Kampanye sosialisasi dan kesadaran.

Implementasi strategi diharapkan menurunkan angka pengangguran penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong dan meningkatkan partisipasi pendidikan formal. Pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi investasi sosial untuk membangun masyarakat inklusif.

3.2.2.5 Pengarusutamaan Hak Anak

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) merupakan strategi sistematis untuk memastikan integrasi hak anak dalam seluruh tahap pembangunan, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Implementasi PUHA di Kabupaten Rejang Lebong bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul. Dengan memadukan pendekatan regulasi, teknologi, dan partisipasi Masyarakat.

Strategi Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 antara lain:

1. Penguatan Sistem Perlindungan Anak.
2. Pendidikan Inklusif dan Partisipatif.
3. Pencegahan Perkawinan Anak.
4. Infrastruktur dan Layanan Kesehatan.
5. Dukungan Regulasi dan Anggaran

3.2.2.6 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai daerah dengan tutupan hutan mencapai 65% (BPS, 2023), memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional melalui integrasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam RPJMD 2025–2029. Berikut strategi konkret PRK yang diintegrasikan dengan program prioritas:

1. Pengelolaan Limbah Terpadu
2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan
3. Pengembangan Industri Hijau

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 telah mengadopsi pendekatan PRK secara holistik, tidak hanya sebagai upaya mitigasi iklim, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan sinergi antar program prioritas, dukungan regulasi, dan komitmen anggaran.

3.2.2.7 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebesar 14,65% pada 2024 (BPS), dengan 22% rumah tangga mengalami kerentanan multidimensi, termasuk akses terbatas ke pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan

penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Berbagai kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah. Guna mendukung efektivitas koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dibentuk kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

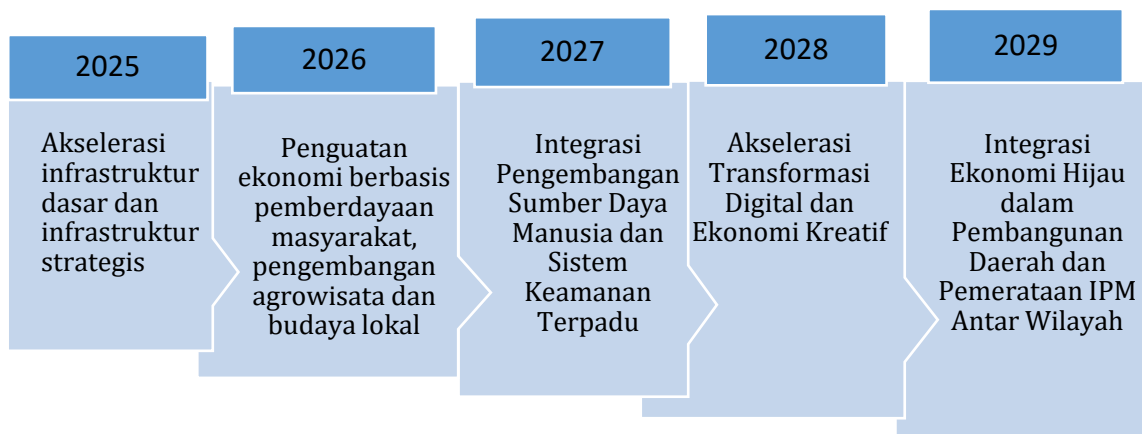
1. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur.
2. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
4. Fasilitasi bantuan untuk menurunkan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan.
5. Fasilitasi bantuan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif.
6. Updating verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/ DTSEN).

3.2.3. ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, tema pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong, meliputi:

1. Akselerasi infrastuktur dasar dan infrastuktur strategis.
2. Penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, pengembangan agrowisata dan budaya lokal.
3. Integrasi pengembangan SDM dan sistem keamanan terpadu.
4. Akselerasi transformasi digital dan ekonomi kreatif.
5. Integrasi ekonomi hijau dalam pembangunan daerah dan pemerataan Indeks Pembangunan Manusia antar wilayah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2025-2029) disajikan pada Gambar berikut ini.



Gambar 3. 1
Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan
Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penahapan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026-2030 adalah :

Tabel 3. 6
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Membangun dasar kelembagaan dan infrastruktur reformasi birokrasi melalui <i>roadmap</i> reformasi birokrasi	Membangun kapasitas pelayan publik melalui penerapan sistem digitalisasi layanan sektor prioritas serta partisipasi masyarakat	Meningkatkan cakupan dan kualitas sistem pelayanan publik	Mengoptimalkan implementasi sistem pelayanan publik serta kualitas tata kelola pemerintahan	Memperkuat sistem manajemen kinerja berbasis hasil serta keberlanjutan reformasi birokrasi
Memetakan dan menyusun fondasi pengembangan Agrowisata dan UMKM Unggulan	Meningkatkan infrastruktur pendukung serta digitasilasi ekonomi lokal	Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan sertifikasi produk unggulan dan destinasi wisata	Memperkuat daya saing produk serta memperluas ekspansi pemasaran produk	Menyusun kebijakan keberlanjutan ekonomi dan daya saing berbasis agrowisata dan UMKM yang berkelanjutan

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menyusun perencanaan strategis yang berbasis kebutuhan infrastruktur dasar	Membangun infrastruktur dasar dan digitalisasi pelayanan dasar	Memperluas cakupan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal serta memperkuat kualitas infrastruktur dasar	Menjamin fungsionalitas dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun	Mengkonsolidasi capaian pembangunan serta evaluasi dampak pelayanan dasar
Menyiapkan peta jalan penguatan stabilitas keamanan lokal dan identifikasi potensi budaya lokal serta sektor ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan UMKM	Mengembangkan infrastruktur dan sarana pendukung pelestarian budaya lokal serta peningkatan keamanan berbasis partisipasi masyarakat	Mendorong sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan event budaya dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM berbasis kearifan lokal	Memperkuat branding dan pemasaran produk ekonomi kreatif serta budaya lokal yang berorientasi ekspor dan pariwisata	Menyusun kebijakan dan regulasi keberlanjutan stabilitas keamanan, pelestarian budaya, dan pengembangan UMKM serta ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan
Menyusun peta jalan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau berbasis potensi lokal	Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan energi terbarukan	Mendorong kolaborasi multipihak dalam konservasi lingkungan	Penguatan tata kelola sumber daya alam dan pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular	Penetapan kebijakan jangka panjang pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau yang inklusif

3.2.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025: Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis sebagai upaya untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur antarwilayah, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta memperkuat dukungan infrastruktur terhadap sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM. Pembangunan infrastruktur dasar meliputi peningkatan kualitas dan cakupan layanan jalan desa, air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak huni, khususnya di wilayah

perdesaan dan daerah terpencil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah.

Sementara itu, pengembangan infrastruktur strategis diarahkan untuk menunjang konektivitas ekonomi dan membuka akses terhadap kawasan pertanian produktif, destinasi wisata unggulan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Termasuk di dalamnya pembangunan jalan penghubung antarkecamatan, revitalisasi pasar tradisional, serta penguatan infrastruktur pendukung logistik dan transportasi. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti sistem informasi pengelolaan jalan dan perencanaan berbasis digital, serta membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta melalui skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan arah kebijakan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat transformasi ekonomi lokal, serta menciptakan pertumbuhan wilayah yang lebih merata dan berdaya saing.

3.2.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026: Penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, pengembangan agrowisata dan budaya lokal

Pada tahun 2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi agrowisata dan pelestarian budaya lokal sebagai pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang kuat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut melalui strategi pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi, BUMDes, kelompok tani, dan UMKM.

Pengembangan agrowisata menjadi fokus penting dalam arah kebijakan ini. Sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata tidak hanya membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Pengembangan kawasan agrowisata yang terpadu dengan infrastruktur pendukung serta promosi digital diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus mengangkat produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya lokal, baik dalam bentuk seni, tradisi, maupun situs sejarah, menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Budaya tidak hanya dijaga sebagai identitas daerah, tetapi juga didorong sebagai aset ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual dan daya tarik wisata. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini

akan melibatkan masyarakat secara aktif melalui program pelatihan, pendampingan, akses permodalan, serta penguatan kapasitas SDM lokal. Pendekatan pembangunan berbasis komunitas akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk membangun ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berbasis potensi lokal, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027: Integrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Keamanan Terpadu

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada integrasi pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penguatan sistem keamanan daerah secara terpadu. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan tangguh, sekaligus menjamin stabilitas sosial sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan keterampilan kerja, serta pengembangan karakter dan etika sosial masyarakat. Fokus diberikan pada upaya peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasi, serta perluasan pelatihan berbasis kompetensi untuk mendorong kemandirian dan daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, pemberdayaan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, penguatan sistem keamanan terpadu dilaksanakan dengan mendorong kolaborasi antara unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan wilayah, pengembangan sistem keamanan lingkungan (siskamling digital), serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan keamanan menjadi bagian dari strategi ini.

Integrasi antara pembangunan SDM dan keamanan diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, bebas dari konflik, kejahatan, maupun radikalisme, sekaligus membentuk masyarakat yang sadar hukum, disiplin, dan partisipatif. Upaya ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Rejang Lebong untuk menjadi daerah yang maju secara sosial-ekonomi dengan landasan ketahanan sosial yang kuat. Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bertekad membangun pondasi masyarakat yang unggul secara kompetensi, serta menciptakan sistem keamanan daerah yang responsif, adaptif, dan berbasis teknologi demi mendukung seluruh sektor pembangunan.

3.2.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2028: Akselerasi Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif

Pada tahun 2028, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong difokuskan pada percepatan transformasi digital di berbagai sektor serta penguatan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan efisiensi layanan publik, daya saing ekonomi daerah, serta pemberdayaan generasi muda dalam menghadapi era digital dan ekonomi berbasis inovasi.

Transformasi digital menjadi strategi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital (e-government), memperluas infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) hingga ke desa-desa, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Upaya ini juga mencakup penguatan kapasitas ASN dan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan akurat.

Sejalan dengan itu, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada penguatan sektor-sektor berbasis ide, inovasi, dan budaya lokal. Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi besar dalam subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, serta digital content (desain grafis, fotografi, animasi). Dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui fasilitasi inkubasi usaha, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan digital, dan promosi melalui platform online.

Integrasi transformasi digital dengan pengembangan ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem inovatif yang membuka peluang kerja baru, khususnya bagi generasi muda. Digitalisasi UMKM, penyediaan marketplace lokal, dan pembentukan pusat kreatif di daerah akan menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis digital dan budaya. Dengan arah kebijakan ini, Kabupaten Rejang Lebong berupaya menciptakan iklim ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberdayakan talenta lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

3.2.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2029: Integrasi Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Daerah dan Pemerataan IPM Antar Wilayah

Pada tahun 2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan arah kebijakan pembangunan yang mengedepankan integrasi prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan daerah, serta mendorong pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penguatan ekonomi hijau dilakukan dengan mempromosikan pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, dan rendah emisi karbon. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemanfaatan energi terbarukan, serta konservasi kawasan hutan dan sumber daya air. Ekonomi hijau juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang mendukung transisi ke arah pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda dalam inisiatif hijau, seperti kewirausahaan hijau (green entrepreneurship), ekowisata, dan edukasi lingkungan hidup. Kebijakan ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring lingkungan, perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan, serta penguatan regulasi daerah yang mendukung investasi hijau.

Di sisi lain, peningkatan dan pemerataan IPM antarwilayah menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa setiap masyarakat di seluruh kecamatan, baik di pusat maupun daerah terpencil, mendapatkan akses setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Strategi yang diambil meliputi peningkatan kualitas layanan dasar, pembangunan infrastruktur sosial secara merata, serta intervensi khusus di wilayah dengan capaian IPM yang masih rendah.

Integrasi antara ekonomi hijau dan pemerataan pembangunan manusia tidak hanya menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan Kabupaten Rejang Lebong dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan wilayah. Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen menciptakan pembangunan yang selaras antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

3.2.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Tata Ruang dan Wilayah.

Berdasarkan Draft Akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2042, terdapat program utama Pembangunan kewilayahan Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :

1. Rencana Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

1.1. Rencana Sistem Perkotaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Sistem perkotaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah penetapan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, dan PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Berdasarkan hasil analisa pusat-pusat pertumbuhan wilayah dalam revisi RTRW Kabupaten Rejang Lebong terjadi perubahan struktur ruang dengan mempertimbangkan kelengkapan sarana prasarana, aksesibilitas dan mobiltas, pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Kecamatan Curup yang berfungsi sebagai pusat perekonomian wilayah di Kabupaten Rejang Lebong. Wilayah yang masuk dalam PKW adalah: Pasar Baru (Kecamatan Curup), Batu Galing (Kecamatan Curup Tengah), Lubuk Ubar (Kecamatan Curup Selatan), Talang Ulu (Kecamatan Curup Timur), Tunas Harapan (Kecamatan Curup Utara).
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal. Berdasarkan RTRW Provinsi dan kajian analisa pusat pusat pertumbuhan wilayah, PKL di kabupaten Rejang Lebong PKL adalah sebagai berikut: PKL Kota Padang, PKL Karang Jaya (Kecamatan Selupu Rejang).
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa juga berfungsi sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah beberapa Ibu Kota Kecamatan, yaitu: Padang Ulak Tanding (Kecamatan Padang Ulak Tanding), Beringin Tiga (Kecamatan Sindang Kelingi), Babakan Baru (Kecamatan Bermani Ulu Raya), Bengko (Kecamatan Sindang Dataran), Lubuk Alai (Kecamatan Sindang Beliti Ulu), Lubuk Belimbing (Kecamatan Sindang Beliti Ilir), Kampung Melayu (Kecamatan Bermani Ulu), Kepala Curup (Kecamatan Binduriang).
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu: Bangun Jaya (Bermani Ulu Raya), Air Pikat (Bermani Ulu), Sentral Baru (Bermani Ulu), Air Lanang (Curup Selatan), Belumai I (Padang Ulak tanding), Blitar (Sindang Kelingi), Tanjung Agung (Sindang Beliti Ulu).

1.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

A. Sistem Jaringan Jalan

a) Jaringan Jalan Nasional

Jaringan Arteri Primer (JAP) meliputi Jalan Thamrin dengan panjang 0,90 km (JAP), Jalan Merdeka dengan panjang 1,40 km (JAP), Jalan A.Yani dengan panjang 0,96 km (JAP), Jalan Curup - Simpang Nangka dengan panjang 5,20 km (JAP), Simpang Nangka - Perbatasan Sumsel dengan panjang 43,27 km (JAP), Jalan Arteri Primer (JAP) yang melintasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini merupakan bagian dari Jalan Lintas Barat Sumatera), yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan)

Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu SP.Taba Mulan - SP Nangka dengan panjang 12,46 km

Jalan Bebas Hambatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong adalah Jalan Bebas Hambatan Lubuk Linggau-Curup - Bengkulu. Jalan Bebas Hambatan diarahkan adanya pintu tol di wilayah Rejang Lebong. Jalur yang terdekat dengan Jalan Arteri Primer ada di wilayah Kecamatan Binduriang

b) Jaringan Jalan Provinsi

Di wilayah Kabupaten Rejang Lebong panjang jalan provinsi 118.550 Km dengan rincian sebagai berikut:

Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3) yang berlokasi pada ruas Jalan Curup-Air Dingin sepanjang 21.3 km

Jalan Jalan Lokal Primer yaitu ruas Jalan Bukit Kaba sepanjang 6.90 km, Ruas Jalan Beringin III - Bengko sepanjang 22 km, Ruas Jalan Air lanang - Desa Apur Sepanjang 13.2 km, Ruas Jalan Palak Curup - SP III karang Baru sepanjang 19.7 km dan Ruas Jalan PUT-Kota Padang-Derati-Tanjung Enim sepanjang 35.4 km.

Rencana Pengembangan Jalan Provinsi menjadi **Jalan Kolektor** berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yaitu rute PGE Lebong - Transad- Sentral Baru - Barumanis - Air Pikat - Tebat Tenong dalam - Tanjung Dalam- Air Lanang- Bengkulu Tengah. Rencana jalan provinsi ini sepanjang sekitar 28 Km

c) Jaringan Jalan Kabupaten

Rencana peningkatan Jalan Lingkar Utara dalam Kota Curup menjadi **Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4)** yang berlokasi di ruas Jalan Simpang Nanka - Seguring - Kota Pagu - Tanjung Berigin – Pahlawan (11.04 Km).

Rencana peningkatan Jalan Lokal Primer menjadi **Jalan Kolektor Sekunder (JKS)** yang berlokasi pada ruas jalan Simpang Pungguk Lalang - Air Lanang (7.43 Km), ruas Jalan Lawang Agung - Air Nau - Air Rusa - Jalan Kolektor Empat Suku Menanti (14.21 Km), ruas Jalan Bengko (PPK) - Warung Pojok -Sinar Gunung (14.77 km), ruas Jalan Sentral Baru – Kampung Sajad - Air Mundu - Baru Manis - Air Pikat - Tebat Tenong Dalam - Tebat Pulau - Dusun Sawah - Batu Panco - Perbo - Tunas Harapan (21.38 Km) dan ruas jalan Simpang Karang Jaya (PKW) - Air Dingin (8.68 Km).

Rencana peningkatan Jalan Lain / Lokal Sekunder menjadi **Jalan Lokal Primer** berlokasi pada ruas Jalan Tebat Pulau - Tanjung Dalam (7.83 km), ruas Jalan Jalan Kolektor Primer -Ruas Jalan Tebat Pulau Menuju Tanjung Dalam (3.06 Km), ruas Jalan Simpang Pusat Kecamatan Curup Utara (0.7 Km), ruas Jalan Pusat Kecamatan Curup Utara - Jalan Lokal Primer (0,25 Km), ruas Jalan Tunas Harapan (PKW) - Pusat Kecamatan Bermani Ulu (1.46 Km) dan ruas Jalan Sinar Gunung --> Air Nau (1.17 km)

Rencana peningkatan Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder yang berlokasi di ruas jalan Air Bang - Air Merah - Teladan - Durian Depun (7.42 Km).

d) Jalan Desa

Dengan telah terhubungkannya semua pusat kegiatan/pusat pelayanan (PKW, PPK, dan PPL) dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong oleh Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten, maka untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tidak ditetapkan Jalan Desa yang akan ikut membentuk struktur ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

B. Terminal

a) Terminal Penumpang

Pengembang terminal di Kabupaten Rejang Lebong :

- 1) Terminal penumpang, yang terdiri atas: Terminal tipe A terdapat di Simpang Nangka, Terminal tipe C terdapat di Tabarenah.
- 2) Terminal barang terdapat di Simpang Nangka

b) Jembatan Timbang

Jembatan Timbang di dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding. Jembatan timbang tersebut terletak di tepi jalan nasional.

C. Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian meliputi :

- a) Jaringan Jalan Rel Kereta Api yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan - Bengkulu melalui Kota Padang.
- b) Pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Kereta Api di Kota Padang. Stasiun kereta api yang dikembangkan sesuai dengan RTRW provinsi adalah: Stasiun Kereta Api Kota Padang dan Stasiun Kereta Api Kepala Curup

1.3. Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Rejang Lebong

Kawasan prioritas pengembangan/peningkatan pelayanan sistem prasarana energi listrik Kabupaten Rejang Lebong adalah:

- 1) Pusat-pusat aktifitas di sepanjang jalur Jalan provinsi.
- 2) Pusat-pusat Pengembangan Wilayah.
- 3) Sub-sub Pusat Pengembangan Wilayah.
- 4) Kawasan Permukiman. Kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa dan kawasan strategis lainnya.
- 5) Daerah-daerah desa terpencil yang belum masuk aliran listrik

A. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan termuat dalam Revisi RTRW Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a) penyediaan energi listrik di Kabupaten Rejang Lebong disediakan oleh PLTA Musi dengan kapasitas 210 MW dan PLTA Tes dengan kapasitas 17.2 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kepala Curup. Rencana pengembangan prasarana pembangkit listrik selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah memanfaatkan potensi sumber energi PLTA Musi dan PLTA Tes;
- b) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang terletak di Hulu Lais, Bukit Daun, Bermani Ulu Raya, Rejang Lebong

B. Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik

Rencana pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik atau transmisi tenaga listrik yang terkait atau melewati wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi RTRW Provinsi meliputi pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang jalur SUTT sebagai berikut:

- a) Jalur Bermani Ulu Raya - Curup dengan kapasitas 70 kilo volt (KV)
- b) Jalur Curup - Kepahiang dengan kapasitas 70 kilo volt (KV)
- c) Jalur Curup - Padang Ulak Tanding dengan kapasitas 150 kilo volt (KV)

C. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong direncanakan akan menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di Kabupaten Rejang Lebong, baik untuk penggunaan domestik (rumah tangga), fasilitas sosial, maupun niaga atau komersial; dengan saluran yang meliputi: saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR), saluran kabel tegangan menengah (SKTM), dan/atau saluran lainnya

1.4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Rejang Lebong

Pengembangan jaringan tetap telepon di Kabupaten Rejang Lebong berupa pengembangan jaringan bergerak:

- a) Pengembangan jaringan nirkabel berupa layanan berbasis internet untuk kepentingan pelayanan umum menjangkau PKW, PPK, dan PPL; Masih banyak desa-desa yang belum mendapatkan jaringan internet, baru 47 desa terlayani internet masih 109 desa yang perlu mendapatkan layanan internet
- b) Pengembangan menara telepon seluler atau Base Transciever Station (BTS) bersama tersebar di kecamatan. Titik BTS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong 92 unit, tetapi yang telah berjalan 54 titik BTS. Sehingga ke depan perlu pembangunan BTS yang sudah diarahakan lokasinya. Untuk lebih jelasnya jaringan BTS.

1.5. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Rejang Lebong

A. Sistem Wilayah Sungai

Sesuai dengan Revisi RTRW Provinsi Bengkulu Sistem jaringan wilayah sungai di Kabupaten Rejang Lebong yaitu pengelolaan Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyu Asin (Wilayah Sungai Lintas Provinsi-Kewenangan Pemerintah Pusat) yang mencakup wilayah aliran Sungai DAS Musi, DAS Lemau, DAS Palik dan DAS Ketahun.

B. Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 meliputi:

- a) Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi, meliputi daerah irigasi Air Musi Kejalo dengan luasan ± 1.180 ha; dan daerah irigasi Air Daup seluas 9 Ha.
- b) Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi 86 daerah irigasi dengan luasan total ± 8.173 ha

C. Sistem Pengendali Banjir

Banjir sering terjadi di wilayah kabupaten Rejang Lebong, hal ini disebabkan sudah terjadi kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai bagian hulu, sehingga perlu pengendalian pemanfaatan ruang di daerah hulu sungai. Terutama sungai hulu sungai mus, hulu sungai air putih dan hulu sungai air duku, dimana aliran sungai-sungai tersebut melintasi permukiman penduduk.

D. Sistem Pengelolaan Air Baku Untuk Air Bersih

Rencana pengelolaan sumber air baku di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya :

1. Kecamatan Curup dengan Lokasi Sungai Air Musi, Mata Air Embun, Mata Air Simpang macang dan Mata Air Desa Air Merah.
2. Kecamatan Bermani Ulu dengan Lokasi MA Air Mundu. MA Nipis-1, MA Nipis-2, MA Nipis-3.
3. Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan Lokasi MA Lawang Agung.
4. Kecamatan Kota Padang dengan Lokasi Sungai Sange.
5. Kecamatan Sindang Kelingi dengan Lokasi Sungai Kelingi dan MA Cahaya Negeri.
6. Kecamatan Selupu Rejang dengan Lokasi Sungai Lirik Kecil/Bukit Kelam.

1.6. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

A. Prasarana Air Minum

Sistem penyediaan air minum bagi masyarakat dapat dikembangkan menjadi dua pendekatan utama, yaitu Sistem Perpipaan dan Sistem Non Perpipaan. Sistem Perpipaan diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu: yang dikelola PDAM dan Non PDAM. Di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, SPAM Perpipaan yang di kelola PDAM memiliki sembilan unit sistem yaitu: Unit Kota Curup, Padang Ulak Tanding, Blitar, Selupu Rejang, Kota Padang, BTN Depag, Batu Ampar, Kampung Delima, dan Kampung Melayu. Akan tetapi karena

terkait dengan Nomenklatur dan Kewenangan penanganan, pembahasan SPAM dibagi menjadi SPAM Ibukota Kabupaten dan SPAM Ibukota Kecamatan.

SPAM Kabupaten dibagi menjadi 5 wilayah pelayanan (zone) yaitu Wilayah Pelayanan I yang melayani sebagian Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya; Wilayah Pelayanan II yang melayani ibukota Kabupaten Rejang Lebong, daerah tersebut berbatasan dengan atau sebagian dengan kecamatan lainnya; Wilayah Pelayanan III yang melayani Sindang Kelingi, sindang dataran dan sebagian Selupu Rejang dan Binduriang; Wilayah Pelayanan IV yang melayani Sebagian Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Beliti Ulu, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Wilayah Pelayanan V yang melayani sebagian Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Kecamatan Kota Padang.

B. Prasarana Pengelolaan Persampahan

Pengembangan sistem pengelolaan prasarana persampahan di Kabupaten Rejang Lebong meliputi:

- a) Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota
Optimalisasi TPA Jambu Keling, Rencana Pembangunan TPA di wilayah Padang Ulak Tanding atau Binduriang, Pengadaan sarana pengangkutan sampah
- b) Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan
Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara dengan sistem 3R (Reduce - Reuse - Recycle) yang berlokasi di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

C. Prasarana Pengelolaan Limbah

Pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolahan air limbah di Kabupaten Rejang Lebong meliputi:

- a) Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat skala Kota diarahakan di kawasan Kota Curup
- b) Sistem Pengolahan Limbah Domestik Setempat Skala Kota Peningkatan dan optimalisasi IPLT Tasik Malaya
- c) Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan untuk pembangunan IPAL Komunal di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

D. Prasarana Pengelolaan Drainase

Rencana pengembangan prasarana drainase sebagai diantaranya Pengendalian pola aliran sesuai dengan kondisi topografi, Pengembangan jaringan drainase primer mengikuti jaringan jalan Arteri Primer dan drainase sekunder mengikuti jaringan jalan kolektor, Identifikasi kebutuhan pembuatan saluran sudetan untuk membenahi pola aliran, Normalisasi sungai - sungai dan saluran drainase, Pengendalian fungsi bantaran sungai meliputi penetapan garis sempadan sungai dan saluran, Pembangunan tandon air ataupun

sumur resapan untuk mendukung sistem prasarana drainase, Penataan sistem penyaluran air hujan, Pembagian daerah pelayanan drainase serta optimasi sistem drainase dalam bentuk penyusunan Master Plan Drainase Wilayah Perkotaan.

E. Prasarana Jalur Evakuasi Bencana

Jalur evaluasi meliputi rencana titik lokasi terdiri dari lokasi **titik kumpul** yang berada di setiap kelurahan untuk mempermudah proses evakuasi dan lokasi **ruang evakuasi** berada jauh dari pusat bencana seperti ruang luar di sekitar Lubuk Belimbing, Lubuk Alai. Beringin Tiga, Kota Curup dan Kawasan TNKS. Jalur Evaluasi selanjutnya adalah rencana jalur evakuasi mengikuti jalur jalan utama eksisting yang telah ada menuju lokasi ruang evakuasi.

2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

2.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

2.1.1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya

1) Kawasan Hutan Lindung

Pengembangan kawasan ini diarahkan pada fungsi perlindungan wilayah atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis sebagai kawasan konservasi serta resapan air. Di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, secara aktual fungsi sebagai kawasan resapan air ini dilakukan oleh kawasan lindung (Hutan Lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan hutan berfungsi lindung lainnya). Kawasan Hutan Lindung (HL), yang didelineasikan dengan luas kurang lebih 19.949,78 Ha yang sebarannya terletak di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ulu Raya (1,91 Ha), Kecamatan Bermani Ulu (3.402,51 Ha), Kecamatan Curup Selatan (546,40 Ha), Kecamatan Kota Padang (6.074,43 Ha), Kecamatan Sindang Beliti Ilir (6.693,02 Ha), Kecamatan Sindang Beliti Ulu (3.061,49 Ha) dan Kecamatan Sindang dataran (170,03 Ha).

2) Kawasan Resapan Air

Kawasan Resapan Air di Kabupaten Rejang Lebong diindikasikan secara normatif yaitu kawasan kawasan hutan, yang meliputi baik hutan yang merupakan kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional, Suaka Margasatwa,) maupun kawasan budidaya (yang meliputi Hutan Produksi dan Hutan Rakyat). Selain itu, dengan karakternya yang bervegetasi, maka secara normatif kawasan budidaya bervegetasi (perkebunan yang terdiri atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar) juga berfungsi sebagai resapan air.

2.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Luas wilayah sempadan sungai di Kabupaten Rejang Lebong 7.279,12 Ha. Wilayah sempadan sungai tersebar di setiap kecamatan. Rencana penetapan kawasan sekitar Danau/Situ/Waduk di Kabupaten Rejang Lebong adalah seluas 60,14 hektar dengan sebaran sebagai berikut Danau Mas Harun Bestari di Kecamatan Selupu Rejang, Danau Talang Kering Kecamatan Bermani Ulu dan Danau Air Panas Sindang Jati di Kecamatan Sindang Kelingi.

2.1.3. Kawasan Konservasi

A. Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong Kawasan Cagar Alam yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong meliputi Cagar Alam Talang Ulu 1 dan Cagar Alam Talang Ulu 2. Luas Cagar Alam 0,60 Ha.

B. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Pelestarian Alam di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a) Taman Nasional Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di Kabupaten Rejang Lebong seluas 28. 868,3Ha. Taman Nasional Kerinci Sebelat tersebar di Kecamatan Bermani Ulu raya, Curup Utara, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Padang Ulak Tanding (PUT)
- b) Taman Wisata Alam Bukit Kaba seluas 4.450,88 hektar yang berada di Sindang Dataran, Selupu Rejang dan Curup Tengah

2.1.4. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, bencana gempa bumi, longsor dan lain-lain. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan potensi bencana alam diantaranya :

- a) Kawasan rawan tanah longsor yang tersebar di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang serta pada tebing-tebing sepanjang jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, sindang Kelingi dan Binduriang. Disamping itu, potensi terjadinya gerakan tanah juga terdapat di wilayah Kecamatan Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya, yaitu pada tebing-tebing relatif terjal yang ada di lembah-lembah sungai dan sepanjang jalan raya. Kegiatan penambangan bahan galian (pasir dan batu) di Kecamatan Curup Selatan dan Curup Utara juga beresiko tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah bila tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian secara intensif

- b) Kawasan rawan banjir yang tersebar di Kecamatan Padang UlakTanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Kota Padang, selupu Rejang dan Bermani Ulu

2.1.5 Kawasan Cagar Budaya

Cagar Budaya, yang tidak didelineasikan dalam peta pola ruang tetapi diindikasikan letak sebarannya, yaitu meliputi:

- a) Situs Suban Air Panas yang berada di Kecamatan Curup Timur.
- b) Situs Batu Dewa, Situs Batu Panco, Situs Batu Perbo dan Situs Tabarenah yang berada di Kecamatan Curup Utara
- c) Situs Karang Baru dan Situs Bukit Kute Giri yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- d) Situs Budaya Punyung Butew Cawang Lekat di Kecamatan Curup Timur

2.1.6. Kawasan Lindung Geologi

Penetapan kawasan lindung geologi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi tanah dan batuan yang terkandung di dalam perut bumi yang menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan di atasnya. Kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap tanah dan batuan. Kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan gunung api dan gerakan tanah. Kawasan rawan gunung api Bukit Kaba yang tersebar di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang

2.1.7. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Rejang Lebong bertujuan sebagai perlindungan terhadap taman wisata alam yang dapat berfungsi sebagai Pengembangan Pendidikan dan Pariwisata.

2.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Budidaya

2.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong, adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Basa yang berada di sekitar Curup Utara seluas kurang lebih 125, 36 hektar. Direkomendasi HPT Bukit Basah menjadi APL tetapi sampai Tahun 2020 belum ada rekomendasi menjadi APL oleh kementerian kehutanan

2.2.2. Kawasan Hutan Rakyat (Hutan Adat)

Di Kabupaten Rejang Lebong terdapat rencana hutan adat, tetapi kawasan hutan adat belum mendapat penetapan dari kementerian kehutanan.

2.2.3. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: kawasan pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman buah-buahan dan kawasan Perkebunan.

A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

1. Tanaman Pangan (LP2B)

Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri tanaman pangan lahan basah (padi), tanaman Hortikultura dan buah-buahan. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagian potensial untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Lahan Pangan berkelanjutan (LP2B) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kabupateng Rejang Lebong seluas 12821,27 Ha.

Luas lahan LP2B di Kabupaten Rejang Lebong tersebut meliputi lahan pertanian lahan kering (tegalan/ladang) dan lahan sawah. Luas lahan LP2B yang sudah teridentifikasi seluas 5.554,43 Ha. LP2B terluas di Kecamatan Bermani Ulu Raya seluas 1.186, 5 Ha, Bermani Ulu 700, 4 Ha, Curup Utara 951,6 Ha, Curup Selatan 523,7 Ha dan Selupu Rejang 504, 9 ha. Sedangkan luas Kecamatan lainnya kurang dari 500 Ha. Selain itu ada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang potensial yang terletak dalam kawasan pertanian tanaman pangan. Sebagai tanaman selingan di lahan LP2B petani menanam tanaman palwija sebagai selingan.

2. Tanaman pertanian Holtikultura

Rencana pengembangan Komoditas Tanaman holtikultura di Kabupaten Rejang berdasarkan hasil analisa potensial dikembangkan di Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang dataran, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Rencana Luas kawasan pengembangan holtikultura seluas 4.462,34 Ha. Terdapat beberapa komoditas unggulan tanaman palawija dan holtikultura yang akan dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Rejang lebong. Komoditas tersebut antara lain:

- a) Komoditas tanaman jagung diarahkan di kecamatan Bermani Ulu, Curup Utara, Sindang Kelingi, Curup Selatan, Sindang Dataran, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Beliti Ilir, Padang Ulak tanding, Kota Padang, Curup Tengah dan Curup Timur
- b) Komoditas tanaman cabai ditetapkan lima kawasan sebagai kawasan pengembangan cabai di Kabupaten Rejang Lebong yaitu:Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang dataran, Bermani Ulu dan Curup Timur

- c) Komoditas tanaman bawang merah di arahkan 5 kecamatan yaitu: Selupu Rejang, Sindang kelingi, Sindang dataran, Bermani Ulu, dan Bermani Ulu raya
- d) Komoditas tanaman obat dan rempah di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti ilir, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang
- 3. Tanaman Florikultura Kabupaten Rejang Lebong potensial dikembangkan tanaman Florikultura. Tanaman florikultura merupakan suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan, keasrian dan kenyamanan di dalam ruang tertutup dan/atau terbuka. Budidaya tanaman florikultura adalah semua kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen florikultura. Arah pengembangan tanaman florikultura di Kecamatan Selupu Rejang dan Sindang Kelingi
- 4. Tanaman Buah-buahan Rencana pengembangan tanaman buahan-buahan berdasarkan kajian analisa diarahkan di Kecamatan Bermani Ulu Raya, Bermani Ulu, Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Sindang Dataran. Rencana pengembangan komoditas tanaman buah-buahan sekitar 2. 665,18 Ha. Arah pengembangan Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di Kabupaten Rejang Lebong membentuk kawasan komoditas antara lain:
 - a) Kawasan Komoditas Tanaman Jeruk diarahkan di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Sindang Dataran
 - b) Kawasan Komoditas Tanaman Apel di Kecamatan Sindang Dataran dan sekitarnya
 - c) Kawasan Komoditas Tanaman Durian di Kecamatan PU.Tanding, Kota Padang, Sindang Beliti Ulu dan Sindang Beliti Ilir
 - d) Kawasan Komoditas Tanaman Alpukat di arahkan di Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Bermani Ulu
 - e) Kawasan Komoditas Tanaman Manggis di arahkan di Kecamatan Sindang Kelingi dan Kota Padang
 - f) Kawasan Komoditas Tanaman Pisang Ambon di Kecamatan Curup Timur, Curup selatan, Curup Utara, Curup Tengah.

Berdasarkan potensi dan arah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan maka perlu diarahkan pembentukan kawasan agropolitan baru di Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya.

2.2.4. Kawasan Perkebunan

Kabupaten Rejang Lebong sangat potensial pengembangan perkebunan. Rencana luas lahan tanaman perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong seluas 47.046,37 Ha. Komoditas unggulan tanaman perkebunan adalah kopi, aren, karet dan sawit. Adapun arahan pengembangan kawasan komoditas unggulan sebagai berikut:

- a) Komoditas Tanaman Kopi di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan di kecamatan Sindang Dataran, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Binduriang, Curup Utara dan Curup Selatan
- b) Komoditas Tanaman Aren di arahkan di Kecamatan Sindang Kelingi, Sindang dataran, Selupu Rejang, Binduriang, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya
- c) Komoditas Tanaman Karet dan Kelapa Sawit diarahkan di Kecamatan Padang Ulak tanding, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu dan Kota Padang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.347.VII Tahun 2017 tentang penetapan lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan Kopi Kabupaten Rejang lebong. Lokasi Kampung Kopi di Kabupaten Rejang lebong sesuai dengan SK Bupati adalah sebagai berikut:

- a) Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran (Pusat Kawasan)
- b) Desa Bengko Kecamatan Sindang dataran
- c) Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran
- d) Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi
- e) Desa Air Dingin Kecamatan Sindang Kelingi

Dengan adanya Kampung Kopi selain peningkatan produktivitas tanaman, kegiatan Agro wisata dapat berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.2.5. Kawasan Peternakan

Kawasan yang diperuntukan bagi peternakan dan atau padang penggembalaan ternak untuk berbagai jenis hewan ternak. Berbagai jenis ternak telah dikembangkan oleh masyarakat, yang terdiri dari ternak besar dan ternak kecil. Jenis ternak besar yang dikembangkan umumnya adalah kerbau dan sapi. Sedangkan jenis ternak kecil yang dikembangkan antara lain kambing, domba, dan unggas. Pengembangan peternakan di Kabupaten Rejang Lebong terintegrasi dengan pengembangan pertanian lainnya. Limbah pertanian yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura dapat difungsikan sebagai Hijauan Pakan Ternak (HPT). Biji bijian produksi pertanian juga dapat dijadikan untuk pakan unggas.

2.2.6. Kawasan Perikanan

Jenis kegiatan perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Rejang Lebong berupa kolam air deras, kolam air tenang, kolam terpal/fiber dan jaring apung. Berdasarkan analisis pengembangan perikanan potensial di Kecamatan:

- a) Kolam air deras potensi di Kecamatan Binduriang dan Kota Padang
- b) Kolam air tenang di Kecamatan Curup, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah Kota Padang, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya dan Padang Ulak Tanding
- c) Kolam Terpal potensi di Kecamatan Curup, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak tanding dan Selupu Rejang
- d) Jaring Apung potensi di Kecamatan Curup Utara

Berdasarkan kondisi eksisting dan sarana penunjang maka pengembangan kawasan perikanan di arahkan di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Binduriang dan Kota Padang dengan pusat di Desa Blumai. Untuk mengoptimalkan kegiatan perikanan diarahkan dibentuk Kawasan Minapolitan di Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan pusat di Desa Blumai.

2.2.7. Kawasan Pertambangan

- a) Pertambangan mineral.

Pertambangan mineral salah satunya adalah tambang batuan. Berdasarkan peta wilayah usaha pertambangan (WUP) untuk pertambangan mineral batuan hampir disetiap kecamatan potensi tambang mineral batuan. Arahkan kawasan pertambangan mineral batuan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut Kecamatan Bermani Ulu Raya, Bermani Ulu, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Sindang Beliti Ulu dan Kecamatan Sindang Dataran.

- b) Pertambangan Batubara.

Berdasarkan peta wilayah usaha pertambangan (WUP) untuk pertambangan batubara dan RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, potensi pertambangan batubara dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Curup Utara Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Selupu Rejang.

2.2.8. Kawasan Industri

Kegiatan Industri di Kabupaten Rejang Lebong secara umum masih masuk dalam kategori industri kecil rumah tangga. Jenis industri kecil yang berkembang cukup bervariasi, sebagian besar jenis industri yang berkembang industri makanan.

Berdasarkan SK Bupati Rejang Lebong Nomor 180.171.1V Tahun 2018 tentang “Penetapan Sentra Industri Kecil Menengah Gula Aren dan IKM Pengolahan Biji Kopi Menjadi Bubuk Kopi dan Sentra Makanan Ringan di Kabupaten Rejang Lebong”. Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan sebagai berikut:

- a) Sentra Industri Kecil dan Menengah Gula Aren di Kecamatan Selupu Rejang
- b) Sentra Industri Kecil dan Menengah Gula Aren di Kecamatan Sindang Kelingi
- c) Sentra Industri Kecil dan Menengah Bubuk Kopi di Kecamatan Sindang Dataran
- d) Sentra Industri Kecil dan Menengah Makanan Ringan di Kecamatan Curup Tengah

Wilayah pendukung kegiatan industri ini semua kecamatan diluar kecamatan sentra industri. Adapun Arah Program Pengembangan Perwilayahan Industri di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Rejang Lebong.

2.2.9. Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong meliputi :

- a) Kawasan wisata alam
Kecamatan Bermani Ulu Raya, Bermani Ulu, Curup Utara, Curup Selatan, Sindang Dataran, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang
- b) Kawasan wisata budaya
Kecamatan Bermani Ulu, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Curup
- c) Kawasan wisata buatan
Kecamatan Bermani Ulu, Curup Utara, Curup Timur, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Padang Ulak Tanding

2.2.10. Kawasan Permukiman

Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rejang Lebong seluas 15.066,51 Ha yang meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Beberapa fasilitas umum yang mendukung kawasan permukiman di Kabupaten Rejang lebong antara lain:

- a) Rumah Sakit Umum di Kecamatan Curup Selatan
- b) Kantor Palang Merah Indonsia (PMI) di Kecamatan Bermnai Ulu
- c) Gedung olah raga (spot centere) di Kecamatan Bermani Ulu Raya
- d) Perguruan Tinggi di Kecamatan Curup dan Curup Tengah

2.2.11. Kawasan Permukiman Perkotaan (PK)

Kawasan permukiman perkotaan di Kabpaten Rejang Lebong ditetapkan di kawasan Kota Curup. Luas Kawasan 2.800,56 Ha yang meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan

Curup, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan dan Kecamatan Curup Utara.

2.2.12. Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)

Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Rejang Lebong yang terdelineasi dalam peta rencana pola ruang dengan luas total kurang lebih 12.265,95 Ha dengan sebarannya terletak di 10 kecamatan (diluar 5 Kecamatan dalam wilayah Curup).

2.1.13. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :

- a) Komando Distrik Militer (KODIM) 0409/Rejang Lebong di Kecamatan Curup
- b) Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- c) Lapangan Tembak senjata ringan di simpang Bukit Kaba Kecamatan Selupu Rejang
- d) Yonif 144 / Jaya Yudha di Kecamatan Curup Selatan
- e) Daerah latihan di Simpang Bukit Kaba Kecamatan Selupu Rejang
- f) Brigade Infanteri (Brigrif) Kodam II Sri Wijaya yang terletak di Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

3.2.3.7 Arah Kebijakan 2025-2029 - Menuju pertumbuhan daerah yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Dalam periode pembangunan tahun 2025 hingga 2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan arah kebijakan yang terintegrasi dan progresif untuk mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. Lima tahun ke depan menjadi momentum penting bagi Rejang Lebong untuk memperkuat fondasi pembangunan melalui akselerasi infrastruktur, transformasi digital, pemberdayaan ekonomi lokal, serta integrasi pendekatan hijau dan pembangunan manusia.

Melalui tahapan arah kebijakan yang terstruktur dari tahun 2025 hingga 2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk membangun daerah yang maju infrastrukturnya, kuat SDM-nya, unggul ekonominya, kreatif inovasinya, dan berkelanjutan lingkungannya. Setiap tahapan kebijakan saling terintegrasi dalam membentuk fondasi pembangunan jangka panjang yang berpihak pada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan sosial dan ekologis.

Penyusunan arah kebijakan tahunan RPJMD diselaraskan secara langsung dengan misi kepala daerah, guna memastikan konsistensi antara visi kepemimpinan dan langkah strategis pembangunan. Penyandingan ini menjadi dasar integratif agar setiap kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tujuan pembangunan secara terarah dan berkelanjutan. Penyandingan misi dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun

2025–2029 bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi kepemimpinan daerah dan pelaksanaan pembangunan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan agar setiap strategi dan kebijakan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat, responsif terhadap tantangan daerah, serta mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah secara efektif dan menyeluruh. Berikut tabel arah kebijakan untuk setiap misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3.7
Arah Kebijakan setiap Misi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025-2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.	Memperkuat reformasi birokrasi yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan tata kelola pemerintahan	
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah.	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja produktif	
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah	Membangun dan mengembangkan infrastruktur dasar secara merata, berkelanjutan, dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta aksesibilitas publik.	
4.	Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah	Mendorong penguatan keamanan, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi pelayanan publik secara inklusif dan berkelanjutan.	
5.	Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	Mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan berbasis tata kelola lingkungan dan potensi lokal	

3.2.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN JANJI KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam periode jangka menengah ke depan dipresentasikan dalam visi dan dijabarkan dalam misi dan selanjutnya dalam sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan jangka menengah dimaksud harus sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dan prioritas pembangunan nasional mengingat bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka pembangunan Provinsi dan pembangunan nasional. Demikian pula bahwa perlu adanya sinergitas antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045.

3.2.4.1 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan I : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berkarakter

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang maju, mandiri, berakhlak, dan berkelanjutan. Fokus utama pembangunan SDM adalah menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual dan keterampilan, tetapi juga berkarakter kuat, beretika, serta memiliki jiwa inklusif yang mampu hidup harmonis dalam keberagaman.

Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai program strategis, antara lain: peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, pengembangan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral dan budaya lokal, serta peningkatan layanan kesehatan terutama bagi ibu dan anak guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, pembangunan SDM inklusif menjadi prioritas dengan memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan layanan sosial yang layak.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional. Pengembangan teknologi pendidikan dan digitalisasi layanan juga menjadi bagian integral untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
 - 1) Beasiswa pendidikan vokasi dan tinggi
 - 2) Sekolah digital dan pelatihan guru daerah
- b. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat
 - 1) Penurunan stunting dan layanan posyandu aktif
 - 2) Mobil kesehatan desa terpencil
- c. Penguatan Pendidikan Karakter dan Moderasi Beragama
 - 1) Pesantren kilat sekolah, sekolah ramah anak, forum pemuda berakhlak

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tercipta SDM Kabupaten Rejang Lebong yang mampu bersaing secara nasional dan global, berintegritas, serta mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

2. Prioritas Pembangunan II : Penguatan Ekonomi Lokal Mandiri melalui UMKM, Pertanian dan Ekonomi Kreatif

Penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas strategis dalam upaya mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang mandiri dan berkelanjutan. Fokus pembangunan diarahkan pada pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pemasaran produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jaringan bisnis. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat tumbuh kuat, inovatif, dan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.

Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi hasil pertanian, dan pengembangan hilirisasi produk. Pengembangan pertanian berkelanjutan juga ditekankan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim.

Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan sebagai upaya menggali potensi budaya dan sumber daya lokal yang unik. Hal ini tidak hanya memperkaya nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas daerah serta membuka peluang baru bagi pemuda dan pelaku kreatif dalam menciptakan inovasi dan produk unggulan. Hal ini juga didukung dengan sektor pendukung utama yaitu pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, sarana prasarana dan event pariwisata daerah.

Selain itu, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional *Pariwisata Ramah Muslim* (PRM). Urgensi penguatan PRM didasarkan pada data *Global Muslim Tourism Index* (GMTI) tahun 2023 yang menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat ke-5 dunia, menurun dari posisi 1 pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai daerah yang memiliki potensi destinasi wisata alam, budaya, dan kuliner yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, Kabupaten Rejang Lebong memandang penting untuk mengintegrasikan pengembangan PRM dalam dokumen perencanaan daerah. Upaya ini meliputi:

1. Penyediaan fasilitas ibadah yang memadai di destinasi wisata.
2. Pengembangan paket wisata berbasis nilai-nilai halal dan keberlanjutan.
3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha wisata dalam layanan ramah muslim.
4. Promosi destinasi wisata Rejang Lebong melalui jejaring pariwisata muslim nasional dan internasional.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi dan Pasar Digital
 - 1) Pelatihan bisnis digital dan inkubator UMKM
 - 2) Kredit mikro dan fasilitasi sertifikasi produk
- b. Penguatan Pertanian dan Hilirisasi Produk Unggulan
 - 1) Modernisasi alat pertanian dan irigasi mikro
 - 2) Pabrik olahan hasil kebun/pertanian rakyat
- c. Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Muda
 - 1) Festival ekonomi kreatif tahunan, digital art, kerajinan lokal
 - 2) Eduwisata kreatif di desa budaya

Melalui sinergi antara UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang mandiri, inklusif, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta pengentasan kemiskinan.

3. Prioritas Pembangunan III : Pembangunan Infrastruktur dan Digitalisasi Layanan Publik

Pembangunan infrastruktur dan digitalisasi layanan publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Rejang Lebong menempatkan agenda ini sebagai prioritas strategis guna memperkuat

konektivitas wilayah, menjawab kesenjangan pelayanan dasar, dan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan efisien.

Di bidang infrastruktur fisik, pembangunan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan jalan strategis, jembatan penghubung antar wilayah, irigasi pertanian, serta akses air bersih dan sanitasi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung mobilitas barang dan orang, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak.

Sementara itu, di sektor digitalisasi, Pemerintah Daerah mendorong transformasi layanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan infrastruktur digital hingga ke tingkat desa, serta pengembangan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya bertujuan mempercepat layanan, tetapi juga untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Air
 - 1) Peningkatan jalan usaha tani dan irigasi teknis
 - 2) Air bersih berbasis komunitas dan sanitasi sehat
- b. Program Digitalisasi Layanan Publik Terintegrasi
 - 1) Sistem Pelayanan Terpadu Online (SPTO)
 - 2) Pusat Layanan Digital Kecamatan
- c. Program Infrastruktur Digital dan Komunikasi Desa
 - 1) Penyediaan BTS dan WiFi publik di desa blank spot

Melalui pendekatan terpadu antara pembangunan infrastruktur fisik dan digital, Kabupaten Rejang Lebong diharapkan mampu meningkatkan daya saing wilayah, memperluas inklusi layanan publik, serta membangun sistem pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

4. Prioritas Pembangunan IV : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Melayani

Reformasi birokrasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Langkah strategis yang diambil antara lain melalui perbaikan sistem manajemen ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, serta penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan. Reformasi juga diarahkan pada penguatan integritas dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi birokrasi digital. Dengan integrasi layanan dan data lintas sektor, pemerintah daerah dapat meningkatkan kecepatan pelayanan, menurunkan biaya birokrasi, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan melalui pembentukan layanan yang terintegrasi, seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), serta pengembangan inovasi pelayanan yang ramah pengguna dan menjangkau kelompok rentan.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Reformasi Birokrasi dan Penguatan SDM Aparatur
 - 1) Pelatihan ASN berbasis kompetensi & merit system
 - 2) Rotasi dan promosi berbasis kinerja
- b. Pelayanan Publik Prima dan Responsif
 - 1) Mall Pelayanan Publik kabupaten
 - 2) Layanan cepat digital berbasis aduan warga
- c. Program Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
 - 1) Sistem e-budgeting, e-planning, e-monitoring terintegrasi

Melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tata kelola yang baik, diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan terpercaya, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

5. Prioritas Pembangunan V : Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau, dan Ketahanan Wilayah

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan ketahanan sosial wilayah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan tangguh terhadap bencana serta risiko sosial lainnya.

Penguatan ekonomi hijau menjadi salah satu strategi kunci, dengan mendorong penerapan praktik pertanian organik, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap. Pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan diarahkan agar tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

Selain itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pelestarian ekosistem, dan pengembangan kawasan konservasi menjadi bagian integral dari strategi pengurangan risiko lingkungan. Program Kampung Iklim (program yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dengan pendekatan berbasis komunitas, terutama di tingkat RT/RW, desa, atau kelurahan), desa mandiri energi, dan penguatan kelembagaan lingkungan lokal terus didorong agar pembangunan tetap berpihak pada daya tahan jangka panjang.

Dalam aspek ketahanan wilayah, fokus diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dan desa dalam menghadapi bencana alam, perubahan iklim, dan gejolak sosial. Hal ini dilakukan melalui sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, serta integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan
 - 1) Pertanian organik, pengembangan pasar hijau, dan pupuk hayati
- b. Perlindungan Lingkungan dan Penanganan Sampah
 - 1) Bank sampah desa, TPS 3R, edukasi sekolah hijau
- c. Ketahanan Sosial dan Penanggulangan Risiko Bencana
 - 1) Pemetaan risiko desa rawan & pelatihan tanggap bencana berbasis masyarakat
 - 2) Early warning system sederhana di daerah rawan longsor/banjir.

Dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya membangun untuk hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki kualitas lingkungan yang layak dan peluang ekonomi yang adil.

Kelima prioritas pembangunan diatas ditetapkan dalam rangka menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Rejang Lebong. Masing-masing prioritas diturunkan ke dalam program-program prioritas yang bersifat lintas sektor, berbasis data, dan mengedepankan integrasi wilayah. Dengan kerangka ini, diharapkan setiap intervensi pembangunan memiliki daya ungkit yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keterkaitan antara isu strategis, prioritas daerah dan program prioritas daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas

Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas
(1)	(2)	(3)
Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berkarakter	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penguatan Ekonomi Lokal Mandiri melalui UMKM, Pertanian, dan Ekonomi Kreatif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 4. Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian 5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 6. Program Pemasaran Pariwisata 7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

		9. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Belum optimalnya Pengendalian Pembangunan dan pelestarian lingkungan	Pembangunan Infrastruktur dan Digitalisasi Layanan Publik serta inovasi	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Kawasan Permukiman 7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 9. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 10. Program Riset dan Inovasi Daerah
Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Melayani	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Perekonomian dan Pembangunan 5. Program Kepegawaian Daerah 6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Belum optimalnya Pengendalian Pembangunan dan pelestarian lingkungan	Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau dan Ketahanan Wilayah	1. Program Penyuluhan Pertanian 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

		5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan 8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 9. Program Penanggulangan Bencana
--	--	---

Kelima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong diatas juga diselaraskan dengan prioritas nasional dan prioritas pembangunan provinsi. Sinkronisasi dan sinergisitas antara agenda pembangunan nasional, prioritas provinsi, prioritas daerah dan program prioritas daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Sinergitas Prioritas Nasional , Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Kabupaten Rejang Lebong	Program Prioritas Kabupaten Rejang Lebong
(1)	(2)	(3)	(4)
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan	PP 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, Pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas PP 2: Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang	PP 1: Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berkarakter	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Kabupaten Rejang Lebong	Program Prioritas Kabupaten Rejang Lebong
(1)	(2)	(3)	(4)
Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan Makmur		
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP 6: Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui Hilirisasi dan industrialisasi produk pangan unggulan PP 5: Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal	PP 2: Penguatan Ekonomi Lokal Mandiri melalui UMKM, Pertanian, dan Ekonomi Kreatif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 4. Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian 5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 6. Program Pemasaran Pariwisata 7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9. Program Administrasi Pemerintahan Desa
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi	PP 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah	PP 3: Pembangunan Infrastruktur dan Digitalisasi Layanan Publik serta inovasi	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Kabupaten Rejang Lebong	Program Prioritas Kabupaten Rejang Lebong
(1)	(2)	(3)	(4)
melalui Peran Aktif Koperasi PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi			5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Kawasan Permukiman 7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 9. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 10. Program Riset dan Inovasi Daerah
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM, dengan sasaran utama yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP 1: Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius	PP 4: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Profesional dan Melayani	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Perekonomian dan Pembangunan 5. Program Kepegawaian Daerah 6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN 5:	PP 7: Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dan berkelanjutan serta berketahanan iklim	PP 5: Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau dan Ketahanan Wilayah	1. Program Penyuluhan Pertanian 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Kabupaten Rejang Lebong	Program Prioritas Kabupaten Rejang Lebong
(1)	(2)	(3)	(4)
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan 8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 9. Program Penanggulangan Bencana

3.2.4.2 Program Prioritas Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong secara terarah, sistematis, dan berdampak nyata bagi masyarakat, telah disusun kerangka strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang terintegrasi. Penyusunan ini berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*), serta berorientasi pada hasil (*result-based management*).

Setiap strategi yang ditetapkan merupakan penjabaran logis dari misi pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan tantangan struktural dan peluang strategis daerah, baik dalam sektor birokrasi, ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar, sosial budaya, maupun keberlanjutan lingkungan. Arah kebijakan kemudian dirumuskan sebagai langkah-langkah konkret yang menjembatani strategi dengan implementasi teknis di lapangan, memastikan bahwa setiap program prioritas memiliki landasan konseptual yang kuat dan relevan dengan kondisi faktual di masyarakat.

Program prioritas daerah berfungsi sebagai jembatan antara strategi makro RPJMD dengan pelaksanaan operasional di tingkat perangkat daerah, sekaligus sebagai media integrasi kebijakan sektoral dan kewilayahan. Dalam rangka menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dan daerah, program-program prioritas Kabupaten Rejang Lebong telah disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMN 2025–2029, khususnya 17 Program Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Keselarasan ini

menjadi kunci untuk memastikan sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Tabel berikut ini menyajikan pemetaan program-program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong. Pemetaan ini dilengkapi dengan outcome, dan indikator terkait kesesuaian maupun kebutuhan penyempurnaan program.

Tabel 3. 10
Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Visi : Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan						
MISI 1						
Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.	T1 : Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi		
		S1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan		I1 : Nilai SAKIP		
			Meningkatnya tata kelola pemerintah.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagian Organisasi Setda Kab. RL dan Seluruh Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPd	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah		
				Persentase Program Prioritas yang didukung program daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dankewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. RL
		S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan		I2 : Indeks Profesionalitas ASN		
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang tersertifikasi	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan		I3 : Indeks SPBE		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan		I4 : Predikat Opini BPK		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	1.Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				2.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	3.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				4.Persentase Penurunan SILPA		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	5. Persentase terlaksananya Pelaporan keuangan Tepat Waktu		
		S1.2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		I1 : Indeks Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan SPM Bidang Rumah Sakit	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Akta kelahiran Yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI 2						
Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	T2 : Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	S2.1 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi		
				I1 : Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi tanaman Pangan (padi)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Peningkatan Produksi Hortikultura		
				Peningkatan Produksi Perkebunan :		
				Kopi Robusta		
				Kopi Arabika		
				Aren		
				Karet		
				Sawit		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (luas lahan pertanian yang diperda LP2B/luas lahan pertanian/sawah di RL	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Pertanian dan Perikanan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		S2.1 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan pariwisata		I2: Kontribusi PAD Sektor Pariwisata		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata
		S2.2. : Meningkatnya investasi daerah		I.1. Nilai Investasi Daerah		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		S3.3 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jangkauanpromosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				I.1. Tingkat Kemiskinan		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
			Meningkatnya Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Kelurahan/ Desa yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
		S3.3 : Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat		I.2. Pendapatan Perkapita		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
		S3.3 : Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat		I.3. Rasio Gini		
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
				Pertumbuhan wirausaha		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Kelurahan/ Desa yang melaksanakan Pengelolaan dan pendataan Data Fakir Miskin	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak usia 4-15 Tahun Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (%)	1.01.02 - PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTS		
				Angka Kelulusan SD/MI		
				Angka Kelulusan SMP/MTs		
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPRKP

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		S3.4 : Menurunnya angka pengangguran		I.1. Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam Negeri	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 3						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah	T3.1 : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar			Indeks Pembangunan Manusia		
		S3.1 : Meningkatkan Pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata		I1 : Rata-rata lama sekolah		
				I2 : Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak usia 4-15 Tahun Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (%)	1.01.02 - PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTS		
				Angka Kelulusan SD/MI		
				Angka Kelulusan SMP/MTs		
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		
		S3.2 : Meningkatnya Kesehatan yang merata dan berkualitas	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.Indeks Distribusi /Pemerataan Guru : 2.Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikasi Pendidik:	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	I1: Umur Harapan Hidup		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup		
				Prevalensi Balita Stunting		
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Rasio puskesmas per satuan penduduk		
				Rasio pustu per satuan penduduk		
				Persentase puskesmas rawat inap		
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan SPM Bidang Rumah Sakit	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	T3.2 : Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Daerah	S3.3 : Meningkatkan infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
				Indeks Infrastruktur Wilayah		
				I1 : Indeks Infrastruktur Wilayah		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPRPKP
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPRPKP
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPRPKP

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPRKP
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPRKP
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DPUPRKP
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan Kabupaten/Kota	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
MISI 4						
Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah	T4.1 : Meningkatnya Stabilitas Keamanan daerah			T4 : 1. Angka Kriminalitas		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		S4 1: Menurunnya angka kriminalitas daerah		I1: Angka Kriminalitas		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Rejang Lebong	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik Sosial yang diselesaikan	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
				Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar		
				Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat		
	T4.2 : Terwujudnya peningkatan daya saing daerah			T4.2 : Indeks Daya Saing Daerah		
		S4.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan melalui UMKM dan Ekonomi Kreatif		I1 : Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
				Pertumbuhan wirausaha		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan Ekspor	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
			Meningkatnya Kemudahan Proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin usaha perdagangan yang difasilitasi	3.30.02.PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
			Meningkatnya kualitas sarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
			Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata
		S4.2 : Meningkatkan transformasi Digital dan Inovasi Daerah		I2 : Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
MISI 5						
Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	T5 : Meningkatnya Ekonomi Hijau dan keseimbangan Lingkungan yang berkelanjutan			T5 : Indeks Ekonomi Hijau		
		S5.1 : Terwujudnya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Kualitas Lingkungan		I1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Menurunnya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Udara	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Air		
				Indeks Kualitas Lahan		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		S5.1 : Terwujudnya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh LignKeyungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				I2 : Persentase Penurunan Emisi GRK		
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan Kabupaten/Kota	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi tanaman Pangan (padi)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Peningkatan Produksi Hortikultura		
				Peningkatan Produksi Perkebunan :		
				Kopi Robusta		
				Kopi Arabika		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Aren		
				Karet		
				Sawit		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh yang titingkatkan	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Persentase Kelembagaan Koperasi tani yang dibentuk yang beroperasi		

3.2.4.3 Program Unggulan Janji Kampanye

Selain program pembangunan daerah, juga terapat 15 janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang merupakan program strategis daerah. Program strategis daerah merupakan program prioritas pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 15 program unggulan yang dirancang menjawab tantangan mencakup berbagai sektor yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Penyediaan Ambulans Gratis Setiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa
2. Program Orang Tua Asuh untuk Anak Yatim dan Tidak Mampu
3. Percepatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong
4. Penerangan Jalan Umum dan Median Jalan di Jalan Utama
5. Pembuatan Taman Bermain Anak
6. Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rejang Lebong dan Stadion
7. Alih Fungsi Stadion menjadi Ruang Terbuka Publik
8. Perluasan Lapangan Setia Negara Sebagai Fungsi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik
9. Penyediaan Rumah Singgah bagi Masyarakat Rejang Lebong yang akan berobat
10. Penertiban Pembuangan Sampah sembarangan
11. Mewujudkan Rejang Lebong sebagai Kabupaten Wisata
12. Pengelolaan Gedung PIC untuk peningkatan PAD
13. Pemanfaatan Mobil BD 1 K dan BD 2 K untuk Mobil Bantu Rakyat
14. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan penguatan BUMDes, Pariwisata dan Pertanian
15. Revitalisasi BUMD agar sehat dan berdaya saing yang dapat membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah

Tabel 3. 11
Rumusan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong
Pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Ambulans Gratis Setiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mempercepat penanganan medis darurat serta wujud komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan ambulans gratis di setiap kecamatan dan kelurahan/desa dengan target 177 ambulans.	Penguatan akses layanan kesehatan darurat serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses cepat terhadap layanan transportasi medis, terutama dalam kondisi gawat darurat. Dengan adanya ambulans gratis di 15 kecamatan, 34 kelurahan dan 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong, masyarakat tidak lagi terbebani oleh biaya transportasi medis, serta dapat merasa lebih aman karena ketersediaan sarana pertolongan pertama yang memadai telah disiapkan secara merata.	APBD Kabupaten Rejang Lebong, APBD Provinsi Bengkulu dan Dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	Utama : Dinas Kesehatan Pendukung : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Kecamatan, Desa
2	Program Orang Tua Asuh untuk Anak Yatim dan Tidak Mampu	Program ini untuk membantu meringankan beban kehidupan anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu dan memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan kehidupannya.	Meningkatkan perlindungan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan anak usia PAUD sampai dengan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan merupakan anak diluar Lembaga Pengasuhan Anak, Panti Sosial, Panti Asuhan atau sejenisnya.	Santunan dari Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rejang Lebong Pendukung : Dinas Sosial dan Kecamatan, Baznas Kabupaten Rejang Lebong

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Percepatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong	Program ini untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman.	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar.	APBD Kabupaten Rejang Lebong, Dana Alokasi Khusus (DAK)	Utama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Penerangan Jalan Umum dan Median Jalan di Jalan Utama	Program ini untuk peningkatan Penerangan Jalan Umum di Median Jalan Kabupaten Rejang Lebong dengan target 42 titik pertahun.	Menciptakan lingkungan jalan yang aman, nyaman, dan representatif, terutama pada malam hari, guna mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi, meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas, meningkatkan rasa aman bagi pengguna jalan. Sementara itu, penataan median jalan dilakukan untuk memperbaiki estetika kota serta mengatur arus lalu lintas agar lebih tertib dan efisien.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Dinas Perhubungan
5	Pembuatan Taman Bermain Anak	Program ini bertujuan untuk membangun Area Taman Bermain untuk Anak dengan lokasi di samping rumah dinas Bupati Rejang Lebong.	Mewujudkan kabupaten yang ramah anak, dengan lokasi strategis, mudah dijangkau masyarakat, dan berada di pusat kota, sehingga dapat menjadi ruang terbuka yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Fasilitas yang disediakan meliputi arena permainan fisik, taman interaktif, serta elemen edukatif yang mendorong perkembangan sosial dan motorik anak.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendukung : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rejang Lebong dan Stadion				
a	Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rejang Lebong	Program ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendekatkan Rumah Sakit ke lokasi yang lebih	Menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk secara berkelanjutan. Selain itu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah,	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu kombinasi	Utama : Rumah Sakit Umum Daerah Pendukung : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		representatif dan strategis yaitu di depan Lapangan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong	sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih merata dan inklusif. Relokasi ini juga memungkinkan pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih modern, lengkap, dan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, guna mendukung peningkatan kapasitas layanan, kenyamanan pasien, serta efisiensi operasional rumah sakit.	antara ABPD/APBN dengan pihak swasta	Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup
b	Relokasi Stadion Kabupaten Rejang Lebong	Program ini untuk memperluas sarana olahraga di Kabupaten Rejang Lebong dengan lokasi di Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya	Mendukung pengembangan sektor olahraga dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta mewujudkan pusat kegiatan olahraga yang representatif, modern, dan multifungsi, yang tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, pembinaan atlet daerah, serta tempat penyelenggaraan kegiatan masyarakat dan kejuaraan berskala lokal maupun regional.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Dinas Pemuda dan Olahraga Pendukung : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7	Alih Fungsi Stadion menjadi Ruang Terbuka Publik	Program ini untuk melengkapi sarana prasarana fasilitas umum di Kabupaten Rejang Lebong	Revitalisasi kawasan pusat kota sekaligus mendukung penyediaan ruang publik yang inklusif, ramah keluarga, dan berwawasan lingkungan, terbuka untuk berbagai aktivitas sosial, budaya, ekonomi kreatif, hingga rekreasi warga.	APBD Kabupaten Rejang Lebong, Dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	Utama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendukung : Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Perluasan Lapangan Setia Negara Sebagai Fungsi Ruang Terbuka Publik (RTP) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program ini untuk menjadikan Lapangan Setia Negara dengan konsep yang betul- betul terbuka dengan jogging track tetap, di tambahkan <i>mini soccer</i> dan <i>food corner</i> serta kedepannya perluasan setianegara menjadi alun - alun kota termasuk pemindahan Balai Agung ke Lapangan Dwi Tunggal	Meningkatkan akses masyarakat terhadap ruang terbuka yang berkualitas, menyediakan tempat berkumpul yang nyaman, aman, dan estetis; memberikan ruang ekspresi dan kreativitas komunitas lokal; mendukung daya tarik wisata kota dan aktivitas ekonomi masyarakat serta menjadikan Ruang Terbuka Hijau melalui penambahan elemen vegetasi, taman tematik, jalur hijau, serta melalui fasilitas ramah lingkungan lainnya, kawasan ini akan menjadi paru-paru kota dan mendukung ketahanan iklim lokal.	APBD Kabupaten Rejang Lebong dan APBN	Utama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendukung : Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Bagian Umum Setda Kabupaten Rejang Lebong.
9	Penyediaan Rumah Singgah bagi Masyarakat Rejang Lebong yang akan berobat	Program ini untuk membantu masyarakat Rejang Lebong yang akan berobat di Bengkulu, Palembang dan Jakarta	Meningkatkan fasilitas pendukung pasien rujukan, kualitas pelayanan publik serta memperkuat perlindungan sosial, khususnya dalam bidang kesehatan. Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan beban biaya masyarakat, meningkatkan kepatuhan kontrol pasien rujukan, serta mempercepat proses pemulihan kesehatan warga.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Dinas Sosial Pendukung : Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
10	Penertiban Pembuangan Sampah sembarangan	Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta menegakkan regulasi terkait kebersihan dan ketertiban umum.	Menurunkan volume timbulan sampah , mengurangi pencemaran lingkungan, serta menumbuhkan budaya hidup bersih di seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi publik, penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan penegakan hukum serta pelibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sampah seperti pelibatan Kelompok Swadaya Masyarakat dan pembentukan Bank Sampah	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Dinas Lingkungan Hidup Pendukung : Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Mewujudkan Rejang Lebong sebagai Kabupaten Wisata	Program ini ditujukan untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya serta lingkungan.	Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten wisata melalui penguatan regulasi dibidang kepariwisataan, pengembangan destinasi baru, penguatan destinasi wisata melalui pembangunan dan penataan infrastruktur penunjang (akses jalan, penerangan, toilet, tempat ibadah, papan informasi), Peningkatan promosi dan pemasaran wisata berbasis digital dan kolaboratif serta pemberdayaan masyarakat lokal (ekonomi kreatif, homestay, UMKM, pemandu wisata) agar ikut serta dalam rantai ekonomi wisata serta kolaborasi lintas sektor dan mitra strategis (swasta, BUMDes, investor, komunitas) untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi. Beberapa lokus pengembangan destinasi wisata yang sudah ada diantaranya adalah : 1. Danau Mas Harun Bastari (DMHB) Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang. 2. Bukit Kaba (termasuk pelaksanaan tindak lanjut MOU dengan BKSDA untuk penyelenggaraan, penguatan fungsi kawasan pelestarian alam dalam rangka pengembangan kawasan wisata alam di Taman Wisata Alam Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong) 3. Suban Air Panas (Desa Cawang Baru Kecamatan Curup Timur) Serta pengembangan destinasi wisata baru diantaranya adalah: 1. View Bukit Basah (Kecamatan Curup Utara) dengan wisata Tobo Leceak (<i>camping ground</i> Desa Dusun Sawah) 2. Danau Bermanei Talang Kering (Kecamatan Curup Utara) dengan wisata rakit.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Dinas Pariwisata Pendukung : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. Air Terjun Curup Lekat (Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah) 4. Arung Jeram (Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang)		
12	Pengelolaan Gedung PIC untuk peningkatan PAD	Program ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan gedung <i>Place Information Centre</i> (PIC) di Jakarta sebagai salah satu alternatif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Meningkatkan fungsi gedung aset daerah agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan menarik investor untuk dapat menyewa dan menggunakan ruang gedung yang ada.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Bagian Umum Setda Kabupaten Rejang Lebong Pendukung : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
13	Pemanfaatan Mobil BD 1 K dan BD 2 K untuk Mobil Bantu Rakyat	Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah untuk dapat memanfaatkan kendaraan perorangan dinas Bupati dan Wakil Bupati terutama pada hari libur untuk kegiatan pernikahan atau lainnya.	Meningkatkan kecepatan dan kehadiran pelayanan publik di tingkat masyarakat serta membangun pemerintahan yang merakyat, terbuka, dan efisien, dengan prinsip bahwa fasilitas negara harus kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Bagian Umum Setda Kabupaten Rejang Lebong

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan penguatan BUMDes, Pariwisata dan Pertanian	Program ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, fasilitasi pemasaran produk lokal melalui promosi daerah, pasar digital dan penguatan kelembagaan koperasi (termasuk penguatan program pusat yaitu koperasi merah putih) dan pelaku usaha kecil serta peningkatan akses UMKM terhadap kebijakan fiskal dan program CSR	Penguatan kerjasama persero daerah dengan pemerintahan desa dilakukan melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. BUMDes didorong untuk mengembangkan unit usaha strategis yang berbasis pada potensi desa masing-masing, seperti Agrowisata dan desa wisata, untuk menarik wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat dan Pertanian terpadu dan pengolahan hasil pertanian, guna meningkatkan nilai tambah dan ketahanan pangan lokal;	APBD Kabupaten Rejang Lebong, Dana Desa, CSR	Utama : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Pendukung : Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
15	Revitalisasi BUMD agar sehat dan berdaya saing yang dapat membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah	Pemberdayaan BUMD untuk lapangan kerja seperti dibidang travel, sewa mobil dinas, menampung hasil pertanian dan menyalurkannya	Meningkatkan peran BUMD yang sehat dan profesional dalam penyediaan layanan publik, penggerak ekonomi lokal, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat melalui perbaikan tata kelola dan manajemen keuangan, Penataan kelembagaan dan SDM, Pemetaan ulang lini usaha, Optimalisasi aset daerah yang dapat dikelola BUMD secara produktif dan bernilai ekonomi tinggi dan kemitraan strategis dengan swasta dan investor untuk pengembangan usaha.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	Utama : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Rejang Lebong Pendukung : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah merupakan instrumen strategis untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah. Dalam perencanaannya, program-program ini disusun dengan memperhatikan permasalahan daerah, isu-isu strategis, serta visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi Bupati Kabupaten Rejang Lebong, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan pelayanan publik, menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Setiap program yang dirancang bertujuan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang kesemuanya berakar pada visi misi Bupati. Misalnya, dalam misi peningkatan kesejahteraan masyarakat, program-program akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang merata. Program yang mendukung IKU akan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan terkait langsung visi dan misi 2025-2029, sementara IKD dan IKK lebih diarahkan untuk mengukur keberhasilan program daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selama lima tahun ke depan, pembangunan Kabupaten Rejang Lebong akan diarahkan pada program-program prioritas yang mencerminkan visi misi Bupati, seperti peningkatan layanan publik, infrastruktur strategis, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setiap program dilengkapi dengan estimasi kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan. Dengan pendekatan ini, visi misi Bupati dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang terukur, selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					-		0		0		0		0	
Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu (%)	100	100	100	232,211,572,912.28	100	238,982,722,468.99	100	238,422,744,693.68	100	240,935,542,140.62	100	243,386,847,562.02	
Tujuan : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Literasi SD	69.04	72.87	72.90		72.92		72.95		73.00		73.10		
	Skor Numerasi SD	63.31	73.00	73.50		73.55		73.60		73.70		73.80		
	Skor Literasi SMP	65.78	69.12	69.50		69.60		69.70		69.80		69.90		
	Skor Numerasi SMP	61.35	68.59	68.80		68.90		68.95		70.00		70.50		
	Harapan Lama Sekolah	8.28	8.28	8.28		8.50		8.60		8.70		8.80		
	Rata-rata Lama Sekolah	13.83	13.83	13.83		13.85		13.87		13.90		13.92		
Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah pertama dan pendidikan non formal	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	48.62	55	70		75		80		85		90		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar (7-15 Tahun)	99.10	99.05	100		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan (7-18 Tahun)	8.29	14.27	19		24		29		34		39		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109.78	100	100		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	113.38	100	100		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	84.04	94.53	98.47		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81.82	92.31	98.6		100		100		100		100		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak usia 4-15 Tahun Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (%)	-	-	100	55,077,157,500.00	100	93,532,394,214.00	100	89,418,000,000.00	100	89,730,000,000.00	100	91,808,000,000.00	
	Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI	0.56	0.513	0.513		0.515		0.516		0.517		0.518		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTS	2.2	1.62	1.5		1.4		1.3		1.2		1.1		
	Angka Kelulusan SD/MI	92.46	98.74	100		100		100		100		100		
	Angka Kelulusan SMP/MTs	97.67	100	100		100		100		100		100		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	54.24	64.85	66.99		70		70.1		70.1		70.2		
	Proporsi Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	34	37.99	38		39		40		41		42		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	0.23	0.41	0.55	-	0.68	310,000,000.00	0.80	320,000,000.00	0.96	330,000,000.00	1.11	340,000,000.00	
	Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikasi Pendidik	26.62	27.66	28.67		30.33		32.00		33.67		35.33		
	Proporsi Guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/D IV	61.64	74.09	80		85		90		95		100		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	BB	BB		BB		BB		A		A		
	Persentase Inovasi yang terealisasi	100	100	100		100		100		100		100		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Kesehatan
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	88,041,890,619.70	100	89,878,245,806.80	100	88,788,019,267.00	100	91,131,714,459.67	100	93,380,045,604.27	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Curup
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	417,996,349.00	100	393,760,983.90	100	403,862,082.29	100	414,763,290.52	100	426,534,119.57	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Perumnas
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Perumnas	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	211,909,536.00	100	216,092,354.00	100	217,092,354.00	100	218,092,354.00	100	219,092,354.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Tunas Harapan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Tunas Harapan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	182,376,700.00	100	154,232,700.00	100	161,332,700.00	100	166,336,700.00	100	172,356,736.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Sambirejo
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Sambirejo	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	136,200,000.00	100	106,360,000.00	100	110,360,000.00	100	112,360,000.00	100	114,360,000.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Talang Rimbo Lama
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Talang Rimbo Lama	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	154,541,548.00	100	132,457,556.80	100	144,644,322.10	100	158,017,994.22	100	172,696,310.75	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Sumber Urip
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Sumber Urip	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	122,700,785.15	100	134,020,863.66	100	146,447,950.03	100	160,092,745.03	100	175,077,019.53	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Watas Marga
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Watas Marga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	130,525,370.00	100	105,330,427.00	100	114,176,552.00	100	123,507,827.00	100	133,472,776.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Kampung Melayu
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Kampung Melayu	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	105,418,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Bangun Jaya
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Bangun Jaya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	147,050,000.00	100	116,850,000.00	100	120,850,000.00	100	125,850,000.00	100	128,850,000.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Curup Timur
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Curup Timur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	216,206,794.50	100	236,693,473.95	100	259,172,121.35	100	283,839,098.48	100	310,910,261.58	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Padang Ulak Tanding

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Padang Ulak Tanding	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	160,833,255.60	100	141,492,867.34	100	155,642,154.07	100	171,206,369.48	100	188,327,006.43	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Beringin Tiga
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Beringin Tiga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	110,959,000.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Tanjung Agung
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Tanjung Agung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	121,360,909.00	100	97,286,999.00	100	106,940,609.00	100	117,559,669.00	100	76,837,445.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Kampung Delima
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Kampung Delima	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	152,993,508.00	100	168,292,858.80	100	185,122,144.68	100	203,634,359.15	100	223,997,795.06	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Sindang Jati
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Sindang Jati	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	117,058,899.50	100	127,716,983.20	100	139,414,680.11	100	152,255,296.68	100	166,352,453.62	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Sindang Dataran
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Sindang Dataran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	149,644,462.00	100	123,524,908.00	100	131,861,398.00	100	140,932,537.00	100	150,911,084.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Kota Padang
Meningkat tata kelola pemerintah pada Puskesmas Kota Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	138,258,942.00	100	113,208,942.00	100	124,149,492.00	100	132,977,492.00	100	141,805,492.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Sindang Beliti Ilir
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Sindang Beliti Ilir	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	126,549,107.00	100	97,331,204.00	100	97,331,204.00	100	97,331,204.00	100	97,331,204.00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Simpang Nangka

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Simpang Nangka	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	135,099,200.00	100	114,120,820.00	100	121,240,187.00	100	132,048,854.95	100	144,191,823.21	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Kepala Curup
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Kepala Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	124,681,312.50	100	135,319,923.75	100	147,022,396.13	100	159,895,115.74	100	174,055,107.31	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Puskesmas Bermani Ulu
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Bermani Ulu	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	136,677,483.00	100	113,385,231.00	100	124,717,454.00	100	137,189,198.00	100	150,908,118.00	
Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada RSUD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	78,654,343,523.40	100	80,933,190,684.16	100	81,449,924,251.01	100	81,977,215,633.52	100	82,395,723,029.85	
Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	69.42	69.68	69.91		70.14		70.37		70.6		70.83		
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Keluarga	Cakupan SPM	95.16	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Keluarga Sehat	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					31,774,527,000.00		37,313,699,700		42,674,169,670		48,137,221,637		53,054,943,801	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5.65	12.62	11.63		10.97		10.46		9.96		9.46		
	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	113.1	115	104		94		85		77		75		
	Prevalensi Balita Stunting	24.7	18.8	17.7		16.6		15.5		14.4		13.3		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96.2	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97.39	100	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97.22	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	96.71	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	85	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84	100	100		100		100		100		100		
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	98.21	98.6	99		99		99		99		99		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Curup
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96.2	96	100	2,225,000,000.00	100	2,265,500,000	100	2,307,215,000	100	2,350,181,450	100	2,394,436,894	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97.39	96	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97.22	94	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	96.71	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88	81	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	61	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	85	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84	91	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Perumnas
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	96	100	1,836,459,200.00	100	1,835,351,518	100	1,844,955,033	100	1,854,654,583	100	1,864,451,128	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	96	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	95	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	82	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	65	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	92	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Tunas Harapan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	1,407,700,000.00	100	1,504,720,000	100	1,611,442,000	100	1,728,836,200	100	1,857,969,820	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
														Puskesmas Sambirejo
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	1,542,500,000.00	100	1,582,500,000	100	1,612,500,000	100	1,642,500,000	100	1,682,500,000	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	88.61	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	90.83	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	88.16	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91.49	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55.87	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	32.65	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	85.57	100	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													Puskesmas Talang Rimbo Lama	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
				2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	856,397,680.00	100	864,775,634	100	873,321,146	100	882,037,569	100	890,928,321	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Sumber Urip
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	954,955,400.00	100	1,006,700,940	100	1,063,621,034	100	1,126,233,137	100	1,195,106,451	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Watas Marga
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	926,500,000.00	100	966,500,000	100	1,006,500,000	100	1,046,500,000	100	1,086,500,000	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Kampung Melayu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	813,836,214.00	100	823,836,214	100	833,836,214	100	843,836,214	100	853,836,214	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Bangun Jaya
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83.68	100	100	1,637,500,000.00	100	1,687,500,000	100	1,737,500,000	100	1,787,500,000	100	1,837,500,000	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	73.3	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	76.9	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	85	90	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55.87	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	32.65	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	59.2	100	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Curup Timur
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96.2	100	100	987,500,000.00	100	1,015,000,000	100	1,072,750,000	100	1,136,275,000	100	1,171,213,750	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97.39	100	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97.22	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	96.71	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	85	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84	100	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													Puskesmas Padang Ulak Tanding	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98	100	100	1,650,800,000.00	100	1,772,130,000	100	1,905,593,000	100	2,052,402,300	100	2,213,892,530	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97	100	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	99	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	62	100	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													Puskesmas Beringin Tiga	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	95	100	894,500,000.00	100	851,469,835	100	892,866,818	100	938,403,499	100	988,493,848	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Tanjung Agung
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	1,140,400,000.00	100	1,210,690,000	100	1,288,009,000	100	1,373,059,935	100	1,466,615,890	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Kampung Delima
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96.2	98	100	1,330,674,647.20	100	1,419,992,112	100	1,518,241,323	100	1,626,315,455	100	1,745,197,001	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97.39	98	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97.22	98	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	96.71	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	85	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Sindang Jati
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	913,657,000.00	100	961,272,700	100	1,013,649,970	100	1,071,264,967	100	1,134,641,464	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95	95	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Sindang Dataran
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	890,500,000.00	100	910,500,000	100	920,500,000	100	940,500,000	100	960,500,000	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													Puskesmas Kota Padang	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	100	100	1,037,346,247.00	100	1,237,500,000	100	1,267,500,000	100	1,297,500,000	100	1,327,500,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	100	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	90	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	65	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													Puskesmas Sindang Beliti Ilir	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	100	100	983,782,140.00	100	1,067,338,559	100	1,098,830,487	100	1,131,897,011	100	1,166,616,862	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	100	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	90	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	65	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													Puskesmas Simpang Nangka	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	932,500,000.00	100	982,000,000	100	1,036,450,000	100	1,096,345,000	100	1,162,229,500	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Kepala Curup
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	987,500,000.00	100	1,015,000,000	100	1,072,750,000	100	1,136,275,000	100	1,171,213,750	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	108.16	100	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97.22	100	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	96.71	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95.45	90	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	35	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33.3	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	85	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84	100	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Bermani Ulu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	1,143,073.000.00	100	1,213,630,300	100	1,291,243,330	100	1,376,617,663	100	1,470,529,429	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	95.28	85	85	175,350,000.00	85	192,885,000.00	85	212,173,500.00	85	235,185,850.00	90	251,204,435.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Curup
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Perumnas
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Sambirejo
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Watas Marga
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Talang Rimbo Lama
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Sumber Urip
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Tunas Harapan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Kampung Melayu
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Bangun Jaya
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Curup Timur
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Padang Ulak Tanding
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Beringin Tiga
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Tanjung Agung
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Kampung Delima
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Sindang Jati
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Sindang Dataran
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Kota Padang
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Sindang Beliti Ilir
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Simpang Nangka
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Kepala Curup
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														Puskesmas Bermani Ulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	
Sasaran : Meningkatnya Layanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas)	85	85.5	86		86.5		87		87.5		88		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Dinas Kesehatan
Meningkatnya layanan fasilitas kesehatan					19,193,664,200.00		24,384,855,020		32,378,070,522		37,955,952,574		46,146,877,832	
	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	87.18	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		
	Rasio puskesmas per satuan penduduk	N/a	0.000075	0.000075		0.000075		0.000075		0.000075		0.000075		
	Rasio puslu per satuan penduduk	N/a	0.000189	0.000189		0.000189		0.000189		0.000189		0.000189		
	Persentase puskesmas rawat inap	N/a	0.57	0.57		0.57		0.57		0.57		0.57		
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100		100		100		100		100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Curup
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Perumnas
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Tunas Harapan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Sambirejo
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Talang Rimbo Lama

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Sumber Urip
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Watas Marga
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Kampung Melayu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Bangun Jaya
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Curup Timur
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Padang Ulak Tanding
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Beringin Tiga
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	-	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Tanjung Agung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Kampung Delima
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Sindang Jati
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Sindang Dataran
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Kota Padang
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Sindang Beliti Ilir
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	12,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Simpang Nangka
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Kepala Curup
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Puskesmas Bermani Ulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	100	37,500,000.00	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	15	1	1	995,763,000.00	1	1,263,527,300	1	1,469,880,030	1	1,793,628,033	1	1,916,990,836	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman	80	85	85	340,000,000.00	90	349,000,000	95	358,900,000	97	466,550,000	100	473,205,000	
	Persentase PIRT yang bersertifikat	7.42	35	40		40		40		40		45		
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	90.56	92	95		96		96		98		100		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	69.42	69.68	69.91		70.14		70.37		70.6		70.83		
Sasaran : Meningkatkan Layanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD)	78.55	78.75	79.00		79.50		80.00		80.50		81.00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan SPM Bidang Rumah Sakit	84.03	84.00	85.00	76,806,280,000.00	86.00	18,479,947,000.00	87.00	16,828,945,000.00	88.00	16,195,391,000.00	89.00	15,580,161,000.00	
Sasaran : Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	27.64	18.00	18.57		19.14		16.29		17.43		21.43		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														Rumah Sakit Umum Daerah
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	27.64	28.9	18.57	500,000,000.00	19.14	2,028,000,000.00	16.29	1,996,000,000.00	17.43	1,964,000,000.00	21.43	1,989,000,000.00	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada PUPRPKP	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	10,269,927,219.83	100	10,700,454,862.03	100	10,700,478,480.65	100	10,846,723,265.46	100	10,933,905,498.11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
TUJUAN : Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur (IKLI)	N/a	N/a	3.1		3.15		3.2		3.25		3.3		
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur (IKLI)	N/a	N/a	3.1		3.15		3.2		3.25		3.3		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas	79.09	80.50	80.45	7,624,808,660.00	80.56	9,135,197,660.00	80.66	9,285,197,660.00	80.70	9,300,197,660.00	80.75	9,335,197,660.00	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	0.77	0.77	0.69	5,900,000,000.00	0.69	5,600,000,000.00	0.69	5,900,000,000.00	0.69	6,305,000,000.00	0.69	6,500,000,000.00	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	4.90	0.46	0.22	3,000,000,000.00	0.22	3,200,000,000.00	0.22	3,000,000,000.00	0.22	3,000,000,000.00	0.22	3,000,000,000.00	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	58.25	58.54	58.64	6,750,000,000.00	58.75	2,386,700,000.00	58.86	2,203,567,000.00	58.97	2,320,602,670.00	59.07	2,237,808,696.70	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	50	51	52	5,235,000,000.00	53	5,300,200,000.00	54	5,365,902,000.00	55	5,432,111,020.00	56	5,498,832,130.20	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya bangunan dan lingkungan tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	8	8	17	7,000,000,000.00	50	13,000,000,000.00	67	7,000,000,000.00	83	2,000,000,000.00	100	2,000,000,000.00	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	47.38	49.44	51.59	56,924,090,000.00	53.74	59,051,024,800.00	55.89	59,712,728,948.00	58.04	60,374,250,137.48	60.19	61,040,636,538.85	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	N/a	N/a	20	470,000,000.00	40	590,000,000.00	60	610,000,000.00	80	630,000,000.00	100	650,000,000.00	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten	86.07	86.50	86.70	750,000,000.00	86.90	1,690,000,000.00	87.00	1,730,000,000.00	87.20	1,770,000,000.00	87.40	2,080,000,000.00	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
TUJUAN : Terpenuhi nya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	92.22	92.76	92.84		92.91		92.99		93.06		93.14		
SASARAN : Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan jumlah rumah layak huni, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	92.22	92.76	92.84		92.91		92.99		93.06		93.14		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Terpenuhi nya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	480,000,000.00	100	315,000,000.00	100	515,200,000.00	100	315,402,000.00	100	515,606,020.00	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	-	-	15.38	1,675,000,000.00	18.18	4,270,000,000.00	22.22	3,880,000,000.00	28.57	3,880,000,000.00	40.00	4,225,000,000.00	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya Penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum)	5.56	-	5.88	573,500,000.00	6.25	686,500,000.00	6.67	686,500,000.00	7.14	686,500,000.00	7.69	686,500,000.00	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		BB		A		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkat tata kelola pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu (%)	100	100	100	5,971,988,080.00	100	6,011,823,772	100	6,084,177,820	100	6,147,055,409	100	6,192,461,774	
TUJUAN : Menciptakan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban (%)	100	100	100		100		100		100		100		
SASARAN : Meningkatnya Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) (%)	20	20	20		20		20		20		20		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	100	100	100	297,314,200.00	100%	350,412,342.00	100%	413,616,465.00	100%	5,756,521,081.00	100%	348,982,628.00	
	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	53.57	57.14	60.71		64.29		67.86		71.43		75.00		
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase jumlah sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	100	100	100		100		100		100		100		
Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-			-		-		-		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	3,584,402,643.00	100	3,616,407,863.83	100	3,648,794,789.56	100	3,681,568,470.28	100	3,714,734,031.27	
Tujuan : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur (IKLI)	N/a	N/a	3.1		3.15		3.2		3.25		3.3		
Sasaran: Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	112.35	110.35	108.35		106.35		104.35		102.35		100.35		
	Indeks Ketahanan Daerah	0.32	0.33	0.34		0.35		0.36		0.37		0.38		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap Darurat, Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	586,098,126.00	100	648,820,088.00	100	661,796,489.00	100	675,032,419.57	100	688,533,067.96	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Pra Bencana	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100	100		100		100		100		100		
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Sakip OPD	B	B	B		B		BB		BB		BB		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pemadam Kebakaran
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	8,166,779,201.00	100	8,641,857,661.00	100	9,241,530,820.00	100	8,713,970,186.00	100	8,644,390,002.00	
Tujuan : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Transtibumilinas Sub-Urusan Kebakaran	N/A	N/A	N/A		80-100		80-100		80-100		80-100		
Sasaran : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	100	100	100		100		100		100		100		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														Dinas Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	316,954,250.00	100	334,850,000.00	100	334,850,000.00	100	2,134,850,000.00	100	419,850,000.00	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah pada Dinas Sosial	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Sosial	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2,059,507,001.20	100	2,102,195,940.00	100	2,135,945,829.00	100	2,170,510,899.00	100	2,205,918,424.00	
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	N/a	N/a	4		4.3		4.5		4.7		5		
Sasaran : Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	71.9	71.9	71.9		72		72.5		73		74		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														Dinas Sosial
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	N/a	N/a	10	50,000,000.00	10	76,500,000.00	12	78,795,000.00	12	81,158,850.00	13	83,593,616.00	
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	N/a	N/a	10		10		12		12		13		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN														Dinas Sosial
Meningkatnya penanganan warga negara migran korban kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	-	-	100	-	100	20,600,000.00	100	21,218,000.00	100	21,854,540.00	100	22,510,176.00	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														Dinas Sosial
Meningkatnya Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100	266,164,543.00	100	374,796,061.00	100	386,039,943.00	100	397,621,141.00	100	409,549,775.00	
	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Kelurahan/ Desa yang melaksanakan Pengelolaan dan pendataan Data Fakir Miskin	-	73.04	19.23	130,906,259.00	38.46	134,833,447.00	57.69	138,878,450.00	76.92	143,044,804.00	100.00	147,336,148.00	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran : Meningkatnya pelayanan korban bencana selama tanggap darurat	Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA														Dinas Sosial
Meningkatnya layanan penanganan penanganan korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	125,163,000.00	100	187,700,000.00	100	193,331,000.00	100	199,130,930.00	100	205,104,858.00	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														Dinas Sosial
Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang terkelola dengan baik	-	-	100	50,359,400.00	100	20,000,000.00	100	20,600,000.00	100	21,218,000.00	100	21,854,540.00	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2,914,276,853.85	100	2,931,035,920.00	100	2,971,215,277.00	100	3,007,727,627.00	100	3,045,505,601.00	
Tujuan : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/tenaga kerja)	42.14	43.17	44.29		45.5		46.78		48.13		49.48		
Sasaran : Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	97.57	97.43	97.63		97.81		97.98		98.21		98.33		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja daerah	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80	-	-		-		-		80.8	95,000,000.00	-	-	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.8	-	2.86	90,000,000.00	2.97	95,000,000.00	3.03	95,000,000.00	3.08	95,000,000.00	3.14	95,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	7.53	7.55	7.58	20,000,000.00	7.65	62,120,000.00	7.70	62,690,000.00	7.75	63,262,000.00	7.80	63,885,000.00	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					-		-		-		-		-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	1.849 Orang	1.849 Orang	1.850 Orang	2,066,758,000.00	1.855 Orang	2,066,808,758.00	1.860 Orang	2,067,000,000.00	1.865 Orang	2,067,510,000.00	1.870 Orang	2,068,025,000.00	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan kesetaraan Gender dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.83	94.83	94.83		94.90		95.10		95.30		95.50		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.53	64.53	64.53		64.75		65.00		65.50		66.00		
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.392	0.385	0.380		0.375		0.370		0.365		0.360		
	Total Fertility Rate (TFR)	2.19	2.18	2.17		2.16		2.15		2.14		2.13		
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)6. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertiltity Rate/ASFR 15-19)	30.0	28.0	26.0		24.0		22.0		20.0		18.0		
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63.82	64.00	64.50		65.00		66.00		66.50		67.00		
Sasaran :Meningkatnya kesetaraan dan keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	63.31	65.5	66		66.5		67		67.5		68		
	Proporsi kursi perempuan di DPRD	23.33	23.33	23.33		23.33		23.33		23.33		23.33		
	Persentase perempuan pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas/pemberdayaan dari PD	-	5	10		15		20		25		30		
	Jumlah Kecamatan melaksanakan program pencegahan kekerasan berbasis masyarakat	-	3	6		9		11		13		15		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ketersediaan data kasus kekerasan terpilah by name by address	100	100	100		100		100		100		100		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan					343,156,000.00		377,470,000		415,215,000		418,989,000		460,887,000	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG);	14,33(2023)	16	17		18		19		20		21		
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.	63.72	63.72	65.25		66		66.75		67.5		68		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	162,365,000.00	100	178,601,000	100	196,461,000	100	198,246,000	100	218,069,000	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	-	100	100	16,984,000.00	100	18,682,000	100	20,550,000	100	20,737,000	100	22,810,000	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan			25	55,000,000.00	50	60,500,000.00	75	66,550,000.00	90	73,205,000.00	100	80,525,000.00	
Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (Usia 0-17 tahun)	92.57(2023)	93.5	94		94.5		95		95.5		96		
	Persentase Kecamatan/Desa yang terfasilitasi menuju Layak Anak (KLA/DLA)	-	20	40		53		67		73		87		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase lembaga layanan anak yang memenuhi standar	-	20	25		30		45		50		65		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).	64.45 (2022)	67.50	68	13,559,000.00	68.50	14,914,000	69.00	16,405,000	69.50	16,554,000	70.00	18,209,000	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak					156,691,000.00		172,360,000		189,596,000		191,320,000		210,452,000	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif;	100		100		100		100		100		100		
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).	64.45		65.2		65.7		65.95		66.4		66.7		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		BB		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Ketahanan Pangan
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	3,813,822,967.00	100	3,900,733,022.00	100	3,961,666,997.00	100	4,011,430,311.00	100	4,075,026,259.00	
Tujuan : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	73.11	73.2	74.88		79.64		84.7		89.09		93		
Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan	Rasio Ketersediaan Pangan Pokok	110,40	110,40	112.61		114.8		116.18		118.71		120.3		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														Dinas Ketahanan Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86.49	86.7	88.50	575,000,000.00	91.00	2,097,950,000.00	93.25	2,192,000,000.00	95.50	2,287,010,000.00	97.59	2,381,540,000.00	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	12.82		100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	0	100	100	125,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0	0	100	3,500,000,000.00	100	3,000,000,000.00	100	3,000,000,000.00	-	0	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Sakip OPD	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	3,840,892,765.95	100	5,076,901,238.25	100	5,901,926,197.27	100	6,090,028,764.99	100	6,158,347,924.28	
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.09	72.01	72.22		72.43		72.64		72.86		73.07		
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.09	72.01	72.22		72.43		72.64		72.86		73.07		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	N/A	-	100	124,131,400.00	100	400,000,000.00	100	350,000,000.00	100	400,000,000.00	-	-	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup
Menurunnya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Udara	92.76	71.25	71.55	245,616,000.00	71.85	270,616,000.00	72.15	275,616,000.00	72.45	280,616,000.00	72.75	285,616,000.00	
	Indeks Kualitas Air	56.20	74.07	74.27		74.47		74.67		74.87		75.07		
	Indeks Kualitas Lahan	52.59	69.87	69.94		70.01		70.08		70.15		70.22		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	N/A	15.56	20	260,000,000.00	25	950,000,000.00	30	605,000,000.00	35	665,500,000.00	40	1,132,050,000.00	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	N/A	8	10	41,996,000.00	20	100,000,000.00	30	100,000,000.00	40	100,000,000.00	50	100,000,000.00	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	70	100	100	60,400,000.00	100	70,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	80,000,000.00	
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	-	100	25,000,000.00	100	60,000,000.00	100	60,000,000.00	100	60,000,000.00	100	60,000,000.00	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	-	-	-	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	N/A	-	100	30,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	100	100	100	35,000,000.00	100	36,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	20,000,000.00	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	-	35	6,963,626,000.00	40	8,427,555,000.00	45	8,477,555,000.00	50	8,527,555,000.00	55	8,527,555,000.00	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
TUJUAN : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	4,345,424,980.65	100	4,590,647,215.18	100	4,704,118,630.99	100	4,824,051,255.32	100	4,951,057,350	
Tujuan: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	87	88	89		89		89		89		90		
Sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	-	-	90		92		95		97		98		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	6.85	30	30	761,724,140.38	33	1,092,205,172	35	1,323,925,689	37	1,316,318,258	40	1,520,450,084	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	72.44	72.44	73		74		75		76		80		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL														Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	50,000,000.00	100	135,000,000	100	220,000,000	100	155,000,000	100	235,000,000	
	Persentase Akta kelahiran Yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100		100		100		100		100		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya pemanfaatan informasi kendumukan	Persentase Informasi kendumukan yang dimanfaatkan	-	-	100	50,000,000.00	100	105,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan profil Kependudukan	tersedia	tersedia	100	50,000,000.00	100	60,500,000	100	66,550,000	100	73,205,000	100	80,525,500	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		A		A		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2,867,180,950.30	100	2,915,852,759.80	100	2,945,011,287.40	100	2,974,461,400.28	100	3,004,206,014.28	
Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0.7089	0.7089	0.7089		0.7089		0.7100		0.7100		0.7150		
Sasaran : Meningkatkan Pembangunan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	133.33	14.29	12.50		11.11		10.00		9.09		8.33		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA														Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	-	-	18.85	-	38.52	50,000,000.00	59.01	50,500,000.00	79.5	51,005,000.00	100	51,515,050.00	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	-	-	-	-	27.86	50,000,000.00	39.34	50,500,000.00	45.08	51,005,000.00	52.45	51,515,050.00	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	13.55	140,000,000.00	27.1	291,400,000.00	40.65	2,294,314,000.00	54.50	301,802,140.00	67.70	309,819,661.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	-	-	100		100		100		100		100		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyakatan Desa (LKD)			20	519,910,238.00	40	675,109,340.00	60	681,860,433.00	80	693,224,038.00	100	700,156,278.00	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	-	-	20		40		60		80		100		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKONOMI														
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	BB	BB		BB		BB		BB		A		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada DP3APPKB	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100%	3,837,325,076.95	100%	3,885,781,438	100%	3,975,982,042	100%	4,015,169,173	100%	4,112,309,144	
Tujuan : Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang di Kabupaten Rejang Lebong.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.83	94.83	94.83		94.90		95.10		95.30		95.50		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.53	64.53	64.53		64.75		65.00		65.50		66.00		
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.392	0.385	0.380		0.375		0.370		0.365		0.360		
	Total Fertility Rate (TFR)	2.19	2.18	2.17		2.16		2.15		2.14		2.13		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran : Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertiltity Rate/ASFR 15-19)6. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertiltity Rate/ASFR 15-19)	30.0	28.0	26.0		24.0		22.0		20.0		18.0		
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63.82	64.00	64.50		65.00		66.00		66.50		67.00		
	Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16.41	18.68	20.34		20.95		24.27		25.49		27.79		
	Persentase PUS anggota kelompok kegiatan (BKB/BKR/BKL/UPPKA)	41.98	44.98	47.98		50.98		53.98		56.98		59.98		
	Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan pendampingan (jika relevan dengan program PD)	45.13	50.94	53.44		56.75		61.75		62.56		70.06		
	Persentase PIK-Remaja/Mahasiswa yang aktif	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ketersediaan data dasar keluarga by name by address	93.59	94.66	95.73		96.8		97.87		98.94		100		
Jumlah analisis/kajian kebijakan yang memanfaatkan data sektoral	-	1	2		3		4		5		6			
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalnya pertumbuhan jumlah penduduk					754,078,500.00		549,630,000		604,591,000		610,087,000		671,093,000	
	Angka Kelahiran Total (Total Fertiltity Rate/ TFR)	2.19	2.18	2.17		2.16		2.15		2.14		2.13		
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertiltity Rate/ASFR 15-19).	30	28,0	26		24		22		20		18		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB)					6,445,368,400.00		8,406,743,000		9,247,412,000		9,331,478,000		10,264,619,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	77.7	80.78	82.22		83.66		85.1		86.54		88		
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need).	3,8	3,70	3.27		2.84		2.41		2.00		2.00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga.	57.1	58.6	60.1	2,429,900,000.00	61.6	2,672,890,000	63.1	2,940,178,000	64.6	2,966,906,000	66.0	3,263,595,000	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B	BB	BB		BB		BB		BB		BB		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Perhubungan
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Perhubungan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	3,374,523,674.00	100	3,367,384,020.76	100	3,401,797,217.38	100	3,433,622,439.50	100	3,468,801,687.14	
Tujuan: Terwujudnya layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	70	75		78		80		83		85		90	
Sasaran: Meningkatnya layanan transportasi darat yang aman, nyaman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	70	75		78		80		83		85		90	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan Kabupaten/Kota	25.62	26.38	26.7	4,670,000,000.00	27.02	5,200,000,000.00	27.34	5,100,000,000.00	27.65	5,050,000,000.00	27.97	5,050,000,000.00	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	B	B	B		B		B		BB		BB		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Pelayanan Administrasi Perksantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	3,571,096,376.00	100	3,678,083,821.00	100	3,745,495,841.00	100	3,814,752,752.00	100	3,884,963,090.00	
Tujuan : Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks SPBE	3.24	3.39	3.47		3.55		3.63		3.71		3.79		
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	N/A	N/A	1.5		1.6		1.8		1.9		2.0		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) (%)	80.53	82.00	84.00	1,201,299,479.00	86.00	1,821,482,900.00	88.00	1,833,862,501.00	90.00	1,845,959,581.00	92.00	1,858,266,369.00	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	3.24	3.39	3.47	450,000,000.00	3.55	665,000,000.00	3.63	730,000,000.00	3.71	795,000,000.00	3.79	860,000,000.00	
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	6.02	6.02	6.02		6.02		6.02		6.02		6.02		
	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem penghubung layanan pada SPLPD	3.57	3.57	3.57		7.14		10.71		14.28		17.85		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
Tujuan : Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	7.15	7.15	7.17		7.18		7.18		7.19		7.2		
Sasaran 2 : Meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian	Persentase Data UMKM yang Digitalisasi	100	50	60		65		70		75		80		
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	33.64	34.27	34.57	6,000,000.00	34.88	80,000,000	35.1	90,000,000	35.48	95,000,000	35.77	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	39.44	38.4	40	30,000,000.00	40	35,000,000	45	40,000,000	50	45,000,000	60	50,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	7.15	7.15	7.17	45,000,000.00	7.18	100,000,000	7.19	110,000,000	7.2	120,000,000	7.21	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
	Pertumbuhan wirausaha	1.04	1.2	1.3		1.4		1.5		1.6		1.7		
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan Ekspor	0	0	8.6	7,000,000.00	9	75,000,000	9.5	90,000,000	9.97	105,000,000	10.4	120,000,000	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		B		B		B		B		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	3,801,041,927.75	100	3,931,473,520.03	100	3,997,879,178.23	100	4,019,875,343.01	100	4,072,405,589.44	
TUJUAN :Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif	Nilai Investasi Daerah (PMA/PMDN)	92.884 Miliar	97.807 Miliar	102.991 Miliar		108.450 Miliar		114.198 Miliar		120.25 Miliar		126.623 Miliar		
SASARAN : Meningkatkan Investasi Bidang Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi (%)	1.2	4.9	5.2		5.4		5.7		6		6.4		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi	7.14	18.6	19.53	181,000,000.00	20.05	490,000,000.00	21.52	120,000,000.00	22.78	120,000,000.00	23.92	120,000,000.00	
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan investor yang Berinvestasi	0.13	0.33	0.53	124,119,353.00	0.73	207,000,000.00	0.93	207,000,000.00	1.13	207,000,000.00	1.23	207,000,000.00	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan	100	100	100	103,298,635.00	100	105,000,000.00	100	105,000,000.00	100	105,000,000.00	100	105,000,000.00	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku Usaha dalam membuka Usaha	100	100	100	77,715,000.00	100	97,000,000.00	100	97,000,000.00	100	97,000,000.00	100	97,000,000.00	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	-	-	100	13,189,100.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
TUJUAN : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Pemuda dan olah raga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	3,415,366,140.09	100	3,423,975,712.76	100	3,450,124,182	100	3,476,534,136	100	3,503,208,189	
TUJUAN : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Tingkat Daya Saing Kepemudaan	1.14	1.61	1.71		1.91		2.11		2.31		2.51		
SASARAN : Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Wirausaha	33.07	36.46	39.85		43.24		46.63		50		50		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan														Dinas Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda Wirausaha	33.07	36.46	39.85	209,000,000.00	43.24	209,000,000.00	46.63	209,000,000	50	209,000,000	50	209,000,000	
Sasaran : Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet Berprestasi	66	68.8	71.6		74.4		77.2		80		80		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan														Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet Yang Masuk Pelatda Provinsi	12	14.60	17.20	2,208,431,091.00	19.80	2,238,431,091.00	22.40	2,238,431,091	25.00	2,238,431,091	25.00	2,238,431,091	
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan													
Program Pengembangan Kapasitas Keparmukaan														Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepramukaan	100	100	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
Tujuan: Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1.61	2.62	2.62		2.65		2.68		2.7		2.72		
Sasaran 3: Meningkatnya Ketersediaan Data Perencanaan sesuai kebutuhan Layanan Data	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1.61	2.62	2.62		2.65		2.68		2.7		2.72		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														Dinas Komunikasi dan Informatika
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1.61	2.62	2.62	60,000,000.00	2.65	132,000,000.00	2.68	133,000,000.00	2.7	134,000,000.00	2.72	135,000,000.00	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
Tujuan : Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (Terkait Keamanan)	2	2	3		4		4		4		4		
Sasaran 4 : Meningkatnya tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	24.96	N/a	27.02		32.68		38.13		43.57		48.37		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	161 (Hasil Penilaian Tahun 2024)	N/A	248	310,000,000.00	300	395,000,000.00	350	432,000,000.00	400	458,000,000.00	444	485,000,000.00	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
Tujuan : Terwujudnya berkebudayaan maju (IPK)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/a	40	42		43		44		45		46		
Sasaran : Meningkatnya Peranan BMA dan meningkatnya keikutsertaan seni etnis nusantara yang ditampilkan	Persentase BMA Aktif	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Keikutsertaaan Seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	70	50	70		75		80		85		90		
2.22.02- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	42.71	42.71	43.28	1,040,000,000.00	43.62	6,100,000,000	43.97	6,160,000,000	44.32	6,210,000,000	44.66	7,000,000,000	
Sasaran : Meningkatnya karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	-	45	54		68		82		96		100		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	42.71	42.71	43.28	141,683,000.00	43.62	200,000,000	43.97	250,000,000	44.32	300,000,000	44.66	350,000,000	
Sasaran : Meningkatnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Benda situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	35	50	50		50		50		60		60		
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan	80	80	82	288,745,200.00	83	200,000,000	84	250,000,000	85	260,000,000	86	200,000,000	
	Persentase Cagar Budaya/Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	14	14	15		16		17		18		19		
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
TUJUAN : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN :Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	BB	BB		BB		BB		A		A		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Arsip Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	2,753,810,023.20	100	2,754,966,713	100	2,822,021,393	100	2,893,697,121	100	3,030,435,157	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
TUJUAN : Meningkatnya Literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	62.12	62.14	62.15		62.17		62.18		62.20		62.21		
SASARAN :Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Kunjungan Perpustakaan	1.55	1.58	1.61		1.63		1.66		1.69		1.72		
Program Pembinaan Perpustakaan														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Masyarakat	65.73	67.23	68.72	941,991,345.80	70.22	955,738,846	71.72	970,861,095	73.21	987,495,570	74.71	1,005,793,492	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
TUJUAN : Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan daerah	75,36	76,36	77,36		78,36		79,36		79,37		80,12		
SASARAN :Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	75	75	75.1		75.3		75.4		75.5		76		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	49,80	49,80	49,80	43,386,304.00	49,80	102,724,934	49,80	52,497,428	49,80	57,747,171	49,80	63,521,888	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	49,80	49,80	49,80	50,000,000.00	49,80	-	49,80	-	49,80	-	49,80	-	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	32.48	32.89	33.26		33.63		34		34.37		34.74		
Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Produktivitas Perikanan	77.45	78.92	80.81		83.16		85.99		89.34		93.27		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														Dinas Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5	2	2.4	600,000,000.00	2.9	660,000,000	3.4	726,000,000	3.9	798,600,000	4.4	878,460,000	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														Dinas Pertanian dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	20.39	20.77	21.27	100,000,000.00	21.89	110,000,000	22.63	121,000,000	23.52	133,100,000	24.55	146,410,000	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah pada Dinas Pariwisata	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	B	BB		BB		BB		A		A		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pariwisata
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Pariwisata	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	3,909,981,419.40	100	4,036,414,719.00	100	4,434,255,605.00	100	4,819,746,241.00	100	5,234,654,087.00	
Tujuan : Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi PAD Sektor pariwisata	0.35	0.4	0.45		0.5		0.55		0.6		0.65		
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2.11	2.16	2.19		2.21		2.24		2.26		2.29		
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel)	6.25	8.8	10.8		12.2		13.0		13.5		13.6		
Sasaran : Meningkatnya Sektor Kepariwisataan Daerah	Rata-rata Lama Tinggal (Hari)	2.5	2.5	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		
	Tingkat Hunian Hotel	12.8	12.8	13		13		13		14		15		
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	33	33	41.32		41.32		41.32		41.32		41.32		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														Dinas Pariwisata
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara	5.82	10	12	4,496,070,000.00	15	4,446,000,000.00	17	4,503,000,000.00	20	5,930,000,000.00	23	10,900,000,000.00	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														Dinas Pariwisata
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	57.14	57.14	57.14	566,390,861.00	57.14	788,000,000.00	57.14	803,000,000.00	57.14	832,000,000.00	57.14	850,000,000.00	
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														Dinas Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	-	-	25	280,000,000.00	30	585,000,000.00	35	637,000,000.00	40	690,000,000.00	45	895,000,000.00	
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														Dinas Pariwisata
Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	33	33	41.32	313,039,800.00	41.32	318,500,000.00	41.32	322,000,000.00	41.32	325,000,000.00	41.32	342,000,000.00	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan	Nilai Sakip OPD	B (67.87)	B	B		B		B		B		BB		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Pertanian dan Perikanan
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	12,799,770,473.00	100	12,573,282,528.00	100	12,732,276,618.00	100	12,896,446,776.00	100	13,066,203,374.00	
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pembudidaya Perikanan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	32.48	32.89	33.26		33.63		34		34.37		34.74		
Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan (padi)	5	6.87	7.01		7.16		7.32		7.49		7.67		
	Produktivitas Tanaman Hortikultura (cabe)	5.75	5.81	5.88		5.96		6.05		6.16		6.29		
	Produktivitas tanaman Perkebunan													
	Kopi Robusta	0.75	0.72	0.721		0.722		0.724		0.726		0.729		
	Kopi Arabika	0.61	0.72	0.721		0.722		0.724		0.726		0.729		
	Aren	3.14	2.91	2.912		2.915		2.919		2.925		2.933		
	Karet	0.77	0.76	0.764		0.772		0.783		0.799		0.819		
	Sawit	16.1	12	12.193		12.396		12.608		12.829		13.062		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													Dinas Pertanian dan Perikanan	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi)	-11.38	3	5	800,000,000.00	5	880,000,000.00	5	968,000,000.00	5	1,064,800,000.00	5	1,171,280,000.00	
	Peningkatan Produksi Hortikutura (Cabe)	2	1.5	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Produksi Perkebunan :													
	Kopi Robusta	5	-3.77	0.09		0.16		0.25		0.32		0.41		
	Kopi Arabika	3.54	16.99	0.09		0.16		0.25		0.32		0.41		
	Aren	0.83	-7.26	0.06		0.11		0.15		0.21		0.25		
	Karet	1.88	-14.8	0.51		1		1.5		2.01		2.51		
	Sawit	1.56	-7.34	1.61		1.66		1.71		1.76		1.81		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														Dinas Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	93.73	93.73	93.73	2,150,000,000.00	93.73	2,171,500,000.00	93.73	2,193,215,000.00	93.73	2,215,147,150.00	93.73	2,237,298,621.50	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														Dinas Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	57.2	82.5	85	575,000,000.00	87.5	632,500,000.00	90	695,750,000.00	92.5	765,325,000.00	95	841,857,500.00	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	-	4.55	18.18		32		50.00		72.73		100.00		
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	-	3	3.1		3.20		3.30		3.40		3.50		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														Dinas Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh yang ditingkatkan			20	450,000,000.00	20	495,000,000.00	20	544,500,000.00	20	598,950,000.00	20	658,845,000.00	
	Persentase Kelembagaan Koperasi tani yang dibentuk yang beroperasi			20		20		20		20		20		
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian	Nilai Sakip OPD	B	B	B		B		B		B		B		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Meningkatkan tata kelola pemerintah pada Dinas Perdagangan, koperasi UKM dan Perindustrian	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	4,407,314,361.00	100	4,894,933,477.05	100	4,967,172,438.30	100	5,049,417,770.49	100	5,140,280,261.39	
Tujuan : Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16.27	17.17	17.26		17.35		17.44		17.54		17.63		
Sasaran 2 : Meningkatkan nilai tambah perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP/Pusat perbelanjaan dan IUTN/IUTS/SIUP Toko swalayan)	100	100	100		100		100		100		100		
3.30.02.PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Meningkatnya Kemudahan Proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100	100	98	13,000,000.00	98	25,000,000.00	98	30,000,000.00	98	35,000,000.00	98	40,000,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya kualitas sarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100	100	21	335,000,000.00	21	500,000,000.00	21	510,000,000.00	21	520,000,000.00	21	550,000,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	117	40	100	50,000,000.00	100	80,000,000.00	100	85,000,000.00	100	90,000,000.00	100	95,000,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Dagang	-	-	12	45,000,000.00	12	150,000,000.00	12	160,000,000.00	15	170,000,000.00	22	180,000,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3.30.06 STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Meningkatnya tertib niaga mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan konsumen	100	100	80	35,000,000.00	80	40,000,000.00	80	42,000,000.00	80	45,000,000.00	80	50,000,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi / dilaksanakan	0	0	0	-	3	50,000,000.00	5	55,000,000.00	5	60,000,000.00	5	65,000,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	3.84	4.41	4.91		5.41		5.91		6.41		6.91		
Sasaran 2 : Meningkatkan daya saing industri	Peningkatan kualitas produk IKM	50	50	55		60		60		65		70		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	0	1	1	375,000,000.00	2	400,000,000	2	420,000,000	2	420,000,000	2.5	430,000,000	
3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Meningkatnya Pemanfaatan informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat , dan terkini	0	0	2	75,000,000.00	2	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	5	250,000,000	
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
Tujuan : Terwujudnya pengembangan wilayah baru	Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan	0	14.3	42.9		57.1		71.4		85.7		100		
Sasaran : Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan berusaha yang layak	Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan	0	14.3	42.9		57.1		71.4		85.7		100		
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	-	-	-	-		-	-	-	100	30,000,000.00	100	35,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	100	100	100	15,000,000.00	100	15,150,000.00	100	15,300,000.00	100	15,450,000.00	100	15,600,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100		100	20,000,000.00	100	20,200,000.00	100	20,400,000.00	100	20,600,000.00	100	20,800,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH														
TUJUAN : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		B		B		B		B		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Bagian Perencanaan dan Keuangan
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	17,523,928,034.40	100	18,215,802,217.00	100	20,006,348,272.00	100	22,006,983,098.00	100	24,207,445,684.60	
4.01.01 -PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		-		-		-		-	Bagian Umum
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Sekretariat Daerah	Persentase Adminitrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	100	7,425,894,692.00	100	7,759,189,426.60	100	8,108,768,897.93	100	8,475,443,542.83	100	8,860,064,281.97	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	286,212,300.00	100	329,144,145.00	100	378,515,766.75	100	435,293,131.76	100	500,587,101.53	
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	10.45	10.95	11.45		11.95		12.45		12.95		13.45		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Bagian Organisasi
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	148,028,900.00	100	155,430,345.00	100	163,201,862.00	100	171,361,955.00	100	179,930,053.00	
Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	B	B	B		B		B		B		B		
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	93.07	94	94.25		94.5		95		95.5		96		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Belum Ada	3.0000	3.0000		3.0000		3.0000		3.0000		3.0000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	227,169,790.00	100	275,000,000.00	100	345,000,000.00	100	395,000,000.00	100	445,000,000.00	
	Efektifitas Kerjasama Daerah	100	100	100		100		100		100		100		
Sasaran : Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	100	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Zakat Nasional	-	0.20	0.23		0.26		0.29		0.32		0.35		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	3,829,442,515.00	100	11,251,630,098	100	12,273,470,807	100	13,376,831,123	100	14,565,730,119	
	Persentase Perangkat Agama Yang Dibina	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Tempat Ibadah aktif	57.5	60.75	67.5		67.5		67.5		67.5		67.5		
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	76.74	77.24	77.49		77.74		77.99		78.24		78.49		
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINNASI HUKUM														Bagian Hukum
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	100	100	100	443,360,600.00	100	594,000,000.00	100	605,880,000	100	617,997,600	100	630,357,000	
Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah	Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	N/A	85	88		89		90		91,5		93.5		
	Indeks Akses Keuangan Daerah	3.3	3.4	3.44		3.47		3.51		3.54		3.56		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan			88	263,628,000.00	89	350,000,000.00	90	350,000,000.00	91,5	350,000,000.00	93.5	350,000,000.00	
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (PD)	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	15.56	16.06	16.46		16.86		17.26		17.66		18.06		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														Bagian Administrasi Pembangunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	100	100	143,253,270	100	150,415,934	100	157,936,732	100	165,833,568	100	174,125,246	
Sasaran: Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan pengadaan Barang/Jasa yang kredibel dan transparan	85	86	87		88		89		90		91		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 2	Level 2	Level 3	329,069,721.00	Level 4	332,360,418.21	Level 4	335,684,022.39	Level 5	339,040,862.62	Level 5	342,431,271.24	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD														
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai Sakip Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Sekretariat Dewan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	29,095,049,108.28	100	35,090,543,000.00	100	36,314,158,000.00	100	38,162,691,000.00	100	41,812,679,000.00	
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	100	100	100		100		100		100		100		
Sasaran 2 : Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase keterpenuhan atas layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100		100		100		100		100		
1.01.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	100	14,388,329,255.00	100	15,481,050,000.00	100	17,032,658,000.00	100	18,848,038,000.00	100	20,700,332,000.00	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100	100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100		100		100		100		100		
5.01 - PERENCANAAN														
TUJUAN : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	-	-	70.00		70.05		70.10		70.15		70.20		
Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		BB		A		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada BAPPEDA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	4,644,941,193.80	100	5,123,081,915.94	100	5,144,172,531.10	100	5,140,014,896.41	100	5,625,513,245.66	
Sasaran 2 :Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22.10	22.18	22.25		22.32		22.39		22.46		22.53		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPd	100	100	100	1,152,041,950.00	100	1,319,000,000.00	100	1,340,000,000.00	100	1,470,000,000.00	100	1,745,000,000.00	
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	369,068,900.00	100	655,000,000.00	100	810,000,000.00	100	840,000,000.00	100	870,000,000.00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100		100		100		100		100		
5.02 - KEUANGAN														
TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	37,419,876,930.00	100	38,108,339,693.90	100	38,586,498,413.24	100	39,074,345,705.02	100	39,525,918,804.22	
TUJUAN : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
SASARAN : Meningkatkan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100		100		100		100		100		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya tata kelola anggaran	1.Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	73.83	61.25	65	171,711,164,445.00	70	181,221,487,060.76	75	186,868,845,531.30	80	192,765,922,806.02	85	198,987,096,603.79	
	2.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	85.71	76.92	70		75		80		85		90		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	98.01	98.00	98.02		98.04		98.04		98.04		98.04		
	Persentase Penurunan SILPA	32.39	31.50	30.50		30.00		29.50		29.00		28.50		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	100		100		100		100		100		
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang diamankan, ditertibkan, dan dimanfaatkan	100	100	100		100		100		100		100		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.72	4.85	3.8	899,860,618.00	3.72	979,969,321.00	4.5	1,028,967,785.00	4.8	1,128,832,671.00	4.9	1,188,457,791.00	
SASARAN : Meningkatkan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah	0.01	0.02	0.01		0.16		0.31		0.39		0.40		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	5.82	8.78	8.79	1,282,643,235.00	8.95	1,682,541,131.00	9.26	1,789,140,277.25	9.65	1,908,366,589.26	10.05	2,030,856,146.58	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pendapatan	-	25	50		50		75		85		100		
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis digital	-	25	25		50		75		85		100		
5.03 - KEPEGAWAIAN														
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkat tata kelola pemerintah pada BKPSDM	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	97.3	100	100	3,648,375,047.00	100	4,036,641,600	100	3,979,288,860	100	4,022,191,940	100	4,116,441,200	
Tujuan : Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	58.87	61.81	64.90		68.15		71.56		75.14		78.89		
Sasaran : Meningkatkan Kapasitas dan Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit	0.17	0.18	0.20		0.25		0.30		0.35		0.41		
	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	54.39	55.48	56.59		57.72		58.87		60.05		61.25		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang tersertifikasi	4.02%		4.31%	631,520,000.00	4.53%	1,282,489,700	4.76%	1,282,489,700	5.25%	1,282,489,700	5.25%	1,282,489,700	
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja baik	94.25	94.25	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian Kinerja Baik	94.25	94.25	100	8,000,000.00	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
Tujuan : Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	100	100	100		100		100		100		100		
	Indeks Inovasi Daerah	47.67	48.17	48.67		49.17		49.67		50.17		50.67		
Sasaran : Meningkatkan penerapan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	100	100	100		100		100		100		100		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					176,000,000.00		235,000,000.00		250,000,000.00		270,000,000.00		290,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	N/A	100	100		100		100		100		100		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	N/A	18.52	22.22	120,000,000.00	25.93	160,000,000.00	29.63	175,000,000.00	33.33	180,000,000.00	37.04	185,000,000.00	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH														
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Inspektorat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	5,769,148,945.75	100	6,151,780,780.96	100	7,437,217,944.10	100	6,324,227,059.53	100	6,412,845,374.20	Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,003 Level 3	3,003 Level 3 (Terdefinisi)	3,05 Level 3 (Ter definisi)		3,10 Level 3 (Ter definisi)		3,15 Level 3 (Ter definisi)		3,20 Level 3 (Ter definisi)		3,25 Level 3 (Ter definisi)		
SASARAN 1 : Terselenggaranya Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Yang Berkualitas	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Yang Terlaksana	N/A	N/A	84.58		85.33		86.08		86.83		87.58		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														Inspektorat
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	86.17	86.17	86.75	864,125,300.00	87	1,800,070,951.00	87.25	1,854,073,079.53	87.5	1,909,695,271.92	88	1,966,986,130.07	
	Tindaklanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1	75	76	77		79		81		83		85		
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan	90	90	90		90		90		90		90		
Sasaran 2 : Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi yang Berkwalitas	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (terintegrasi)	Level 3 (terintegrasi)	Level 3 (terintegrasi)		Level 3 (terintegrasi)		Level 3 (terintegrasi)		Level 3 (terintegrasi)		Level 3 (terintegrasi)		
	Level Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level 2 (2.85)	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														Inspektorat
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Seluruh OPD	100	100	100	200,546,000.00	100	258,062,380.00	100	265,804,251.40	100	273,778,378.94	100	281,991,730.31	
	Persentase Pemenuhan Dokumen KAPIP Yang Berkualitas	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Seluruh OPD	100	100	100		100		100		100		100		
7.01 - KECAMATAN					-									
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	7,616,339,075.10	100	7,700,110,755	100	7,764,520,151	100	7,829,573,641	100	7,895,277,666	Kecamatan Curup
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	88.13	89	90		90.5		91		91.5		92		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	50,000,000.00	100	35,150,000	100	35,501,500	100	35,856,515	100	36,215,080	Kecamatan Curup
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,400,000.00	100	250,400,000.00	100	250,400,000.00	100	250,400,000.00	100	250,400,000.00	Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,400,000.00	100	250,400,000.00	100	250,400,000.00	100	250,400,000.00	100	250,400,000.00	Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	100	239,600,000.00	Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	6,843,606,450.34	100	6,913,141,102	100	6,974,837,100	100	7,032,100,058	100	7,089,935,646	Kecamatan Curup Tengah
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	88.83	89.00	90.00		90.50		91.00		91.50		92.00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	23,800,000.00	100	37,473,000	100	37,647,730	100	37,824,207	100	38,002,449	Kecamatan Curup Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	4,334,624,853.19	100	4,341,457,733	100	4,404,276,862	100	4,442,474,182	100	4,481,053,476	Kecamatan Curup Timur
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	91.76	92	92		93		94		95		96		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	41,870,200.00	100	42,288,902	100	42,711,791	100	43,138,909	100	43,570,298	Kecamatan Curup Timur
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	240,050,000.00	100	240,050,000.00	100	240,050,000.00	100	240,050,000.00	100	240,050,000.00	Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	100	240,000,000.00	Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2,841,053,616.32	100	2,888,681,116	100	2,913,635,951	100	2,943,840,334	100	2,969,296,762	Kecamatan Curup Selatan
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	81	82	83		84		85		86		87		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	95	100	100	38,500,000.00	100	35,150,000	100	35,501,500	100	35,856,515	100	36,215,080	Kecamatan Curup Selatan
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	260,000,000.00	100	260,000,000.00	100	260,000,000.00	100	260,000,000.00	100	260,000,000.00	Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	260,000,000.00	100	260,000,000.00	100	260,000,000.00	100	260,000,000.00	100	260,000,000.00	Kelurahan Tempel Rejo Kecaamatan Curup Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2,409,589,230.73	100	2,459,531,780	100	2,481,181,694	100	2,503,048,108	100	2,525,133,186	Kecamatan Curup Utara
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	84	85	86		87		88		89		90		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	38,000,000.00	100	38,380,000	100	38,763,800	100	39,151,438	100	39,542,952	Kecamatan Curup Utara
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,277,356.00	100	239,277,356.00	100	239,277,356.00	100	239,277,356.00	100	239,277,356.00	Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239,041,934.00	100	239,041,934.00	100	239,041,934.00	100	239,041,934.00	100	239,041,934.00	Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	2,833,726,107.06	100	2,861,817,675	100	2,886,003,455	100	2,910,431,093	100	2,935,103,007	Kecamatan Selupu Rejang
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	88.23	89	89		90		91		92		93		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	95%	100	100	30,000,000.00	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	Kecamatan Selupu Rejang
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	100	251,600,000.00	Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB		BB		BB		BB		A		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2,378,373,989.49	100	2,393,368,212	100	2,415,723,094	100	2,438,301,525	100	2,461,105,740	Kecamatan Sindang Kelingi
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	88.46	89	89		90		91		92		93		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	37,644,000.00	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	Kecamatan Sindang Kelingi
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	254,733,000.00	100	254,733,000	100	254,733,000	100	254,733,000	100	254,733,000	Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2,390,785,401.00	100	2,430,756,768	100	2,452,899,934	100	2,475,264,532	100	2,497,852,775	Kecamatan Padang Ulak Tanding
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	81.13	88.49	88.65		88.87		89		89.45		90		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	67,378,000.00	100	40,000,000	100	40,400,000	100	40,804,000	100	41,212,040	Kecamatan Padang Ulak Tanding
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	259,989,988.00	100	259,989,988	100	259,989,988	100	259,989,988	100	259,989,988	Kelurahan Pasar PUT Kecamatan Padang Ulak Tanding
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2,528,005,319.00	100	2,572,872,648	100	2,595,402,850	100	2,618,158,355	100	2,641,141,414	Kecamatan Kota Padang
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	86.28	86.28	87		88		89		90		91		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	40,680,000.00	100	41,086,800	100	41,497,668	100	41,912,645	100	42,331,771	Kecamatan Kota Padang
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	45,250,000	50,660,000	56,960,000		59,490,000		62,150,000		64,950,000		68,530,000		
Sasaran : Meningkatnya Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Pesentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,736,000.00	100	250,736,000	100	250,736,000	100	250,736,000	100	250,736,000	Kelurahan Bedeng SS Kecamatan Kota Padang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,736,000.00	100	250,736,000	100	250,736,000	100	250,736,000	100	250,736,000	Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250,736,000.00	100	250,736,000	100	250,736,000	100	250,736,000	100	250,736,000	Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Kota Padang
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	1,387,815,945.39	100	1,417,606,105	100	1,436,567,166	100	1,450,667,838	100	1,464,909,516	Kecamatan Bermani Ulu
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	85.57	85.67	86		87		88		89		90		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	53,274,000.00	100	40,000,000	100	40,200,000	100	40,402,000	100	40,606,020	Kecamatan Bermani Ulu
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	1,531,028,075.58	100	1,548,783,926	100	1,539,021,766	100	1,579,411,983	100	1,594,956,103	Kecamatan Bermani Ulu Raya
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	97.68	97.68	98		98		98		98		98		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	40,529,000.00	100	40,000,000	100	40,200,000	100	40,402,000	100	40,606,020	Kecamatan Bermani Ulu Raya
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B		B		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	1,388,492,212.75	100	1,432,858,635	100	1,446,448,721	100	1,460,174,708	100	1,474,037,956	Kecamatan Sindang Beliti Ulu
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	83.58	84	84		85		86		87		90		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	46,825,168.00	100	30,000,000	100	30,100,000	100	30,201,000	100	30,303,010	Kecamatan Sindang Beliti Ulu
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B		B		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	1,286,611,961.94	100	1,163,382,707	100	1,194,487,674	100	1,210,703,690	100	1,197,031,867	Kecamatan Sindang Beliti Ilir
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	84.92	85	85		86		87		88		90		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	19,998,000.00	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	Kecamatan Sindang Beliti Ilir
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	1,220,192,467.25	100	1,241,334,616	100	1,252,860,162	100	1,264,500,964	100	1,276,258,173	Kecamatan Sindang Dataran
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	80	81	82		84		86		88		90		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	42,994,000.00	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	Kecamatan Sindang Dataran
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB		BB		BB		BB		A		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	1,333,627,858.87	100	1,357,360,037	100	1,375,115,938	100	1,387,999,397	100	1,401,011,691	Kecamatan Binduriang
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.15	84.68	85.47		86.27		87.06		87.86		88.66		
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	88.09	88.25	89		90		91		92		93		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	39,521,000.00	100	40,000,000	100	40,200,000	100	40,402,000	100	40,606,020	Kecamatan Binduriang
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		BB		A		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkat tata kelola pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	2,677,537,614.00	100	2,757,157,790	100	2,783,236,168	100	2,759,575,330	100	2,836,177,883	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TUJUAN : Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Angka kriminalitas	12.74	10	10		10		10		10		9		
SASARAN : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	20	20	20		20		20		20		20		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Rejang Lebong (%)	100	100	100	984,282,150.00	100	987,218,895	100	996,191,084	100	1,005,252,995	100	1,015,305,525	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN : Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Peningkatan Etika dan Budaya Politik (%)	20	20	20		20		20		20		20		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik yang dilakukan (%)	100	100	100	1,946,102,700.00	100	1,946,667,819	100	15,189,590,800	100	32,839,590,800	100	1,946,667,819	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN : Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Rejang Lebong (%)	-	-	25		50		75		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	100	100	61,793,800.00	100	62,411,738	100	63,035,855	100	63,666,214	100	64,302,876	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat (%)	20	20	20		20		20		20		20		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (%)	100	100	100	1,080,302,500.00	100	581,105,525	100	581,916,580	100	581,916,580	100	582,735,746	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN : Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kabupaten Rejang Lebong (%)	-	-	20		20		20		20		20		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik Sosial yang diselesaikan (%)	100	100	100	402,083,550.00	100	406,104,386	100	410,165,429	100	414,267,084	100	418,409,754	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1 Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui IKU

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai alat bantu penting dalam merumuskan, memantau, dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah secara terukur. Komponen-komponen dalam tabel, seperti nama indikator, formulasi perhitungan, satuan, dan target tahunan dari tahun 2024 hingga 2030, disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur mengenai arah kinerja yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Penyusunan komponen ini tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga bertujuan agar seluruh pihak—baik internal pemerintah maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya—dapat memahami dan menilai proses serta hasil pembangunan dengan cara yang objektif dan transparan.

Dalam konteks pencapaian kinerja pembangunan, kejelasan dan keterpaduan antar komponen tabel menjadi kunci. Indikator yang dirumuskan secara tepat akan mencerminkan tujuan pembangunan yang relevan dan realistis. Target yang disusun secara bertahap dan konsisten mencerminkan proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) serta kesiapan daerah dalam menjawab tantangan-tantangan strategis. Dengan menyajikan komponen-komponen ini secara lengkap dan terukur, maka pembangunan daerah dapat diarahkan secara lebih terfokus, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (64.18)	B (65.68)	B (66.94)	B (67.57)	B (68.21)	B (69.47)	B (70.10)
2	Nilai SAKIP	Nilai	B (62.47)	B (63.75)	B (66.52)	B (69.29)	BB (72.07)	BB (74.84)	BB (77.61)
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58.87	61.81	64.9	68.15	71.56	75.14	78.89
4	Indeks SPBE	Indeks	3.24	3.39	3.47	3.55	3.63	3.71	3.79
5	Predikat Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.15	84.68	85.47	86.27	87.06	87.86	88.66
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.29	4.5-4.8	4.8-5.0	5.0-6.5	5.11-6.8	5.23-7.0	5.3-7.2
8	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	32.48	32.89	33.26	33.63	34.00	34.37	34.74
9	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65
10	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rupiah	92.884	100.890	106.232	111.858	117.781	124.018	130.586
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	14.65	14.14-14.51	13.77-14.14	13.41-13.77	13.04-13.41	12.67-13.04	12.30-12.67

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	45.24	50.66	56.96	59.49	62.15	64.95	68.53
13	Rasio Gini	Angka	0.28	0.279-0.292	0.279-0.291	0.279-0.290	0.279-0.289	0.279-0.288	0.278-0.286
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.43	2.30-2.40	2.28-2.39	2.26-2.38	2.22-2.36	2.20-2.35	2.18-2.33
16	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.04	75.17-76.11	75.69-76.67	76.21-77.24	76.74-77.81	77.26-78.38	77.79-78.94
17	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.81	8.96-9.14	9.14-9.32	9.32-9.50	9.50-9.68	9.68-9.87	9.87-10.05
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.20	14.28-14.40	14.40-14.51	14.51-14.63	14.63-14.74	14.74-14.86	14.86-14.98
19	Umur Harapan Hidup	Tahun	69.42	69.68	69.91	70.14	70.37	70.6	70.83
20	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	16.94	20.94	24.94	28.94	32.94	36.94	40.94
21	Angka Kriminalitas	Angka	10	10	10	10	10	10	9
22	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.63	3.69	3.73	3.78	3.82	3.87	3.91
23	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	16.27	17.17	17.26	17.35	17.44	17.54	17.63
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47.67	48.17	48.67	49.17	49.67	50.17	50.67
25	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	58.49	58.49	58.93	59.36	59.795	60.23	60.67
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.09	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07
27	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	20.37	20.37	24.31	28.25	32.19	36.13	40.07

4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui IKD

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil, penyusunan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menjadi instrumen fundamental dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Tabel IKD yang disajikan memuat indikator-indikator utama lintas sektor yang mencerminkan arah, capaian, dan kualitas pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Penyusunan tabel ini bukan semata formalitas administratif, tetapi merupakan bagian integral dari sistem evaluasi kinerja yang berbasis hasil (*result-based management*) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Komponen-komponen dalam tabel disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang indikator, satuan ukur, baseline, target tahunan hingga tahun 2030, serta perangkat daerah penanggung jawab. Keterpaduan antara indikator dan target tahunannya menciptakan kerangka logis dan progresif yang memungkinkan setiap pemangku kepentingan memahami dinamika capaian pembangunan dari waktu ke waktu. Setiap indikator dirancang untuk dapat diukur secara kuantitatif dan diverifikasi, sehingga memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang objektif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penetapan target tahunan menjadi sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Target tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu kinerja tahunan bagi perangkat daerah, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja), penganggaran (RKA dan RKPD), hingga laporan kinerja (LKjIP). Dengan adanya target yang jelas per tahun, setiap OPD penanggung jawab dapat menyusun strategi pelaksanaan, menetapkan prioritas program, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Peran perangkat daerah penanggung jawab dalam tabel ini sangat strategis, karena mereka menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program pembangunan yang relevan dengan masing-masing indikator. Setiap OPD tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis, tetapi juga terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan kolaboratif dari seluruh OPD sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan RPJMD maupun konsistensi capaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan agenda pembangunan nasional.

Dengan demikian, tabel IKD ini menjadi dokumen penting yang tidak hanya memetakan kinerja, tetapi juga mengikat komitmen seluruh elemen birokrasi dalam satu visi pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. Narasi pengantar ini diharapkan dapat memberi pemahaman atas pentingnya indikator-indikator tersebut dalam kerangka pengelolaan pembangunan daerah yang modern, adaptif, dan bertanggung jawab.

Tabel 4.3
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.1.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.09	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07	
	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	20.37	20.37	24.31	28.25	32.19	36.13	40.07	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas	Persen	79.09	80.50	80.45	80.56	80.66	80.70	80.75	
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	0.77	0.77	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
	Indeks Resiko Bencana	Indeks	112.35	111.35	110.35	108.35	106.35	104.35	102.35	
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73.11	73.2	74.88	79.64	84.7	89.09	93	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	86.49	86.70	88.50	91.00	93.25	95.50	97.59	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.2.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.29	4.5-4.8	4.8-5.0	5.0-6.5	5.11-6.8	5.23-7.0	5.3-7.2	
	Tingkat Kemiskinan	Persen	14.65	14.14-14.51	13.77-14.14	13.41-13.77	13.04-13.41	12.67-13.04	12.30-12.67	
	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	45.24	50.66	56.96	59.49	62.15	64.95	68.53	
	Rasio Gini	Angka	0.28	0.279-0.292	0.279-0.291	0.279-0.290	0.279-0.289	0.279-0.288	0.278-0.286	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.43	2.30-2.40	2.28-2.39	2.26-2.38	2.22-2.36	2.20-2.35	2.18-2.33	
	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.04	75.17-76.11	75.69-76.67	76.21-77.24	76.74-77.81	77.26-78.38	77.79-78.94	
	Rata-rata Lama sekolah	Tahun	8.81	8.96-9.14	9.14-9.32	9.32-9.50	9.50-9.68	9.68-9.87	9.87-10.05	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.20	14.28-14.40	14.40-14.51	14.51-14.63	14.63-14.74	14.74-14.86	14.86-14.98	
	Umur Harapan Hidup	Tahun	69.42	69.68	69.91	70.14	70.37	70.6	70.83	
	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	24.7	18.8	17.7	16.6	15.5	14.4	13.3	
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/a	N/a	4	4.3	4.5	4.7	5	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.83	94.83	94.83	94.90	95.10	95.30	95.50	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64.53	64.53	64.53	64.75	65.00	65.50	66.00	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.392	0.385	0.380	0.375	0.370	0.365	0.360	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.82	64.00	64.50	65.00	66.00	66.50	67.00	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	62.12	62.14	62.15	62.17	62.18	62.20	62.21	
I.3.	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rupiah	92.884	100.890	106.232	111.858	117.781	124.018	130.586	
	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	16.94	20.94	24.94	28.94	32.94	36.94	40.94	
	Angka Kriminalitas	Angka	10	10	10	10	10	10	9	
	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.63	3.69	3.73	3.78	3.82	3.87	3.91	
	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	32.48	32.89	33.26	33.63	34.00	34.37	34.74	
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	16.27	17.17	17.26	17.35	17.44	17.54	17.63	
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	3.84	4.41	4.91	5.41	5.91	6.41	6.91	
	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	2.11	2.16	2.19	2.21	2.24	2.26	2.29	
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47.67	48.17	48.67	49.17	49.67	50.17	50.67	
	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	58.49	58.49	58.93	59.36	59.795	60.23	60.67	
	Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	n/A	n/A	3.1	3.15	3.2	3.25	3.3	
	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7089	0.7089	0.7089	0.7089	0.7100	0.7100	0.7150	
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.3	3.4	3.44	3.47	3.51	3.54	3.56	
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	n/A	0.20	0.23	0.26	0.29	0.32	0.35	
I.4.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (64.18)	B (65.68)	B (66.94)	B (67.57)	B (68.21)	B (69.47)	B (70.10)	
	Nilai SAKIP	Nilai	B (62.47)	B (63.75)	B (66.52)	B (69.29)	BB (72.07)	BB (74.84)	BB (77.61)	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58.87	61.81	64.9	68.15	71.56	75.14	78.89	
	Indeks SPBE	Indeks	3.24	3.39	3.47	3.55	3.63	3.71	3.79	
	Predikat Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.15	84.68	85.47	86.27	87.06	87.86	88.66	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	87	88	89	89	89	89	90	
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1.61	2.62	2.62	2.65	2.68	2.70	2.72	
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	N/a	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	76.74	77.24	77.49	77.74	77.99	78.24	78.49	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	53.57	57.14	60.71	64.29	67.86	71.43	75.00	
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Indeks	N/a	N/a	70.00	70.05	70.10	70.15	70.20	

4.2.3 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah, baik secara menyeluruh maupun per urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. IKK ini terbagi menjadi dua jenis, yang masing-masing memiliki bobot penilaian yang berbeda, yaitu terdiri dari capaian kinerja makro dan capaian kinerja pemerintahan. Target indikator kinerja kunci capaian kinerja urusan pemerintahan dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
A	Pendidikan									
	Skor Literasi SD	Nilai	69.04	72.87	72.9	72.92	72.95	73	73.1	
	Skor Numerasi SD	Nilai	63.31	73	73.5	73.55	73.6	73.7	73.8	
	Skor Numerasi SD	Nilai	65.78	69.12	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	
	Skor Numerasi SMP	Nilai	61.35	68.59	68.8	68.9	68.95	70	70.5	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar (7-15 Tahun)	Angka	99.1	99.05	100	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan (7-18 Tahun)	Angka	8.29	14.27	19	24	29	34	39	
	Proporsi Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	Persentase	34	37.99	38	39	40	41	42	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Proporsi Guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persentase	61.64	74.09	80	85	90	95	100	
b	Kesehatan									
	Jumlah Kematian Ibu	Nilai	113.1	115	104	94	85	77	75	
	Prevalensi Stunting	nilai	24.7	18.8	17.7	16.6	15.5	14.4	13.3	
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	96.2	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	97.39	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	97.22	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	96.71	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	88	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	93	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	95	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	85	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	50	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	84	100	100	100	100	100	100	
c	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	79.09	80.5	80.45	80.56	80.66	80.7	80.75	
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	45.46	0.77	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	76.61	0.46	0.68	0.9	1.12	1.34	1.56	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	nilai	47.38	49.44	51.59	53.74	55.89	58.04	60.19	
	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	N/a	N/a	20	40	60	80	100	
	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	86.07	86.5	86.7	86.9	87	87.2	87.4	
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0	0	15.38	18.18	22.22	28.57	40.00	
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	5.56	0	7.41	9.26	11.11	12.96	14.81	
e	Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	5	5	5	5	5	5	5	
	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
f	Sosial									
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
II	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a	Tenaga Kerja									
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	80	80	-	-	-	80.8	-	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2.8	-	2.86	2.97	3.03	3.08	3.14	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	42.14	43.17	44.29	45.5	46.78	48.13	49.48	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	7.53	7.55	7.58	7.65	7.7	7.75	7.8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
b	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.83	94.83	94.83	94.9	95.1	95.3	95.5	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.392	0.385	0.38	0.375	0.37	0.365	0.36	
	Persentase ARG Daerah	%	14.33	16	17	18	19	20	21	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
c	Pangan									
	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	nilai	86.49	86.7	88.5	91	93.25	95.5	97.59	
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	12.82	-	100	100	100	100	100	
	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	0	100	100	100	100	100	100	
d	Lingkungan Hidup									
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks	71.09	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07	
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	N/A	29.11	35	37	39	41	43	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Nilai	70	100	100	100	100	100	100	
e	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	-	-	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	-	-	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	-	-	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	-	-	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	72.44	72.44	73	74	75	76	80	
	Cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Nilai	6.85	30	30	33	35	37	40	
f	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	133.33	14.29	12.50	11.11	10.00	9.09	8.33	
	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	-	-	18.85	38.52	59.01	79.5	100	
	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	-	-	20.49	27.86	39.34	45.08	52.45	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	-	-	20	40	60	80	100	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0	0	20	40	60	80	100	
g	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	nilai	2.19	2.18	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13	
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	nilai	77.7	80.78	82.22	83.66	85.1	86.54	88	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	3.8	3.7	3.27	2.84	2.41	2	2	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	nilai	30	28	26	24	22	20	18	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.82	64	64.5	65	66	66.5	67	
h	Perhubungan									
	Konektivitas Kabupaten/Kota	rasio	70	75	78	80	83	85	90	
	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	25.62	26.38	26.7	27.02	27.34	27.65	27.97	
i	Komunikasi dan Informatika									
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	6.02	6.02	6.02	6.02	6.02	6.02	6.02	
	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem penghubung layanan pada SPLPD	%	3.57	3.57	3.57	7.14	10.71	14.28	17.85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
i	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	nilai	7.15	7.15	7.17	7.18	7.19	7.2	7.21	
	Pertumbuhan Wirausaha	nilai	1.04	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	
j	Penanaman Modal									
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1.2	4.9	5.2	5.4	5.7	6	6.4	
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	nilai	100	100	100	100	100	100	100	
k	Kepemudaan dan Olahraga									
	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	12	14.6	17.2	19.8	22.4	25	25	
l	Statistik									
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1.61	2.62	2.62	2.65	2.68	2.7	2.72	
m	Persandian									
	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	nilai	24.96	N/a	27.02	32.68	38.13	43.57	48.37	
n	Kebudayaan									
	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan	%	80	80	82	83	84	85	86	
	Persentase Cagar Budaya/Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	%	14	14	15	16	17	18	19	
o	Perpustakaan									
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	nilai	65.73	67.23	68.72	70.22	71.72	73.21	74.71	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	62.12	62.14	62.15	62.17	62.18	62.2	62.21	
p	Kearsipan									
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	75.36	76.36	77.36	78.36	79.36	79.37	80.12	
III	Urusan Pilihan									
a	Kelautan dan Perikanan									
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	5	1.9	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	
b	Pariwisata									
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	-	25	35	50	75	100	
c	Pertanian									
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi)	Persentase	-11.38	3	5	5	5	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabe)	%	2	1.5	2	2	2	2	2	
	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan									
	Kopi Robusta	%	5	-3.77	0.09	0.16	0.25	0.32	0.41	
	Kopi Arabika	%	3.54	16.99	0.09	0.16	0.25	0.32	0.41	
	Aren	%	0.83	-7.26	0.06	0.11	0.15	0.21	0.25	
	Karet	%	1.88	-14.8	0.51	1	1.5	2.01	2.51	
	Sawit	%	1.56	-7.34	1.61	1.66	1.71	1.76	1.81	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	-	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	57.2	82.5	85	87.5	90	92.5	95.0	
d	Perdagangan									
	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	
e	Perindustrian									
	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	0	1	1	2	2	2	2.5	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	nilai	0	0	2	2	3	3	5	
IV	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a	Perencanaan									
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
b	Keuangan									
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	73.83	61.25	65	70	75	80	85	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5.82	8.78	8.79	8.95	9.26	9.65	10.05	
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	98.01	98	98.02	98.04	98.04	98.04	98.04	
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3.72	4.85	3.8	3.72	4.5	4.8	4.9	
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	85.71	76.92	70	75	80	85	90	
	Persentase Penurunan SILPA	%	32.39	31.5	30.5	30	29.5	29	28.5	
c	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	54.39	55.48	56.59	57.72	58.87	60.05	61.25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
d	Penelitian dan Pengembangan									
	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	-	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	%	-	18.52	22.22	25.93	29.63	33.33	37.04	
e	Fungsi Pengawasan									
	Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	nilai	3,003 Level 3	3,003 Level 3 (Terdefinisi i)	3,05 Level 3 (Ter definisi)	3,10 Level 3 (Ter definisi)	3,15 Level 3 (Ter definisi)	3,20 Level 3 (Ter definisi)	3,25 Level 3 (Ter definisi)	
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	nilai	Level 3 (terintegra si)	Level 3 (terintegra si)	Level 3 (terintegra si)	Level 3 (terintegra si)	Level 3 (terintegra si)	Level 3 (terintegra si)	Level 3 (terintegra si)	
	Level Manajemen Risiko Indeks (MRI)	nilai	Level 2 (2.85)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	nilai	86.17	86.17	86.75	87	87.25	87.5	88	
f	Fungsi Pengadaan									
	Tingkat Kematangan UKPBJ	nilai	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5	
g	Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
h	Pelayanan Publik									
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	%	93.07	94	94.25	94.5	95	95.5	96	

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2045. RPJMD disusun sebagai instrumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah, yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif secara terukur dan akuntabel.

RPJMD ini tidak hanya menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, tetapi juga merupakan rujukan normatif bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah. Implementasi RPJMD harus dilakukan secara sinergis, partisipatif, dan berorientasi hasil (*outcome-oriented*) agar mampu menjawab tantangan pembangunan, mempercepat transformasi sosial-ekonomi, dan mewujudkan Rejang Lebong yang maju, inklusif, dan berkelanjutan sesuai arah pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan uraian dan analisis pada Bab II khususnya tentang Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026–2030, dapat disimpulkan bahwa struktur penerimaan daerah masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dengan porsi lebih dari 85% setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan fiskal daerah relatif rentan terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional.

Oleh karena itu, apabila kebijakan Pemerintah Pusat berimplikasi pada perubahan signifikan terhadap besaran Dana Transfer yang diterima daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melakukan revisi proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyesuaikannya dalam dokumen RKPD dan KUA-PPAS maupun Perubahan RKPD dan KUA-PPAS pada tahun berkenaan.
2. Melakukan penyesuaian Belanja dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD, guna menjamin pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
3. Menjalin koordinasi yang intensif antara Bupati dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka penyiapan dan penetapan KUA-PPAS maupun Perubahan KUA-PPAS agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, implementasi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 diharapkan tetap adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika fiskal nasional maupun tantangan pembangunan daerah.

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar berjalan secara terkoordinasi, terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan arah kebijakan, strategi, serta program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penyusunan dan pelaksanaan RPJMD ini berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi.

Kaidah ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan tahunan (RKPD, Renja) dan dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD), sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk menjamin keselarasan, keberlanjutan, dan keberhasilan implementasi RPJMD secara menyeluruh, berikut ini adalah prinsip dan mekanisme pelaksanaan yang wajib diikuti:

5.1.1 Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Seluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD secara kolaboratif, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, akan dibentuk Forum Koordinasi Pembangunan Daerah yang bertugas memantau pelaksanaan, menyelesaikan permasalahan implementatif, dan menyusun rekomendasi perbaikan secara berkala. Kolaborasi ini juga diharapkan mendorong efisiensi sumber daya dan sinkronisasi antarlevel perencanaan.

5.1.2 Kepemimpinan dan Pengarahan Bupati

Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah memegang peran sentral dalam mengarahkan pelaksanaan RPJMD, termasuk mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dan memastikan konsistensi antara kebijakan makro dan program sektoral. Kepemimpinan Bupati harus berbasis data dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur, seperti target penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan Indeks Daya Saing Daerah. Bupati juga wajib menyampaikan laporan kinerja kepada publik secara berkala untuk menjamin akuntabilitas dan pengawasan demokratis.

5.1.3 Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyusunan Renstra harus merujuk langsung pada dokumen RPJMD dan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Penjaminan keselarasan antara RPJMD, Renstra, dan Renja dilakukan melalui proses *reviu internal* oleh Bappeda serta evaluasi eksternal melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*Musrenbang*).

5.1.4 Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Publik

Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah kepada publik secara luas, menggunakan berbagai kanal komunikasi seperti media cetak dan elektronik, media sosial, website resmi pemerintah daerah, serta melalui forum musyawarah pembangunan. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga akan mengembangkan Platform Partisipasi Publik Digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, memantau capaian pembangunan, dan turut serta dalam proses evaluasi. Hal ini dilakukan guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat (*need-based planning*).

5.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dirancang secara sistematis, terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Evaluasi pelaksanaan RPJMD tidak hanya berperan sebagai instrumen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga merupakan alat strategis untuk pembelajaran kelembagaan dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses perencanaan,

penganggaran, dan implementasi pembangunan. Dalam kerangka kebijakan pembangunan yang berbasis hasil (*result-based development planning*), pendekatan evaluasi kinerja menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan relevansi setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan terhadap isu-isu strategis daerah.

Selain sebagai proses teknokratik, pengendalian dan evaluasi juga harus dilakukan secara partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta lingkungan. Evaluasi bukan hanya dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah, tetapi juga harus melibatkan pemangku kepentingan eksternal guna memperkuat legitimasi dan kualitas umpan balik terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan beberapa komponen utama dalam sistem pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan RPJMD yang wajib dilaksanakan secara konsisten sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi pembangunan dilakukan dengan memantau capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Evaluasi berbasis kinerja ini akan mengukur sejauh mana program dan kegiatan menghasilkan output, outcome, serta dampak yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

2. Pelaporan Kinerja Secara Berkala

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pembangunan daerah, antara lain:

- 1) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3) Laporan Evaluasi RPJMD, serta
- 4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan-laporan di atas menjadi dasar evaluasi internal dan eksternal, serta akan dipublikasikan secara terbuka untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

3. Forum Evaluasi dan Umpan Balik Multi-Pihak

Evaluasi pembangunan akan melibatkan pemangku kepentingan secara lintas sektor, termasuk DPRD, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat melalui *Forum Evaluasi Pembangunan Daerah*. Forum ini berperan dalam memberikan masukan substantif terhadap efektivitas kebijakan dan pelaksanaan program serta

menjembatani komunikasi antara pemerintah dan publik terkait hasil dan tantangan pembangunan.

4. Rekomendasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Setiap hasil evaluasi harus dikonsolidasikan menjadi rekomendasi strategis yang bersifat operasional dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, revisi program, maupun penyesuaian anggaran di tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Pendekatan ini mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap proses pembangunan daerah dan menjamin adaptabilitas kebijakan terhadap dinamika lingkungan strategis.

5. Pengawasan oleh DPRD dan Partisipasi Masyarakat

DPRD memiliki peran konstitusional dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi RPJMD melalui mekanisme pengawasan anggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja kepala daerah. Di samping itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan publik melalui forum-forum dialog, survei kepuasan layanan, kanal pengaduan, serta platform digital partisipatif. Dengan keterlibatan semua pihak, pembangunan akan berjalan lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

5.3 PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan pemerintahan berikutnya yang akan dipilih pada Pemilu 2024. Selama lima tahun ke depan, diharapkan seluruh program pembangunan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh perangkat daerah. Hasil pembangunan ini akan menjadi dasar bagi kesinambungan program pembangunan daerah dalam RPJMD berikutnya.

5.3.1 Mekanisme Transisi Kepemimpinan

Untuk memastikan keberlanjutan program, pada awal tahun 2029 akan dibentuk Tim Transisi Pembangunan Daerah yang bertugas memastikan bahwa program-program RPJMD tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Tim ini akan melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

5.3.2 Evaluasi dan Pelaporan Berkala

Setiap tahun, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Pembangunan Daerah yang memuat capaian indikator kinerja, tantangan, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini akan dipublikasikan secara terbuka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

5.3.3 Penyiapan RKPD Tahun Anggaran 2030

Bupati periode 2025-2030 akan menyerahkan jabatannya kepada Bupati terpilih periode 2030-2035 pada 20 Februari 2030. Oleh karena itu, Tim Transisi Pembangunan diberikan tugas khusus untuk menyiapkan RKPD 2030 dan memastikan program RPJMD tetap berjalan berkesinambungan dengan mempedomani hasil evaluasi Laporan Kinerja Pembangunan Daerah.

5.4. KATA AKHIR

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan peta jalan strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi publik. Dengan memperkuat mekanisme koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas, dokumen ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya visi "Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan".

Bupati Rejang Lebong,

H. MUHAMMAD FIKRI, S.E., M. AP



**PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
2025 - 2029**